



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Kota Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima dalam Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk menciptakan suatu produk/hasil dengan mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan APBD, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, permendagri nomor 77 tahun 2020 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah untuk menjadi landasan bagi para Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Walikota selaku Kepala Daerah yang



memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Kementerian Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bima;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara Pemerintah Kota Bima mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Arus Kas; (f) Neraca; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;



- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dari pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.



e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi Jangka Pendek;
- 3) Piutang;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi Jangka Panjang;
- 6) Aset Tetap;
- 7) Aset Lain-lain;
- 8) Kewajiban Jangka Pendek;
- 9) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 10) Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menjelaskan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; dan
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi



Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 250);
 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243);



23. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 193);
24. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 737);
25. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 739);
26. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 796);
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 852).
28. Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 809).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan**
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD**
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi**
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
 - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 - 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan



- 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3 Penjelasan Komponen-Komponen Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
 - 5.5 Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
Bab VII Penutup
Lampiran-Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET APBD



BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Beberapa Indikator Kemiskinan antara lain :

1. Penduduk Miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.
2. Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
3. Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Secara sederhana Persentase Kemiskinan yang juga disebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Garis kemiskinan di Kota Bima mengalami peningkatan sebesar Rp33.466 dibandingkan dengan Tahun lalu. Pada Tahun ini garis kemiskinan Kota Bima sebesar Rp432.959. Persentase penduduk miskin di Kota Bima secara trend selalu menurun semenjak Tahun 2016. Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada Tahun 2022 sebesar 8,8 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16.440 jiwa.

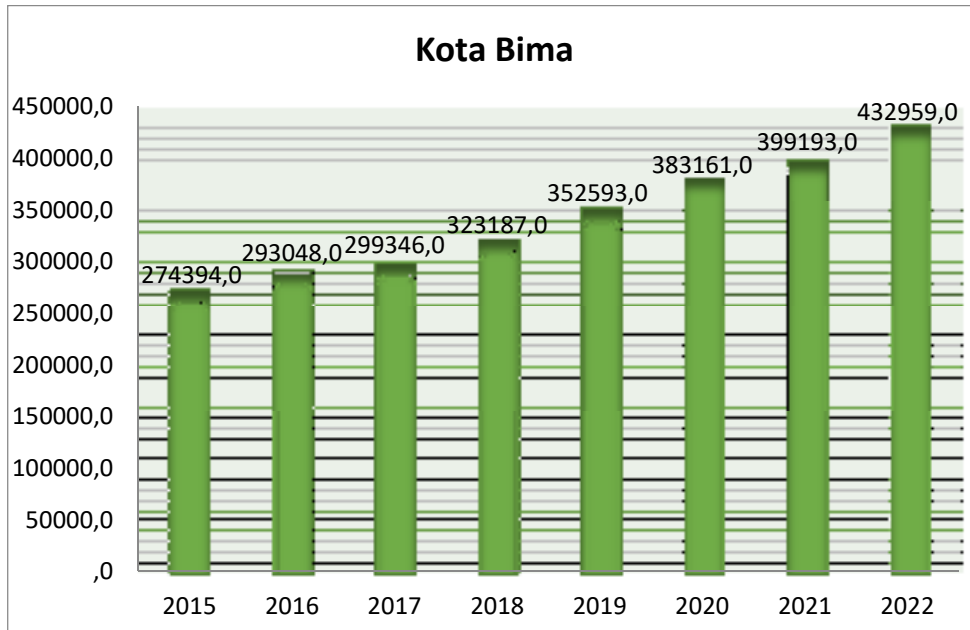
Tabel 2.1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015 - 2022
(Poverty Line - Rupiah)

Jumlah Penduduk Miskin (Poverty Line - Rupiah)								
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kota Bima	274.394	293.048	299.346	323.187	352.593	383.161	399.193	432.959

Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023



Grafik 2.1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015-2022



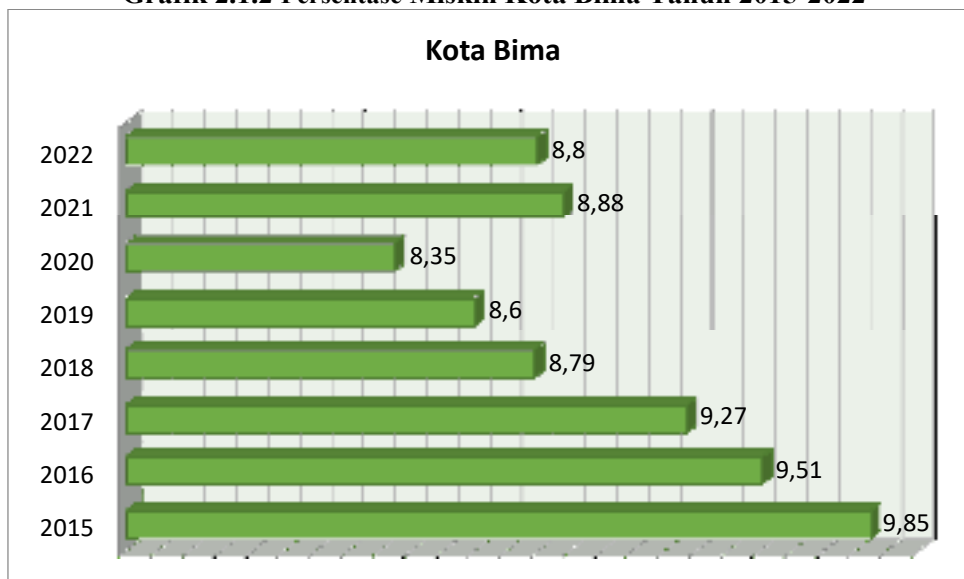
Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023

Tabel 2.1.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015 – 2022
(Persentase)

Jumlah Penduduk Miskin (Poverty Line - Rupiah)								
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kota Bima	9,85	9,51	9,27	8,79	8,6	8,35	8,88	8,8

Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023

Grafik 2.1.2 Persentase Miskin Kota Bima Tahun 2015-2022



Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran utama pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk usia 15 Tahun ke atas dalam Kegiatan Ekonomi di Kota Bima pada Tahun 2022 mencapai 69,80 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 75,46 persen. Proporsi angkatan kerja yang menganggur dikenal dengan nama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

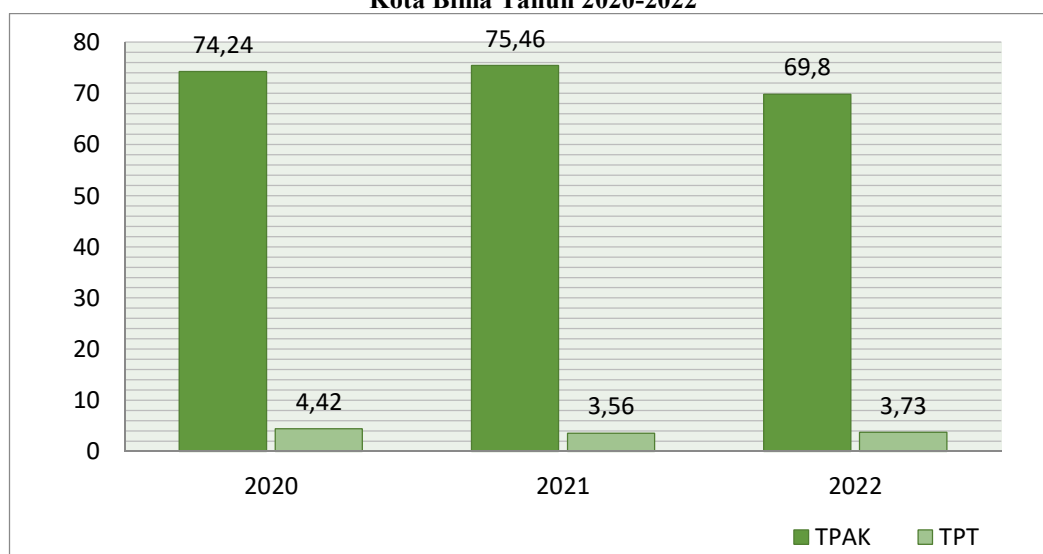
Indikator ini dapat menggambarkan secara umum mengenai Tingkat Pengangguran di suatu wilayah dari waktu ke waktu. TPT Kota Bima Tahun 2022 sebesar 3,73 persen atau mengalami Kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 3,56 persen.

Tabel 2.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bima Tahun 2020-2022
(Persentase)

Tahun	Keterlibatan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi	
	TPAK	TPT
1	2	3
2020	74,24	4,42
2021	75,46	3,56
2022	69,80	3,73

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Bima, BPS 2023

Grafik 2.1.3 Keterlibatan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi
Kota Bima Tahun 2020-2022



Sumber : Statistik Daerah Kota Bima, BPS 2023



2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran. Pengukuran terhadap Indikator Pembangunan Manusia sangatlah kompleks. Walaupun demikian beberapa indikator dianggap dapat merefleksikan aspek-aspek pembangunan manusia. Aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia dapat dilihat dengan menggunakan ukuran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan Indeks Komposit yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh Indeks Harapan Hidup, pengetahuan dan ketrampilan yang dicerminkan oleh Indeks Pendidikan dan kehidupan yang layak yang dicerminkan oleh Indeks Pendapatan.

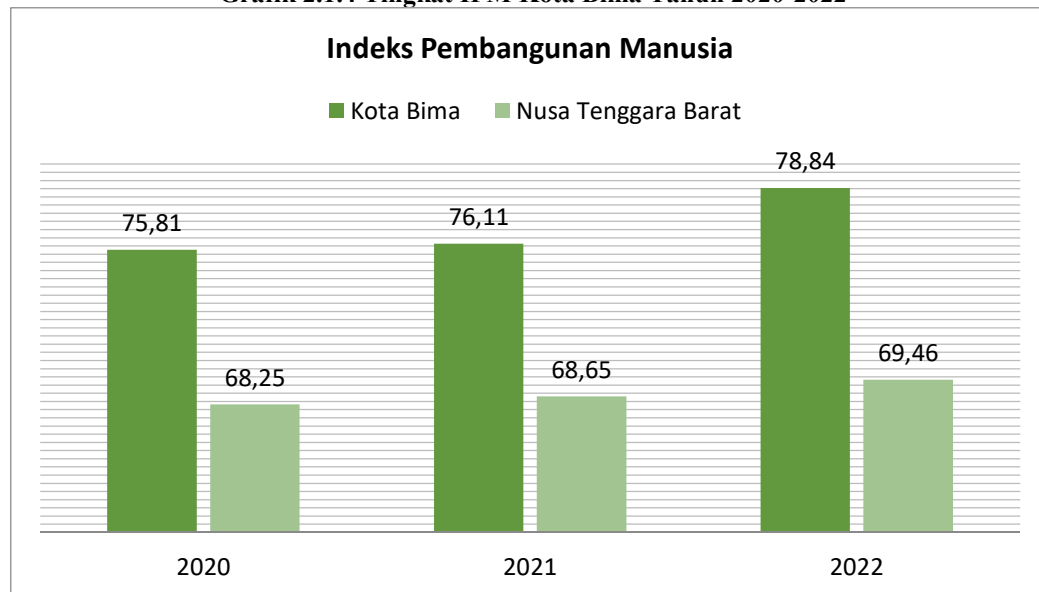
IPM merupakan ukuran ringkas rata-rata yang menempatkan Kota Bima pada posisi kedua tertinggi dari sepuluh Kabupaten/kota yang ada di NTB. IPM Kota Bima pada Tahun 2022 adalah sebesar 78,84. Angka ini cukup tinggi dibandingkan Nilai IPM NTB sendiri yang sebesar 69,46.

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kota Bima	75,81	76,11	78,84
Nusa Tenggara Barat	68,25	68,65	69,46

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023

Grafik 2.1.4 Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2020-2022



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023



2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu Setahun.

Di Tahun 2022 besaran Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku sebesar 4.574,61 Miliar Rupiah meningkat dari Tahun sebelumnya. Seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB kota Bima atas dasar harga konstan juga meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya menjadi sebesar 4.301,03 Miliar Rupiah. Dapat dilihat Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,70 persen mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Pemerintah mengimplementasikan Program Stimulus Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini meliputi berbagai kebijakan Fiskal, seperti Pengurangan Pajak bagi sektor tertentu, Insentif Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *Stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak Pertumbuhan Perekonomian.

Tabel 2.1.5
LPE Kota Bima Tahun 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	4,70	5,15	-4,95	2,08	2,70

Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023

Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima



Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2023



2.1.5 Inflasi

Inflasi sebagai salah satu Indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu Wilayah atau Daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan Angka perbandingan harga yang terjadi pada suatu saat dari satu kelompok barang/jasa pada suatu periode waktu dengan periode tertentu (Tahun Dasar). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

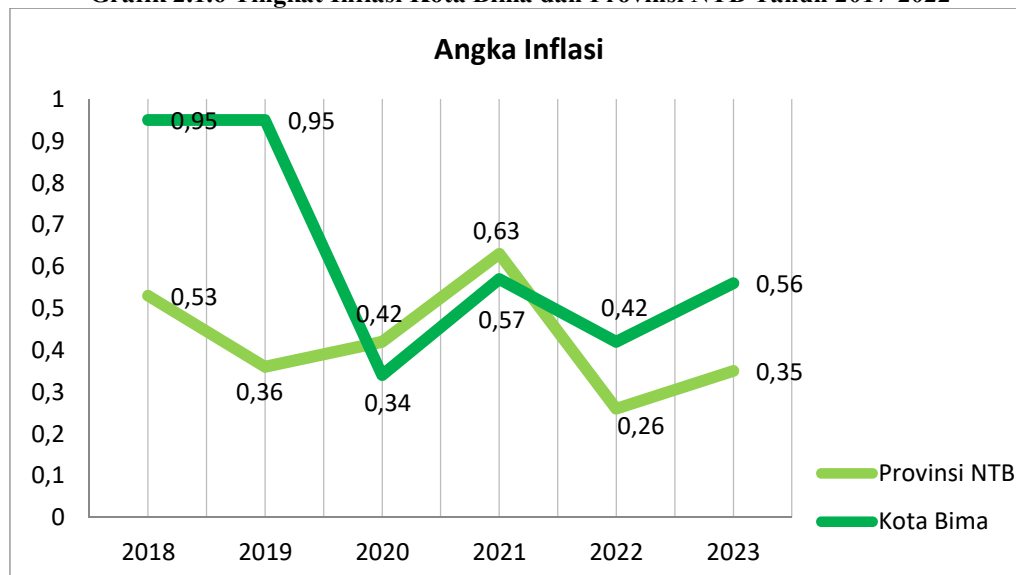
Pada Bulan Desember 2023, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,56 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,94 persen pada bulan November 2023 menjadi 116,59 persen pada Bulan Desember 2022. Laju inflasi Tahun kalender (Desember 2023 terhadap Januari 2022) sebesar 2,91 persen dan laju inflasi 'Tahun ke Tahun' (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 2,91 persen.

Tabel 2.1.6
Angka Inflasi Kota Bima Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi NTB	0,53	0,36	0,42	0,63	0,26	0,35
Kota Bima	0,95	0,95	0,34	0,57	0,42	0,56

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023

Grafik 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023



2.1.6 Pertumbuhan PDRB

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses saat Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Tren pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun dapat dilihat salah satunya berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (Satu Tahun).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga Tahun sedang berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada Tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 mencapai 4,57 Triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 273,58 Milyar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang telah mencapai 4,30 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 2,94 triliun rupiah pada Tahun 2021 menjadi 3,01 triliun rupiah pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2022 Kota Bima mengalami kontraksi peningkatan ekonomi sekitar 2,70 persen dibandingkan Tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 berada pada angka minus 2,08 persen.

Peningkatan Nilai PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh kategori lapangan usaha di Kota Bima yang merupakan efek dari pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi Covid-19 diawal Tahun 2019.



Pada Tahun 2021, perekonomian Kota Bima mengalami kontraksi hampir sebesar 5%. Kontraksi terbesar terjadi pada transportasi dan Pergudangan, kemudian disusul konstruksi. Kondisi ini sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Walaupun pandemi belum sepenuhnya berakhir data menunjukkan kemajuan ekonomi Kota Bima terbaik dari semua Kabupaten/Kota di pulau Sumbawa. Berbagai pihak optimis ekonomi Kota Bima bakal semakin tumbuh, untuk memastikan itu dibutuhkan sinergi dan melanjutkan atau meningkatkan inivasi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kota Bima.

Gambaran mengenai Pertumbuhan Ekonomi masing-masing sektor PDRB (Lapangan usaha) dapat dilihat pada tabel berikut.

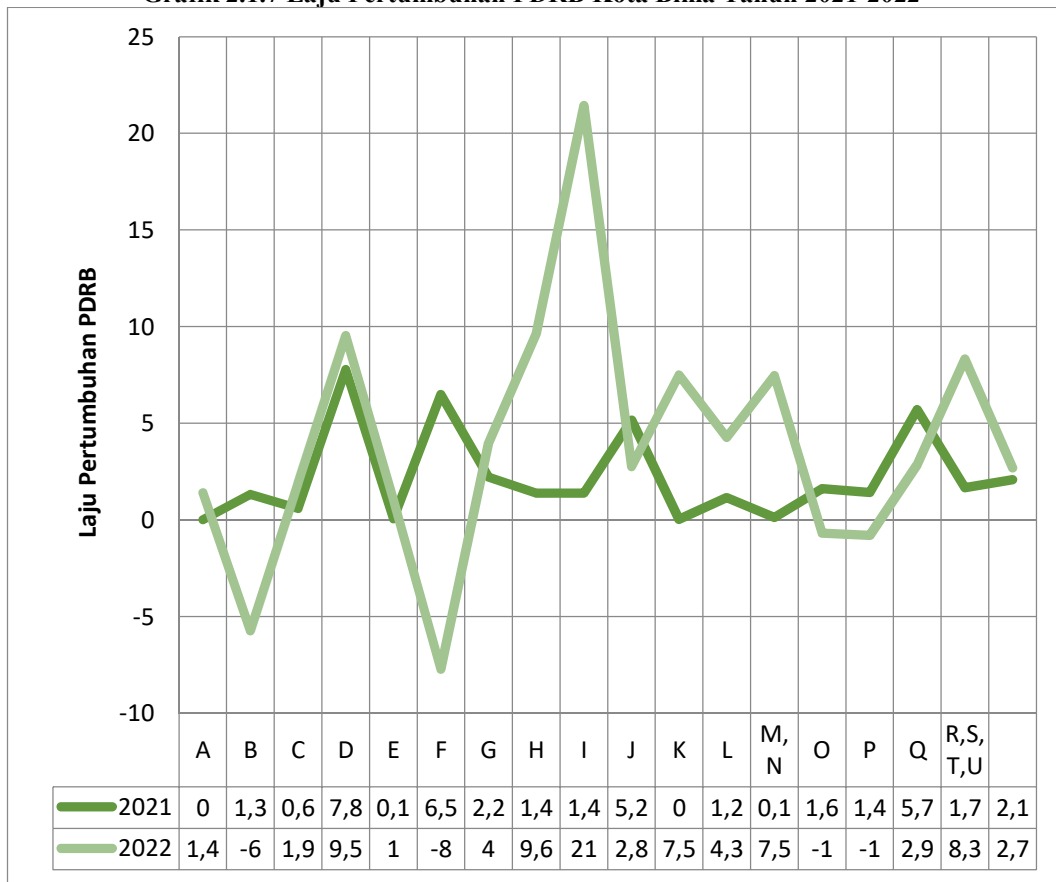
Tabel 2.1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022

	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,20	(0,52)	0,01	1,40
B	Pertambangan dan Penggalian	5,05	4,72	(7,19)	1,32	(5,73)
C	Industri Pengolahan	3,52	4,23	(0,69)	0,59	1,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	7,46	8,23	7,78	9,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	3,43	(2,23)	0,06	1,03
F	Konstruksi	4,93	4,84	(12,70)	6,48	(7,72)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	7,06	(6,00)	2,22	3,96
H	Transportasi dan Pergudangan	4,21	5,96	(20,24)	1,38	9,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	4,61	(5,24)	1,38	21,44
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	4,93	13,48	5,16	2,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,18	1,88	1,95	0,02	7,49
L	Real Estate	5,74	5,69	1,29	1,15	4,27
M,N	Jasa Perusahaan	7,40	4,18	(1,94)	0,12	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,98	1,27	(0,38)	1,62	(0,68)
P	Jasa Pendidikan	5,53	7,56	1,35	1,41	(0,81)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,86	5,25	0,83	5,71	2,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,71	6,35	(5,97)	1,67	8,32
	PDRB	4,70	5,15	(4,95)	2,08	2,70

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023



Grafik 2.1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2021-2022



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023

Pendapatan Regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan PDRB Kota Bima, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun. Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada Tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatannya tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi di sebagian lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,02 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,94 Trilyun Rupiah pada Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,70 Persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,08 Persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 21,44 Persen yang selama dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir ini selalu menunjukkan pertumbuhan tinggi diatas 7 Persen. Salah satu sebab utamanya adalah makin meningkatnya kebutuhan akan makan dan minum oleh pelaku usaha maupun masyarakat di Kota Bima. 6 (Enam) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen. Sedangkan 7 (Tujuh) lapangan usaha lainnya



tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari dua persen.

Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen tersebut antara lain: Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum sebesar 21,44 persen, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,53 Persen, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,63 Persen, Lapangan usaha Keuangan dan Asuransi sebesar 7,49 Persen, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,46 persen dan yang terakhir adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,32 Persen.

Sedangkan 5 (Lima) Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas 1 Persen namun kurang dari 3 Persen yaitu lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,40 persen, Lapangan kerja Pengadaan Air Pengolahan sampah dan Daur Ulang sebesar 1,03 persen, Lapangan Kerja Informasi dan Komunikasi sebesar 2,76 persen, Industri Pengolahan sebesar 1,90 persen, dan Industri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebesar 2,85 persen.

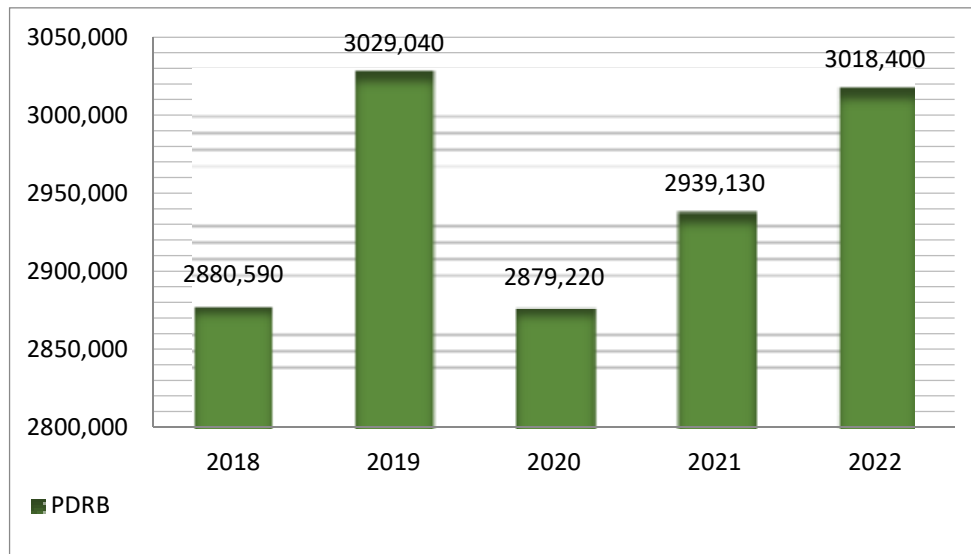
Tabel 2.1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rupiah) Tahun 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.033,46	2.114,88	2.000,05	2.052,73	2.100,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	59,01	63,74	58,68	59,16	61,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	883,69	910,59	904,54	888,90	899,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.046,34	1.099,35	983,12	1.016,11	946,80
Perubahan Inventori	8,60	8,65	8,50	(1,14)	(1,20)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.150,51)	(1.168,18)	(1.075,67)	(1.076,63)	(988,75)
PDRB	2 880, 59	3 029, 03	2 879, 22	2 939, 13	3 018, 41

Sumber Data : PDRB Kota Bima, 2018-2022 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Grafik 2.1.8 Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, Nilai PDRB Kota Bima hingga Tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Bima mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB Kota Bima adanya pandemi Covid-19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami penurunan. Seiring pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, Nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2022 mencapai 3.018,40 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 79,27 miliar rupiah (2%) dari nilai PDRB tahun 2020 yaitu sebesar 2.939,13 miliar rupiah.

2.1.7 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu Tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.



Tabel 2.1.9
PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
I. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB Perkapita (Ribu Rp)	23.250	24.265	26.658	27.531	29.071
Pertumbuhan (%)	16,97	17,22	18,57	18,81	19,18

Sumber Data : BPS NTB 2023, PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bima Tahun 2018-2022

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2018-2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 16,97 Juta Rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2022 mencapai 19,18 juta rupiah, walaupun faktor inflasi yang masih mempengaruhi kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi.

2.1.8 Indeks Harga Implisit

Tingkat harga merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap peningkatan PDRB dan Daya Beli (*Purchasing Power*) masyarakat terhadap barang dan jasa. Sementara itu daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima dan tingkat harga atas barang dan jasa. Untuk melihat terjadinya perubahan harga pada suatu waktu, indikator yang digunakan adalah Indeks Harga Implisit (IHI).

IHI adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing sektor/sub sektor dalam Kurun Waktu Satu Tahun dan dikalikan 100. Perubahan indeks harga implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen dari seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan Ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam Kurun Waktu Satu Tahun.

Tabel 2.1.10
IHI dan Perubahan IHI Kota Bima Tahun 2018–2022

Tahun	Indeks Harga Implisit (IHI)	Laju IHI (%)
2018	136,98	3,74
2019	140,88	2,85
2020	143,55	1,89
2021	146,34	1,94
2022	151,56	3,57

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-2022



Selama kurun waktu 2018–2022, laju perubahan IHI selalu lebih rendah dibandingkan laju perubahan PDRB per kapita. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat selama periode tersebut mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bima dilihat dari PDRB per kapita meningkat selama Tahun 2022.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian, dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
2. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
3. Sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Bima dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kota Bima Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, maka RKPD dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan Tujuan dari Visi dan Misi daerah. Untuk itu RKPD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka Investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga untuk menjalankan Fungsi Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong Partisipasi Masyarakat di Daerah.

Dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati, terdapat lima program prioritas pembangunan dalam Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2022 adalah pembangunan ekonomi berbasis perekonomian lokal, yaitu :

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Lokal yang tersedia, sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif;



2. Meningkatkan nilai tambah bagi Produk yang dihasilkan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan kemudahan dan insentif yang sifatnya pengguliran, sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja;
3. Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat, sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif, dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa;
5. Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi pangan, serta mengembangkan Usaha Agrobisnis.

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bima, selama Tahun 2022 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023, ditempuh arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan peningkatan Pendapata Asli Daerah (PAD) harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif atau Rasionalisasi Pajak/Retribusi Daerah, dan Sosialisasi untuk terus meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek Pajak dan Restribusi Daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan Kekayaan atau Aset-aset daerah yang *idle* dengan cara melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.



B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Tahun 2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang ditargetkan pada Tahun 2022 khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring asumsi peningkatan gaji pegawai.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2023.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran. Disamping itu, Pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi pada Tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas terlaksananya Otonomi Daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan pada Program/Kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :



- a. Untuk mengantisipasi adanya Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Keluarga, Mutasi, dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) telah diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah Belanja Pegawai untuk Gaji Pokok dan Tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran Gaji ke-13 dan Gaji ke -14 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD (CPNSD) sesuai Formasi Penyuluh Lapangan Tahun 2023 serta pengangkatan PPPK;
- c. Penyediaan dana untuk membiayai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Askes) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah senilai 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD;
- f. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yang didasarkan pada Pertimbangan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas, dan Kelangkaan Profesi;
- g. Dasar penghitungan besaran Honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; dan
- h. Penganggaran Honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara Swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah Pegawai dan beban pekerjaan;
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dan terdapat pembatasan frekuensi dan jumlah hari;
- d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, *workshop*, seminar, dan lokakarya agar dibatasi; dan



- f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat Akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain :

- a. Penganggaran belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Partai Politik, Perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Belanja Modal

1. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
2. Penganggaran belanja modal tidak hanya senilai harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

C. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2023 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2023.



2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa Lebih Anggaran (Surplus) digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja APBD Daerah, sehingga Pemerintah Kota Bima memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan capaian kinerja APBD untuk Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak Dua kali, yang Pertama adalah melalui Penetapan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.3.1 APBD dan Perubahannya

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

Tabel 2.1.11
APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2023

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Realisasi APBD	%
1.	Pendapatan	782.938.149.798,00	812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19
2.	Belanja	838.920.155.398,00	886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59
	Surplus / (Defisit)	(55.982.005.600,00)	(74.583.026.630,00)	(56.792.374.019,55)	76,15
3.	Pembiayaan				
a.	Penerimaan Pembiayaan	57.982.005.600,00	76.583.026.630,00	76.592.231.592,67	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	55.982.005.600,00	74.592.231.592,67	74.592.231.592,67	100,00
	SILPA	0,00	0,00	17.799.857.573,12	0,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2023, Diolah



Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan anggaran pendapatan pada perubahan APBD senilai Rp29.279.848.761,00 atau senilai 3,60%. Peningkatan pendapatan ini diakibatkan karena estimasi kebutuhan yang terjadi karena adanya penambahan belanja sehingga dilakukan penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Total anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 setelah perubahan senilai Rp886.801.025.189,00 mengalami peningkatan senilai Rp47.880.869.791,00 atau senilai 5,40% dibanding total anggaran belanja sebelum perubahan senilai Rp838.920.155.398,00.

2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2023 senilai Rp773.124.623.905,70 atau 95,19% dari target yang ditetapkan senilai Rp812.217.998.559,00, kurang dari target senilai Rp39.093.374.653,30 atau senilai 4,81%.

Realisasi belanja tahun 2023 senilai Rp829.916.997.925,25 atau senilai 93,59% dari yang ditargetkan senilai Rp886.801.025.189,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran senilai Rp56.884.027.263,75 atau 6,85%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan dikurangi belanja pada tahun 2023 mengalami defisit senilai Rp56.792.374.019,55 sementara realisasi pembiayaan neto adalah senilai Rp74.592.231.592,67 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp76.592.231.592,67 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp17.799.857.573,12.

Tabel 2.1.12
Rekapitulasi Belanja Daerah Per Program Kegiatan Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	378.894.999,00	364.281.865,00	(14.613.134,00)	96,14
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	210.196.800,00	188.675.700,00	(21.521.100,00)	89,76
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145.005.400,00	131.870.400,00	(13.135.000,00)	90,94
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	89.215.675,00	86.205.675,00	(3.010.000,00)	96,63
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	105.240.800,00	104.563.500,00	(677.300,00)	99,36
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	349.494.184,00	334.725.866,00	(14.768.318,00)	95,77
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	710.311.220,00	659.979.470,00	(50.331.750,00)	92,91
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	371.570.339.442,00	355.596.878.303,00	(15.973.461.139,00)	95,70
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412.488.000,00	411.121.000,00	(1.367.000,00)	99,67
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.808.736.400,00	8.336.368.590,00	(472.367.810,00)	94,64
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.921.552,00	43.789.900,00	(1.131.652,00)	97,48
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	206.839.200,00	204.911.500,00	(1.927.700,00)	99,07
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	255.741.856,00	215.447.780,00	(40.294.076,00)	84,24
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	319.067.451,00	307.140.822,00	(11.926.629,00)	96,26
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	69.818.700,00	69.348.700,00	(470.000,00)	99,33
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	9.976.000,00	9.952.000,00	(24.000,00)	99,76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Daerah SKPD				
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.424.000,00	30.804.000,00	(620.000,00)	98,03
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	88.601.200,00	86.263.000,00	(2.338.200,00)	97,36
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.230.000,00	20.210.000,00	(20.000,00)	99,90
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.412.800,00	114.376.500,00	(36.300,00)	99,97
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	428.319.800,00	423.940.600,00	(4.379.200,00)	98,98
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	287.773.600,00	278.868.600,00	(8.905.000,00)	96,91
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	357.160.000,00	341.840.000,00	(15.320.000,00)	95,71
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	317.764.801,00	305.986.000,00	(11.778.801,00)	96,29
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.816.049.880,00	2.635.755.593,00	(180.294.287,00)	93,60
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	623.221.700,00	505.581.018,00	(117.640.682,00)	81,12
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.499.800,00	5.499.800,00	0,00	100,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	439.851.400,00	435.616.300,00	(4.235.100,00)	99,04
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.113.503.980,00	3.077.208.395,00	(36.295.585,00)	98,83
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	290.636.000,00	290.251.000,00	(385.000,00)	99,87
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.513.999.750,00	1.499.388.035,00	(14.611.715,00)	99,03
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.138.219.167,00	2.115.296.850,00	(22.922.317,00)	98,93
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	267.050.300,00	255.440.100,00	(11.610.200,00)	95,65
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.484.989.662,00	1.482.969.685,00	(2.019.977,00)	99,86
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.578.883.457,00	12.113.183.238,00	(465.700.219,00)	96,30
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	183.083.100,00	182.481.160,00	(601.940,00)	99,67
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.622.700,00	79.332.700,00	(1.290.000,00)	98,40
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.465.000,00	143.192.561,00	(6.272.439,00)	95,80
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.967.505.000,00	6.150.211.000,00	(817.294.000,00)	88,27
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	937.828.800,00	834.639.308,00	(103.189.492,00)	89,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.690.094.770,00	1.655.617.821,00	(34.476.949,00)	97,96
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.620.000,00	164.058.000,00	(562.000,00)	99,66
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	555.797.500,00	551.484.647,00	(4.312.853,00)	99,22
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.154.250,00	130.428.250,00	(726.000,00)	99,45
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.174.015.900,00	3.019.578.400,00	(154.437.500,00)	95,13
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.756.361.580,00	5.427.465.962,00	(328.895.618,00)	94,29
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.189.500,00	425.869.000,00	(20.320.500,00)	95,45
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.149.838.244,00	8.821.358.735,00	(328.479.509,00)	96,41
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.729.703.000,00	2.525.835.274,00	(203.867.726,00)	92,53
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.231.426.600,00	2.874.283.655,00	(357.142.945,00)	88,95
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	552.169.017,00	531.760.494,00	(20.408.523,00)	96,30
01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	40.700.000,00	39.585.625,00	(1.114.375,00)	97,26
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.061.160.200,00	1.054.524.372,00	(6.635.828,00)	99,37



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.743.561.900,00	5.623.160.241,00	(120.401.659,00)	97,90
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	858.581.000,00	842.590.983,00	(15.990.017,00)	98,14
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.890.000,00	42.690.000,00	(14.200.000,00)	75,04
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.907.250.967,00	12.896.611.283,00	(1.010.639.684,00)	92,73
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	521.399.585,00	228.909.962,00	(292.489.623,00)	43,90
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	121.500.000,00	116.500.000,00	(5.000.000,00)	95,88
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.084.893,00	167.589.657,00	(495.236,00)	99,71
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	354.999.600,00	(45.000.400,00)	88,75
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.100.108.000,00	1.059.239.863,00	(40.868.137,00)	96,29
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	642.804.000,00	635.002.320,00	(7.801.680,00)	98,79
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900,00	161.793.960,00	(708.940,00)	99,56
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	313.060.500,00	300.823.000,00	(12.237.500,00)	96,09
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.260.000,00	109.079.000,00	(181.000,00)	99,83
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	94.535.000,00	94.206.000,00	(329.000,00)	99,65
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.026.500,00	38.979.000,00	(47.500,00)	99,88
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	118.016.500,00	117.313.500,00	(703.000,00)	99,40
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.797.160.000,00	2.795.948.639,00	(1.211.361,00)	99,96
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	764.288.000,00	706.875.499,00	(57.412.501,00)	92,49
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	401.018.870,00	357.668.870,00	(43.350.000,00)	89,19
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	105.414.000,00	99.161.500,00	(6.252.500,00)	94,07
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	252.400.000,00	241.660.000,00	(10.740.000,00)	95,74
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000,00	70.557.000,00	(4.443.000,00)	94,08
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	469.150.000,00	463.025.000,00	(6.125.000,00)	98,69
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.912.854.190,00	10.677.192.209,00	(235.661.981,00)	97,84
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	485.308.000,00	467.208.000,00	(18.100.000,00)	96,27
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	72.658.000,00	54.558.000,00	(18.100.000,00)	75,09
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89.952.000,00	81.522.202,00	(8.429.798,00)	90,63
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.569.633.800,00	2.560.026.940,00	(9.606.860,00)	99,63
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	126.508.000,00	101.448.000,00	(25.060.000,00)	80,19
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.226.800.200,00	14.226.799.999,51	(200,49)	100,00
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	203.288.000,00	97.936.000,00	(105.352.000,00)	48,18
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.546.000,00	6.840.000,00	(13.706.000,00)	33,29
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	796.712.000,00	294.068.200,00	(502.643.800,00)	36,91
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.419.958.960,00	3.296.874.738,00	(123.084.222,00)	96,40
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.190.000,00	49.050.000,00	(5.140.000,00)	90,51
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46.975.000,00	45.195.000,00	(1.780.000,00)	96,21
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.068.978.400,00	1.056.978.400,00	(12.000.000,00)	98,88
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	42.727.000,00	37.227.000,00	(5.500.000,00)	87,13
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.427.400.000,00	6.445.500.000,00	18.100.000,00	100,28
02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.398.000,00	39.552.060,00	(16.845.940,00)	70,13
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	300.000.000,00	272.355.710,00	(27.644.290,00)	90,79
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4.058.789.650,00	4.017.801.585,00	(40.988.065,00)	98,99
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	159.776.750,00	154.622.750,00	(5.154.000,00)	96,77
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	13.871.600,00	12.811.600,00	(1.060.000,00)	92,36
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	46.474.800,00	46.474.800,00	0,00	100,00
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	634.098.300,00	625.342.300,00	(8.756.000,00)	98,62
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	152.468.800,00	135.818.800,00	(16.650.000,00)	89,08
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.224.000.000,00	4.365.496.000,00	141.496.000,00	103,35
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	41.883.400,00	41.133.400,00	(750.000,00)	98,21
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13.192.000,00	10.442.000,00	(2.750.000,00)	79,15
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.768.800,00	46.221.280,00	(4.547.520,00)	91,04
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.633.700.000,00	1.633.700.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	7.438.719.100,00	6.309.782.579,00	(1.128.936.521,00)	84,82
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.800.888.368,00	6.684.267.702,00	(116.620.666,00)	98,29
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.805.434.379,00	1.701.290.475,00	(104.143.904,00)	94,23
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.191.915.000,00	1.645.589.772,00	(546.325.228,00)	75,08
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	391.228.890,00	(8.771.110,00)	97,81
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	80.924.000,00	80.924.000,00	0,00	100,00
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	720.770.661,00	574.467.997,00	(146.302.664,00)	79,70
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.480.000,00	11.580.000,00	(11.900.000,00)	49,32
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90.449.600,00	72.931.400,00	(17.518.200,00)	80,63
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	130.016.000,00	128.663.800,00	(1.352.200,00)	98,96
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	175.855.800,00	159.840.800,00	(16.015.000,00)	90,89
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	113.366.800,00	111.620.200,00	(1.746.600,00)	98,46
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	116.838.000,00	115.412.800,00	(1.425.200,00)	98,78
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26.700.000,00	23.690.000,00	(3.010.000,00)	88,73
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21.000.000,00	19.400.000,00	(1.600.000,00)	92,38
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	101.965.000,00	99.764.800,00	(2.200.200,00)	97,84



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	291.954.800,00	288.555.800,00	(3.399.000,00)	98,84
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	92.491.600,00	83.048.400,00	(9.443.200,00)	89,79
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	31.491.700,00	31.491.700,00	0,00	100,00
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	13.700.000,00	11.700.000,00	(2.000.000,00)	85,40
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.847.508.810,00	1.084.963.600,00	(1.762.545.210,00)	38,10
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	96.666.800,00	90.566.800,00	(6.100.000,00)	93,69
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	378.069.400,00	365.748.400,00	(12.321.000,00)	96,74
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	979.131.500,00	960.150.800,00	(18.980.700,00)	98,06
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.161.000,00	20.639.000,00	(522.000,00)	97,53
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	190.728.400,00	178.850.400,00	(11.878.000,00)	93,77
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.922.000,00	14.922.000,00	0,00	100,00
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	979.506.497,00	952.190.100,00	(27.316.397,00)	97,21
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.542.209.848,00	25.319.052.085,00	(3.223.157.763,00)	88,71
02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.683.853.256,00	7.394.894.414,00	(288.958.842,00)	96,24
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.562.323.802,00	2.026.040.154,00	(536.283.648,00)	79,07
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.349.399.000,00	671.461.877,00	(677.937.123,00)	49,76
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	461.260.000,00	430.024.959,00	(31.235.041,00)	93,23
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	204.115.800,00	198.066.200,00	(6.049.600,00)	97,04
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23.908.300,00	23.908.300,00	0,00	100,00
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	100,00
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	19.500.200,00	17.055.000,00	(2.445.200,00)	87,46
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.500.000,00	7.400.000,00	(100.000,00)	98,67
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.750.000,00	130.590.000,00	(10.160.000,00)	92,78
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	461.250.700,00	422.613.920,00	(38.636.780,00)	91,62
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	127.500.000,00	63.414.072,00	(64.085.928,00)	49,74
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	433.165.000,00	327.739.969,00	(105.425.031,00)	75,66
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.700.443.000,00	2.669.874.700,00	(30.568.300,00)	98,87
02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	394.763.000,00	386.014.000,00	(8.749.000,00)	97,78
02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	196.577.000,00	177.257.000,00	(19.320.000,00)	90,17
02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	128.875.000,00	128.870.000,00	(5.000,00)	100,00
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	852.313.000,00	849.447.000,00	(2.866.000,00)	99,66
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	239.021.000,00	233.673.000,00	(5.348.000,00)	97,76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Permukaan				
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	169.629.860,00	136.301.600,00	(33.328.260,00)	80,35
02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	77.476.440,00	60.333.000,00	(17.143.440,00)	77,87
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000,00	999.810.000,00	(190.000,00)	99,98
02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	59.443.000,00	41.878.000,00	(17.565.000,00)	70,45
02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	154.450.300,00	147.034.400,00	(7.415.900,00)	95,20
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	230.280.000,00	76.760.000,00	(153.520.000,00)	33,33
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	297.602.500,00	52.235.000,00	(245.367.500,00)	17,55
02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	296.888.500,00	204.529.000,00	(92.359.500,00)	68,89
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000,00	19.350.000,00	(650.000,00)	96,75
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76.450.000,00	73.150.000,00	(3.300.000,00)	95,68
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	21.249.000,00	21.247.000,00	(2.000,00)	99,99
02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	58.095.600,00	53.374.300,00	(4.721.300,00)	91,87
02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	25.442.200,00	25.102.200,00	(340.000,00)	98,66
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.303.135.600,00	1.294.015.917,00	(9.119.683,00)	99,30
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.358.700,00	116.830.700,00	(10.528.000,00)	91,73
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.766.930.080,00	2.692.943.794,00	(73.986.286,00)	97,33
02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	461.234.400,00	401.357.200,00	(59.877.200,00)	87,02
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	143.489.000,00	142.625.000,00	(864.000,00)	99,40
02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	163.007.290,00	83.952.953,00	(79.054.337,00)	51,50
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	9.914.000,00	9.260.000,00	(654.000,00)	93,40
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18.619.200,00	18.619.200,00	0,00	100,00
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	10.169.800,00	10.169.800,00	0,00	100,00
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25.049.900,00	25.049.900,00	0,00	100,00
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	286.206.000,00	286.205.950,00	(50,00)	100,00
02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	31.419.900,00	31.419.900,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	979.404.000,00	975.654.000,00	(3.750.000,00)	99,62
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	46.260.000,00	45.786.000,00	(474.000,00)	98,98
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.435.727.257,00	5.223.464.907,96	(212.262.349,04)	96,10
02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	132.700.000,00	131.906.000,00	(794.000,00)	99,40
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	228.282.000,00	227.970.000,00	(312.000,00)	99,86
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71.561.000,00	70.561.000,00	(1.000.000,00)	98,60
02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.016.000,00	14.977.000,00	(39.000,00)	99,74
02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	136.294.800,00	133.294.800,00	(3.000.000,00)	97,80
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	56.000.000,00	55.506.000,00	(494.000,00)	99,12
02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	123.460.000,00	114.679.000,00	(8.781.000,00)	92,89
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	47.055.000,00	46.565.000,00	(490.000,00)	98,96
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	22.620.000,00	22.605.000,00	(15.000,00)	99,93
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	244.843.000,00	243.749.125,00	(1.093.875,00)	99,55
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.607.948.000,00	1.607.478.000,00	(470.000,00)	99,97
02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	25.069.000,00	24.919.000,00	(150.000,00)	99,40
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	53.481.200,00	53.091.700,00	(389.500,00)	99,27
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	7.188.000,00	7.173.000,00	(15.000,00)	99,79
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	93.153.000,00	93.018.000,00	(135.000,00)	99,86
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	134.344.000,00	134.058.000,00	(286.000,00)	99,79
02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	31.083.000,00	30.728.000,00	(355.000,00)	98,86
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.938.000,00	12.758.000,00	(180.000,00)	98,61
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.061.200,00	47.713.000,00	(348.200,00)	99,28
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	63.068.000,00	62.942.991,00	(125.009,00)	99,80
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.088.000,00	13.023.000,00	(65.000,00)	99,50
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.754.900,00	136.160.040,00	(594.860,00)	99,57
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	392.247.610,00	392.246.810,00	(800,00)	100,00
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	379.203.200,00	367.799.200,00	(11.404.000,00)	96,99



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	609.046.000,00	569.008.408,00	(40.037.592,00)	93,43
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8.843.600,00	8.743.600,00	(100.000,00)	98,87
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.130.000,00	(870.000,00)	87,57
02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.667.600,00	19.157.600,00	(510.000,00)	97,41
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.012.600,00	15.755.000,00	(257.600,00)	98,39
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	24.705.000,00	24.615.000,00	(90.000,00)	99,64
02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	253.390.000,00	251.581.000,00	(1.809.000,00)	99,29
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	100,00
02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	100,00
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	7.707.600,00	7.607.600,00	(100.000,00)	98,70
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	100,00
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.040.400,00	112.040.400,00	0,00	100,00
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	100,00
02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	7.484.000,00	7.484.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	146.289.000,00	145.991.322,00	(297.678,00)	99,80
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	27.072.000,00	26.182.000,00	(890.000,00)	96,71
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	37.200.000,00	36.330.000,00	(870.000,00)	97,66
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	94.436.300,00	94.409.800,00	(26.500,00)	99,97
02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	74.262.000,00	64.172.000,00	(10.090.000,00)	86,41
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39.250.000,00	16.095.000,00	(23.155.000,00)	41,01
02.2.02.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12.855.714.479,00	12.817.555.924,00	(38.158.555,00)	99,70
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	358.687.940,00	345.947.753,00	(12.740.187,00)	96,45
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.711.788.957,00	2.703.569.577,00	(8.219.380,00)	99,70
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6.979.200,00	6.977.700,00	(1.500,00)	99,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6.080.500,00	6.080.500,00	0,00	100,00
02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00
02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	27.915.700,00	27.915.700,00	0,00	100,00
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	456.198.000,00	452.599.500,00	(3.598.500,00)	99,21
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	702.728.250,00	679.101.670,00	(23.626.580,00)	96,64
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	496.378.000,00	462.884.823,00	(33.493.177,00)	93,25
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	550.299.990,00	526.837.631,00	(23.462.359,00)	95,74
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	382.400.900,00	340.154.670,00	(42.246.230,00)	88,95
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.188.766.700,00	20.010.376.886,78	(178.389.813,22)	99,12
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	693.268.400,00	683.441.400,00	(9.827.000,00)	98,58
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	185.424.600,00	150.944.600,00	(34.480.000,00)	81,40
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	712.277.200,00	710.710.537,00	(1.566.663,00)	99,78
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	403.055.000,00	389.706.889,00	(13.348.111,00)	96,69
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	261.257.800,00	260.113.800,00	(1.144.000,00)	99,56
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	523.200.000,00	522.502.849,00	(697.151,00)	99,87
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	454.675.000,00	256.595.518,00	(198.079.482,00)	56,43
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	0,00
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	42.650.000,00	0,00	(42.650.000,00)	0,00
02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	0,00
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	10.150.000,00	4.712.500,00	(5.437.500,00)	46,43
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	135.150.000,00	123.461.220,00	(11.688.780,00)	91,35
02.2.02.03	Pembahasan APBD	135.150.000,00	109.392.377,00	(25.757.623,00)	80,94
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	135.150.000,00	128.877.972,00	(6.272.028,00)	95,36
02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	10.150.000,00	10.102.500,00	(47.500,00)	99,53
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	93.550.000,00	92.696.600,00	(853.400,00)	99,09
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	27.810.000,00	24.435.000,00	(3.375.000,00)	87,86
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	18.630.000,00	4.365.000,00	(14.265.000,00)	23,43
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	27.810.000,00	10.075.000,00	(17.735.000,00)	36,23
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	37.260.000,00	9.270.000,00	(27.990.000,00)	24,88
02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	18.630.000,00	14.145.000,00	(4.485.000,00)	75,93
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	18.630.000,00	0,00	(18.630.000,00)	0,00
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.095.000,00	57.435.000,00	(9.660.000,00)	85,60
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.900.000.000,00	1.521.596.792,00	(378.403.208,00)	80,08
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	430.800.000,00	429.820.000,00	(980.000,00)	99,77
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	229.200.000,00	157.200.000,00	(72.000.000,00)	68,59
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	100,00
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.465.482.500,00	2.421.185.200,00	(44.297.300,00)	98,20
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	135.100.000,00	76.965.280,00	(58.134.720,00)	56,97
02.2.08.01	Fasilitasi Tugas DPRD	5.770.800.000,00	5.693.290.227,00	(77.509.773,00)	98,66
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	95.567.000,00	79.506.700,00	(16.060.300,00)	83,19
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	131.847.000,00	28.047.000,00	(103.800.000,00)	21,27
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212.885.500,00	187.565.431,00	(25.320.069,00)	88,11



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302.576.800,00	272.984.522,00	(29.592.278,00)	90,22
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	27.788.100,00	27.365.160,00	(422.940,00)	98,48
02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	11.044.000,00	10.850.620,00	(193.380,00)	98,25
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	235.158.900,00	212.742.217,00	(22.416.683,00)	90,47
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.674.000,00	30.417.000,00	(257.000,00)	99,16
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	26.596.000,00	25.236.000,00	(1.360.000,00)	94,89
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	316.715.114,00	312.029.450,00	(4.685.664,00)	98,52
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	278.673.120,00	273.823.090,00	(4.850.030,00)	98,26
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	328.587.000,00	317.167.037,00	(11.419.963,00)	96,52
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	568.050.000,00	563.020.000,00	(5.030.000,00)	99,11
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	222.850.000,00	191.166.000,00	(31.684.000,00)	85,78
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	54.157.176,00	53.977.176,00	(180.000,00)	99,67
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	166.750.216,00	166.628.372,00	(121.844,00)	99,93
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.935.025,00	64.764.025,00	(171.000,00)	99,74
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	136.909.908,00	136.846.908,00	(63.000,00)	99,95
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8.589.000,00	8.576.000,00	(13.000,00)	99,85
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	167.316.675,00	167.231.844,00	(84.831,00)	99,95
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	24.695.700,00	21.003.067,00	(3.692.633,00)	85,05
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	26.659.000,00	22.688.515,00	(3.970.485,00)	85,11
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	167.209.000,00	165.082.205,00	(2.126.795,00)	98,73
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.162.481,00	151.834.889,00	(1.327.592,00)	99,13
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	273.994.481,00	262.671.653,00	(11.322.828,00)	95,87
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.361.400,00	25.285.000,00	(1.076.400,00)	95,92
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.024.228.347,00	1.935.940.872,00	(2.088.287.475,00)	48,11
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	267.479.566,00	234.628.752,00	(32.850.814,00)	87,72
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	576.112.200,00	557.295.113,00	(18.817.087,00)	96,73
02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	27.423.000,00	25.396.400,00	(2.026.600,00)	92,61
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	117.862.000,00	117.568.151,00	(293.849,00)	99,75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	35.620.000,00	34.754.800,00	(865.200,00)	97,57
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	184.205.000,00	173.753.580,00	(10.451.420,00)	94,33
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72.747.500,00	70.612.633,00	(2.134.867,00)	97,07
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	471.000.000,00	421.000.000,00	(50.000.000,00)	89,38
02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.200.000,00	10.198.000,00	(2.000,00)	99,98
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19.270.000,00	19.270.000,00	0,00	100,00
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	15.980.000,00	10.780.000,00	(5.200.000,00)	67,46
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	93.943.800,00	89.061.000,00	(4.882.800,00)	94,80
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	13.823.200,00	11.973.200,00	(1.850.000,00)	86,62
02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	10.638.000,00	10.630.000,00	(8.000,00)	99,92
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.270.318.900,00	1.196.643.784,00	(73.675.116,00)	94,20
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	256.661.400,00	197.211.800,00	(59.449.600,00)	76,84
02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	325.710.000,00	306.799.499,00	(18.910.501,00)	94,19
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	122.665.400,00	77.894.500,00	(44.770.900,00)	63,50
02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	110.420.000,00	105.916.500,00	(4.503.500,00)	95,92
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	119.886.200,00	118.233.000,00	(1.653.200,00)	98,62
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	181.006.400,00	163.434.758,00	(17.571.642,00)	90,29
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	800.489.200,00	636.994.300,00	(163.494.900,00)	79,58
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	484.128.000,00	481.594.807,00	(2.533.193,00)	99,48
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5.172.000,00	5.060.000,00	(112.000,00)	97,83
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	166.764.000,00	165.707.943,00	(1.056.057,00)	99,37
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	14.345.000,00	14.266.000,00	(79.000,00)	99,45
02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	178.124.563,00	136.964.563,00	(41.160.000,00)	76,89
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	194.573.000,00	193.845.000,00	(728.000,00)	99,63
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17.282.400,00	17.280.000,00	(2.400,00)	99,99
02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32.585.500,00	32.532.000,00	(53.500,00)	99,84
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.218.000,00	70.109.800,00	(108.200,00)	99,85
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.124.000,00	102.618.300,00	(505.700,00)	99,51
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.691.300,00	44.691.300,00	0,00	100,00
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	554.288.400,00	535.261.874,00	(19.026.526,00)	96,57
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	157.358.400,00	100.990.032,00	(56.368.368,00)	64,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Ika dan Sejarah Kebangsaan				
03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	99,50
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.023.200,00	35.008.880,00	(14.320,00)	99,96
03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13.528.000,00	13.528.000,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	99.805.270,00	(194.730,00)	99,81
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000,00	9.931.750,00	(68.250,00)	99,32
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	5.918.000,00	5.918.000,00	0,00	100,00
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	138.573.300,00	134.781.300,00	(3.792.000,00)	97,26
03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.058.107.000,00	965.863.000,00	(92.244.000,00)	91,28
03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.507.245.700,00	1.085.345.800,00	(421.899.900,00)	72,01
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.143.375.000,00	4.518.557.611,00	(624.817.389,00)	87,85
03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	42.330.000,00	11.510.000,00	(30.820.000,00)	27,19
03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	99.052.000,00	84.612.000,00	(14.440.000,00)	85,42
03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	242.327.744,00	230.868.922,00	(11.458.822,00)	95,27
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	202.738.020,00	198.714.400,00	(4.023.620,00)	98,02
03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	148.340.000,00	146.980.150,00	(1.359.850,00)	99,08
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	801.628.000,00	801.448.000,00	(180.000,00)	99,98
03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	261.940.400,00	209.664.363,00	(52.276.037,00)	80,04
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	293.473.630,00	290.306.615,00	(3.167.015,00)	98,92
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	249.317.680,00	233.388.100,00	(15.929.580,00)	93,61
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	257.701.590,00	256.196.690,00	(1.504.900,00)	99,42
03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	186.095.300,00	185.857.300,00	(238.000,00)	99,87
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25.007.000,00	24.497.000,00	(510.000,00)	97,96
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24.272.000,00	24.272.000,00	0,00	100,00
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	441.077.000,00	439.399.995,00	(1.677.005,00)	99,62



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	224.351.980,00	224.351.980,00	0,00	100,00
03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.907.811,00	(92.189,00)	99,82
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	110.562.720,00	110.560.811,00	(1.909,00)	100,00
03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	7.055.000.000,00	7.055.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	367.212.800,00	352.122.800,00	(15.090.000,00)	95,89
03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	100,00
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.203.300,00	19.895.300,00	(308.000,00)	98,48
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.792.800,00	43.792.800,00	0,00	100,00
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.722.100,00	131.322.100,00	(400.000,00)	99,70
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.479.900,00	63.812.680,00	(5.667.220,00)	91,84
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.492.000,00	81.375.000,00	(54.117.000,00)	60,06
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	49.815.200,00	49.587.200,00	(228.000,00)	99,54
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15.906.600,00	15.713.400,00	(193.200,00)	98,79
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	65.406.191,00	65.406.191,00	0,00	100,00
03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	43.164.822,00	42.939.822,00	(225.000,00)	99,48
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	39.057.640,00	39.057.640,00	0,00	100,00
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	18.451.900,00	17.503.100,00	(948.800,00)	94,86
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	297.500.000,00	297.182.000,00	(318.000,00)	99,89
03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33.765.300,00	33.198.100,00	(567.200,00)	98,32
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	106.450.200,00	102.813.180,00	(3.637.020,00)	96,58
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	90.135.000,00	89.884.002,00	(250.998,00)	99,72
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23.397.000,00	18.793.500,00	(4.603.500,00)	80,32
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	130.074.500,00	115.599.400,00	(14.475.100,00)	88,87
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.790.195,00	74.313.122,00	(5.477.073,00)	93,14
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	37.202.500,00	34.612.500,00	(2.590.000,00)	93,04
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47.980.700,00	36.736.700,00	(11.244.000,00)	76,57
03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	40.190.875,00	37.675.000,00	(2.515.875,00)	93,74
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	86.214.000,00	60.544.000,00	(25.670.000,00)	70,23
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.682.000,00	25.682.000,00	0,00	100,00
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	47.902.100,00	47.902.100,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	13.060.000,00	13.060.000,00	0,00	100,00
03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	9.196.000,00	9.196.000,00	0,00	100,00
03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	119.909.000,00	(91.000,00)	99,92
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	65.000.000,00	58.630.000,00	(6.370.000,00)	90,20
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	127.203.000,00	126.361.125,00	(841.875,00)	99,34
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	145.123.400,00	145.123.400,00	0,00	100,00
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	110.750.000,00	88.900.000,00	(21.850.000,00)	80,27
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	100,00
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	514.517.000,00	484.345.000,00	(30.172.000,00)	94,14
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.190.000.000,00	1.159.087.000,00	(30.913.000,00)	97,40
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.500.000,00	8.590.000,00	(1.910.000,00)	81,81
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7.920.000,00	5.463.000,00	(2.457.000,00)	68,98
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	560.000.000,00	539.932.000,00	(20.068.000,00)	96,42
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	249.080.000,00	149.480.000,00	(99.600.000,00)	60,01
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	53.505.000,00	53.430.000,00	(75.000,00)	99,86
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	76.064.000,00	76.035.900,00	(28.100,00)	99,96
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	88.032.000,00	87.757.388,00	(274.612,00)	99,69
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.631.219.200,00	1.626.881.221,00	(4.337.979,00)	99,73
03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	146.514.000,00	143.154.763,00	(3.359.237,00)	97,71
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	201.350.000,00	201.311.500,00	(38.500,00)	99,98
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	77.129.000,00	76.567.668,00	(561.332,00)	99,27
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.025.000,00	31.100.000,00	(1.925.000,00)	94,17
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.454.000,00	10.880.000,00	(4.574.000,00)	70,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota				
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	337.152.400,00	321.791.180,00	(15.361.220,00)	95,44
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.405.500,00	14.405.500,00	0,00	100,00
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	232.950.000,00	210.893.100,00	(22.056.900,00)	90,53
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	65.143.700,00	63.243.700,00	(1.900.000,00)	97,08
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20.529.700,00	19.529.700,00	(1.000.000,00)	95,13
03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	18.578.700,00	18.578.700,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	147.929.250,00	118.804.100,00	(29.125.150,00)	80,31
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.065.208.150,00	1.047.662.405,00	(17.545.745,00)	98,35
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	69.750.500,00	56.208.749,00	(13.541.751,00)	80,59
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	20.800.800,00	20.800.800,00	0,00	100,00
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.900.000,00	42.090.200,00	(3.809.800,00)	91,70
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	94.036.500,00	89.539.644,00	(4.496.856,00)	95,22
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	266.320.000,00	245.421.020,00	(20.898.980,00)	92,15
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	68.820.600,00	66.074.600,00	(2.746.000,00)	96,01
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	56.472.200,00	30.244.769,00	(26.227.431,00)	53,56
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	78.381.250,00	77.072.500,00	(1.308.750,00)	98,33
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.050.695.940,00	939.705.700,00	(110.990.240,00)	89,44
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	145.950.500,00	143.175.060,00	(2.775.440,00)	98,10
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248.183.100,00	241.671.600,00	(6.511.500,00)	97,38
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	312.171.740,00	307.835.300,00	(4.336.440,00)	98,61
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	269.709.900,00	265.060.160,00	(4.649.740,00)	98,28
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	33.609.300,00	31.991.645,00	(1.617.655,00)	95,19
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	77.792.100,00	73.592.831,00	(4.199.269,00)	94,60
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	158.618.000,00	116.530.668,00	(42.087.332,00)	73,47



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88.139.000,00	51.121.500,00	(37.017.500,00)	58,00
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	348.038.000,00	280.125.044,00	(67.912.956,00)	80,49
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.300.000,00	32.572.600,00	(33.727.400,00)	49,13
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	291.304.900,00	257.970.115,00	(33.334.785,00)	88,56
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.772.800,00	35.300.000,00	(8.472.800,00)	80,64
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	323.269.900,00	270.712.442,00	(52.557.458,00)	83,74
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	23.523.000,00	18.039.000,00	(5.484.000,00)	76,69
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	442.534.520,00	431.301.329,00	(11.233.191,00)	97,46
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	71.911.400,00	34.857.600,00	(37.053.800,00)	48,47
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	381.116.380,00	354.824.757,00	(26.291.623,00)	93,10
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	31.107.800,00	22.119.000,00	(8.988.800,00)	71,10
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	54.297.700,00	54.139.000,00	(158.700,00)	99,71
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.150.000,00	22.950.000,00	(200.000,00)	99,14
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.388.500,00	7.745.500,00	(1.643.000,00)	82,50
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	44.561.000,00	44.525.000,00	(36.000,00)	99,92
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.699.600,00	222.162.202,00	(537.398,00)	99,76
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	457.087.800,00	456.326.250,00	(761.550,00)	99,83
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	96.943.400,00	86.626.418,00	(10.316.982,00)	89,36
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	108.051.000,00	107.965.378,00	(85.622,00)	99,92
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	62.760.000,00	61.714.000,00	(1.046.000,00)	98,33
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.912.000,00	14.985.000,00	(927.000,00)	94,17
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.356.000,00	7.327.100,00	(28.900,00)	99,61
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	7.003.000,00	6.903.000,00	(100.000,00)	98,57
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.461.400,00	5.427.000,00	(34.400,00)	99,37
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.088.500,00	7.023.000,00	(65.500,00)	99,08
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	113.551.020,00	113.406.020,00	(145.000,00)	99,87
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7.539.400,00	7.352.000,00	(187.400,00)	97,51
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di	77.317.200,00	77.317.200,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	kelurahan				
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	640.829.244,00	564.356.325,00	(76.472.919,00)	88,07
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.900.931.368,00	19.772.170.606,00	(128.760.762,00)	99,35
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	155.611.200,00	152.693.300,00	(2.917.900,00)	98,12
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	9.327.602.300,00	2.699.829.860,00	(6.627.772.440,00)	28,94
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126.444.000,00	121.484.000,00	(4.960.000,00)	96,08
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	604.937.900,00	604.937.900,00	0,00	100,00
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.598.100,00	85.233.100,00	(1.365.000,00)	98,42
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000,00	107.709.400,00	(8.640.600,00)	92,57
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	49.680.300,00	49.680.300,00	0,00	100,00
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151.118.000,00	132.396.320,00	(18.721.680,00)	87,61
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	71.450.200,00	71.450.200,00	0,00	100,00
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.028.300,00	4.028.300,00	0,00	100,00
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	303.687.000,00	302.187.000,00	(1.500.000,00)	99,51
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	180.417.000,00	175.872.000,00	(4.545.000,00)	97,48
04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	27.693.400,00	27.693.400,00	0,00	100,00
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	122.820.500,00	122.820.500,00	0,00	100,00
04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	33.070.400,00	32.995.400,00	(75.000,00)	99,77
04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	128.026.200,00	126.188.830,00	(1.837.370,00)	98,56
04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.071.000,00	15.071.000,00	0,00	100,00
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.509.300,00	17.509.300,00	0,00	100,00
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	81.611.800,00	80.031.800,00	(1.580.000,00)	98,06
04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	100,00
04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	15.850.000,00	15.320.000,00	(530.000,00)	96,66



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				
04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	100,00
04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	120.000.000,00	116.296.200,00	(3.703.800,00)	96,91
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	148.104.250,00	142.558.850,00	(5.545.400,00)	96,26
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	97.285.000,00	95.105.000,00	(2.180.000,00)	97,76
04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.696.600,00	42.651.400,00	(45.200,00)	99,89
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	262.957.050,00	210.487.050,00	(52.470.000,00)	80,05
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.839.000,00	21.499.000,00	(1.340.000,00)	94,13
04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00	10.040.000,00	(4.960.000,00)	66,93
04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	283.996.402,00	272.652.022,00	(11.344.380,00)	96,01
04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000,00	750.000,00	(9.250.000,00)	7,50
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000,00	9.928.000,00	(72.000,00)	99,28
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	10.236.500,00	10.236.500,00	0,00	100,00
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	36.682.000,00	30.482.000,00	(6.200.000,00)	83,10
04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	181.250.000,00	180.400.000,00	(850.000,00)	99,53
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	13.050.000,00	11.950.000,00	(1.100.000,00)	91,57
04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	16.847.000,00	16.777.000,00	(70.000,00)	99,58
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32.310.000,00	32.310.000,00	0,00	100,00
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	36.196.000,00	36.084.000,00	(112.000,00)	99,69
04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	16.270.900,00	15.938.000,00	(332.900,00)	97,95
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	75.987.200,00	75.524.750,00	(462.450,00)	99,39
04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	27.387.500,00	14.010.000,00	(13.377.500,00)	51,15
04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	123.070.000,00	66.440.000,00	(56.630.000,00)	53,99
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.180.322.600,00	4.001.203.639,00	(179.118.961,00)	95,72
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	100,00
04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.408.200,00	6.303.000,00	(105.200,00)	98,36
04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	313.040.000,00	299.540.000,00	(13.500.000,00)	95,69
04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	24.389.300,00	24.389.300,00	0,00	100,00
04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.303.200,00	3.293.600,00	(9.600,00)	99,71
04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2.331.200,00	2.331.200,00	0,00	100,00
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.261.500,00	22.252.800,00	(8.700,00)	99,96
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	360.000.000,00	235.200.000,00	(124.800.000,00)	65,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	756.000.000,00	742.820.000,00	(13.180.000,00)	98,26
04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.797.000,00	50.650.000,00	(147.000,00)	99,71
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	123.081.000,00	121.292.800,00	(1.788.200,00)	98,55
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	21.406.000,00	21.406.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	35.696.500,00	34.045.060,00	(1.651.440,00)	95,37
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	186.984.600,00	175.009.400,00	(11.975.200,00)	93,60
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	253.009.940,00	219.721.391,00	(33.288.549,00)	86,84
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.979.700,00	170.365.449,00	(21.614.251,00)	88,74
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	239.955.560,00	219.105.228,00	(20.850.332,00)	91,31
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.156.000,00	13.156.000,00	0,00	100,00
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.595.900,00	15.595.900,00	0,00	100,00
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	176.322.224,00	159.329.150,00	(16.993.074,00)	90,36
04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.338.000,00	14.338.000,00	0,00	100,00
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10.324.000,00	10.324.000,00	0,00	100,00
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15.450.700,00	8.970.700,00	(6.480.000,00)	58,06
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	38.523.600,00	38.523.600,00	0,00	100,00
04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	98.080.000,00	98.080.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	390.537.584,00	304.265.603,00	(86.271.981,00)	77,91
04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	27.197.000,00	27.196.300,00	(700,00)	100,00
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	112.272.024,00	108.821.774,00	(3.450.250,00)	96,93
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98.305.500,00	96.166.500,00	(2.139.000,00)	97,82
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	243.042.811,00	241.240.811,00	(1.802.000,00)	99,26
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	181.965.165,00	124.532.497,00	(57.432.668,00)	68,44
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	120.540.600,00	120.537.580,00	(3.020,00)	100,00
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	26.609.000,00	24.926.000,00	(1.683.000,00)	93,68
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	28.222.000,00	27.888.600,00	(333.400,00)	98,82
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	751.640.704,00	583.259.367,00	(168.381.337,00)	77,60
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	78.403.000,00	75.602.660,00	(2.800.340,00)	96,43
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	136.529.000,00	131.742.000,00	(4.787.000,00)	96,49
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	134.800.000,00	132.150.560,00	(2.649.440,00)	98,03



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	72.824.000,00	72.824.000,00	0,00	100,00
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.810.800,00	84.810.800,00	0,00	100,00
05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	352.390.000,00	307.390.000,00	(45.000.000,00)	87,23
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	94.050.300,00	80.181.700,00	(13.868.600,00)	85,25
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	99.810.000,00	92.610.000,00	(7.200.000,00)	0,00
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.406.502.320,00	7.391.984.984,00	(14.517.336,00)	99,80
05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	218.463.700,00	160.986.732,00	(57.476.968,00)	73,69
05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	14.000.000,00	13.820.000,00	(180.000,00)	98,71
05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	27.311.000,00	27.300.000,00	(11.000,00)	99,96
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	276.062.900,00	274.915.500,00	(1.147.400,00)	99,58
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.316.279.200,00	2.259.926.900,00	(56.352.300,00)	97,57
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	21.067.500,00	19.830.000,00	(1.237.500,00)	94,13
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	45.811.000,00	45.561.000,00	(250.000,00)	99,45
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.895.000,00	20.895.000,00	0,00	100,00
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.649.900,00	21.571.000,00	(78.900,00)	99,64
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27.476.000,00	27.441.000,00	(35.000,00)	99,87
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	38.046.000,00	37.841.000,00	(205.000,00)	99,46
05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.381.000,00	5.193.000,00	(4.188.000,00)	55,36
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.538.000,00	82.458.218,00	(79.782,00)	99,90
05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.009.600,00	10.534.600,00	(475.000,00)	95,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.012.284.987,00	1.588.172.800,00	(4.424.112.187,00)	26,42
05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	100,00
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	100,00
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	268.812.700,00	262.264.500,00	(6.548.200,00)	97,56
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	336.160.000,00	298.328.900,00	(37.831.100,00)	88,75
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.940.000,00	115.380.000,00	(7.560.000,00)	93,85
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	184.887.380,00	180.643.272,00	(4.244.108,00)	97,70
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	19.754.310,00	19.754.310,00	0,00	100,00
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	108.400.200,00	108.322.520,00	(77.680,00)	99,93
05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	89.626.800,00	79.070.000,00	(10.556.800,00)	88,22
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	169.561.400,00	167.296.460,00	(2.264.940,00)	98,66
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.877.578,00	78.254.399,00	(623.179,00)	99,21
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	134.865.800,00	134.639.000,00	(226.800,00)	99,83
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.960.400,00	13.960.400,00	0,00	100,00
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.357.600,00	18.057.600,00	(7.300.000,00)	71,21
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	88.579.600,00	85.199.600,00	(3.380.000,00)	96,18
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.664.291.000,00	4.613.796.850,00	(50.494.150,00)	98,92
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.116.290.286,00	3.060.534.000,00	(55.756.286,00)	98,21
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.800.000,00	5.300.000,00	(1.500.000,00)	77,94
06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	100,00
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	151.215.000,00	149.415.000,00	(1.800.000,00)	98,81
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.578.700,00	6.385.500,00	(193.200,00)	97,06
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	179.759.800,00	163.926.100,00	(15.833.700,00)	91,19
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.502.700,00	67.962.700,00	(1.540.000,00)	97,78
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	841.077.000,00	588.254.290,00	(252.822.710,00)	69,94
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.950.600,00	14.980.000,00	(34.970.600,00)	29,99
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	41.841.400,00	41.833.400,00	(8.000,00)	0,00
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.169.800,00	66.089.800,00	(1.080.000,00)	98,39
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	33.478.000,00	33.027.000,00	(451.000,00)	98,65
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.073.105.000,00	1.053.841.401,00	(19.263.599,00)	98,20
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.322.000,00	43.395.388,00	(926.612,00)	97,91
06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16.455.800,00	16.425.800,00	(30.000,00)	99,82
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	31.780.200,00	31.748.700,00	(31.500,00)	99,90
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	127.340.000,00	80.876.050,00	(46.463.950,00)	63,51
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.915.000,00	27.335.000,00	(6.580.000,00)	80,60
06.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	657.940.800,00	558.933.410,00	(99.007.390,00)	84,95
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	244.796.800,00	143.760.600,00	(101.036.200,00)	58,73
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65.599.500,00	54.000.000,00	(11.599.500,00)	82,32
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.319.590.900,00	1.308.947.900,00	(10.643.000,00)	99,19
07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	237.984.400,00	237.105.270,00	(879.130,00)	99,63
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105.707.200,00	105.314.700,00	(392.500,00)	99,63
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.495.800,00	171.134.900,00	(3.360.900,00)	98,07



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	211.348.000,00	187.400.000,00	(23.948.000,00)	88,67
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.548.000,00	98.061.100,00	(14.486.900,00)	87,13
07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.757.200,00	61.780.700,00	(11.976.500,00)	83,76
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17.776.000,00	14.265.000,00	(3.511.000,00)	80,25
07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	29.159.400,00	0,00	(29.159.400,00)	0,00
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.963.600,00	37.796.800,00	(2.166.800,00)	94,58
07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	270.177.300,00	267.816.171,00	(2.361.129,00)	99,13
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	47.714.000,00	47.515.000,00	(199.000,00)	99,58
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	62.785.200,00	62.609.704,00	(175.496,00)	99,72
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	33.097.200,00	33.097.200,00	0,00	100,00
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	73.899.845,00	72.652.900,00	(1.246.945,00)	98,31
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.873.066.893,00	18.987.263.382,00	(885.803.511,00)	95,54
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	245.840.000,00	234.738.000,00	(11.102.000,00)	95,48
08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	171.257.400,00	155.374.040,00	(15.883.360,00)	90,73
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	108.035.000,00	95.830.000,00	(12.205.000,00)	88,70
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	275.108.300,00	265.747.000,00	(9.361.300,00)	96,60
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	13.032.410.252,00	12.467.889.156,00	(564.521.096,00)	95,67
09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5.864.871.184,00	5.705.012.600,00	(159.858.584,00)	97,27
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	53.108.000,00	43.101.000,00	(10.007.000,00)	81,16
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	674.998.600,00	672.713.850,00	(2.284.750,00)	99,66
10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	127.281.000,00	126.888.000,00	(393.000,00)	99,69
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	442.762.000,00	438.614.500,00	(4.147.500,00)	99,06
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	6.533.058.172,00	6.432.058.595,00	(100.999.577,00)	98,45
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	17.191.352.870,00	15.864.145.696,00	(1.327.207.174,00)	92,28
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.185.034.693,00	4.578.435.138,00	(606.599.555,00)	88,30
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	612.186.748,00	602.601.686,00	(9.585.062,00)	98,43
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	33.294.000,00	11.694.000,00	(21.600.000,00)	35,12
11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	131.661.500,00	130.741.500,00	(920.000,00)	99,30
11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	134.017.500,00	106.867.500,00	(27.150.000,00)	79,74



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.956.038.805,00	5.896.203.285,00	(59.835.520,00)	99,00
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100.000.000,00	97.392.800,00	(2.607.200,00)	97,39
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	54.004.500,00	44.130.000,00	(9.874.500,00)	81,72
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.067.270.000,00	5.992.804.000,00	(74.466.000,00)	98,77
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	307.409.340,00	301.096.890,00	(6.312.450,00)	97,95
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	73.046.500,00	72.956.500,00	(90.000,00)	99,88
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	16.889.200,00	16.889.200,00	0,00	100,00
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10.950.000,00	10.590.000,00	(360.000,00)	96,71
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	77.899.815,00	77.567.740,00	(332.075,00)	99,57
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	252.381.500,00	247.571.500,00	(4.810.000,00)	98,09
JUMLAH		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	(56.884.027.263,75)	93,59

Sumber Data : BPKAD Kota Bima Tahun Anggaran 2023, Diolah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bima telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2023 senilai Rp812.217.998.559,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp62.434.155.760,00, Pendapatan Transfer senilai Rp740.018.857.090,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp9.764.985.709,00.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2022 senilai Rp786.130.956.782,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp68.087.667.058,00, Pendapatan Transfer senilai Rp718.043.289.724,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp0,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 adalah senilai Rp773.124.623.905,70 atau (95,19%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp51.449.182.945,70 atau (82,41%), Pendapatan Transfer senilai Rp712.153.663.997,00 atau (96,23%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp9.521.776.963,00 atau (97,51%).

Sedangkan Realisasi Pendapatan pada TA 2022 adalah senilai Rp805.811.256.060,22 atau (102,50%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp57.359.469.008,22 atau (84,24%), Pendapatan Transfer senilai Rp748.451.787.052,00 atau (104,23%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp0,00 atau (0,00%).

Anggaran Belanja pada TA 2023 senilai Rp886.801.025.189,00 dan TA 2022 senilai Rp806.099.136.615,00. Sedangkan realisasi Belanja TA 2023 adalah senilai Rp829.916.997.925,25 dan TA 2022 senilai Rp749.196.056.304,73 yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2023 senilai Rp680.574.756.827,25, Belanja Modal teralisasi senilai Rp147.480.020.226,00 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp1.862.720.872,00. Sedangkan realisasi TA 2022 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2022 senilai Rp594.440.854.017,00, Belanja Modal senilai Rp153.809.784.287,73 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp945.418.000,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 senilai Rp773.124.623.905,70 bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2023 senilai Rp829.916.997.925,25 maka terjadi defisit senilai Rp56.792.374.019,55 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp76.592.231.592,67 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2023 senilai Rp17.799.857.573,12.

Realisasi Pendapatan pada TA 2022 senilai Rp805.811.256.060,22, bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2022 senilai Rp749.196.056.304,73 maka terjadi surplus senilai Rp56.615.199.755,49 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp21.967.826.874,18 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2021 senilai Rp76.583.026.629,67.

Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2023 dan 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	62.434.155.760,00	51.449.182.945,70	82,41
4.1.01	Pajak Daerah	24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38
4.1.02	Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64
04.02	Pendapatan Transfer	740.018.857.090,00	712.153.663.997,00	96,23
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	672.019.052.986,00	654.147.760.859,00	97,34
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	85,30
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51
Jumlah Pendapatan		812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi	728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	93,46
05.01.01	Belanja Pegawai	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29
05.01.05	Belanja Hibah	43.552.366.000,00	37.168.222.233,00	85,34
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55
05.02	Belanja Modal	154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	95,34
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	89,38
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.256.905.058,00	35.594.128.839,00	95,54
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40
Jumlah Belanja		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59
SUPLUS/ (DEFISIT)		(74.583.026.630,00)	(56.792.374.019,55)	76,15
3	Pembiayaan			
03.01	Penerimaan	76.583.026.630,00	76.592.231.592,67	100,01
03.02	Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pembiayaan		74.583.026.630,00	74.592.231.592,67	100,01
SILPA		0,00	17.799.857.573,12	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2023, diolah

Tabel 3.1.2.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen	Tahun 2022 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68.087.667.058,00	57.359.469.008,22	84,24
4.1.01	Pajak Daerah	24.368.139.721,00	21.355.298.265,81	87,64
4.1.02	Retribusi Daerah	26.296.337.440,00	19.710.293.760,28	74,95
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.545.139.285,00	120,3
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.138.801.485,00	14.748.737.697,13	91,34
04.02	Pendapatan Transfer	718.043.289.724,00	748.451.787.052,00	104,23
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.234.092.232,00	696.779.883.471,00	104,74
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.809.197.492,00	51.671.903.581,00	97,85
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,5
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi	646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,9
05.01.01	Belanja Pegawai	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33



No.	Komponen	Tahun 2022 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
05.01.05	Belanja Hibah	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64
05.02	Belanja Modal	156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,4
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,9
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.256.078.301,00	69.040.535.395,00	96,89
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87
05.03	Belanja Tidak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
Jumlah Belanja		806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94
SUPLUS/ (DEFISIT)		(19.968.179.833,00)	56.615.199.755,49	(283,53)
3	Pembiayaan			
03.01	Penerimaan	21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	100,00
03.02	Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pembiayaan		19.968.179.833,00	19.967.826.874,18	100,00
SILPA		0,00	76.583.026.629,67	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2022, diolah

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3.2.1 Penjelasan Terkait Capaian Target Pendapatan

Capaian target pendapatan Kota Bima terdapat pada beberapa SKPD selama tahun 2023 dan tahun 2022. Adapun rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2023 dan 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.3
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Berdasarkan SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	167.400.000,00	149.000.000,00	89,01	150.000.000,00	114.000.000,00	76,00
2	Dinas Kesehatan	13.424.380.475,00	13.613.989.750,54	101,41	16.530.459.400,00	17.647.310.413,26	106,76
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.435.460.000,00	1.290.607.251,00	89,91	1.309.850.000,00	1.378.436.759,28	105,24
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	144.463.700,00	206,38	50.000.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000,00	367.465.000,00	52,50	700.000.000,00	364.200.000,00	52,03
6	Dinas Perhubungan	1.422.950.000,00	886.862.000,00	62,33	1.499.260.000,00	793.548.000,00	52,93
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.738.000,00	187.738.000,00	100,00	187.738.000,00	182.710.440,00	97,32
8	Dinas Koperindag	2.165.803.040,00	1.055.359.100,00	48,73	2.977.205.040,00	1.130.823.315,00	37,98
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	203.100.000,00	156.000.000,00	76,81	193.600.000,00	165.250.000,00	85,36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5	3	4	5
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.026.070.000,00	762.888.395,00	74,35	1.527.900.000,00	698.861.887,00	45,74
11	Dinas Pertanian	250.000.000,00	236.110.750,00	94,44	260.000.000,00	251.750.750,00	96,83
12	Sekretariat Daerah	473.350.000,00	417.360.000,00	88,17	507.350.000,00	440.380.000,00	86,80
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	790.691.747.044,00	753.856.779.959,16	95,34	760.237.594.342,00	782.643.984.495,68	102,95
JUMLAH		812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19	786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,50

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022, diolah

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bima untuk mencapai target pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.4
Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi SKPD untuk mencapai Target Pendapatan dan Belanja

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antar elemen pada SKPD terkait; Percepatan pada proses pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pihak ke tiga; Proses pencairan dana yang tepat waktu; System pelaporan realisasi fisik dan keuangan semakin optimal; Kelengkapan personil yang lebih maksimal sehingga pembagian pekerjaan menjadi lebih merata, 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kelengkapan kantor guna menunjang aktifitas operasional; Kondisi Alam yang seringkali menghambat pekerjaan fisik dan lapangan; Pelaksanaan Pembuatan Kontrak dengan System Online sehingga terjadi kendala dalam penginputan data terkait masalah jaringan dan lain-lain.
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Menjaga hubungan koordinasi dan terlibatnya semua unsur dalam OPD agar pencapaian kinerja yang diharapkan bisa maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya tenaga yang memahami Pegelolaan Keuangan Perangkat Daerah terutama pada Pejabat PPKeu maupun PPTK Kurangnya Sosialisasi terkait Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan; Adanya obyek yang menjadi sasaran kegiatan; Terlaksananya kegiatan yang direncanakan; 	<ol style="list-style-type: none"> Dana Terbatas; Kualitas SDM masih rendah; Sarana dan Prasarana Terbatas;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		4 Peran serta masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik.	4 Data pendukung masih kurang.
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Optimalisasi Pencapaian Kinerja dan Manajemen yang Baik dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	Perencanaan untuk realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang baik
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Tersedianya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan SKPD 2 Terpenuhnya SDM pada setiap struktur organisasi pada SKPD 3 Adanya program kerjasama dengan mitra pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan pada kemasyarakatan lebih efektif dan efisien	1 Panjangnya birokrasi penyelesaian tugas karena adanya penyerahan sebagian wewenang kepala pelaksana kepada sekretaris yang masih kabur pembatasannya sehingga perlu konsultasi atas bawah secara berulang kepada pimpinan untuk akhirnya diputuskan 2 Kendala dalam pelaksanaan tugas dibidang kesiapsiagaan adalah koordinasi dengan BNPB yang selalu molor pada saat asistensi teknis pembuatan kajian resiko bencana pada sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana karena jadwal kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketersediaan waktu pihak BNPB, sehingga menyebabkan terlambatnya penyelesaian dokumen kajian resiko bencana 3 Keterbatasan tenaga teknis dalam perawatan peralatan peringatan dini, menyebabkan sebagian besar peralatan tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1 Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan kerangka acuan yang ditetapkan serta didukung oleh koordinasi dan kolaborasi maksimal antar bidang 2 Leadership yang tegas dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 3 penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan dengan baik	1 keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini pejabat pelaksana dan terbatasnya sarana pendukung berupa peralatan komputer
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Ketersediaan Anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan Program Kegiatan	1 Kurangnya SDM dan Koordinasi antar Bidang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dokumen kegiatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dedikasi dan Tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	1 Armada Pengangkut Sampah perlu ditambah, karena armada yang sebelumnya sudah tidak layak pakai
		2 Manajerial yang baik dalam mendukung pencapaian target kinerja dan realisasi APBD	2 Masih kurangnya SDM Pegawai yang memahami pengaplikasian pengelolaan keuangan (SIMDA Daerah)
			3 Peralatan dan Mesin untuk Penataan Taman Masih Kurang 4 Ternak yang masih berkeliaraan di tiap sudut Kota 5 Peralatan kerja yang secara umum kurang memadai
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Adanya Komitmen dan semangat yang kuat dari ASN untuk bekerja secara maksimal	1 Kurang Stabilitasnya Jaringan untuk akses Sistem pelayanan kependudukan sehingga mengganggu pelayan dan pencapaian target
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 Manajemen pengelolaan Program/Kegiatan disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan	1 Terlambatnya informasi dari pusat terhadap petunjuk pelaksanaan dan Penggunaan DAK fisik dan BOKB
		2 Penerapan Aplikasi yang memadai dan efisien	2 Ketidaksiesuaian Rekening Pemerintah Daerah terhadap alokasi dana DAK 3 Kurangnya Dana UP yang berbanding terbalik terhadap efisiensi penggunaan dan DAK yang signifikan sekitar 120%
11	DINAS PERHUBUNGAN	1 Kinerja tim yang bagus dan Profesional, serta kecukupan dukungan anggaran	1 Dipengaruhi oleh kurangnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang menurun
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Peran dan Dukungan perangkat organisasi yang cukup tinggi	1 Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian target.
		2 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan;	
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1 Adanya sumber PAD yang terdapat pada Pasar ;	1 Banyaknya tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya
		2 Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait Pemungutan PAD.	
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1 Perencanaan dan target awal tertuang jelas dan terarah	1 Sarana ruang kerja yang kurang kondusif
		2 Kinerja bidang pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran bagus dan tepat waktu	2 Kurangnya sarana dan Prasarana Kearsipan Sub Bagian Keuangan untuk pengarsipan SPJ



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		3 Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai perencanaan	
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Perencanaan program/kegiatan terstruktur;	1 Kegiatan yang tidak mampu diprediksi;
		2 Sistem kinerja dan pengendaliannya yang baik;	2 Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program dan kegiatan.
		3 Administratif, penatausahaan yang memadai;	
		4 Pemahaman akan fungsi dan tugas.	
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan;	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2023;
		2 Jaringan internet yang mendukung;	2 Kurangnya kontroling dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
		3 SDM pada sekretariat yang bisa diandalkan sehingga mempermudah dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	3 Masih adanya ego sektoral bidang.
17	DINAS PERTANIAN	1 Komitmen yang baik beberapa stakeholder dalam melahirkan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya petani dengan dukungan APBD	1 kegiatan pertanian yang bergantung pada keadaan cuaca dan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu di kota Bima sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan.
		2 ketersediaan anggaran yang cukup dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.	
18	SEKRETARIAT DAERAH	1 Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta antar unit bagian dalam melaksanakan tugas;	1 Proses administrasi keuangan yang belum maksimal karena keterbatasan sumber daya aparatur pengelola keuangan serta penguasaan terhadap regulasi dan teknis pengelolaan keuangan;
		2 Adanya profesionalisme ASN yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;	2 Belum optimalnya SDM dalam megoperasikan teknologi informasi;
		3 Profisialnya tenaga hanorer dan kontrak dalam menyikapi tugas dan tanggung jawab; dan	3 Pemeliharaan barang inventaris dan fasilitas kantor lainnya belum dilaksanakan secara berkala dan teratur.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		4 Fasilitas peralatan kerja yang memadai dalam mendukung pekerjaan	
19	SEKRETARIAT DPRD	1 Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD sesuai Program Kerja Tahunan dan Profram Sekretariat DPRD; dan 2 Terlaksananya Kegiatan sesuai dengan Jadwal.	1 Program yang sudah di tentukan maupun yang dijadwalkan berbenturan dengan alokasi waktu.
20	KECAMATAN RABA	1 Tersedianya Anggaran yang cukup sehingga belanja dapat dilakukan secara maksimal	1 terlambatnya unit pelaksana di bawahnya dalam pengurusan adminitrasi keuangan
21	INSPEKTORAT	1 program dan kegiatan yang terencana dengan baik 2 terciptanya sistem kerja dan pengendaliannya yang baik 3 Sistem administrasi, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang memadai; 4 Paham akan Tugas dan Fungsi Setiap Aparatur.	1 Beberapa kegiatan tidak berjalan dengan baik sesuai waktu dan pelaksanaannya karena beberapa faktor yang salah satunya kegiatan penanganan atas aduan masyarakat; 2 Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
22	BAPPEDA DAN LITBANG	1 Pengoptimalan anggaran berbasis kinerja	1 Kurang cermat penganggaran dalam pengalokasian pada belanja rutin seperti belanja telepon, belanja pajak kendaraan bermotor
23	BPKAD	1 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan Terintegrasi satu sama lain; 2 Penerapan SIM Gaji yang maksimal; 3 Komitmen Aparatur dalam Menyelesaikan Pekerjaan 4 Kerjasama dan Kolaborasi antar Bidang yang sistematis dan lancar; 5 Regulasi dan SOP Tersedia dalam mendukung Tupoksi Kerja	1 Kurangnya komitmen pada beberapa perangkat daerah dalam memenuhi standar kelengkapan pengajuan pencairan dana; 2 Tempat maupun ruang kerja yang kurang memadai; 3 Kurangnya SDM untuk optimalisasi program dan kegiatan; 4 Kurangnya tenaga IT untuk megoptimalkan aplikasi berbasis web.
24	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1 Lengkapinya fasilitas peralatan kantor sehingga mempermudah dalam pengerjaan laporan keuangan	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		2 Dukungan Sistem Aplikasi yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan	2 terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan 3 Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal
25	KECAMATAN RASANA E BARAT	1 Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan; 2 Terlaksananya kegiatan yang direncanakan; 3 Peran serta masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan	1 Kualitas SDM masih rendah; 2 Anggaran yang tersedia masih belum memadai
26	DINAS TENAGA KERJA	1 Personal team, semua pegawai bisa saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar capaian target kinerja dinas dapat dilaksanakan secara maksimal dan bertanggungjawab; 2 Sarana dan Prasarana, Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya karena didukung oleh sarana prasarana yang memadai; 3 Anggaran, untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu anggaran yang cukup.	1 Jumlah pegawai yang kurang sehingga dalam pelaksanaan tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat mengalami hambatan
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang pencapaian target kinerja	1 Perencanaan Anggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan dinas atau kantor 2 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas
28	DINAS SOSIAL	1 Lengkapya fasilitas peralatan kantor 2 Dukungan Sistem Aplikasi yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan 3 Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan mitra pengelola keuangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan.	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2023; 2 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas; 4 Kurang memadainya jaringan Internet yang menyebabkan mempengaruhi proses penginputan di sistem 3 Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal



No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
29	KECAMATAN ASAKOTA	1 Terlibatnya semua unsur dalam kecamatan asakota sehingga dengan mudah dalam mencapai semua target	1 Terbatasnya tenaga/Sumber Daya Manusia yang menguasai IT dan memahami pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan anggaran

3.2.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Pencapaian target belanja dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima per SKPD
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

No.	SKPD	Tahun 2023 (Rp)		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	205.716.961.396,00	197.915.018.002,51	96,21	192.039.092.308,00
2	Dinas Kesehatan	104.622.908.969,00	93.816.666.084,00	89,67	90.499.856.864,20
3	RSUD Kota Bima	31.529.823.323,00	29.019.391.992,00	92,04	45.375.066.931,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.163.895.597,00	104.429.043.307,00	94,79	80.826.878.268,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.367.193.937,00	8.742.361.369,00	65,40	11.830.199.286,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	9.551.147.309,00	7.839.685.560,00	82,08	7.775.878.915,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.143.130.435,00	5.718.383.936,00	93,09	4.787.698.448,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.233.147.092,00	6.114.434.177,00	98,10	4.622.397.252,00
9	Dinas Sosial	9.085.528.990,00	8.851.957.908,00	97,43	10.542.000.188,00
10	Dinas Tenaga Kerja	4.076.346.059,00	3.869.703.033,00	94,93	5.488.613.024,81
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.883.351.886,00	9.516.402.544,00	96,29	5.562.324.257,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.431.334.174,00	4.327.332.545,00	97,65	3.849.221.184,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	29.172.216.838,00	27.940.170.220,00	95,78	18.696.866.781,16
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.754.316.667,00	6.608.379.403,00	97,84	5.606.515.988,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.578.125.222,00	9.962.604.704,00	94,18	7.711.788.573,00
16	Dinas Perhubungan	12.360.581.498,00	11.912.347.908,96	96,37	12.628.389.380,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.582.395.270,00	11.457.849.787,00	98,92	7.661.960.545,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10.162.302.136,00	9.621.986.501,00	94,68	7.376.038.652,00



No.	SKPD	Tahun 2023 (Rp)		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.366.924.409,00	4.185.027.476,00	95,83	3.792.740.156,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.477.740.013,00	6.275.713.631,00	96,88	5.336.193.214,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.888.107.642,00	5.429.180.945,00	92,21	5.253.834.812,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.866.895.888,00	20.545.371.181,00	98,46	11.297.762.990,00
23	Dinas Pertanian	17.102.169.762,00	16.832.751.854,00	98,42	12.661.123.910,00
24	Sekretariat Daerah	61.838.069.787,00	59.530.838.452,78	96,27	52.703.815.843,56
25	Inspektorat	10.666.967.810,00	10.577.120.539,00	99,16	8.041.090.868,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	8.888.832.820,00	7.971.922.554,00	89,68	6.695.345.281,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	23.856.731.885,00	20.888.049.010,00	87,56	17.300.669.604,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.993.572.155,00	7.786.017.406,00	97,40	6.242.265.825,00
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.016.321.520,00	5.465.875.301,00	90,85	0,00
30	Sekretariat DPRD	31.121.318.817,00	28.572.981.919,00	91,81	26.521.250.423,00
31	Kecamatan RasanaE Barat	10.941.400.726,00	10.882.146.343,00	99,46	9.944.919.563,00
32	Kecamatan RasanaE Timur	12.555.461.546,00	12.455.532.034,00	99,20	11.309.927.200,00
33	Kecamatan Asakota	11.725.339.323,00	11.493.515.689,00	98,02	10.319.865.721,00
34	Kecamatan Mpunda	15.840.922.011,00	15.582.136.960,00	98,37	14.693.237.521,00
35	Kecamatan Raba	18.956.200.102,00	18.548.959.137,00	97,85	17.267.282.065,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.283.342.175,00	9.230.138.512,00	56,68	6.933.944.463,00
JUMLAH		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59	749.196.056.304,73

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022, diolah

3.3 Mandatory Spending Kota Bima Tahun Anggaran 2023

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam



- rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan Mandatory spending adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Mandatory Spending Kota Bima Tahun Anggaran 2023

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory Spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
		Total Belanja Daerah		886.801.025.189	829.916.997.925,25
A		Bidang Pendidikan 20%		26%	27%
		Capaian anggaran mandatory spending Bidang Pendidikan		233.061.597.397	
		Capaian realisasi mandatory spending Bidang Pendidikan			224.736.955.506
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			205.716.961.396	197.915.518.003
			1.01.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	147.230.987.346	139.961.748.357
			1.01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	50.093.059.650	49.599.890.466
			1.01.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000	199.000.000
			1.02.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	485.308.000	467.208.000
			1.02.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.707.606.400	7.687.671.180
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			20.866.895.988	20.545.371.181
			2.22.01.00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.567.618.309	4.446.322.223
			2.22.02.00 Program Pengembangan Kebudayaan	865.887.110	854.455.810
			2.22.05.00 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	204.641.690	200.397.582
			3.26.02.00 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	13.578.272.479	13.466.831.332
			3.26.03.00 Program Pemasaran Pariwisata	1.282.887.900	1.222.675.254
			3.26.05.00 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	367.588.500	354.688.980



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory Spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.477.740.013	6.276.066.322
			2.23.01.00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.686.619.213	5.490.539.800
			2.23.02.00 Program Pembinaan Perpustakaan	508.196.800	504.660.200
			2.24.02.00 Program Pengelolaan Arsip	269.396.000	267.338.322
			2.24.03.00 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	13.528.000	13.528.000
B		Kesehatan 10% dari APBD diluar gaji		22%	21%
		Gaji ASN		254.379.839.259	244.216.882.843
		Capaian anggaran mandatory spending Bidang Kesehatan diluar gaji		632.421.185.930	
		Capaian realisasi mandatory spending Bidang Kesehatan diluar gaji			585.700.615.082
	Dinas Kesehatan			104.622.908.969	93.816.666.084
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.436.550.604	50.075.243.127
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.163.673.765	42.813.602.487
			01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.918.000	50.849.750
			01.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	425.516.300	396.789.020
			01.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	546.250.300	480.181.700
	RSUD			31.529.823.323	29.019.391.992
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.907.250.967	12.896.611.597
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.622.572.356	16.122.780.395
Total Bidang Kesehatan				136.152.732.292	122.836.058.076
C		Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur 25%		49%	47%
		Capaian anggaran			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory Spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
		<i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur		254.259.803.677	
		Capaian realisasi <i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur			239.160.364.105
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			147.716.295.346	140.428.956.357
			1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	147.230.987.346	139.961.748.357
			1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	485.308.000	467.208.000
	Dinas Kesehatan			60.875.269.704	56.385.025.706
			1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.436.550.604	50.075.243.127
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.438.719.100	6.309.782.579
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			7.300.000.000	7.300.000.000
			1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	600.000.000	600.000.000
			1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.850.000.000	2.850.000.000
			1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.850.000.000	1.850.000.000
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.000.000.000	2.000.000.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.460.999.600	1.385.357.000
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.460.999.600	1.385.357.000
	Dinas Tenaga Kerja			1.929.656.229	1.816.930.878
			2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.929.656.229	1.816.930.878
	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			4.366.910.392	4.077.866.727
			2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.366.910.392	4.077.866.727
			2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	33.915.000	27.335.000
			2.17.08 Program Pengembangan UMKM	275.108.300	265.747.000
	Dinas Lingkungan Hidup			12.622.163.075	12.408.804.307



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory Spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
			2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	444.849.770	378.274.222
			2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	12.177.313.305	12.030.530.085
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			374.395.400	360.771.900
			2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	374.395.400	360.771.900
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			99.815.000	99.628.000
			3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	13.578.272.479	13.466.831.332
	Dinas Perikanan			2.315.479.500	2.193.048.257
			3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	368.607.600	343.650.700
			3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	728.797.100	653.043.968
			3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.218.074.800	1.196.353.589
	Dinas Pertanian			4.853.059.792	4.762.579.987
			3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.728.658.992	4.638.373.917
			3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	124.400.800	124.206.070
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			309.023.300	293.082.000
			2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	33.915.000	27.335.000
			2.17.08 Program Pengembangan UMKM	275.108.300	265.747.000
	Sekretariat Daerah			2.702.143.130	2.514.244.829
			4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.702.143.130	2.514.244.829
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			7.334.593.209	5.134.068.157
			5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.334.593.209	5.134.068.157
			Jumlah Capaian anggaran mandatory spending Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya	1.119.742.587.004	
			Jumlah Capaian realisasi mandatory spending Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya		1.049.597.934.693

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kestinambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. SKPD merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;



2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Kota Bima;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21. Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Dinas Pertanian
24. Sekretariat Daerah
25. Inspektorat
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
29. Badan Riset dan Inovasi Daerah
30. Sekretariat DPRD
31. Kecamatan RasanaE Barat
32. Kecamatan RasanaE Timur
33. Kecamatan Asakota
34. Kecamatan Mpunda
35. Kecamatan Raba
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO) dan Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.



Basis akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD atau pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan bahwa pendapatan dalam LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian entitas dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan jumlah nilai yang dicatat dalam catatan akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kejadian tersebut. Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.2 Pengukuran Pos-Pos Laporan Operasional

A. Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
2. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Bima;
3. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kota Bima;
4. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO Bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;



6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
 7. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
 8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
 11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- B. Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.3.3 Pengukuran Pos-Pos Neraca

A. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
 - c. Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
3. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Biaya perolehan, apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen;
 - c. Nilai perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan;
 - d. Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
 - e. Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah; dan
 - f. Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
 6. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir;
 7. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 8. Aset Lainnya dicatat sebesar:
 - a. Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - b. Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Harga perolehan untuk aset tak berwujud; dan
 - d. Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.
- B. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



- C. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Pendapatan-LRA

- A. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- B. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar;
- C. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
- D. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
1. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 2. Diterima di SKPD;
 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 4. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 5. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor;
 6. Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari tiga bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 7. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 8. Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan-LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 9. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA;



10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;
 11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 12. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 13. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- E. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Belanja

- A. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- B. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- C. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- D. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- E. Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- F. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci terdapat dalam Bagan Akun Standar;
- G. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- H. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;
- I. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA);



- J. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- K. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- L. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- M. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan;
- N. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.3 Pembiayaan

- A. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- B. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan;
- C. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah;
- D. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah;
- E. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- F. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD;



- G. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- H. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- I. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- J. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- K. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- L. Pembiayaan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4.4.4 Pendapatan-LO

- A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- B. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- C. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- D. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- E. Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan;
 - 1. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan;
 - 2. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan;
- F. Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;



4.4.5 Beban

- A. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- B. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- C. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- D. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- E. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- F. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

4.4.6 Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.6.1. Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3-12 bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis



- pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
 5. Kas diakui pada saat diterima oleh BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
 6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3-12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
 7. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
 8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 9. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
 10. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
 12. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 13. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.



14. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Persediaan dapat terdiri atas: alat tulis kantor, alat listrik, material/bahan, benda pos, bahan bakar, dan bahan makanan pokok.
17. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

4.4.6.2. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa pembelian SUN dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat (dana bergulir), dan investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
 - c. Properti Investasi merupakan properti/aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa.
3. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.



4. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanen.
6. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
7. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK.
8. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
9. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.6.3. Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Peralatan dan Mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
6. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.



7. Jalan Irigasi dan Jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
8. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
10. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
11. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
12. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
13. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
14. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
15. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6.4. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.



2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

4.4.6.5. Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
3. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
4. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih.
5. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
7. Piutang dari TGR diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
8. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
10. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
11. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
12. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
13. Jumlah yang dapat diamortisasi dari ATB harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat ATB adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.



14. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. ATB dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
15. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
16. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
17. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama bangun serah guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
18. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
19. Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
20. Pengakuan Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.7 Kewajiban

- A. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- B. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- C. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- D. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- E. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- F. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- G. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



- H. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.8 Ekuitas

- A. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan.
- B. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari LPE dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.
- C. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke Neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
- D. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Bima yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2023 agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut :

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
5.1.1 Pendapatan	812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	805.811.256.060,22

Pendapatan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp812.217.998.559,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 250) dan terealisasi senilai Rp773.124.623.905,70 atau 95,19%. Jika dibandingkan realisasi pendapatan Tahun 2022 senilai Rp805.811.256.060,22 maka realisasi pendapatan Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp32.686.632.154,54 atau 4,06%.

Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana yang terdapat pada ikhtisar dibawah ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN					
A.	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38	21.355.298.265,81
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80	19.710.293.760,28
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	100,00	1.545.139.285,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64	14.748.737.697,13
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		62.434.155.760,00	51.449.182.945,70	82,41	57.359.469.008,22
B.	Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1	Bagi Hasil Pajak	73.154.845.730,00	55.895.742.054,00	76,41	69.899.355.791,00
2	Dana Alokasi Umum	450.585.561.000,00	453.939.356.950,00	100,74	430.503.529.123,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	43.745.879.000,00	42.423.553.167,00	96,98	89.773.006.178,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	83.360.557.256,00	80.716.898.688,00	99,83	67.495.307.379,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		650.846.842.986,00	632.975.550.859,00	97,25	657.671.198.471,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1	Dana Insentif Daerah DID	21.172.210.000,00	21.172.210.000,00	100,00	39.108.685.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		21.172.210.000,00	21.172.210.000,00	100,00	39.108.685.000,00
	Transfer Pemerintah Propinsi				
1	Pendapatan Bagi Hasil	64.176.900.904,00	54.382.999.938,00	84,74	51.171.903.581,00
2	Bantuan Keuangan	3.822.903.200,00	3.622.903.200,00	94,77	500.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	85,30	51.671.903.581,00
Total Pendapatan Transfer		740.018.857.090,00	712.153.663.997,00	96,23	748.451.787.052,00
C.	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
1	Lain-lain Pendapatan	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.764.985.709,00	9.461.776.963,00	96,89	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51	0,00
TOTAL		812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19	805.811.256.060,22

Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.2
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	167.400.000,00	149.000.000,00	89,01	150.000.000,00	114.000.000,00	76,00
2	Dinas Kesehatan	4.471.339.975,00	2.527.493.700,00	56,53	16.530.459.400,00	1.851.800.100,00	11,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.435.460.000,00	1.290.607.251,00	89,91	1.309.850.000,00	1.378.436.759,28	105,24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	144.463.700,00	206,38	50.000.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000,00	367.465.000,00	52,50	700.000.000,00	364.200.000,00	52,03
6	Dinas Perhubungan	1.422.950.000,00	886.862.000,00	62,33	1.499.260.000,00	793.548.000,00	52,93
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.738.000,00	187.738.000,00	100,00	187.738.000,00	182.710.440,00	97,32
8	Dinas Koperindag	2.165.803.040,00	1.055.359.100,00	48,73	2.977.205.040,00	1.130.823.315,00	37,98
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	203.100.000,00	156.000.000,00	76,81	193.600.000,00	165.250.000,00	85,36
10	Dinas Pariwisata	1.026.070.000,00	762.888.395,00	74,35	1.527.900.000,00	698.861.887,00	45,74
11	Dinas Pertanian	250.000.000,00	236.110.750,00	94,44	260.000.000,00	251.750.750,00	96,83
12	Sekretariat Daerah	473.350.000,00	417.360.000,00	88,17	507.350.000,00	440.380.000,00	86,80
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	26.349.749.637,00	24.927.156.798,90	94,60	760.237.594.342,00	782.643.984.495,68	102,95
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	764.341.997.407,00	728.929.623.160,26	95,37	0,00	0,00	0,00
15	BLUD RSUD KOTA BIMA	8.953.040.500,00	11.086.496.050,54	123,83	0,00	15.795.510.313,26	0,00
JUMLAH		812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19	786.130.956.782,00	805.811.256.060,22	102,50

Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/430/500/XI/2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dilaksanakan pada 01 Januari 2022 sehingga Rumah Sakit Umum Kota Bima dapat mengelola Pendapatan dan Belanja secara mandiri. Pendapatan Rumah Sakit Umum Kota Bima pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.086.496.050,54, dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Daerah sebesar Rp23.492.000,00
- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp11.063.004.050,54

5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		62.434.155.760,00	51.449.182.945,70	57.359.469.008,22

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target pada Tahun 2023 senilai Rp62.434.155.760,00 dan terealisasi senilai Rp51.449.182.945,70 atau 82,41%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp57.359.469.008,22 maka terjadi penurunan senilai Rp5.910.286.062,52 atau 10,30%.



Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38	21.355.298.265,81
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80	19.710.293.760,28
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	100,00	1.545.139.285,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64	14.748.737.697,13
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	62.434.155.760,00	51.449.182.945,70	82,41	57.359.469.008,22

5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp) 24.857.277.198,00	Realisasi 2023 (Rp) 23.211.800.485,23	Realisasi 2022 (Rp) 21.355.298.265,81
------------------	--------------------------------	---	--	--

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022, yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp24.857.277.198,00 dan terealisasi senilai Rp23.211.800.485,23 atau 93,38%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp21.355.298.265,81 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yaitu senilai Rp1.856.502.219,42 Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan BPHTB.

Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari :

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Pajak Daerah - LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hotel	1.112.000.000,00	1.281.743.103,28	115,26	911.452.444,30
2	Restoran	2.412.886.948,00	2.132.758.354,00	88,39	2.103.232.173,38
3	Hiburan	59.750.000,00	56.267.950,00	94,17	36.169.080,00
4	Reklame	774.440.250,00	448.264.791,50	57,88	489.500.086,50
5	Penerangan Jalan	9.800.000.000,00	10.233.873.243,00	104,43	9.443.782.515,00
6	Pajak Parkir	170.000.000,00	164.195.500,00	96,59	132.915.500,00
7	Air Tanah	54.000.000,00	52.914.467,70	97,99	56.046.006,45
8	Sarang Burung Walet	74.200.000,00	21.000.000,00	28,30	13.500.000,00
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	235.761.383,75	47,15	350.043.239,18
10	Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.100.000.000,00	3.456.288.051,00	67,77	3.543.193.929,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.800.000.000,00	5.128.733.641,00	106,85	4.275.463.292,00
	Jumlah	24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38	21.355.298.265,81



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pajak hotel meningkat disebabkan nilai kunjungan/inap yang meningkat, ditambah optimalnya BPKAD melakukan penagihan secara intens melalui pendekatan yang maksimal kepada wajib pajak;
 - b. Pajak Penerangan Jalan meningkat seiring meningkatnya pemakaian listrik di masyarakat;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan disebabkan pemakaian bahan galian C yang berasal dari Kota Bima menurun.
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Bima telah dilandasi dengan Perda sebagai berikut :
 - a. Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
 - b. Peraturan-Peraturan Kepala Daerah tentang SOP dalam Pemungutan Pajak Daerah;

Secara rinci anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel					
1	Hotel	1.035.000.000,00	1.222.791.828,28	118,14	873.240.494,30
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	47.000.000,00	57.487.275,00	122,31	35.993.450,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari Sepuluh (10)	30.000.000,00	1.464.000,00	4,88	2.218.500,00
Jumlah		1.112.000.000,00	1.281.743.103,28	115,26	911.452.444,30
Pajak Restoran					
1	Restoran dan Sejenisnya	1.175.000.000,00	999.716.604,40	85,08	1.192.303.990,00
2	Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00	147.215.135,00	36,80	178.489.112,00
3	Kafetaria dan Sejenisnya	160.000.000,00	282.255.872,50	176,41	155.637.536,00
4	Kantin dan Sejenisnya	27.886.948,00	46.069.776,05	165,20	42.244.835,00
5	Warung dan Sejenisnya	325.000.000,00	367.930.009,05	113,21	244.099.078,98
6	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	325.000.000,00	289.570.957,00	89,10	290.457.621,40
Jumlah		2.412.886.948,00	2.132.758.354,00	88,39	2.103.232.173,38
Pajak Hiburan					
1	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	14.500.000,00	3.406.350,00	23,49	5.641.080,00
2	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	43.675.000,00	52.861.600,00	121,03	30.528.000,00
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan pusat kebugaran (fitnes Center)	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		59.750.000,00	56.267.950,00	94,17	36.169.080,00
Pajak Reklame					
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	600.000.000,00	369.714.399,00	61,62	399.375.631,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

2	Reklame Kain	71.440.250,00	64.940.187,50	90,90	76.733.000,00
3	Reklame Berjalan	103.000.000,00	13.610.205,00	13,21	13.391.455,00
Jumlah		774.440.250,00	448.264.791,50	57,88	489.500.086,50
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.800.000.000,00	10.233.873.243,00	104,43	9.443.782.515,00
Jumlah		9.800.000.000,00	10.233.873.243,00	104,43	9.443.782.515,00
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir	170.000.000,00	164.195.500,00	96,59	132.915.500,00
Jumlah		170.000.000,00	164.195.500,00	96,59	132.915.500,00
Pajak Air Tanah					
1	Air Tanah	54.000.000,00	52.914.467,70	97,99	56.046.006,45
Jumlah		54.000.000,00	52.914.467,70	97,99	56.046.006,45
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Sarang Burung Walet	74.200.000,00	21.000.000,00	28,30	13.500.000,00
Jumlah		74.200.000,00	21.000.000,00	28,30	13.500.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan kerikil	266.380.000,00	115.661.350,00	43,42	134.597.875,11
2	Tanah Liat	21.800.000,00	5.239.375,00	24,03	5.941.457,79
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00	114.860.658,75	54,23	209.503.906,28
Jumlah		500.000.000,00	235.761.383,75	47,15	350.043.239,18
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.100.000.000,00	3.456.288.051,00	67,77	3.543.193.929,00
Jumlah		5.100.000.000,00	3.456.288.051,00	67,77	3.543.193.929,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
1	BPHTB – Pemindahan Hak	4.800.000.000,00	5.128.733.641,00	106,85	4.275.463.292,00
Jumlah		4.800.000.000,00	5.128.733.641,00	106,85	4.275.463.292,00
Total Pajak Daerah		24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38	21.355.298.265,81

5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	19.710.293.760,28

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp13.058.478.015,00 dan terealisasi senilai Rp8.723.098.596,00 atau 66,80%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp19.710.293.760,28 maka realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp10.987.195.164,28 atau 55,74% yang dipengaruhi oleh Retribusi Jasa Umum.

Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	7.656.832.975,00	4.803.149.450,00	62,73	15.907.342.800,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.301.645.040,00	2.979.641.895,00	69,27	2.736.604.201,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	940.307.251,00	85,48	1.066.346.759,28
Jumlah Retribusi Daerah		13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80	19.710.293.760,28

Secara rinci Retribusi Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum					
1	Pelayanan Kesehatan	4.615.114.975,00	2.736.071.950,00	59,29	13.970.104.800,00
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.024.470.000,00	501.768.000,00	48,98	509.321.000,00
3	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	407.854.000,00	67,98	315.780.000,00
4	Pelayanan Pasar	440.375.000,00	464.957.500,00	105,58	500.953.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	434.860.000,00	66,90	429.810.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	135.460.000,00	69.900.000,00	51,60	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.738.000,00	187.738.000,00	100,00	181.374.000,00
Jumlah		7.656.832.975,00	4.803.149.450,00	62,73	15.907.342.800,00
Retribusi Jasa Usaha					
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.758.260.000,00	1.763.033.700,00	100,27	1.468.535.000,00
2	Pasar Grosir/Pertokoan	1.250.618.040,00	423.824.800,00	33,89	452.400.314,00
3	Terminal	18.740.000,00	5.626.000,00	30,02	8.730.000,00
4	Tempat Khusus Parkir	453.402.000,00	211.343.000,00	46,61	216.983.500,00
5	Rumah Potong Hewan	93.625.000,00	14.700.000,00	15,70	47.710.000,00
6	Tempat Rekreasi dan Olahraga	727.000.000,00	561.114.395,00	77,18	542.245.387,00
Jumlah		4.301.645.040,00	2.979.641.895,00	69,27	2.736.604.201,00
Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00	22.550.000,00	22,55	15.050.000,00
2	Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	917.757.251,00	91,78	1.051.296.759,28



No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
3	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	940.307.251,00	85,48	1.066.346.759,28
	Total Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80	19.710.293.760,28

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum

Penurunan realisasi Retribusi Jasa Umum disebabkan Retribusi pelayanan Kesehatan yang direklasifikasi ke pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu terdapat target pelayanan PCR untuk tes Covid 19, sedangkan untuk tahun 2023 masyarakat tidak lagi menggunakan test bebas Covid untuk keperluannya.
 - b. Retribusi Jasa Usaha

untuk Retribusi jasa usaha terjadi peningkatan yang bersumber dari Pemakaian kekayaan daerah disebabkan adanya penambahan aset daerah yang diperoleh dari penyerahan Pemerintah Kabupaten Bima ke Pemerintah Kota Bima.
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan tertentu terjadi penurunan pada retribusi ijin mendirikan bangunan akibat dari fluktuasi penerbitan IMB ini biasa terjadi karena ijin mendirikan bangunan tergantung kemampuan masyarakat atau adanya masyarakat yang mendirikan bangunan.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Perda No 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2020 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	1.545.139.285,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik



Daerah/BUMD. Pada Tahun 2023 yang dianggarkan senilai Rp2.140.790.453,00 dan terealisasi senilai Rp2.140.790.453,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.545.139.285,00 maka realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp595.651.168,00 atau 38,55%.

Rincian Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	BUMD	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
1	PT. Bank NTB Syariah	1.988.566.416,00	1.988.566.416,00	100,00	1.364.656.675,00
2	PT Jamkrida NTB Bersaing	41.066.722,00	41.066.722,00	100,00	25.426.352,00
3	PD. BPR NTB Bima	102.435.626,00	102.435.626,00	100,00	155.056.258,00
4	KPN Sabua Ade	8.721.689,00	8.721.689,00	100,00	0,00
Jumlah		2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	100,00	1.545.139.285,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Peningkatan nilai Deviden bagian laba Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dipengaruhi peningkatan komposisi modal disetor pada Bank NTB Syariah, prosentase penyertaan modal pada tahun 2022 sebagai dasar perhitungan deviden atas hasil laba kinerja Tahun 2023;
- Penurunan Deviden pada PD. BPR NTB Bima terjadi karena komposisi modal disetor sehingga hanya mendapatkan deviden bagian laba sebesar 0,69% ;
- Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT BANK NTB diakui berdasarkan RUPS dengan Berita Acara RUPS Nomor SBA/712/17/10/2023 tentang Penyampaian Berita Acara RUPS LB Sirkuler PT. Bank NTB Syariah.

5.1.1.1.4	Lain-Lain	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	14.748.737.697,13

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan senilai Rp22.377.610.094,00 dan terealisasi senilai Rp17.373.493.411,47 atau 77,64%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2022 senilai Rp14.748.737.697,13 maka realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp2.624.755.714, 34 atau 17,80%.



Tabel 5.1.9
Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 dan tahun 2022

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	823.262.000,00	1.117.736.923,00	135,77	45.064.900,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	217.870.439,00	78.735.456,67	36,14	0,00
3	Penerimaan jasa giro	333.297.171,00	479.369.095,52	143,83	634.481.215,05
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00	501.300,00	9,34	110.001,00
4	Penerimaan bunga deposito	2.371.798.670,00	3.247.190.524,39	136,91	1.699.870.625,01
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.078.023.688,00	1.185.757.924,39	38,52	406.652.754,32
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.633.888.001,00	35.676.961,50	0,54	25.536.962,75
7	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	356.625,00	133.093.093,00	37320,18	296.382.068,00
8	Pendapatan denda pajak	500.000,00	123.934,00	24,79	170.251,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	1.336.440,00
10	Pendapatan dari pengembalian	0,00	49.065.850,00	0,00	5.063.080,00
11	Lain-Lain PAD yang sah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan BLUD	8.913.248.500,00	11.046.242.349,00	123,93	3.839.000.000,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	7.795.069.400,00
Jumlah		22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64	14.748.737.697,13

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disebabkan adanya penjualan Aset Daerah berupa Alat angkut darat, dan peningkatan penempatan deposito;
2. Pendapatan BLUD tercatat mengalami peningkatan yang signifikan akibat reklasifikasi akun pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak dianggarkan dan direalisasikan akibat reklasifikasi Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tahun sebelumnya tercatat pada Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Rincian Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dan tahun 2022

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan					
1	Penjualan Peralatan/dan Mesin Hasil Penjualan Alat Angkutan	800.762.000,00	1.098.505.923,00	137,18	0,00
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.231.000,00	101,54	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Biota Perairan	7.500.000,00	4.000.000,00	53,33	5.000.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.064.900,00
	Jumlah	823.262.000,00	1.117.736.923,00	135,77	45.064.900,00
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan					
1	Hasil Sewa BMD	217.870.439,00	78.735.456,67	36,14	0,00
	Jumlah	217.870.439,00	78.735.456,67	36,14	0,00
Penerimaan Jasa Giro					
1	Jasa Giro Kas Daerah	333.297.171,00	444.039.980,05	133,23	597.948.766,56
2	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	35.329.115,47	0,00	36.532.448,49
	Jumlah	333.297.171,00	479.369.095,52	143,83	634.481.215,05
Penerimaan Bunga Deposito					
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.371.798.670,00	3.247.190.524,39	136,91	1.699.870.625,01
	Jumlah	2.371.798.670,00	3.247.190.524,39	136,91	1.699.870.625,01
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)					
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan/Kerugian Uang	0,00	544.880.166,32	0,00	243.285.542,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan/Kerugian Barang	3.078.023.688,00	640.877.758,07	20,82	163.367.212,32
	Jumlah	3.078.023.688,00	1.185.757.924,39	38,52	406.652.754,32
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain					
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.633.888.001,00	35.676.961,50	0,54	25.536.962,75
	Jumlah	6.633.888.001,00	35.676.961,50	0,54	25.536.962,75
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	356.625,00	133.093.093,00	37.320,18	296.382.068,00
	Jumlah	356.625,00	133.093.093,00	37.320,18	296.382.068,00
Pendapatan Denda Pajak					
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	500.000,00	123.934,00	24,79	170.251,00
	Jumlah	500.000,00	123.934,00	24,79	170.251,00
Pendapatan Denda Retribusi					
1	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.336.440,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.336.440,00
Pendapatan Dari Pengembalian					
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	2.265.850,00	0,00	5.063.080,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	49.065.850,00	0,00	5.063.080,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat					



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa/Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	5.365.000,00	501.300,00	9,34	110.001,00
Jumlah		5.365.000,00	501.300,00	9,34	110.001,00
Pendapatan BLUD					
1	Pendapatan BLUD	8.913.248.500,00	11.046.242.349,00	123,93	3.839.000.000,00
Jumlah		8.913.248.500,00	11.046.242.349,00	123,93	3.839.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP					
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	7.795.069.400,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	7.795.069.400,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64	14.748.737.697,13

Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan yang terdapat pada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas Kota Bima Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp7.795.069.400,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.11

Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No	Puskesmas	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	PKM Mpunda	0,00	1.875.264.000,00
2	PKM Rasanac Timur	0,00	661.329.000,00
3	PKM Paruga	0,00	1.443.774.900,00
4	PKM Penanae	0,00	1.755.236.700,00
5	PKM Kolo	0,00	312.010.700,00
6	PKM Kumbe	0,00	344.672.100,00
7	PKM Jatibaru	0,00	1.402.782.000,00
Jumlah		0,00	7.795.069.400,00

5.1.1.2	Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		740.018.857.090,00	712.153.663.997,00	748.451.787.052,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan senilai Rp740.018.857.090,00 dan terealisasi senilai Rp712.153.663.997,00 atau 96,23%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp36.298.123.055,00 atau 4,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp748.451.787.052,00.

Pendapatan Dana Transfer diperoleh dari :



Tabel 5.1.12
Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realiasi 2023 (Rp)	%	Realiasi 2022 (Rp)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
1	Dana Perimbangan	650.846.842.986,00	632.975.550.859,00	97,25	657.671.198.471,00
2	Dana Insentif Daerah	21.172.210.000,00	21.172.210.000,00	100,00	39.108.685.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	672.019.052.986,00	654.147.760.859,00	97,34	696.779.883.471,00
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.176.900.904,00	54.382.999.938,00	84,74	51.171.903.581,00
2	Bantuan Keuangan	3.822.903.200,00	3.622.903.200,00	94,77	500.000.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Antar Daerah	67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	85,30	51.671.903.581,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	740.018.857.090,00	712.153.663.997,00	96,23	748.451.787.052,00

5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023 (Rp) 672.019.052.986,00	Realisasi 2023 (Rp) 654.147.760.859,00	Realisasi 2022 (Rp) 696.779.883.471,00
------------------	---	--	---	---

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan senilai Rp672.019.052.986,00 dan terealisasi senilai Rp654.147.760.859,00 atau 97,34%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp 42.632.122.612,00 atau 6,12% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp696.779.883.471,00.

5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp) 650.846.842.986,00	Realisasi 2023 (Rp) 632.975.550.859,00	Realisasi 2022 (Rp) 657.671.198.471,00
--------------------	-------------------------	--	---	---

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan yang dianggarkan Rp650.846.842.986,00 dan terealisasi senilai Rp632.975.550.859,00 atau 97,25%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp 24.695.647.612,00 atau 3,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp657.671.198.471,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan diperoleh dari :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.13

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	73.154.845.730,00	55.895.742.054,00	76,41	69.899.355.791,00
2	Dana Alokasi Umum	450.585.561.000,00	453.939.356.950,00	100,74	430.503.529.123,00
3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	43.745.879.000,00	42.423.553.167,00	96,98	89.773.006.178,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.360.557.256,00	80.716.898.688,00	99,83	67.495.307.379,00
Jumlah		650.846.842.986,00	632.975.550.859,00	97,25	657.671.198.471,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan Penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp29.342.498.000,00 yang ditambahkan sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S.84/KPN.2302/2024;
- 2) Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan antara lain karena adanya Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan untuk membiayai dukungan Pendanaan Kelurahan, Dukungan Pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan untuk dukunga Pendanaan THR 50% bagi guru-guru PNSD.

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	73.154.845.730,00	55.895.742.054,00	69.899.355.791,00

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp73.154.845.730,00 dan terealisasi senilai Rp55.895.742.054,00 atau 76,41%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp14.003.613.737,00 atau 20,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp69.899.355.791,00

Secara rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Tabel 5.1.14

Rincian Obyek Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.744.135.700,00	2.506.766.425,00	143,73	5.701.935.675,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	6.828.466.968,00	0,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.214.582.999,00	415.565.539,00	6,69	7.630.278.551,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.859.361.683,00	17.992.909.872,00	100,75	3.732.305.034,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	46.274.375.104,00	26.628.033.453,00	57,54	50.786.615.092,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	57.221.578,00	50.097.586,00	87,55	89.910.439,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.005.168.666,00	1.473.902.211,00	146,63	1.958.311.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		73.154.845.730,00	55.895.742.054,00	76,41	69.899.355.791,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp55.895.742.054,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 serta adanya pendapatan dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 serta adanya Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke Kas Daerah Kota Bima karena telah ditambahkan sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S.84/KPN.2302/2024.

5.1.1.2.1.1.2	Dana Alokasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Umum	450.585.561.000,00	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00

Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp450.585.561.000,00 dan terealisasi senilai Rp453.939.356.950,00 atau 100,74%. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2022 sebesar Rp430.503.529.123,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.435.827.827,00 atau 5,44%.

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp453.939.356.950,00, telah/tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran Rincian Dana Transfer Umum, Selisih Pечатatan terjadi akibat terdapat pengembalian Kelebihan Penyaluran DAU bulan Oktober 2023 dan penambahan alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan untuk dukungan pendanaan THR 50% guru PNSD yang dibayarkan melalui Kas Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.471.790.000,00.

Rincian DAU yang ditentukan penggunaannya (*Earkmark*) untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp815.575.330.000,00, Pendanaan Kelurahan sebesar Rp8.200.000.000,00, Bidang Kesehatan sebesar Rp32.117.389.547,00 dan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp7.300.000.000,00.

5.1.1.2.1.1.3	Dana Alokasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Khusus	127.106.436.256,00	125.461.275.393,00	157.268.313.557,00

Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp127.106.436.256,00 dan terealisasi senilai Rp125.461.275.393,00 atau 98,71%. Realisasi Tahun 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

mengalami penurunan senilai Rp31.807.038.164,00 atau 20,22% dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp157.268.313.557,00

5.1.1.2.1.1.3.1	Dana Alokasi Khusus - Fisik	Anggaran 2023 (Rp) 43.745.879.000,00	Realisasi 2023 (Rp) 42.423.553.167,00	Realisasi 2022 (Rp) 89.773.006.178,00
-----------------	------------------------------------	--	---	---

Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp43.745.879.000,00 dan terealisasi senilai Rp42.423.553.167,00 atau 96,98%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp47.349.453.011,00 atau 52,74% dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp89.773.006.178,00.

Secara rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Fisik terdiri dari :

Tabel 5.1.15
Rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Khusus – Fisik					
1	DAK Bidang Pendidikan				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.194.656.000,00	1.186.700.960,00	99,33	1.357.812.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.831.624.000,00	3.655.596.744,00	95,41	9.265.464.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.355.934.000,00	1.238.372.495,00	91,33	5.397.751.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SKB	639.504.000,00	606.855.775,00	94,89	304.036.000,00
	Jumlah	7.021.718.000,00	6.687.525.974,00	95,24	16.325.063.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	2.138.763.000,00	2.053.758.280,00	96,03	1.554.530.490,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.985.566.479,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	882.829.000,00	878.800.000,00	99,54	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit	96.643.000,00	85.994.300,00	88,98	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.641.103.000,00	5.526.073.402,00	97,96	0,00
	Jumlah	8.759.338.000,00	8.544.625.982,00	97,55	5.540.096.969,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.216.113.000,00	14.039.613.511,00	98,76	26.076.988.000,00
	Jumlah	14.216.113.000,00	14.039.613.511,00	98,76	26.076.988.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	6.488.430.000,00	5.891.507.700,00	90,80	2.466.236.500,00
	Jumlah	6.488.430.000,00	5.891.507.700,00	90,80	2.466.236.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	7.260.280.000,00	7.260.280.000,00	100,00	5.523.565.000,00
	Jumlah	7.260.280.000,00	7.260.280.000,00	100,00	5.523.565.000,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	1.578.947.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.578.947.000,00
7	DAK Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	733.107.707,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	286.884.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	30.869.455.144,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	372.662.858,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	32.262.109.709,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus – Fisik	43.745.879.000,00	42.423.553.167,00	96,98	89.773.006.178,00

5.1.1.2.1.1.3.2 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Anggaran 2023 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Realisasi 2022 (Rp)
83.360.557.256,00 80.716.898.688,00 67.495.307.379,00

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp83.360.557.256,00 dan terealisasi senilai Rp80.716.898.688,00 atau 99,83%. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp13.221.591.309,00 atau - 19,59% dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp67.495.307.379,00.

Secara rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Non Fisik terdiri dari :

Tabel 5.1.16

Rincian obyek Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
1	BOS Reguler	19.611.700.000,00	19.630.299.800,00	100,09	19.311.779.270,00
2	BOS Kinerja	1.042.500.000,00	1.042.500.000,00	100,00	685.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3	TPG PNSD	39.552.522.000,00	39.325.406.520,00	99,43	34.424.858.975,00
4	Tamsil Guru PNSD	897.751.000,00	1.009.999.950,00	112,50	1.029.000.000,00
5	BOP PAUD	4.381.200.000,00	4.365.496.000,00	99,64	4.334.874.000,00
6	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.633.700.000,00	1.633.700.000,00	100,00	771.100.000,00
7	BOKKB BOK	3.296.633.506,00	8.286.641.638,00	251,37	3.248.199.820,00
8	BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	425.516.000,00	0,00	0,00	0,00
9	BOKKB Akreditasi Puskesmas	7.419.015.000,00	0,00	0,00	0,00
10	BOKKB BOKB	3.555.064.242,00	3.555.064.242,00	100,00	2.089.486.982,00
11	PK2UKM	434.261.629,00	434.261.629,00	100,00	387.372.856,00
12	Fasilitasi Penanaman Modal	432.394.800,00	432.394.800,00	100,00	397.878.676,00
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	481.725.079,00	481.725.079,00	100,00	397.356.800,00
14	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.574.000,00	196.574.000,00	100,00	418.400.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	83.360.557.256,00	80.716.898.688,00	99,83	67.495.307.379,00

5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		21.172.210.000,00	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00

Dana Insentif Daerah Tahun 2023 merupakan Dana Insentif Daerah yang dianggarkan senilai Rp21.172.210.000,00 dan terealisasi senilai Rp21.172.210.000,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp17.936.475.000,00 atau 45,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp39.108.685.000,00.

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp21.172.210.000,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran Rincian Dana Transfer Umum.

5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	51.671.903.581,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah yang dianggarkan senilai



Rp67.999.804.104,00 dan terealisasi senilai Rp58.005.903.138,00 atau 85,30%. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp6.333.999.557,00 atau 12,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp51.671.903.581,00.

Secara rinci Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.17
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.176.900.904,00	54.382.999.938,00	84,74	51.171.903.581,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.822.903.200,00	3.622.903.200,00	94,77	500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah		67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	85,30	51.671.903.581,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor sesuai Alokasi SK Gubernur NTB Nomor973-825 Tahun 2023 dan SK Gubernur Nomor 973-184 Tahun 2024, alokasi DBH Kendaraan bermotor bagian Kota Bima meningkat disebabkan meningkatnya penerimaan Propinsi atas Pajak Kendaraan Bermotor;

5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u> 64.176.900.904,00	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u> 54.382.999.938,00	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u> 51.171.903.581,00
-------------	------------------------------------	--	---	---

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai Rp64.176.900.904,00 dan terealisasi senilai Rp54.382.999.938,00 atau 84,74%. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp3.211.096.357,00 atau 6,28% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp51.171.903.581,00.

Secara rinci Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.18
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	12.080.762.450,00	7.875.547.294,00	65,19	7.625.909.931,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.220.506.681,00	7.152.234.289,00	87,00	5.609.123.194,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.107.669.693,00	20.631.215.848,00	97,74	18.745.529.174,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	39.925.000,00	40.784.440,00	102,15	41.524.731,00
5	Pajak Rokok	22.728.037.080,00	18.683.218.067,00	82,20	19.149.816.551,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Jumlah	64.176.900.904,00	54.382.999.938,00	84,74	51.171.903.581,00

5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		3.822.903.200,00	3.622.903.200,00	500.000.000,00

Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp3.822.903.200,00 dan terealisasi senilai Rp3.622.903.200,00 atau 94,77%. Sesuai SK Gubernur NTB Nomor 900-730 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Kota se Provinsi NTB, Kota Bima mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi NTB sebesar Rp3.822.903.200,00 untuk Bantuan BPJS Kesehatan sedangkan untuk Tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 untuk Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut
Peningkatan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 sesuai SK Gubernur Nomor 900-730 Tahun 2023 untuk Dukungan khusus Jaminan Kesehatan.

5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan senilai Rp9.764.985.709,00 dan terealisasi senilai Rp9.521.776.963,00 atau 97,51%, yang merupakan pendapatan atas Pengembalian Belanja Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan. Lain-lain PAD yang Sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.19
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Lainnya	9.764.985.709,00	9.461.776.963,00	96,89	0,00
	Jumlah	9.764.985.709,00	9.461.776.963,00	96,89	0,00
	Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51	0,00



5.1.1.3.1	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		0,00	60.000.000,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp60.000.000,00 atau 0,00%. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp6.000.0000,00 atau 0,00%. dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00. Pendapatan Hibah ini merupakan Hibah pendapatan atas Pengembalian Belanja Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 (Mushala At Taqwa SDN 47 Kelurahan Kodo dan Mushala Nurul Iman Kelurahan Ntobo).

5.1.1.3.2	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Dana Darurat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		0,00	0,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Dana Darurat Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%

5.1.1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		9.764.985.709,00	9.461.776.963,00	0,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan lainnya merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 2023 dianggarkan senilai Rp9.764.985.709,00 dan terealisasi senilai Rp9.461.776.963,00 atau 96,89%. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp9.461.776.963,00 atau 100,00%. dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00. Merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Rincian Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Kapitas JKN pada FKTP Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023

No	Puskesmas	Realisasi 2023 (Rp)
1	PKM Mpunda	2.294.524.403,00
2	PKM Rasanae Timur	831.943.062,00
3	PKM Paruga	1.884.855.292,00
4	PKM Penanae	1.957.307.633,00
5	PKM Kolo	411.862.204,00
6	PKM Kumbe	457.552.311,00
7	PKM Jatibaru	1.623.732.058,00
	Jumlah	9.461.776.963,00



5.1.2. BELANJA

5.1.2 Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	749.196.056.304,73

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023. Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pemerintah Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja aset Tetap Lainnya, selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp886.801.025.189,00 dan terealisasi senilai Rp829.916.997.925,25 atau 93,59%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp56.884.027.263,75 atau 6,41%. Terdapat Peningkatan realisasi Belanja Tahun 2023 senilai Rp80.720.941.620,52 atau 10,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp749.196.056.304,73 yang dipengaruhi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja dan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	93,46	594.440.854.017,00
2	Belanja Modal	154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	95,34	153.809.784.287,73
3	Belanja Tak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40	945.418.000,00
	Jumlah	886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59	749.196.056.304,73

Laporan ikhtisar atas realisasi belanja Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Rincian Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja dan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
A	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47	361.680.806.870,00
2	Belanja Barang & Jasa	287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29	209.804.746.008,00
3	Belanja Hibah	43.552.366.000,00	37.168.222.233,00	85,34	16.448.051.139,00
4	Belanja Bantuan Sosial	7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55	6.507.250.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	93,46	594.440.854.017,00
B	Belanja Modal				
1	Belanja Tanah	1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	89,38	3.035.329.060,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.256.905.058,00	35.594.628.839,00	95,54	45.650.535.702,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja dan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
3	Belanja Bangunan dan Gedung	50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15	34.349.972.004,73
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80	69.040.535.395,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02	1.733.412.126,00
6	Belanja Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	95,34	153.809.784.287,73
C	Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40	945.418.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40	945.418.000,00
Jumlah Belanja		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59	749.196.056.304,73
D	Belanja Transfer				
1	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59	749.196.056.304,73

Rekapitulasi Belanja Daerah masing-masing SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Rekapitulasi Belanja masing-masing SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	205.716.961.396,00	197.915.518.002,51	96,21	192.039.092.308,00
2	Dinas Kesehatan	104.622.908.969,00	93.816.666.084,00	89,67	90.499.856.864,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.163.895.597,00	104.429.043.307,00	94,79	80.826.878.268,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.367.193.937,00	8.742.361.369,00	65,40	11.830.199.286,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	9.551.147.309,00	7.839.685.560,00	82,08	7.775.878.915,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.233.147.092,00	6.114.434.177,00	98,10	4.622.397.252,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.143.130.435,00	5.718.383.936,00	93,09	4.787.698.448,00
8	Dinas Sosial	9.085.528.990,00	8.851.957.908,00	97,43	10.542.000.188,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.076.346.059,00	3.869.703.033,00	94,93	5.488.613.024,81
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.883.351.886,00	9.516.402.544,00	96,29	5.562.324.257,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.431.334.174,00	4.327.332.545,00	97,65	3.849.221.184,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	29.172.216.838,00	27.940.170.220,00	95,78	18.696.866.781,16
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.754.316.667,00	6.608.379.403,00	97,84	5.606.515.988,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.578.125.222,00	9.962.604.704,00	94,18	7.711.788.573,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
15	Dinas Perhubungan	12.360.581.498,00	11.912.347.908,96	96,37	12.628.389.380,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.582.395.270,00	11.457.849.787,00	98,92	7.661.960.545,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10.162.302.136,00	9.621.986.501,00	94,68	7.376.038.652,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.366.924.409,00	4.185.027.476,00	95,83	3.792.740.156,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.477.740.013,00	6.275.713.631,00	96,88	5.336.193.214,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.888.107.642,00	5.429.180.945,00	92,21	5.253.834.812,00
21	Dinas Pariwisata	20.866.895.888,00	20.545.371.181,00	98,46	11.297.762.990,00
22	Dinas Pertanian	17.102.169.762,00	16.832.751.854,00	98,42	12.661.123.910,00
23	Sekretariat Daerah	61.838.069.787,00	59.530.838.452,78	96,27	52.703.815.843,56
24	Sekretariat DPRD	31.121.318.817,00	28.572.981.919,00	91,81	26.521.250.423,00
25	Kecamatan Rasanae Barat	10.941.400.726,00	10.882.146.343,00	99,46	9.944.919.563,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	12.555.461.546,00	12.455.532.034,00	99,20	11.309.927.200,00
27	Kecamatan Asakota	11.725.339.323,00	11.493.515.689,00	98,02	10.319.865.721,00
28	Kecamatan Mpunda	15.840.922.011,00	15.582.136.960,00	98,37	14.693.237.521,00
29	Kecamatan Raba	18.956.200.102,00	18.548.959.137,00	97,85	17.267.282.065,00
30	Inspektorat	10.666.967.810,00	10.577.120.539,00	99,16	8.041.090.868,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	8.888.832.820,00	7.971.922.554,00	89,68	6.695.345.281,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	23.856.731.885,00	20.888.049.010,00	87,56	17.300.669.604,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.993.572.155,00	7.786.017.406,00	97,40	6.242.265.825,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.283.342.175,00	9.230.138.512,00	56,68	6.933.944.463,00
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.016.321.520,00	5.465.875.301,00	90,85	0,00
36	RSUD Kota Bima	31.529.823.323,00	29.019.391.992,00	92,04	45.375.066.931,00
JUMLAH		886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59	749.196.056.304,73

Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/430/500/XI/2021 Rumah Sakit Umum Kota Bima ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dilaksanakan pada 01 Januari 2022 sehingga Rumah Sakit Umum Kota Bima dapat mengelola Pendapatan dan Belanja secara mandiri. Pada Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp31.529.823.323,00 dan terealisasi senilai Rp29.019.391.992,00 atau 92,04%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp2.510.431.331,00 atau 7,96%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp45.375.066.931,00 maka realisasi Rumah Sakit Kota Bima Tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp16.355.674.939,00 atau 36,05%.



5.1.2.1	Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	594.440.854.017,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp728.183.679.382,00 dan terealisasi senilai Rp680.574.756.827,25 atau 93,46%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp47.608.922.554,75 atau 6,54% Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp594.440.854.017,00 maka realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 menunjukkan peningkatan senilai Rp86.133.902.810,25 atau 14,49%.

Belanja Operasi Tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.1.24
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47	361.680.806.870,00
2	Belanja Barang & Jasa	287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29	209.804.746.008,00
3	Belanja Hibah	43.552.366.000,00	37.168.222.233,00	85,34	16.448.051.139,00
4	Belanja Bantuan Sosial	7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55	6.507.250.000,00
Jumlah		728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	93,46	594.440.854.017,00

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	361.680.806.870,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai adalah belanja pegawai pada Belanja Operasi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp389.708.764.568,00 dan direalisasikan senilai Rp372.071.721.926,00 atau 95,47%. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 Rp361.680.806.870,00 maka realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 menunjukkan peningkatan senilai Rp10.390.915.056,00 atau 2,87%.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	254.379.839.259,00	244.216.882.843,00	96,00	240.011.994.328,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	64.217.052.477,00	62.332.814.300,00	97,07	54.164.103.648,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.821.610.297,00	52.335.251.611,00	93,75	56.766.361.210,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.906.273.548,00	9.913.395.633,00	90,90	9.978.172.296,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.399.585,00	228.909.962,00	43,90	274.375.788,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	455.799.600,00	86,65	485.799.600,00
7	Belanja Pegawai BLUD	3.336.589.402,00	2.588.667.977,00	77,58	0,00
	Jumlah	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47	361.680.806.870,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Peningkatan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi :

- Penambahan penggajian PPPK
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru 50% untuk THR
- Penambahan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan PPPK

Tabel 5.1.26
Subrincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	254.379.839.259,00	244.216.882.843,00	96,00	240.011.994.328,00
	* Belanja Gaji Pokok ASN	191.119.145.722,00	184.511.329.600,00	96,54	182.091.772.707,00
	- Belanja Gaji Pokok PNS	176.244.123.635,00	172.779.184.600,00	98,03	175.655.810.814,00
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	14.875.022.087,00	11.732.145.000,00	78,87	6.435.961.893,00
	* Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.425.531.096,00	15.842.908.564,00	96,45	15.640.042.131,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.343.086.884,00	15.045.365.842,00	98,06	15.189.833.463,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.082.444.212,00	797.542.722,00	73,68	450.208.668,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.306.421.175,00	7.144.202.000,00	97,78	7.243.001.803,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.306.421.175,00	7.144.202.000,00	97,78	7.243.001.803,00
	* Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.209.141.381,00	11.096.608.740,00	99,00	9.934.731.320,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.125.921.381,00	11.013.388.740,00	98,99	9.859.131.320,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	83.220.000,00	83.220.000,00	100,00	75.600.000,00
	* Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.001.306.325,00	3.332.175.000,00	83,28	3.192.453.160,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Tunjangan - Fungsional Umum PNS	2.537.912.325,00	2.353.029.000,00	92,72	2.820.973.160,00
	Belanja Tunjangan - Fungsional Umum PPPK	1.463.394.000,00	979.146.000,00	66,91	371.480.000,00
	* Belanja Tunjangan Beras ASN	10.636.728.972,00	10.190.105.124,00	95,80	10.144.955.700,00
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	9.718.029.992,00	9.501.608.184,00	97,77	9.763.012.620,00
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	918.698.980,00	688.496.940,00	74,94	381.943.080,00
	* Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	705.082.707,00	692.534.115,00	98,22	766.011.053,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	705.082.707,00	692.534.115,00	98,22	766.011.053,00
	* Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.793.243,00	2.582.998,00	92,47	2.568.590,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.586.912,00	2.434.697,00	94,12	2.477.616,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	206.331,00	148.301,00	71,88	90.974,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.398.453.223,00	9.884.030.041,00	86,71	9.501.079.294,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.759.022.871,00	9.374.622.058,00	87,13	9.241.438.915,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	639.430.352,00	509.407.983,00	79,67	259.640.379,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	394.076.223,00	380.101.842,00	96,45	373.844.766,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	361.915.185,00	354.655.184,00	97,99	360.814.138,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	32.161.038,00	25.446.658,00	79,12	13.030.628,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.181.159.192,00	1.140.304.819,00	96,54	1.121.533.804,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.084.696.803,00	1.063.951.029,00	98,09	1.082.400.881,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	96.462.389,00	76.353.790,00	79,15	39.132.923,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	64.217.052.477,00	62.332.814.300,00	97,07	54.164.103.648,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.656.554.549,00	30.756.566.729,00	97,16	18.423.859.101,20
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.319.220.627,00	30.431.315.677,00	97,16	18.299.792.882,20
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	337.333.922,00	325.251.052,00	96,42	124.066.219,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.911.923.089,00	10.669.558.770,00	97,78	7.788.488.579,80
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.715.808.693,00	10.475.473.796,00	97,76	7.785.006.893,80
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	196.114.396,00	194.084.974,00	98,97	3.481.686,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	128.322.146,00	124.127.016,00	96,73	122.846.313,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	128.322.146,00	124.127.016,00	96,73	122.846.313,00
	* Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.520.252.693,00	20.782.561.785,00	96,57	27.828.909.654,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.290.729.437,00	20.559.395.674,00	96,57	27.639.594.493,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	229.523.256,00	223.166.111,00	97,23	189.315.161,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.821.610.297,00	52.335.251.611,00	93,75	56.766.361.210,00
	* Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	592.659.732,00	413.313.900,00	69,74	404.515.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.400.000,00	8.345.000,00	99,35	8.385.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	40.200.000,00	39.075.000,00	97,20	40.200.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	665.000,00	636.800,00	95,76	660.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.466.040,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	252.000.000,00	249.835.000,00	99,14	234.950.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.520.000,00	2.509.000,00	99,56	2.230.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.260.000,00	998.400,00	79,24	1.000.000,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	145.308.692,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	112.000.000,00	111.914.700,00	99,92	111.990.000,00
	* Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	365.403.846,00	153.641.127,00	42,05	107.030.546,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	38.383.520,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31.362.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.348.400,00	17.388.750,00	28,81	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.891.360,00	6.707.655,00	85,00	7.891.360,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	88.113.600,00	55.535.850,00	63,03	51.954.650,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.115.480,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	749.600,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.426.400,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	42.973.486,00	24.008.872,00	55,87	7.184.536,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	40.000.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.939.109.580,00	37.422.280.500,00	93,70	36.728.350.420,00
	- Belanja TPG PNSD	39.939.109.580,00	37.422.280.500,00	93,70	36.728.350.420,00
	* Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.044.001.000,00	1.043.750.000,00	99,98	1.028.250.000,00
	- Belanja Tamsil Guru PNSD	1.044.001.000,00	1.043.750.000,00	99,98	1.028.250.000,00
	* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.640.419.139,00	6.458.201.484,00	97,26	10.556.930.452,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.640.419.139,00	6.458.201.484,00	97,26	10.556.930.452,00
	* Belanja Honorarium	7.236.417.000,00	6.842.264.600,00	94,55	7.941.284.792,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Honorarium - Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.357.357.000,00	6.001.934.600,00	94,41	7.401.501.100,00
	Belanja Honorarium - Pengadaan Barang/Jasa	879.060.000,00	840.330.000,00	95,59	539.783.692,00
	* Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD - yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.906.273.548,00	9.913.395.633,00	90,90	9.978.172.296,00
	* Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	99,72	561.435.000,00
	- Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.965.000,00	99,72	561.435.000,00
	* Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.567.000,00	53.518.500,00	99,91	53.508.000,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.567.000,00	53.518.500,00	99,91	53.508.000,00
	* Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00	78.052.570,00	98,53	78.130.080,00
	- Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00	78.052.570,00	98,53	78.130.080,00
	* Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.974.500,00	85,43	48.121.500,00
	- Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.974.500,00	85,43	48.121.500,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	99,72	814.080.750,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	99,72	814.080.750,00
	* Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00	64.767.150,00	67,08	64.097.050,00
	- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	96.556.950,00	64.767.150,00	67,08	64.097.050,00
	* Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00	17.904.600,00	91,06	18.300.450,00
	- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00	17.904.600,00	91,06	18.300.450,00
	* Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	99,67	1.890.000.000,00
	- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	99,67	1.890.000.000,00
	* Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00	466.200.000,00	96,26	472.500.000,00
	- Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00	466.200.000,00	96,26	472.500.000,00
	* Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan	248.794,00	248.794,00	100,00	248.794,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	dan Anggota DPRD				
	- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.794,00	248.794,00	100,00	248.794,00
	* Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.687.950.784,00	3.150.605.269,00	85,43	3.160.600.672,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	154.560.000,00	132.000.000,00	85,40	132.480.000,00
	- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00	1.151.317,00	85,43	1.155.168,00
	- Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00	3.453.952,00	85,43	3.465.504,00
	- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.528.000.000,00	3.014.000.000,00	85,43	3.023.500.000,00
	* Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.988.000.000,00	2.772.000.000,00	92,77	2.814.000.000,00
	- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.988.000.000,00	2.772.000.000,00	92,77	2.814.000.000,00
	* Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	174.832.212,00	6.510.000,00	3,72	3.150.000,00
	- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	174.832.212,00	6.510.000,00	3,72	3.150.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.399.585,00	228.909.962,00	43,90	274.375.788,00
	* Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.842.807,00	42.900.000,00	74,17	54.600.000,00
	- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.842.807,00	42.900.000,00	74,17	54.600.000,00
	* Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	7.594.020,00	5.610.000,00	73,87	7.140.000,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00	5.610.000,00	73,87	7.140.000,00
	* Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00	77.220.000,00	73,00	98.280.000,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00	77.220.000,00	73,00	98.280.000,00
	* Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00	5.576.340,00	74,53	6.083.280,00
	- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00	5.576.340,00	74,53	6.083.280,00
	* Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00	366.651,00	41,37	984.529,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00	366.651,00	41,37	984.529,00
	* Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	1.560,00	69,64	1.920,00
	- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	1.560,00	69,64	1.920,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	* Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	4.114.800,00	75,00	5.486.400,00
	Belanja Iuran - Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	4.114.800,00	75,00	5.486.400,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	84.240,00	75,00	112.320,00
	Belanja Iuran - Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	84.240,00	75,00	112.320,00
	* Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	252.720,00	90,00	336.960,00
	Belanja Iuran - Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	252.720,00	90,00	336.960,00
	* Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	230.510.772,00	68.958.000,00	29,92	88.350.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.360.000,00	3.180.000,00	59,33	4.100.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22.128.869,00	10.000.000,00	45,19	17.300.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	237.500,00	118.000,00	49,68	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.744.403,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	92.500.000,00	42.950.000,00	46,43	36.465.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.200.000,00	350.000,00	29,17	385.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00	110.000,00	20,37	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00	12.250.000,00	28,82	30.100.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas * Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	105.427.590,00	23.825.651,00	22,60	13.000.379,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	14.297.750,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.436.380,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	15.213.100,00	4.500.000,00	29,58	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.972.840,00	1.183.704,00	60,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.900,00	2.000.000,00	10,26	4.000.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan	2.778.870,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	187.400,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	7.806.600,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	836.250,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.887.500,00	6.141.947,00	51,67	1.000.379,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.000.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas - Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	455.799.600,00	86,65	485.799.600,00
	Belanja Dana * Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	100.800.000,00	80,00	100.800.000,00
	Belanja Dana - Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	100.800.000,00	80,00	100.800.000,00
	Belanja Dana * Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	354.999.600,00	88,75	384.999.600,00
	Belanja Dana - Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	354.999.600,00	88,75	384.999.600,00
7	Belanja Pegawai BLUD	3.336.589.402,00	2.588.667.977,00	77,58	0,00
	* Belanja Pegawai BLUD	3.336.589.402,00	2.588.667.977,00	77,58	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Pegawai BLUD	3.336.589.402,00	2.588.667.977,00	77,58	0,00
	Jumlah	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47	361.680.806.870,00

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	209.804.746.008,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang adalah belanja barang pada Belanja Operasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilisasi, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas.

Dalam APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp287.103.412.292,00 dan direalisasikan senilai Rp267.851.512.668,25 atau 93,29%. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 Rp209.804.746.008,00 maka realisasi belanja barang Tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp58.046.766.660,25 atau 27,67%.

Tabel 5.1.27

Rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	87.725.379.685,00	81.346.245.862,96	92,73	57.459.374.310,00
2	Belanja Jasa	103.250.171.598,00	94.683.151.800,00	91,70	87.258.923.544,00
3	Belanja Pemeliharaan	12.545.425.229,00	11.938.036.803,00	95,16	6.503.946.252,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	54.763.860.264,00	51.486.586.152,00	94,02	38.319.952.531,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.998.457.900,00	2.917.431.258,78	97,30	4.430.545.200,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.287.111.051,00	16.085.406.650,51	98,76	15.832.004.171,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.533.006.565,00	9.394.654.141,00	98,55	0,00
	Jumlah	287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29	209.804.746.008,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga antara lain lanjutan pembangunan Mesjid Al Muwahidin
2. Pemeliharaan dan Peningkatan kebutuhan armada Persampajhan
3. Peningkatan Belanja Barang Jasa BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan BOK



4. Peningkatan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 akibat penambahan Peserta.

Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	87.717.879.685,00	81.346.245.862,96	92,74	57.459.374.310,00
2	Belanja Barang Tak Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	77.375.750.214,00	71.961.716.775,00	93,00	69.381.287.567,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.656.595.200,00	13.980.197.690,00	83,93	9.986.968.850,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.849.086.500,00	1.765.363.000,00	95,47	793.029.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	980.703.220,00	922.695.220,00	94,09	1.195.330.400,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	4.553.466.005,00	4.370.558.435,00	95,98	4.428.859.125,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	465.000.000,00	415.000.000,00	89,25	315.000.000,00
11	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.115.082.000,00	1.091.628.000,00	97,90	967.384.500,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	253.988.459,00	175.492.680,00	69,09	180.676.300,00
13	Belanja Pemeliharaan	12.545.425.229,00	11.938.036.803,00	95,16	6.503.946.252,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	54.763.860.264,00	51.486.586.152,00	94,02	38.319.952.531,00
15	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	6.387.802,00
16	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.998.457.900,00	2.917.431.258,78	97,30	4.430.545.200,00
18	Belanja Barang Dan Jasa BOS	16.287.111.051,00	16.085.406.650,51	98,76	15.832.004.171,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.533.006.565,00	9.394.654.141,00	98,55	0,00
Jumlah		287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29	209.804.746.008,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.29
Subbrincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	87.717.879.685,00	81.346.245.862,96	92,74	57.459.374.310,00
*	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	679.397.880,00	679.172.582,00	99,97	758.804.870,00
*	Belanja Bahan-Bahan Kimia	82.946.500,00	82.946.500,00	100,00	85.306.700,00
*	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.358.636.500,00	4.010.923.323,00	92,02	2.903.478.832,00
*	Belanja Bahan-Bahan Baku	135.369.000,00	131.304.720,00	97,00	0,00
*	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	567.055.000,00	411.534.400,00	72,57	470.026.700,00
*	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	3.200.000,00
*	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	14.840.000,00	0,00	0,00	74.780.000,00
*	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	584.709.205,00	580.848.500,00	99,34	145.008.000,00
*	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.548.410.950,00	1.516.773.500,00	97,96	1.223.823.622,00
*	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	0,00
*	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.670.000,00	3.670.000,00	100,00	2.760.000,00
*	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	308.000,00
*	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	138.514.500,00	132.847.044,00	95,91	153.147.296,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.107.139.120,00	4.239.127.128,00	103,21	3.125.336.707,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.436.929.258,00	1.370.504.500,00	95,38	1.356.535.413,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.533.382.040,00	7.975.981.562,00	93,47	6.339.667.209,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	838.775.000,00	826.923.000,00	98,59	658.950.500,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administras	11.767.150,00	11.766.500,00	99,99	37.362.800,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	i Tender				
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	74.043.700,00	69.961.200,00	94,49	89.606.200,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.714.142.875,00	1.535.753.394,00	89,59	750.676.737,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.852.676.980,00	1.810.839.891,96	97,74	1.171.784.430,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	402.559.030,00	402.269.615,00	99,93	523.054.700,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	856.559.000,00	842.955.000,00	98,41	837.150.000,00
*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.336.013.661,00	1.283.728.321,00	96,09	811.274.200,00
*	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.722.192.683,00	6.327.959.865,00	81,95	9.276.390.818,00
*	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	23.581.210,00	20.980.999,00	88,97	14.035.000,00
*	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.477.928.153,00	28.295.287.922,00	95,99	11.910.366.106,00
*	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	23.140.000,00	23.140.000,00	100,00	82.520.000,00
*	Belanja Natura dan Pakan-Natura	246.000,00	246.000,00	100,00	677.851.372,00
*	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	20.773.660,00	18.267.945,00	87,94	17.897.100,00
*	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.911.055.680,00	10.225.317.358,00	93,72	8.264.162.000,00
*	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.593.490.350,00	3.541.591.368,00	98,56	2.763.747.448,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
*	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	161.058.000,00	0,00	0,00
*	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.762.910.000,00	2.040.050.000,00	54,21	667.711.550,00
*	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.424.670.000,00	1.327.999.000,00	93,21	978.010.000,00
*	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	121.500.000,00	116.500.000,00	95,88	187.480.000,00
*	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	45.500.000,00	43.450.000,00	95,49	125.230.000,00
*	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.300.000,00	92.270.000,00	95,82	2.467.200,00
*	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	210.385.000,00	207.626.025,00	98,69	34.539.000,00
*	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	420.269.600,00	412.809.350,00	98,22	687.473.800,00
*	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.600.000,00	64.650.000,00	95,64	0,00
*	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	50.000.000,00	40.757.000,00	81,51	0,00
*	Belanja Pakaian Siaga	15.000.000,00	14.400.000,00	96,00	0,00
*	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	1.500.000,00
*	Belanja Pakaian Adat Daerah	210.250.000,00	210.104.350,00	99,93	157.350.000,00
*	Belanja Pakaian Batik Tradisional	169.000.000,00	167.400.000,00	99,05	0,00
*	Belanja Pakaian Olahraga	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	38.500.000,00
*	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	50.100.000,00
2	Belanja Barang Tak Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	77.375.750.214,00	71.961.716.775,00	93,00	69.381.287.567,00
*	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00	16.414.640,00	54,72	5.816.280,00
*	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.250.000,00	2.807.297.500,00	82,56	1.969.478.100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
*	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.891.210.000,00	6.093.545.000,00	88,42	5.127.113.000,00
*	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	68.400.000,00	66.600.000,00	97,37	136.800.000,00
*	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	998.100.000,00	996.300.000,00	99,82	550.900.000,00
*	Honorarium Rohaniwan	86.000.000,00	80.800.000,00	93,95	51.200.000,00
*	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	315.850.000,00	311.000.000,00	98,46	199.700.000,00
*	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
*	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	152.850.000,00	144.550.000,00	94,57	172.475.000,00
*	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	542.400.000,00	537.500.000,00	99,10	597.000.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.296.140.000,00	1.110.880.000,00	85,71	5.193.300.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.434.134.910,00	7.427.779.858,00	88,07	9.484.889.049,00
*	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.660.000,00	64.290.000,00	99,43	0,00
*	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	496.520.800,00	482.520.800,00	97,18	347.636.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.323.850.000,00	2.948.980.000,00	88,72	2.898.540.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	450.000.000,00	444.000.000,00	98,67	407.250.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.340.300.000,00	6.306.300.000,00	99,46	6.338.550.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
*	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	8.600.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
*	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	146.450.000,00	142.450.000,00	97,27	58.500.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.344.785.000,00	10.924.470.500,00	96,30	5.635.048.818,00
*	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	298.050.000,00	292.250.000,00	98,05	245.400.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.515.650.000,00	6.301.231.000,00	96,71	5.779.447.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Ahli	557.590.000,00	438.240.000,00	78,60	297.750.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.092.725.000,00	5.896.402.000,00	96,78	4.833.213.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	642.700.000,00	514.710.000,00	80,09	670.312.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Caraka	128.400.000,00	127.200.000,00	99,07	486.580.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Supir	301.800.000,00	285.455.000,00	94,58	316.250.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.448.000,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	590.800.000,00	587.550.000,00	99,45	464.300.000,00
*	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	14.400.000,00
*	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	181.300.000,00	152.600.000,00	84,17	723.100.000,00
*	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	110.960.700,00	94.481.700,00	85,15	129.579.000,00
*	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	228.000.000,00	225.750.000,00	99,01	222.750.000,00
*	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	93.970.000,00
*	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	913.000.000,00	708.000.000,00	77,55	561.560.000,00
*	Belanja Jasa Kalibrasi	232.014.938,00	164.116.270,00	70,74	7.277.500,00
*	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	98.820.000,00	91.050.431,00	92,14	755.551.633,00
*	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	16.957.000,00	16.390.000,00	96,66	12.292.500,00
*	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.167.300.000,00	2.112.700.000,00	97,48	1.525.500.000,00
*	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	14.520.800,00
*	Belanja Tagihan Listrik	7.737.731.225,00	7.361.666.643,00	95,14	6.628.761.874,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
*	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.025.000,00	50.025.000,00	100,00	89.200.000,00
*	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.384.791.664,00	3.200.689.549,00	94,56	1.974.708.602,00
*	Belanja Paket/Pengiriman	37.575.000,00	34.675.000,00	92,28	17.454.000,00
*	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	256.264.000,00	114.561.803,00	44,70	83.941.218,00
*	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Lembur	1.489.399.000,00	1.390.938.000,00	93,39	844.922.000,00
*	Belanja Medical Check Up	243.084.893,00	238.146.657,00	97,97	196.447.893,00
*	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	1.640.445.000,00
*	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.562.677.300,00
*	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	697.363.084,00	639.109.424,00	91,65	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.656.595.200,00	13.980.197.690,00	83,93	9.986.968.850,00
*	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.782.320.000,00	12.415.513.000,00	83,99	8.903.007.000,00
*	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.301.563.200,00	1.088.338.000,00	83,62	803.411.600,00
*	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	254.798.400,00	211.709.637,00	83,09	124.689.000,00
*	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	317.913.600,00	264.637.053,00	83,24	155.861.250,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
*	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.849.086.500,00	1.765.363.000,00	95,47	793.029.000,00
*	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	157.480.000,00	157.480.000,00	100,00	0,00
*	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.968.000,00	57.468.000,00	78,76	26.460.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	* Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	10.800.000,00
	* Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	152.100.000,00	152.100.000,00	100,00	82.400.000,00
	* Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	1.987.000,00
	* Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	2.000.000,00
	* Belanja Sewa Peralatan Cetak	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00
	* Belanja Sewa Peralatan Umum	1.336.688.500,00	1.308.465.000,00	97,89	657.282.000,00
	* Belanja Sewa Photo and Film Equipment	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	10.500.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	980.703.220,00	922.695.220,00	94,09	1.195.330.400,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	16.500.000,00	16.250.000,00	98,48	24.600.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	207.500.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	30.036.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	260.450.000,00	207.700.000,00	79,75	148.225.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Taman	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	3.400.000,00
	* Belanja Sewa Hotel	203.680.000,00	202.680.000,00	99,51	190.223.000,00
	* Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	* Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	492.573.220,00	488.565.220,00	99,19	541.346.400,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
9	Belanja Jasa Konsultansi	4.553.466.005,00	4.370.558.435,00	95,98	4.428.859.125,00
	* Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.465.008.320,00	3.426.457.030,00	98,89	3.033.208.380,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	210.000.000,00	207.792.000,00	98,95	273.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	118.880.000,00	116.097.000,00	97,66	157.287.250,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	265.000.000,00	263.403.000,00	99,40	14.199.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	592.900.220,00	583.433.500,00	98,40	824.211.560,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	318.104.000,00	316.732.500,00	99,57	836.455.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.173.618.100,00	1.169.855.850,00	99,68	407.856.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				
	- Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	342.736.000,00	342.226.000,00	99,85	274.759.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	62.770.000,00	61.345.880,00	97,73	146.103.340,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22.000.000,00	21.811.500,00	99,14	24.101.430,00
	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	60.000.000,00	59.155.800,00	98,59	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.000.000,00	97.380.300,00	98,36	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000,00	187.223.700,00	93,61	75.235.800,00
	* Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.088.457.685,00	944.101.405,00	86,74	1.395.650.745,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	437.957.685,00	371.121.805,00	84,74	277.678.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	270.000.000,00	192.534.600,00	71,31	594.211.450,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	299.500.000,00	299.445.000,00	99,98	296.104.800,00
	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	227.656.495,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	465.000.000,00	415.000.000,00	89,25	315.000.000,00
	* Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00
	* Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	115.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.115.082.000,00	1.091.628.000,00	97,90	967.384.500,00
	* Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	412.682.000,00	405.843.000,00	98,34	140.160.500,00
	* Belanja Sosialisasi	94.800.000,00	89.800.000,00	94,73	0,00
	* Belanja Bimbingan Teknis	105.600.000,00	105.600.000,00	100,00	427.160.000,00
	* Belanja Diklat Kepemimpinan	502.000.000,00	490.385.000,00	97,69	400.064.000,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	253.988.459,00	175.492.680,00	69,09	180.676.300,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.600.000,00	3.496.000,00	97,11	3.596.800,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	17.220.000,00	16.012.000,00	92,98	17.213.900,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	285.000,00	235.500,00	82,63	282.500,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.628.304,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	108.000.000,00	106.830.080,00	98,92	107.878.900,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.080.000,00	981.400,00	90,87	1.018.000,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00	467.700,00	86,61	520.000,00
	* Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	360.000,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
*	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	62.275.155,00	0,00	0,00	0,00
*	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.000.000,00	47.470.000,00	98,90	47.966.200,00
13	Belanja Pemeliharaan	12.545.425.229,00	11.938.036.803,00	95,16	6.503.946.252,00
*	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.244.216.460,00	1.241.280.000,00	99,76	49.582.000,00
	Belanja Pemeliharaan - Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.244.216.460,00	1.241.280.000,00	99,76	49.582.000,00
*	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.467.474.092,00	5.176.563.786,00	94,68	4.300.642.636,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00	12.746.650,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	32.634.000,00	32.634.000,00	100,00	66.530.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	227.077.342,00	223.001.475,00	98,21	59.908.122,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	3.232.317.500,00	3.031.408.876,00	93,78	2.708.538.474,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Perorangan				
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	70.500.000,00	62.468.178,00	88,61	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.200.000,00	19.060.527,00	75,64	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untu k Penumpang	20.240.000,00	20.240.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	30.000.000,00	22.444.000,00	74,81	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	109.252.500,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	74.997.150,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat	0,00	0,00	0,00	45.850.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Angkutan Darat Bermotor Lainnya				
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat - Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat - Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	272.000.000,00	262.060.000,00	96,35	73.950.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	56.000.000,00	55.506.000,00	99,12	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	283.670.000,00	271.505.290,00	95,71	180.849.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	22.604.200,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	430.380.000,00	425.983.600,00	98,98	269.562.300,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Komunikasi Radio SSB				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF	39.000.000,00	38.975.240,00	99,94	10.997.240,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	15.000.000,00	14.997.000,00	99,98	14.997.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4.745.250,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	651.860.000,00	619.429.600,00	95,02	558.860.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	* Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.341.411.758,00	5.104.343.017,00	95,56	2.152.821.616,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	4.829.011.758,00	4.643.999.771,00	96,17	1.907.588.116,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Kantor				
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- - Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	179.502.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- - Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	480.000.000,00	427.943.246,00	89,15	54.631.500,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
	* Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	492.322.919,00	415.850.000,00	84,47	0,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- - Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	243.102.744,00	166.630.000,00	68,54	0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- - Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	199.220.175,00	199.220.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	* Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	900.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	54.763.860.264,00	51.486.586.152,00	94,02	38.319.952.531,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.688.860.264,00	51.486.586.152,00	94,14	38.319.952.531,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.835.326.864,00	33.025.403.020,00	94,80	23.982.045.445,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	1.027.580.197,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.770.199.400,00	10.761.482.500,00	91,43	6.688.266.347,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.656.615.000,00	7.284.265.000,00	95,14	6.515.870.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	426.719.000,00	415.435.632,00	97,36	106.190.542,00
	* Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.998.457.900,00	2.917.431.258,78	97,30	4.430.545.200,00
	* Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.621.038.400,00	2.602.912.400,00	99,31	4.428.553.200,00
	- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.605.438.400,00	2.587.312.400,00	99,30	1.184.433.600,00
	- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	4.119.600,00
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	3.240.000.000,00
	* Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	377.419.500,00	314.518.858,78	83,33	1.992.000,00
	- Belanja Jasa yang	102.900.000,00	40.000.000,00	38,87	1.992.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
	Belanja Jasa yang - Diberikan kepada Masyarakat	274.519.500,00	274.518.858,78	100,00	0,00
16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	6.387.802,00
*	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	6.387.802,00
17	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
*	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18	Belanja Barang Dana BOS	16.287.111.051,00	16.085.406.650,51	98,76	15.832.004.171,00
*	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.287.111.051,00	16.085.406.650,51	98,76	15.832.004.171,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.533.006.565,00	9.394.654.141,00	98,55	0,00
*	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.533.006.565,00	9.394.654.141,00	98,55	0,00
Jumlah		287.103.412.292,00	267.851.012.668,25	93,29	209.804.746.008,00

5.1.2.1.3	Belanja Hibah	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u> 43.552.366.000,00	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u> 37.168.222.233,00	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u> 16.448.051.139,00
------------------	----------------------	--	---	---

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp43.552.366.000,00 dan direalisasikan senilai Rp37.168.222.233,00 atau 85,34%. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp16.448.051.139,00 maka realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp20.720.171.094,00 atau 125,97%.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
Peningkatan Belanja Hibah terjadi disebabkan antara lain Hibah Ke KPU, Bawaslu, KONI, Hibah untuk Mesjid dan Mushala se Kota Bima dan lain-lain
2. Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada:
 - a. KONI, Dewan Pendidikan, PGRI, KNPI Kota Bima dll berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor



- 188.45/744/420/XI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/5/900/I/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok dan anggota masyarakat Tahun Anggaran 2023
- b. DEKRANASDA Kota Bima berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/436/510/III/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Bima Tahun Anggaran 2023
 - c. PKK, GOW,DWP, LPA dan Forum PUSPA Maja Labo Dahu Kota Bima berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/165/475/II/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023
 - d. Masjid dan Mushala se Kota Bima, berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/318/400/XI/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada d. Masjid dan Mushala se Kota Bima Tahun Anggaran 2023
 - e. Dan seterusnya.
3. Pemberian Hibah kepada Partai Politik:
- a. Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Bima berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/74/300/I/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada a. Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota BiTahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	140.729.233,00	93,82	0,00
A	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	140.729.233,00	93,82	0,00
II	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.083.910.000,00	33.479.537.000,00	83,52	13.271.100.000,00
A	<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>9.364.810.000,00</i>	<i>2.693.941.000,00</i>	<i>28,77</i>	<i>1.640.000.000,00</i>
1	Dewan Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
2	PGRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
3	FPRB KOTA BIMA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100.000.000,00
4	TIM SIAGA BENCANA (FTSB) KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5	KONI	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
6	Perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesi Kota Bima	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ikatan Dokter Indonesia	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Lembaga Bantuan Hukum Ksatria Bima	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	30.000.000,00
9	Posbakumadin PA Bima	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	30.000.000,00
10	Karang Taruna Kota Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
12	Palang Merah Indonesia (PMI)	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
13	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5.649.810.000,00	1.124.525.000,00	19,90	0,00
14	FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE KOTA BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
15	HIMPAUDI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	2.550.000.000,00	449.416.000,00	17,62	0,00
17	IKATAN APOTEKER INDONESIA PC KOTA BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
18	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
19	YAYASAN MUSEUM SAMPARAJA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
B	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.860.000.000,00	7.810.000.000,00	99,36	825.000.000,00
1	YYS KARTIKA SARI SLB DWP KOBİ	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
2	LEGIUN VETERAN RI KOTA BIMA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
4	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5	Gerakan Pemuda ANSOR Kota Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
6	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
7	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bima	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	130.000.000,00
8	Pengurus Cabang Generasi Muda FKPPİ Kota Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
9	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BIMA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
10	PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
11	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLİK INDONESIA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
12	LEMBAGA PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13	MAJELIS ADAT KESULTANAN BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
14	Patelki Kota Bima	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	Kontrol Publik Kebijakan DPD Kota Bima	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
16	BNNK Kab Bima	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
17	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00
18	KORPRI	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
19	PERBAKIN KOTA BIMA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
20	KONI	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	100,00	0,00
C	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.859.100.000,00	22.975.596.000,00	100,51	10.806.100.000,00
1	Bantuan Hibah Kepada PKBM (DAK Non Fisik BOP Kesetaraan)	1.633.700.000,00	1.633.700.000,00	100,00	771.100.000,00
2	FOREIGN LANGUAGEINSTITUTE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Bantuan Hibah Kepada PAUD/TK (DAK Non Fisik BOP PAUD)	3.245.400.000,00	3.401.896.000,00	104,82	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bima	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5	Perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bima	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
8	DHARMAWANITA PERSATUAN KOTA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
9	FORUM PUSPA MAJA LABO DAHU KOTA	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
10	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)KOTA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
11	TIM PENGGERAKPEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA (PKK)	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00
12	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
13	FORUM PUSPA MAJA LABO DAHU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
14	IKATAN MAHASISWA KOTA BIMA-MALANG	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
15	Hibah Kepada Masjid dan Mushala se Kota Bima	12.635.000.000,00	12.620.000.000,00	99,88	0,00
16	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	150.000.000,00
17	BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM KOTA BIMA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
18	BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNNK) BIMA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
19	Badan Waqaf Indonesia (BWI)	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
20	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	50.000.000,00
21	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA KOTA BIMA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
22	FORUM KOMUNIKASI GEREJA KRISTEN	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
23	MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
24	MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA (MUI)	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	570.000.000,00
25	PENGURUS CABANG NADHLATUL ULAMA (NU)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
26	PENGURUS DAERAH NAHDLATUL WATHAN KOTA BIMA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
27	MUSLIMAT NAHDLATUL WATHAN DINIYAH ISLAMİYAH KOTA BIMA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
28	Hibah Kepada Pondok Pesantren di Kota Bima	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	0,00
29	RUMAH SINGGAH KERUKUNAN KELUARGA BIMA DOMPU KUPANG	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
30	Masyarakat Ekonomi Syariah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
31	BKMM-DMI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	PONDOK RUMAH PENGHAFAL QUR'AN (RPQ) AS-SUNNAH	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
33	PONDOK PESANTREN IMAM AHMAD	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
34	MESJID DAN MUSHALA SE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	6.350.000.000,00
35	IKATAN ALUMNI MAHASISWA KOTA BIMA MATARAM	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
36	DEKRANASDA	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
37	Penguatan Kelembagaan Organisasi Annisa Lintas Nusantara (ALIN) Kota Bima	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
III	Belanja Hibah Dana BOS	2.340.600.000,00	2.570.100.000,00	109,81	2.199.095.139,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

NO.	BELANJA HIBAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BOS SD SWASTA	1.247.400.000,00	1.476.900.000,00	118,40	0,00
2	BOS SMP SWASTA	1.093.200.000,00	1.093.200.000,00	100,00	0,00
3	SD AL IKHWAN SALAMA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00
4	SD AL-ISLAM SUNTU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	102.095.500,00
5	SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SALAMA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	154.483.500,00
6	SD IT AL HIKMAH MELAYU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	151.762.539,00
7	SD MUHAMMADIYAH GILIPANDA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	109.781.000,00
8	SDIT IMAM SYAFII KEDO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	228.600.000,00
9	SDIT INSAN KAMIL SANTI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	351.583.360,00
10	SDIT LASKAR PELANGI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
11	SDIT ULUL ALBAAB KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	45.547.000,00
12	SMP AL IKHWAN	0,00	0,00	0,00	15.238.000,00
13	SMP DARUL FURQAN KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	122.100.000,00
14	SMP ISLAM NURUL IHSAN	0,00	0,00	0,00	71.138.800,00
15	SMP ISLAM TAHFIDZ QUR AN	0,00	0,00	0,00	169.150.000,00
16	SMP IT IMAM SYAFIY	0,00	0,00	0,00	338.897.900,00
17	SMP MUHAMMADIYAH KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	89.701.000,00
18	SMPIT INSAN KAMIL KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	127.596.540,00
19	SMPIT LASKAR PELANGI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	69.220.000,00
IV	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00	977.856.000,00	100,00	977.856.000,00
1	Partai Amanat Nasional	146.448.000,00	146.448.000,00	100,00	146.448.000,00
2	Partai Bulan Bintang	96.528.000,00	96.528.000,00	100,00	96.528.000,00
3	Partai Demokrat	95.424.000,00	95.424.000,00	100,00	95.424.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	89.436.000,00	89.436.000,00	100,00	89.436.000,00
5	Partai Golongan Karya	164.160.000,00	164.160.000,00	100,00	164.160.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	64.104.000,00	64.104.000,00	100,00	64.104.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	67.812.000,00	67.812.000,00	100,00	67.812.000,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	59.064.000,00	59.064.000,00	100,00	59.064.000,00
9	Partai NasDem	69.312.000,00	69.312.000,00	100,00	69.312.000,00
10	Partai PERINDO	49.224.000,00	49.224.000,00	100,00	49.224.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	76.344.000,00	76.344.000,00	100,00	76.344.000,00
	TOTAL	43.552.366.000,00	37.168.222.233,00	85,34	16.448.051.139,00

5.1.2.1.4 **Belanja Bantuan Sosial** Anggaran 2023 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) Realisasi 2022 (Rp)
7.819.136.522,00 3.483.300.000,00 6.507.250.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja



Bantuan Sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp7.819.136.522,00 dan direalisasi senilai Rp3.483.300.000,00 atau 44,55%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 Rp6.507.250.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp3.023.950.000,00 atau 46,47%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO.	Belanja Bantuan Sosial	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.869.136.522,00	1.583.250.000,00	26,98	92.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.950.000.000,00	1.900.050.000,00	97,44	5.199.750.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.215.000.000,00
Jumlah		7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55	6.507.250.000,00

Berdasarkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.483.300.000,00 sudah termasuk realisasi Belanja Bantuan Pendidikan, Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Bagi Korban Bencana, Bantuan Orang Terlantar dan Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan pada 3 OPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2023

NO.	SKPD/ KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Pendidikan)	113.000.000,00	79.000.000,00	69,91
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Bagi Korban Bencana)	5.741.136.522,00	1.500.000.000,00	26,13
3	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Orang Terlantar)	15.000.000,00	4.250.000,00	28,33
4	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga (Bantuan Langsung Tunai)	1.950.000.000,00	1.900.050.000,00	97,44
TOTAL			7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55



Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan Realisasi belanja bantuan sosial untuk dukungan penanganan inflasi berupa Bantuan Langsung Tunai pada pada Dinas Sosial Kota Bima
- b. Penurunan Realisasi belanja Bantuan Sosial disebabkan karena tidak dilaksanakan kegiatan dukungan masyarakat yang berdampak penataan bantaran sungai yang belum terbit pedoman teknis pelaksanaannya.

5.1.2.2	Belanja Modal	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
		154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	153.809.784.287,73

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp154.687.517.460,00 dan terealisasi senilai Rp147.479.520.226,00 atau 95,34%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp153.809.784.287,73 maka realisasi Belanja Modal Tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp6.330.264.061,73 atau 4,12%.

Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Tanah	1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	89,38	3.035.329.060,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.256.905.058,00	35.594.628.839,00	95,54	45.650.535.702,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15	34.349.972.004,73
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80	69.040.535.395,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02	1.733.412.126,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	95,34	153.809.784.287,73

5.1.2.2.1	Belanja Tanah	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
		1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	3.035.329.060,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.224.391.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.094.391.000,00 atau 89,38%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.035.329.060,00 maka realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 mengalami Penurunan senilai Rp1.940.938.060,00 atau 63,94%. Realisasi Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.



Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	1.024.391.000,00	894.391.000,00	87,31	0,00
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.024.391.000,00	894.391.000,00	87,31	0,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.035.329.060,00
	Belanja Modal Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	3.035.329.060,00
	Jumlah	1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	89,38	3.035.329.060,00

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya karena reklasifikasi pengandaan tanah ke Belanja Bantuan Sosial untuk dukungan penanganan Masyarakat yang terdampak penataan Sungai.

5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		37.256.905.058,00	35.594.628.839,00	45.650.535.702,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp37.256.905.058,00 dan terealisasi senilai Rp35.594.628.839,00 atau 95,54%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp45.650.535.702,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami Penurunan senilai Rp10.055.906.863,00 atau 22,03%.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin OPD Tahun 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.966.085.430,00	1.806.770.330,00	91,90
2	Dinas Kesehatan	4.703.298.618,00	4.659.119.236,00	99,06
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.560.300,00	169.693.000,00	96,66
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	142.471.300,00	142.059.600,00	99,71
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	145.096.500,00	144.075.000,00	99,30
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.500.000,00	161.757.000,00	98,93



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	456.326.700,00	452.433.330,00	99,15
8	Dinas Sosial	58.924.000,00	58.174.000,00	98,73
9	Dinas Tenaga Kerja	152.903.500,00	152.838.000,00	99,96
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	310.797.500,00	297.968.802,00	95,87
11	Dinas Ketahanan Pangan	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.125.739.000,00	6.051.254.000,00	98,78
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.569.641.000,00	1.568.426.000,00	99,92
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.589.307.000,00	1.433.594.000,00	90,20
15	Dinas Perhubungan	159.120.000,00	158.140.000,00	99,38
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.278.595.000,00	1.276.528.686,00	99,84
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	129.100.000,00	128.538.000,00	99,56
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.630.000,00	38.823.500,00	93,26
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	29.750.000,00	29.750.000,00	100,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	678.511.500,00	667.090.200,00	98,32
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	970.000.000,00	967.820.000,00	99,78
22	Dinas Pertanian	155.995.000,00	155.621.730,00	99,76
23	Sekretariat Daerah	6.380.821.410,00	5.460.768.345,00	85,58
24	Sekretariat DPRD	5.945.500,00	2.783.000,00	46,81
25	Kecamatan Rasanae Barat	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00
26	Kecamatan Rasanae Timur	268.677.800,00	268.677.800,00	100,00
27	Kecamatan Asakota	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
28	Kecamatan Mpunda	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33
29	Kecamatan Raba	67.516.000,00	67.516.000,00	100,00
30	Inspektorat	58.000.000,00	57.939.780,00	99,90
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.685.200,00	313.034.425,00	97,61
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	577.774.600,00	560.160.751,00	96,95
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	667.565.000,00	662.199.000,00	99,20
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	846.933.500,00	837.163.500,00	98,85
35	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	6.903.333.700,00	6.689.111.824,00	96,90
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.600.000,00	35.600.000,00	100,00
JUMLAH		37.256.905.058,00	35.594.628.839,00	95,54

Sebab meningkatnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Peralatan dan mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya pengadaan kendaraan dinas roda 4, Kendaraan roda 2 untuk penyuluh KB dan Motor Sampah 3 roda.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Alat Besar Darat	639.125.000,00	639.004.400,00	99,98	0,00
	- Belanja Modal Mesin Proses	639.125.000,00	639.004.400,00	99,98	0,00
2	Alat-alat Bantu	368.480.000,00	242.600.000,00	65,84	830.218.000,00
	- Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	201.470.000,00
	- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	368.480.000,00	242.600.000,00	65,84	628.748.000,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	12.963.310.000,00	12.077.293.312,00	93,17	2.324.259.795,00
	- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.890.164.800,00	2.770.230.751,00	95,85	64.437.000,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000,00	541.300.000,00	98,42	0,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	730.650.000,00	705.827.561,00	96,60	1.200.612.795,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	232.000.000,00	232.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.560.495.200,00	7.827.935.000,00	91,44	1.059.210.000,00
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5	Alat Angkut Apung Bermotor	108.000.000,00	107.800.000,00	99,81	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	190.000.000,00	188.500.000,00	99,21	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	190.000.000,00	188.500.000,00	99,21	0,00
7	Alat Bengkel Bermesin	2.900.000,00	2.870.000,00	98,97	50.212.200,00
	- Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.900.000,00	2.870.000,00	98,97	50.212.200,00
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
9	Peralatan Kantor	957.813.000,00	946.051.000,00	98,77	300.354.300,00
	- Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	957.813.000,00	946.051.000,00	98,77	300.354.300,00
10	Alat Rumah Tangga	1.654.846.500,00	1.558.122.725,00	94,16	566.658.200,00
	- Belanja Modal Mebel	852.280.000,00	768.060.000,00	90,12	99.800.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Pendingin	426.887.000,00	424.686.200,00	99,48	178.591.000,00
	- Belanja Modal Alat Dapur	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	5.741.000,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	323.969.000,00	314.606.025,00	97,11	175.607.500,00
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	50.510.500,00	49.570.500,00	98,14	106.918.700,00
11	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.226.839.200,00	1.202.075.375,00	98,02	523.035.530,00
	- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	481.759.500,00	479.141.600,00	99,46	95.011.000,00
	- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	21.999.000,00
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	379.100.200,00	369.240.300,00	97,40	198.898.110,00
	- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	169.852.000,00	167.307.975,00	98,50	96.871.300,00
	- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	22.580.000,00
	- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	184.127.500,00	174.385.500,00	94,71	87.676.120,00
12	Alat-Alat Studio	466.899.000,00	462.290.125,00	99,01	33.950.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.954.000,00	37.914.000,00	99,89	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Cetak	20.000.000,00	16.980.000,00	84,90	0,00
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	408.945.000,00	407.396.125,00	99,62	33.950.000,00
13	Alat-Alat Komunikasi	250.815.070,00	247.441.900,00	98,66	108.518.532,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	100.653.532,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	66.898.870,00	66.891.070,00	99,99	0,00
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	183.916.200,00	180.550.830,00	98,17	7.865.000,00
14	Alat-Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	3.839.000.000,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	3.839.000.000,00
15	Alat Kesehatan Umum	11.334.073.568,00	11.066.971.110,00	97,64	24.772.034.118,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.334.073.568,00	11.066.971.110,00	97,64	24.772.034.118,00
16	Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
17	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.039.700.000,00	794.446.800,00	76,41	8.422.944.000,00
	- Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	289.700.000,00	44.656.800,00	15,41	3.948.372.000,00
	- Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	750.000.000,00	749.790.000,00	99,97	4.474.572.000,00
18	Alat Laboratorium Hydrodinamica	1.400.000.000,00	1.374.500.000,00	98,18	464.257.500,00
	- Belanja Modal Peralatan Umum	1.400.000.000,00	1.374.500.000,00	98,18	464.257.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Peralatan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
19	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	31.100.000,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00	31.100.000,00
20	Komputer Unit	3.121.302.790,00	3.076.779.212,00	98,57	1.844.099.446,00
	- Belanja Modal Komputer Jaringan	258.029.740,00	256.213.000,00	99,30	146.252.226,00
	- Belanja Modal Personal Computer	2.154.128.550,00	2.128.414.960,00	98,81	1.374.225.670,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	709.144.500,00	692.151.252,00	97,60	323.621.550,00
21	Peralatan Komputer	1.348.060.930,00	1.423.742.880,00	105,61	1.432.684.081,00
	- Belanja Modal Peralatan Mainframe	5.945.500,00	2.783.000,00	46,81	11.891.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	167.430.000,00	160.961.350,00	96,14	158.787.200,00
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.166.435.430,00	1.251.748.530,00	107,31	1.262.005.881,00
22	Alat Pelindung	64.740.000,00	64.740.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Baju Pengaman	64.740.000,00	64.740.000,00	100,00	0,00
23	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	85.000.000,00	84.400.000,00	99,29	91.660.000,00
	- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	85.000.000,00	84.400.000,00	99,29	91.660.000,00
	Jumlah	37.256.905.058,00	35.594.628.839,00	95,54	45.650.535.702,00

5.1.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	34.349.972.004,73

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp50.543.932.600,00 dan terealisasi senilai Rp49.102.960.642,00 atau 97,15%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp34.349.972.004,73 maka realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp14.752.988.635,27 atau 42,95%.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 20XX dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya :

Peningkatan Belanja Modal Bangunan dan Gedung karena adanya Pembangunan gedung pada RSUD, Sekolah dan gedung pemerintah pada Kantor Camat RasanaE Timur.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung OPD Tahun 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17.467.120.800,00	17.111.596.532,00	97,96
2	Dinas Kesehatan	409.640.000,00	401.869.790,00	98,10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.417.271.300,00	13.383.932.600,00	99,75
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	256.610.000,00	254.730.500,00	99,27
5	Dinas Tenaga Kerja	157.950.000,00	157.388.000,00	99,64
6	Dinas Ketahanan Pangan	214.390.000,00	212.427.347,00	99,08
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.608.770.000,00	1.601.325.939,00	99,54
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.290.000,00	30.037.000,00	99,16
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	570.000.000,00	517.220.900,00	90,74
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.520.000,00	197.195.440,00	99,33
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	300.000.000,00	298.113.400,00	99,37
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	310.875.000,00	299.797.632,00	96,44
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.567.615.000,00	11.563.579.000,00	99,97
14	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	196.560.679,00	98,28
15	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	198.603.145,00	99,30
16	Kecamatan Asakota	150.000.000,00	149.225.000,00	99,48
17	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	3.484.880.500,00	2.529.357.736,00	72,58
JUMLAH		50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15

Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.993.280.099,00	44.562.254.214,00	96,89	33.537.243.104,73
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.158.139.023,00	9.846.877.663,00	88,25	21.355.760.700,37
	- Belanja Modal Bangunan Gudang	2.551.467.000,00	2.500.616.000,00	98,01	444.548.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.836.994.766,20
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	198.890.000,00	198.890.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	812.450.000,00	812.245.000,00	99,97	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	510.010.000,00	510.010.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	198.890.000,00	198.890.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	310.875.000,00	299.797.632,00	96,44	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Parkir	230.290.000,00	228.640.145,00	99,28	0,00
	- Belanja Modal Taman	23.848.579.776,00	23.824.150.474,00	99,90	8.899.939.638,16
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.973.689.300,00	5.943.137.300,00	99,49	0,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.287.860.000,00	1.287.860.000,00	100,00	812.728.900,00
	- Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.287.860.000,00	1.287.860.000,00	100,00	812.728.900,00
3	Tugu/Tanda Batas	3.262.792.501,00	3.252.846.426,00	99,70	0,00
	- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	200.000.000,00	196.560.679,00	98,28	0,00
	- Belanja Modal Pagar	2.992.792.501,00	2.987.354.747,00	99,82	0,00
	-Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	70.000.000,00	68.931.000,00	98,47	0,00
	Jumlah	50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15	34.349.972.004,73

5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	69.040.535.395,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp63.867.230.083,00 dan terealisasi senilai Rp59.909.921.028,00 atau 93,80%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp69.040.535.395,00 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 mengalami Penurunan senilai Rp9.130.614.367,00 atau 13,23%.

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD Tahun 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.767.230.083,00	59.810.115.758,00	93,79
2	Dinas Pertanian	100.000.000,00	99.805.270,00	99,81
	JUMLAH	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Jalan/Konstruksi Jalan	40.730.988.583,00	38.288.362.881,00	94,00	39.135.337.650,00
	- Belanja Modal Jalan Kota	29.037.942.883,00	27.101.302.541,00	93,33	30.516.492.150,00
	- Belanja Modal Jalan Desa	11.593.045.700,00	11.087.255.070,00	95,64	8.218.845.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Jalan Lainnya	100.000.000,00	99.805.270,00	99,81	400.000.000,00
2	Jembatan	1.950.061.000,00	1.755.636.236,00	90,03	3.720.567.000,00
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	3.371.817.000,00
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.950.061.000,00	1.755.636.236,00	90,03	348.750.000,00
3	Bangunan Air Irigasi	4.260.758.000,00	4.187.475.700,00	98,28	911.175.939,00
	- Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.358.522.000,00	1.347.930.000,00	99,22	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.902.236.000,00	2.839.545.700,00	97,84	911.175.939,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	4.269.196.500,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	4.069.196.500,00
5	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.276.442.500,00
	- Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	1.276.442.500,00
6	Bangunan Air Bersih/Baku	7.546.582.000,00	6.414.638.711,00	85,00	5.193.338.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	7.546.582.000,00	6.414.638.711,00	85,00	5.193.338.000,00
7	Bangunan Air Kotor	9.378.840.500,00	9.263.807.500,00	98,77	7.593.002.146,00
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.612.869.500,00	7.514.741.200,00	98,71	5.024.912.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.765.971.000,00	1.749.066.300,00	99,04	2.372.090.146,00
8	Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	1.826.200.000,00
	- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.826.200.000,00
9	Instalasi Gardu Induk Listrik	0,00	0,00	0,00	89.700.000,00
	- Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk	0,00	0,00	0,00	89.700.000,00
10	Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	98.130.660,00
	- Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	98.130.660,00
11	Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
	- Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
12	Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	4.886.945.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	4.886.945.000,00
	Jumlah	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80	69.040.535.395,00

Sebab menurunnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penurunan alokasi DAK Fisik bidang Jalan, bidang Air minum dan bidang Irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	1.733.412.126,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.775.058.719,00 dan terealisasi senilai Rp1.757.618.719,00 atau 99,02%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.733.412.126,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp24.206.593,00 atau 1,40%.

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya OPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.326.103.719,00	1.360.777.419,00	102,61
2	Dinas Ketahanan Pangan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.755.000,00	27.455.850,00	98,92
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	261.250.000,00	259.441.000,00	99,31
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	49.944.450,00	99,89
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	49.950.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.587.353.719,00	1.620.218.419,00	102,07	1.648.425.926,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Buku Umum	461.250.000,00	510.895.600,00	110,76	332.828.000,00
	- Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	49.984.000,00
	- Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.126.103.719,00	1.109.322.819,00	98,51	1.265.613.926,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	49.999.000,00
	- Belanja Modal Audio Visual	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	49.999.000,00
3	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	167.705.000,00	117.420.300,00	70,02	34.987.200,00
	- Belanja Modal Software	167.705.000,00	117.420.300,00	70,02	34.987.200,00
	Jumlah	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02	1.733.412.126,00

5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp20.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp20.000.000,00 atau 100%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal yang terdapat pada Sekretariat Daerah berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software.

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	945.418.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tak Terduga tahun 2023 dianggarkan senilai Rp3.929.828.347,00 dan terealisasi senilai Rp1.862.720.872,00 atau 47,40%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp945.418.000,00 maka realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan senilai Rp917.302.872,00 atau 97,03%.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya, Peningkatan Belanja Tidak terduga disebabkan adanya dampak bencana alam dan bencana sosial yang perlu penanganan segera.

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 terdiri dari :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023

NO	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
I	PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN MENDESAK				444.271.250,00
1	24/03/2023	962/TU NIHIL/KOBI/2023	DINAS KESEHATAN KOTA BIMA	BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN MENDESAK DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) CHIKUNGUNYA KEPADA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA	444.271.250,00
II	PENANGANAN KEPERLUAN PERCEPATAN PENATAAN SEMPADAN				454.971.622,00
1	4/10/2023	5548/TU NIHIL/KOBI/2023	BPKAD Kota Bima	BELANJA TAK TERDUGA PENANGANAN KEPERLUAN PERCEPATAN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI PADOLO DI KOTA BIMA TAHUN 2023	454.971.622,00
III	PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR				282.978.000,00
1	27/06/2023	3188/TU NIHIL/KOBI/2023	BPBD KOTA BIMA	BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR TAHUN 2023 KEPADA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA	282.978.000,00
IV	PEMBERIAN PENGOBATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT				680.500.000,00
TOTAL PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023					1.862.720.872,00

Pemakaian Belanja Tidak terduga tahun 2023 dapat direklasifikasi ke dalam belanja sebagai berikut :

RINCIAN REKLASIFIKASI BEBAN TIDAK TERDUGA KE BELANJA TAHUN 2023			
NO	Kode Rekening Beban	Uraian	Jumlah
1	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN MENDESAK DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) CHIKUNGUNYA KEPADA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA TA 2023		
	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.1.1.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	55.800.000,00
	5.1.02.1.1.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	151.471.250,00
	5.1.02.1.1.23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.170.000,00
	5.1.02.1.1.56	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.480.000,00
	5.1.02.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.350.000,00
	5.1.02.2.1.52	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	124.000.000,00
	5.1.02.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	61.500.000,00
	5.1.02.4.1.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00
	Jumlah		444.271.250,00
2	BEBAN TAK TERDUGA PENANGANAN KEPERLUAN PERCEPATAN PENATAAN SEMPADAN SUNGAI PADOLO DI KOTA BIMA TAHUN 2023 KEPADA BPBD KOTA BIMA		
	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

RINCIAN REKLASIFIKASI BEBAN TIDAK TERDUGA KE BELANJA TAHUN 2023			
NO	Kode Rekening Beban	Uraian	Jumlah
	5.1.02.1.1.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.695.956,00
	5.1.02.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00
	5.1.02.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.137.000,00
	5.1.02.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.950.000,00
	5.1.02.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.145.000,00
	5.1.02.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.875.000,00
	5.1.02.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	308.168.666,00
	5.1.02.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.200.000,00
	5.1.02.2.4.14	Belanja Sewa Floating Excavator	26.200.000,00
	5.1.02.4.1.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.500.000,00
	Jumlah		454.971.622,00
3	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR TAHUN 2023 KEPADA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA		
	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.1.1.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.843.000,00
	5.1.02.1.1.05	Belanja Bahan-Bahan Baku	65.826.000,00
	5.1.02.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	94.500.000,00
	5.1.06.1.1.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	106.809.000,00
	Jumlah		282.978.000,00
4	BEBAN TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBERIAN PENGOBATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT		
	5.1.2.5.1.7	Belanja Santunan Kematian	680.500.000,00
	Jumlah		680.500.000,00
	Jumlah Jumlah Relaksasi Beban Tidak Terduga		1.862.720.872,00

5.1.2.4 Belanja Transfer	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
	0,00	0,00	0,00

Belanja Transfer Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 Rp0,00.

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
	0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dianggarkan senilai 0,00 dan terealisasi senilai 0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Rp0,00.



	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2022 Rp0,00.

5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp76.583.026.630,00 dan terealisasi senilai Rp76.592.231.292,67 atau 100,01%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp21.967.826.874,18 maka realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp54.620.846.797,49 atau 248,68%.

	<u>Anggaran 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA	76.583.026.630,00	76.592.231.292,67	21.967.826.874,18

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 terdapat pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu senilai Rp. 76.592.231.292,67.

Tabel 5.1.44
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.583.026.630,00	76.583.026.629,67	100,00	21.967.826.874,18
*	Penghematan Belanja	76.574.467.924,00	76.574.467.924,16	100,00	21.962.179.832,18
	- Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.699.162.241,00	6.699.162.241,16	100,00	4.462.179.832,18
	- Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	41.868.925.733,00	41.868.925.733,00	100,00	10.000.000.000,00
	- Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
	- Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
	- Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	- Penghematan Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	1.504.374.350,00	1.504.374.350,00	100,00	0,00
	- Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.502.005.600,00	10.502.005.600,00	100,00	500.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.1

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
*	Sisa Belanja Lainnya	8.558.706,00	8.558.705,51	100,00	0,00
	- Sisa Dana BOS	664.162,00	664.161,51	100,00	0,00
	- Sisa Dana Kapitasi	7.894.544,00	7.894.544,00	100,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek berupa Dana Bergulir	0,00	9.204.963,00	0,00	5.647.042,00
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	9.204.963,00	0,00	5.647.042,00
	Jumlah Penerimaan	76.583.026.630,00	76.592.231.592,67	100,01	21.967.826.874,18
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	74.583.026.630,00	74.592.231.592,67	100,01	19.967.826.874,18

5.1.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		0,00	9.204.963,00	5.647.042,00

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp9.204.963,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.647.042,00 maka realisasi Penerimaan Pembiayaan Lainnya Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp3.557.921,00 atau 63,01% atas penerimaan kembali dana bergulir.

5.1.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.000.000.000,00, tidak terdapat peningkatan/penurunan pada Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Penyertaan Modal Kota Bima Tahun 2023 Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 pada PT.Bank NTB Syariah sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/824/900/XII/2023.



5.1.4	SiLPA Tahun Berjalan	Realisasi 2023 (Rp) 17.799.857.573,12	Realisasi 2022 (Rp) 76.583.026.629,67
-------	-----------------------------	--	--

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk SiLPA Tahun TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp 17.799.857.573,12 dan Tahun 2022 senilai Rp76.583.026.629,67 terdiri dari :

Tabel 5.1.45
Nilai SiLPA Tahun Berjalan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Daerah	14.428.033.676,32	71.620.257.944,90
2	Kas Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan	139.665.450,00	7.894.544,00
3	Kas Dana BOS	0,00	664.161,51
4	Kas Bendahara Penerimaan	88.063.700,00	0,00
5	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di BLUD RSUD	3.144.094.746,80	4.954.209.979,26
5	Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		17.799.857.573,12	76.583.026.629,67



5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kota Bima (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67
5	Subtotal (3 + 4)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	2023 (Rp) <u>76.583.026.629,67</u>	2022 (Rp) <u>21.962.179.832,18</u>
--------------	----------------------------------	--	--

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA pada Pemerintah Kota Bima tahun anggaran sebelumnya, yaitu senilai Rp76.583.026.629,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp21.962.179.832,18 maka Saldo Anggaran Lebih Awal mengalami peningkatan senilai Rp54.620.846.797,49 atau 248,70%.

5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	2023 (Rp) <u>76.583.026.629,67</u>	2022 (Rp) <u>21.962.179.832,18</u>
--------------	---	--	--

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL merupakan SiLPA pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp76.583.026.629,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp21.962.179.832,18 maka Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan mengalami peningkatan senilai Rp54.620.846.797,49 atau 248,70%.



		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Pemerintah Kota Bima tahun 2023 senilai Rp17.799.857.573,12 Jika dibandingkan tahun 2022 Rp76.583.026.629,67 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan senilai Rp58.783.169.056,55 atau 73,76 %. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 dan 2022

NO	URAIAN	2023	2022
1	Pendapatan	773.124.623.905,70	805.811.256.060,22
2	Belanja dan Transfer	829.916.997.925,25	749.196.056.304,73
3	Surplus/Defisit	(56.792.374.019,55)	56.615.199.755,49
4	Penerimaan Pembiayaan	76.592.231.592,67	21.967.826.874,18
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	74.592.231.592,67	19.967.826.874,18
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai (Rp0,00) sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Pemerintah Kota Bima tahun 2023 senilai Rp17.799.857.573,12 Jika dibandingkan tahun 2022 Rp76.583.026.629,67 maka Saldo Anggaran Lebih Akhir mengalami penurunan senilai Rp58.783.169.059,55 atau 76,76%, sebagai berikut.



Tabel 5.2.3
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67
5	Subtotal (3 + 4)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.3* di atas.



5.3 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Kota Bima mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Laporan Neraca Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
1	Aset	2.227.447.515.825,72	2.101.200.364.710,09
2	Kewajiban	8.895.417.511,87	739.857.783,51
3	Ekuitas	2.218.552.098.313,85	2.100.460.506.926,58

5.3.1	Aset	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		2.227.447.515.825,72	2.101.200.364.710,09

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Bima terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka panjang, Aset Tetap serta Aset lainnya.

Saldo Aset pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp2.227.447.515.825,72 mengalami peningkatan senilai Rp126.247.151.115,63 atau 6,01% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.101.200.364.710,09.

Perbandingan aset Pemerintah Kota Bima periode tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Rincian Aset Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
1	Aset Lancar	121.892.245.057,06	105.490.536.949,40
2	Investasi Jangka Panjang	18.137.504.969,22	23.023.125.259,72
3	Aset Tetap	2.023.919.402.348,75	1.947.211.575.128,24
4	Propertis Investasi	10.483.729.499,55	0,00
5	Aset Lainnya	53.014.633.951,14	25.475.127.372,73
Jumlah		2.227.447.515.825,72	2.101.200.364.710,09

Adapun akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2023 adalah sebagai berikut.



5.3.1.1	Aset Lancar	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		121.892.245.057,06	105.490.536.949,40

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Deviden, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri atas Kas, Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.3
Rincian Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Kas	17.811.367.573,12	76.613.516.008,67
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	94.423.381.910,04	27.651.468.502,54
4	Penyisihan Piutang	(8.686.677.242,40)	(11.235.490.023,86)
5	Beban Dibayar dimuka	13.750.000,00	274.770.484,00
6	Persediaan	18.330.422.816,30	12.186.271.978,05
Total		121.892.245.057,06	105.490.536.949,40

Saldo Aset Lancar pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp121.892.245.057,06 mengalami kenaikan senilai Rp16.401.708.107,66 atau 15,55% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp105.490.536.949,40.

5.3.1.1.1	Kas dan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Setara Kas	17.811.367.573,12	76.613.516.008,67

Saldo Kas pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp17.811.367.573,12 mengalami penurunan senilai Rp58.802.148.435,55 atau 76,75% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp76.613.516.008,67.

Saldo Kas per 31 Desember 2023 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP, Kas di Kas Dana BOS, Kas Lainnya, dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.4
Rincian Kas Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	14.428.033.676,32	71.620.257.944,90



No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	88.063.700,00	0,00
3	Kas di BLUD	3.144.094.746,80	4.954.209.979,26
4	Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	139.665.450,00	7.894.544,00
5	Kas di Kas Dana BOS	0,00	664.161,51
6	Kas Lainnya	11.510.000,00	30.489.379,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah		17.811.367.573,12	76.613.516.008,67

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31-12-2023	31-12-2022
	(Rp)	(Rp)
	14.428.033.676,32	71.620.257.944,90

Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp14.428.033.676,32 mengalami penurunan senilai Rp57.192.224.268,58 atau 79,85% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp71.620.257.944,90.

Penjelasan terkait Pencairan Deposito senilai Rp76.000.000.000,00 Tahun 2023 :

- Pada PT Bank NTB Syariah di tahun 2022 memiliki jumlah Deposito senilai Rp35.000.000.000,00. Di tahun 2023 terdapat Penempatan Deposito senilai Rp22.000.000.000,00 dan telah di lakukan Pencairan di tahun 2023 senilai Rp57.000.000.000,00.
- Pada PT Bank BNI di Tahun 2022 memiliki Deposito senilai Rp5.000.000.000,00. Di tahun 2023 terdapat Penempatan Deposito senilai Rp7.000.000.000,00 dan telah di lakukan pencairan di tahun 2023 senilai Rp12.000.000.000,00.
- Pada PT Bank BRI di Tahun 2022 memiliki Deposito senilai Rp4.000.000.000,00. Di tahun 2023 terdapat Penempatan Deposito senilai Rp3.000.000.000,00 dan telah di lakukan pencairan di tahun 2023 senilai Rp7.000.000.000,00.

Saldo Kas di Kas Daerah 31 Desember 2023 senilai Rp14.428.033.676,32 terdiri dari:

Tabel 5.3.5
Rincian Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
A.	PT Bank NTB Syariah		
1	Rekening Giro Nomor 005.21.00102.02-5	14.428.033.676,32	27.620.257.944,90
2	Deposito	0,00	35.000.000.000,00
Jumlah		14.428.033.676,32	62.620.257.944,90
B.	PT Bank BNI		



No	Uraian	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
1	Deposito	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah		0,00	5.000.000.000,00
C.	PT Bank BRI		
1	Deposito	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah		0,00	4.000.000.000,00
Total		14.428.033.676,32	71.620.257.944,90

Pemerintah Kota Bima menempatkan dana pada Rekening Deposito yang bersifat *on call* yang dapat diartikan sebagai simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai dengan 30 hari atau satu bulan sehingga dapat dicairkan sewaktu-waktu.

5.3.1.1.1.2	Kas di Kas Bendahara	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 tidak mengalami perubahan di bandingkan tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.1.3	Kas di Kas Bendahara	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	Penerimaan	88.063.700,00	0,00

Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima menyatakan bahwa apabila masih ada kas di Bendahara Penerimaan belum disetorkan ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Kas Bendahara Penerimaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp88.063.700,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00. Kas di Bendahara penerimaan Tahun 2023 telah di setorkan di tahun 2024 yang terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi atas pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan senilai Rp86.713.700,00. Sampai dengan 31 Desember 2023, uang Retribusi khusus NSD belum disetorkan oleh juru pungut ke Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan.
- Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan senilai Rp1.350.000,00, belum di setorkan oleh bendahara penerimaan di sebabkan belum terpenuhinya jumlah setoran bulanan dari penyewa.



5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
	3.144.094.746,80	4.954.209.979,26

Saldo Kas di BLUD RSUD Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp3.144.094.746,80 yang terdiri dari Saldo RSUD Rp3.144.094.746,80 termasuk di dalamnya Pendapatan Jasa Giro RSUD BLUD di bendahara penerimaan sebesar Rp16.761.701,54 dan terdapat pendapatan BLUD RSUD senilai Rp6.599.000,00.

5.3.1.1.1.5 Kas di Kas Dana BOS	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
	0,00	664.161,51

Saldo Kas di Kas Dana BOS pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp664.161,51 atau 100,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp664.161,51. Saldo Kas Dana Bos sebesar Rp663.962,00 disetorkan ke Kas Daerah disebabkan SDN 54 dimerger ke SDN 25 melayu dan SDN 43 dimerger ke SDN 28 Santi . sedangkan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 senilai Rp664.161,51 dengan rincian:

Tabel 5.3.6
Kas Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

Kas Dana BOS	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
Kas Dana BOS	0,00	664.161,51

Rincian saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank	Bunga Bank	Saldo 31 des/12/2023
1	2	4	5	6	7
1	SD NEGERI 1 MELAYU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SD NEGERI 2 SUNTU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SD NEGERI 3 JATIWANGI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SD NEGERI 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SD NEGERI 6 KODO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SD NEGERI 7 KUMBE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SD NEGERI 8 PENANAE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SD NEGERI 10 PENATOI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SD NEGERI 11 MANGGEMACI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SD NEGERI 12 SARAE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank	Bunga Bank	Saldo 31 des/12/2023
11	SD NEGERI 13 KOLO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SD NEGERI 14 SADIA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SD NEGERI 15 NTOBO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SD NEGERI 16 SALAMA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SD NEGERI 17 PANE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SD NEGERI 18 DODU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SD NEGERI 19 RABANGODU UTARA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SD NEGERI 20 RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SD NEGERI 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SD NEGERI 22 JATIBARU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SD NEGERI 24 RABANGODU UTARA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SD NEGERI 25 SANTI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SD NEGERI 26 RABADOMPU BARAT KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SD NEGERI 27 RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SD NEGERI 28 MELAYU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SD NEGERI 29 TANJUNG KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SD NEGERI 30 NITU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SD NEGERI 31 LELAMASE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SD NEGERI 32 PANGGI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SD NEGERI 33 LAMPE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SD NEGERI 34 BONTO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SD NEGERI 35 NUNGA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SD NEGERI 36 NGGARALO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SD NEGERI 37 KENDO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SD NEGERI 39 RABADOMPU BARAT KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SD NEGERI 40 LEWIRATO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SD NEGERI 42 MANGGEMACI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SD NEGERI 44 MANDE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SD NEGERI 45 PANE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SD NEGERI 46 LELA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SD NEGERI 47 KODO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SD NEGERI 48 KUMBE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank	Bunga Bank	Saldo 31 des/12/2023
43	SD NEGERI 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SD NEGERI 50 PENARAGA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SD NEGERI 51 RITE KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SD NEGERI 52 BUSU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SD NEGERI 53 OI FOO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SD NEGERI 55 DARA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SD NEGERI 56 TOLOBALI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SD NEGERI 57 WADUMBOLO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SD NEGERI 58 TAMBANA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SD NEGERI 59 RASALEWI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SD NEGERI 60 SAMBINA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SD NEGERI 61 KARARA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SD NEGERI 62 RONTU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SD NEGERI 63 DODU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SD NEGERI 64 SORI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SD NEGERI 65 JATIBARU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SD NEGERI 66 KUTA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SD NEGERI 67 RABANTALA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SD NEGERI 68 KOLO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SD NEGERI 69 KABANTA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SD NEGERI 70 TOLOTONGGA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SD NEGERI 71 WENGGO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SD NEGERI 72 NTOBO KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SD NEGERI 73 SABALI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SD NEGERI 74 SONGGELA KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SD NEGERI 76 TOLOWERI KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SD NEGERI 77 NIU KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SD		0,00	0,00	0,00	0,00
70	SMP NEGERI 1 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SMP NEGERI 2 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SMP NEGERI 3 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SMP NEGERI 4 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SMP NEGERI 5 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SMP NEGERI 6 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank	Bunga Bank	Saldo 31 des/12/2023
76	SMP NEGERI 7 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SMP NEGERI 8 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SMP NEGERI 9 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SMP NEGERI 10 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SMP NEGERI 11 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SMP NEGERI 12 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SMP NEGERI 13 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SMP NEGERI 14 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SMP NEGERI 15 KOTA BIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SMP		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SD + SMP		0,00	0,00	0,00	0,00

Sementara Kas Dana BOS tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.8
Kas Dana Bos Setiap Sekolah Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Bungan Bank	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Saldo 31 des/12/2022
1	2	4	5	6	7	8
1	SD Negeri 1 Melayu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SD Negeri 2 Suntu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SD Negeri 3 Jatiwangi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SD Negeri 5 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SD Negeri 6 Kodo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SD Negeri 7 Kumbe Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SD Negeri 8 Penanae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SD Negeri 10 Penatoi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SD Negeri 11 Manggemaci Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SD Negeri 12 Sarae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SD Negeri 13 Kolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SD Negeri 14 Sadia Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sd Negeri 15 Ntobo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SD Negeri 16 Salama Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SD Negeri 17 Pane Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SD Negeri 18 Dodu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SD Negeri 19 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SD Negeri 20 Rabadompu Timur Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SD Negeri 21 Tolomundu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SD Negeri 22 Jatibaru Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SD Negeri 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SD Negeri 25 Santi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SD Negeri 26 Rabadompu Barat Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SD Negeri 27 Rabadompu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Bungan Bank	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Saldo 31 des/12/2022
	Kota Bima					
25	SD Negeri 28 Melayu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SD Negeri 29 Tanjung Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SD Negeri 30 Nitu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SD Negeri 31 Lelamase Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SD Negeri 32 Panggi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SD Negeri 33 Lampe Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SD Negeri 34 Bonto Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SD Negeri 35 Nungga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SD Negeri 36 Nggaralo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SD Negeri 37 Kendo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SD Negeri 39 Rabadompu Barat Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SD Negeri 40 Lewirato Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SD Negeri 42 Manggemaci Kota Bima	(0,49)	0,00	0,00	0,00	-0,49
38	SD Negeri 43 Melayu Kota Bima	628.062,00	0,00	0,00	0,00	628.062,00
39	SD Negeri 44 Mande Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SD Negeri 45 Pane Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SD Negeri 46 Lela Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SD Negeri 47 Kodo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SD Negeri 48 Kumbé Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SD Negeri 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SD Negeri 50 Penaraga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SD Negeri 51 Rite Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SD Negeri 52 Busu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SD Negeri 53 Oi Foo Kota Bima	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
49	SD Negeri 54 Santi Kota Bima	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
50	SD Negeri 55 Dara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SD Negeri 56 Tolobali Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SD Negeri 57 Wadumbolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SD Negeri 58 Tambana Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SD Negeri 59 Rasalewi Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SD Negeri 60 Sambinae Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SD Negeri 61 Karara Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SD Negeri 62 Rontu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SD Negeri 63 Dodu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SD Negeri 64 Sori Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SD Negeri 65 Jatibaru Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SD Negeri 66 Kuta Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SD Negeri 67 Rabantala Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SD Negeri 68 Kolo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SD Negeri 69 Kabanta Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SD Negeri 70 Tolotonga Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SD Negeri 71 Wenggo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SD Negeri 72 Ntobo Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SD Negeri 73 Sabali Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SD Negeri 74 Songgela Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SD Negeri 76 Toloweri Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SD Negeri 77 Niu Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah SD	663.961,51	-	200,00	-	664.161,51
72	SMP Negeri 1 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SMP Negeri 2 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SMP Negeri 3 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SMP Negeri 4 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SMP Negeri 5 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Nama Sekolah	Kas Tunai Bos	Bungan Bank	Kas Bank Bos	Bos Kinerja	Saldo 31 des/12/2022
77	SMP Negeri 6 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SMP Negeri 7 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SMP Negeri 8 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SMP Negeri 9 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SMP Negeri 10 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SMP Negeri 11 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SMP Negeri 12 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SMP Negeri 13 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SMP Negeri 14 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SMP Negeri 15 Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah SMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SD + SMP		663.961,51	0,00	200,00	0,00	664.161,51

5.3.1.1.1.6 Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
	139.665.450,00	7.894.544,00

Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP merupakan Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan. Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp139.665.450,00 mengalami kenaikan senilai Rp131.770.906,00 atau 1669.14% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp7.894.544,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.9
Rincian Kas Dana Kapitasi Tahun 2023 dan 2022

No	NAMA FKTP	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1	Puskesmas Mpunda	25.124.093,00	7.894.544,00
2	Puskesmas RasanaE Timur	0,00	0,00
3	Puskesmas Paruga	2.994.624,00	0,00
4	Puskesmas PenanaE	111.546.733,00	0,00
5	Puskesmas Kolo	0,00	0,00
6	Puskesmas Kumbe	0,00	0,00
7	Puskesmas Jatibaru	0,00	0,00
Jumlah		139.665.450,00	7.894.544,00

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
	11.510.000,00	30.489.379,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp11.510.000,00 mengalami penurunan senilai Rp18.979.379,00 atau 164,89% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp30.489.379,00.



Rincian Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3.10
Kas Lainnya Tahun 2023

NO	SKPD	Pihak Ketiga Lainnya BOP-PAUD	bulan Penyetoran
1	BOP PAUD KB Anur	3.600.000,00	31 Januari 2024 ke Kas Negara
2	BOP TK Al Ikhwan	60.000,00	Di setor 2024 ke kasda
3	BOP PAUD KB Alam Soncolela	50.000,00	Di setor 2024 ke kasda
4	BOP PAUD KB Imam Safei	7.800.000,00	31 Januari 2024
	Total	11.510.000,00	

Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 senilai Rp11.510.000,00 berupa utang PFK lainnya dari Pengembalian Dana Transfer Pusat Dana alokasi BOP PAUD bahwa sekolah tersebut menolak menggunakan dan transferan BOP PAUD dan telah disetorkan di tahun 2024 ke Kasda Untuk BOP TK Al Ikhwan dan PAUD KB Alam Soncolela belum di setorkan ke Kas Negara. Sementara Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 senilai Rp30.489.379, merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, semua telah terbayarkan ke Kas Negara pada tahun 2023.

5.3.1.1.1.8	Setara Kas	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Saldo Setara Kas pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.3	Piutang Pajak Daerah	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		10.352.833.424,96	13.211.288.451,55

Saldo Piutang Pajak Daerah bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp10.352.833.424,96. Adanya penghapusan piutang tahun 2022 pada pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 4.730.195.714,00 yang baru dilakukan pencatatannya di tahun 2023. Piutang Pajak Daerah terdapat penambahan senilai Rp24.972.703.837,64 dan terdapat penurunan senilai Rp23.327.479.010,67, sehingga mengalami penurunan senilai Rp2.858.455.026,59 atau 21,64% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp13.211.288.451,55 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.11
Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31-12 2022 (Rp)	Koreksi	Penghapusan Piutang TA 2022	Piutang atas Penetapan 2022	Penambahan	Pengurangan	31-12 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	84.447.421,20	0,00	79.012.000,00	0,00	1.281.718.787,59	1.279.734.603,28	7.419.605,51
2	Pajak Restoran	118.215.667,10	0,00	44.831.900,00	0,00	2.169.467.450,00	2.132.758.354,00	110.092.863,10
3	Pajak Hiburan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.767.950,00	56.267.950,00	1.700.000,00
4	Pajak Reklame	65.994.316,25	0,00	0,00	185.245.686,44	463.310.917,00	619.144.852,94	95.406.066,75
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.873.243,00	10.233.873.243,00	0,00
6	Pajak Parkir	4.462.250,00	0,00	0,00	0,00	185.048.000,00	164.195.500,00	25.314.750,00
7	Pajak Air Tanah	30.156.678,00	0,00	29.551.590,00	0,00	53.909.204,30	52.914.467,70	1.599.824,60
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	235.761.383,75	235.761.383,75	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	12.261.465.569,00	41.270.174,00	4.576.800.224,00	0,00	5.236.116.761,00	3.403.095.015,00	9.558.957.265,00
11	Pajak Pajak BPHTB (Bea Perolahan Tanah dan Bangunan)	644.346.550,00	0,00	0,00	0,00	5.036.730.141,00	5.128.733.641,00	552.343.050,00
Jumlah		13.211.288.451,55	41.270.174,00	4.730.195.714,00	185.245.686,44	24.972.703.837,64	23.327.479.010,67	10.352.833.424,96

Sesuai Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/555/900/XI/2022 tentang Penetapan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima atas nama PDAM Bima dkk sebanyak 34,228 debitor, Pemerintah Kota Bima telah melakukan penghapusan Piutang pajak daerah sebesar Rp4.730.195.714,00 yang terdiri dari PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pjak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Permukaan.

Dari jumlah Piutang Pajak senilai Rp10.352.833.424,96 telah dilakukan penyisihan senilai Rp4.532.292.409,40 sehingga nilai Piutang Pajak neto adalah senilai Rp5.820.538.015,57 dengan rincian sebagai berikut.

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp7.419.605,51 dan telah di lakukan penghapusan piutang pajak hotel di tahun 2022 senilai Rp 79.012.000,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp77.027.815,69 atau 90,21% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp84.447.421,20 sebagaimana pada **Lampiran 1** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12
Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang TA 2022	Penambahan	Pembayaran Piutang atas Penghapusan TA 2023	Total Piutang Akibat Penghapusan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2011	39.562.000,00	39.562.000,00	0,00	1.158.500,00	38.403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	850.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang TA 2022	Penambahan	Pembayaran Piutang atas Penghapusan TA 2023	Total Piutang Akibat Penghapusan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2014	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.026.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.800,00	3.026.800,00	0,00
2018	542.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	410.621,20	410.621,20	0,00
2019	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	286.500,00	286.500,00
2020	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	322.500,00	322.500,00
2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2022	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	444.000,00	44.400,00	399.600,00
2023		0,00	1.281.718.787,59	0,00	0,00	1.279.518.603,28	2.200.184,31	11.000,92	2.189.183,39
Jumlah	84.447.421,20	79.012.000,00	1.281.718.787,59	2.008.500,00	60.903.500,00	1.279.734.603,28	7.419.605,51	4.161.822,12	3.257.783,39

Dari jumlah Piutang Pajak Hotel senilai Rp7.419.605,51 telah dilakukan penyisihan senilai Rp4.161.822,12 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel netto adalah senilai Rp3.257.783,39.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp110.092.863,10. Di tahun 2022 telah dilakukan penghapusan piutang atas pajak restoran senilai Rp44.831.900 sehingga mengalami penurunan senilai Rp8.122.804 atau 6,87% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp118.215.667,10 sebagaimana pada **Lampiran 2** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13

Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang TA 2022	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2010	13.677.000,00	13.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4.634.000,00	4.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13.161.900,00	13.161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.790.000,00	10.790.000,00	0,00
2018	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
2019	5.755.000,00	0,00	0,00	0,00	5.755.000,00	2.877.500,00	2.877.500,00
2020	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2021	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	945.000,00	945.000,00
2022	48.653.767,10	0,00	0,00	39.825.773,40	8.827.993,70	882.799,37	7.945.194,33
2023		0,00	2.169.467.450,00	2.092.932.580,60	76.534.869,40	382.674,35	76.152.195,05
Jumlah	118.215.667,10	44.831.900,00	2.169.467.450,00	2.132.758.354,00	110.092.863,10	20.612.973,72	89.479.889,38



Dari jumlah Piutang Pajak Restoran senilai Rp110.092.863,10 telah dilakukan penyisihan senilai Rp20.612.973,72 nilai Piutang Pajak Restoran netto adalah senilai Rp89.479.889,38.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp1.700.000,00. mengalami Penurunan senilai Rp500.000,00 atau 22,73% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.200.000,00 sebagaimana pada **Lampiran 3** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14

Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2023		55.767.950,00	55.767.950,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.200.000,00	55.767.950,00	56.267.950,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00

Dari jumlah Piutang Pajak Hiburan senilai Rp1.700.000,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp850.000,00 sehingga nilai Piutang Pajak Hiburan netto adalah senilai Rp850.000,00.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp95.406.066,75 mengalami kenaikan senilai Rp29.411.750,50 atau 44,57 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp65.994.316,25 sebagaimana pada sebagaimana pada **Lampiran 4** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15

Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Pengakuan 2023 atas Penetapan 2022	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2017	9.265.625,25	0,00	0,00	0,00	9.265.625,25	9.265.625,25	0,00
2018	771.588,96	0,00	0,00	0,00	771.588,96	771.588,96	0,00
2019	19.039.896,20	0,00	0,00	0,00	19.039.896,20	9.519.948,10	9.519.948,10
2020	23.954.704,17	0,00	0,00	0,00	23.954.704,17	11.977.352,09	11.977.352,09
2021	759.376,42	0,00	0,00	0,00	759.376,42	379.688,21	379.688,21
2022	12.203.125,25	0,00	0,00	11.321.875,00	881.250,25	88.125,03	793.125,23
2023		463.310.917,00	185.245.686,44	607.822.977,94	40.733.625,50	203.668,13	40.529.957,37
Jumlah	65.994.316,25	463.310.917,00	185.245.686,44	619.144.852,94	95.406.066,75	32.205.995,76	63.200.070,99

E N



Piutang Pajak Reklame senilai Rp95.406.066,75 telah dilakukan penyisihan senilai Rp32.205.995,76 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame neto adalah senilai Rp63.200.070,99.

e. Piutang Pajak Penereangan Jalan

Tidak terdapat saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2023.

f. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp25.314.750,00 mengalami kenaikan senilai Rp20.852.500 atau 467,31% dibandingkan dengan per 31 desember 2022 senilai Rp4.462.250,00 sebagaimana pada **Lampiran 9**.

Tabel 5.3.16

Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2019	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	508.000,00	508.000,00
2020	346.250,00	0,00	0,00	346.250,00	173.125,00	173.125,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.100.000,00	0,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	185.048.000,00	161.095.500,00	23.952.500,00	119.762,50	23.832.737,50
Jumlah	4.462.250,00	185.048.000,00	164.195.500,00	25.314.750,00	800.887,50	24.513.862,50

Dari jumlah Piutang Pajak Parkir senilai Rp25.314.750,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp800.887,50 sehingga nilai Piutang BPHTB neto adalah senilai Rp24.513.862,50.

g. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp1.599.824,60. Adanya penghapusan tahun 2022 pada piutang pajak air tanah senilai Rp29.551.590,00 yang baru dilakukan pencatatanya di tahun 2023. sehingga mengalami penurunan senilai Rp28.556.853,40 atau 94,69% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp30.156.678,00 sebagaimana pada **Lampiran 6** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.17

Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang TA 2022	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2012	291.570,00	291.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5.934.360,00	5.934.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10.579.830,00	10.579.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.155.830,00	8.155.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang TA 2022	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	605.088,00	0,00	0,00	605088,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	53.909.204,30	52.309.379,70	1.599.824,60	7.999,12	1.591.825,48
Jumlah	30.156.678,00	29.551.590,00	53.909.204,30	52.914.467,70	1.599.824,60	7.999,12	1.591.825,48

Dari jumlah Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp1.599.824,60 telah dilakukan penyisihan senilai Rp7.999,12 sehingga nilai Piutang Pajak Air Tanah neto adalah senilai Rp1.591.825,48.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan Perkotaan (PBB - P2) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp9.558.957.265,00. Adanya penghapusan piutang PBB senilai 4.576.800.224,00 tahun 2022 sehingga mengalami penurunan senilai Rp2.702.508.304,00 atau 22,04% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp12.261.465.569,00 sebagaimana pada **Lampiran 7** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.18
Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	koreksi saldo awal	Penghapusan Piutang TA 2022	Realisasi atas pembayaran Piutang yang di hapuskan TA 2023	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2011	553.562.775,00	0,00	553.562.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	636.912.241,00	0,00	636.912.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	585.637.501,00	0,00	585.637.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	707.669.369,00	9.759.534,00	707.779.086,00	13.604.836,00	0,00	0,00	9.649.817,00	9.649.817,00	0,00
2015	937.685.879,00	12.031.969,00	938.813.719,00	16.932.312,00	0,00	0,00	10.904.129,00	10.904.129,00	0,00
2016	1.153.187.142,00	19.478.671,00	1.154.094.902,00	22.655.888,00	0,00	0,00	18.570.911,00	18.570.911,00	0,00
2017	1.120.655.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.956.557,00	1.097.699.388,00	1.097.699.388,00	0,00
2018	1.020.658.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696.095,00	997.962.097,00	997.962.097,00	0,00
2019	901.557.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879.815,00	883.677.305,00	441.838.652,50	441.838.652,50
2020	1.134.936.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.848.702,00	1.108.088.049,00	554.044.024,50	554.044.024,50
2021	1.593.451.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.099.881,00	1.544.351.666,00	772.175.833,00	772.175.833,00
2022	1.915.551.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.315.479,00	1.642.235.628,00	164.223.562,80	1.478.012.065,20
2023					5.236.116.761,00	2.990.298.486,00	2.245.818.275,00	11.229.091,38	2.234.589.183,63
Jumlah	12.261.465.569,00	41.270.174,00	4.576.800.224,00	53.193.036,00	5.236.116.761,00	3.403.095.015,00	9.558.957.265,00	4.078.297.506,18	5.480.659.758,83

E K



Dari jumlah Piutang PBB senilai Rp9.558.957.265,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp4.078.297.506,18 sehingga nilai Piutang Pajak PBB neto adalah senilai Rp5.480.659.758,83.

i. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp552.343.050,00 mengalami penurunan senilai Rp92.003.500 atau 14,28% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp644.346.550,00 sebagaimana pada **Lampiran 8** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19
Rincian Piutang BPHTB Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2014	8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00
2015	12.339.600,00	0,00	0,00	12.339.600,00	12.339.600,00	0,00
2016	14.017.500,00	0,00	0,00	14.017.500,00	14.017.500,00	0,00
2017	96.188.100,00	0,00	0,00	96.188.100,00	96.188.100,00	0,00
2018	108.862.200,00	0,00	1.500.000,00	107.362.200,00	107.362.200,00	0,00
2019	142.100.300,00	0,00	24.000.000,00	118.100.300,00	59.050.150,00	59.050.150,00
2020	260.128.850,00	0,00	66.503.500,00	193.625.350,00	96.812.675,00	96.812.675,00
2021	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5.036.730.141,00	5.036.730.141,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	644.346.550,00	5.036.730.141,00	5.128.733.641,00	552.343.050,00	395.355.225,00	156.987.825,00

Dari jumlah Piutang BPHTB senilai Rp552.343.050,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp395.355.225,00 sehingga nilai Piutang BPHTB neto adalah senilai Rp156.987.825,00.

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi	2023 (Rp)	2023 (Rp)
	5.241.427.815,00	6.570.013.361,00

Saldo Piutang Retribusi bruto pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp5.241.427.815,00 mengalami penurunan senilai 1.328.585.546,00 atau 20,22% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp6.570.013.361 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.20
Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi	Piutang 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Koreksi BPK	Piutang 2023 (Rp)
1	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	3.520.783.935,00	1.215.332.040,00	423.824.800,00	0,00	4.312.291.175,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	337.145.000,00	741.305.000,00	707.635.000,00	40.950.000,00	411.765.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara	52.231.840,00	187.738.000,00	187.738.000,00	0,00	52.231.840,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	359.343.000,00	407.354.300,00	359.343.000,00	57.785.500,00	465.139.800,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2.300.509.586,00	0,00	2.300.509.586,00	0,00	0,00
Jumlah		6.570.013.361,00	2.551.729.340,00	3.979.050.386,00	98.735.500,00	5.241.427.815,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir serta Peraturan Wali kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima. Penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Dari jumlah Piutang Retribusi senilai Rp5.241.427.815,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp4.154.384.833,00 sehingga nilai Piutang Retribusi netto adalah senilai Rp1.087.042.982,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi	Piutang Retribusi 2023	Koreksi BPK	Piutang Retribusi 2023	Penyisihan 2023	NRV 2023	Piutang 2022
1	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	4.312.291.175,00	0,00	4.312.291.175,00	3.754.135.393,75	558.155.781,25	3.520.783.935,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	370.815.000,00	40.950.000,00	411.765.000,00	350.059.250,00	61.705.750,00	337.145.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara	52.231.840,00	0,00	52.231.840,00	50.190.189,25	2.041.650,75	52.231.840,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	407.354.300,00	57.785.500,00	465.139.800,00	0,00	465.139.800,00	359.343.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.509.586,00
Jumlah		5.142.692.315,00	98.735.500,00	5.241.427.815,00	4.154.384.833,00	1.087.042.982,00	6.570.013.361,00

Penjelasan masing-masing akun piutang retribusi sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp4.312.291.175,00 mengalami peningkatan senilai Rp791.507.240,00 atau 22,48% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp3.520.783.935,00 sebagaimana pada **Lampiran 10** dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.3.22

Mutasi Piutang Retribusi Pasar/Grosir Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Penambahan	Pembayaran Tahun 2023	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan 2023	NRV 2023
2010	114.245.220,00	0,00	0,00	114.245.220,00	114.245.220,00	0,00
2011	123.061.001,00	0,00	0,00	123.061.001,00	123.061.001,00	0,00
2012	61.799.028,00	0,00	0,00	61.799.028,00	61.799.028,00	0,00
2013	54.311.750,00	0,00	0,00	54.311.750,00	54.311.750,00	0,00
2014	71.485.067,00	0,00	0,00	71.485.067,00	71.485.067,00	0,00
2015	13.209.910,00	0,00	0,00	13.209.910,00	13.209.910,00	0,00
2016	184.150.110,00	0,00	0,00	184.150.110,00	184.150.110,00	0,00
2018	416.873.230,00	0,00	0,00	416.873.230,00	416.873.230,00	0,00
2019	325.037.928,00	0,00	0,00	325.037.928,00	325.037.928,00	0,00
2020	531.719.578,00	0,00	0,00	531.719.578,00	531.719.578,00	0,00
2021	637.076.073,00	0,00	0,00	637.076.073,00	637.076.073,00	0,00
2022	987.815.040,00	0,00	0,00	987.815.040,00	987.815.040,00	0,00
2023		1.215.332.040,00	423.824.800,00	791.507.240,00	233.351.458,75	558.155.781,25
Total	3.520.783.935,00	1.215.332.040,00	423.824.800,00	4.312.291.175,00	3.754.135.393,75	558.155.781,25

Dari jumlah Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan senilai Rp4.312.291.175,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp3.754.135.393,75 sehingga nilai Piutang Retribusi neto adalah senilai Rp588.155.781,25.

b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp411.765.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp74.620.000,00 atau 22,13% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp337.145.000,00.

Tabel 5.3.23

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Piutang atas Penetapan 2022	Penambahan	Pengurangan	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan	NRV	
A	Bagian Umum (Lampiran 11)							
2010	56.035.000,00	0,00	0,00	0,00	56.035.000,00	56.035.000,00	0,00	
2011	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
2012	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
2013	16.610.000,00	0,00	0,00	0,00	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	
Jumlah	77.745.000,00	0,00	0,00	0,00	77.745.000,00	77.745.000,00	0,00	
B	BPKAD (Lampiran 12)							
2019	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
2020	24.125.000,00	0,00	0,00	0,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,00	
2021	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tahun	Piutang 2022 (Rp)	Piutang atas Penetapan 2022	Penambahan	Pengurangan	Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan	NRV
2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023		27.500.000,00	539.305.000,00	550.135.000,00	16.670.000,00	3.684.000,00	12.986.000,00
Jumlah	30.900.000,00	27.500.000,00	539.305.000,00	555.135.000,00	42.570.000,00	29.584.000,00	12.986.000,00
C	Dinas Kelautan dan Perikanan (Lampiran 13)						
2015	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2016	12.425.000,00	0,00	0,00	0,00	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00
2017	49.925.000,00	0,00	0,00	0,00	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00
2018	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2019	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2020	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
2021	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
2022	12000000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2023		500.000,00	174.000.000,00	152.500.000,00	22.000.000,00	7.610.000,00	14.390.000,00
Jumlah	228.500.000,00	500.000,00	174.000.000,00	152.500.000,00	250.500.000,00	236.110.000,00	14.390.000,00
D	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2023	0,00	0,00	98.700.000,00	57.750.000,00	40.950.000,00	6.620.250,00	34329750,00
Jumlah	0,00	0,00	98.700.000,00	57.750.000,00	40.950.000,00	6.620.250,00	34.329.750,00
Total	337.145.000,00	28.000.000,00	812.005.000,00	765.385.000,00	411.765.000,00	350.059.250,00	61.705.750,00

Dari jumlah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp411.765.000,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp350.059.250,00 sehingga nilai Piutang Retribusi netto adalah senilai Rp61.705.750,00.

c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp52.231.840,00 tidak mengalami perubahan Piutang Retribusi Pengendalian Menara dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp52.231.840,00,00.

Tabel 5.3.24

Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Tahun 2023 dan 2022

NO	NAMA PEMILIK / WAJIB RETRIBUSI	SALDO 31/12/2022	PENETAPAN	Realisasi Tahun 2023	Total Piutang 2023
			2023		
1	PT. TOWER BERSAMA	20.012.265,00	19.092.000,00	19.092.000,00	20.012.265,00
2	PT. XL-AXIATA	23.896.161,00	0,00	3.182.000,00	20.714.161,00
3	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	0,00	35.002.000,00	35.002.000,00	0,00
4	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00
5	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00
6	PT. PERSADA SOKKA TAMA	0,00	19.092.000,00	19.092.000,00	0,00
7	PT. EDOTCO INFRASTRUKTUR INDONESIA	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00
8	SOLUSINDO KREASI PRATAMA	0,00	12.728.000,00	12.728.000,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

NO	NAMA PEMILIK / WAJIB RETRIBUSI	SALDO 31/12/2022	PENETAPAN	Realisasi Tahun 2023	Total Piutang 2023
			2023		
9	PT. EPID MENARA ASSETCO	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00
10	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKA	0,00	38.184.000,00	35.002.000,00	3.182.000,00
11	PROTELINDO / PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0,00	12.728.000,00	12.728.000,00	0,00
12	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	8.323.414,00	31.820.000,00	31.820.000,00	8.323.414,00
	TOTAL	52.231.840,00	187.738.000,00	187.738.000,00	52.231.840,00

Dari jumlah Piutang Retribusi Pengendalian Menara senilai Rp52.231.840,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp50.190.189,25 sehingga nilai Piutang Retribusi netto adalah senilai Rp2.041.650,75

Tabel 5.3.25
Perhitungan Penyisihan Pengendalian Menara

Tahun	Piutang 2022	Penambahan	Pembayaran	Piutang 2023	Penyisihan	NRV
2015	29.957.840,00	0,00	0,00	29.957.840,00	29.957.840,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.364.000,00	0,00	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00
2021	9.546.000,00	0,00	0,00	9.546.000,00	9.546.000,00	0,00
2022	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00
2023	3.182.000,00	187.738.000,00	187.738.000,00	3.182.000,00	1.140.349,25	2.041.650,75
	52.231.840,00	187.738.000,00	187.738.000,00	52.231.840,00	50.190.189,25	2.041.650,75

d. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp465.139.800,00 mengalami kenaikan senilai Rp196.877.200,00 atau 73,39% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai 268.262.600,00 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Piutang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
1	Penanae	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan November dan Desember 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	November	22.932.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Desember	29.687.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Saldo 31 Desember 2023		52.619.200,00
2	Rasanae Timur	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	5.774.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			November	15.055.200,00	
			Desember	12.878.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
Saldo 31 Desember 2023				33.707.300,00	
3	Jatibaru	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan September, Oktober 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	35.697.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			November	35.842.100,00	
			Desember	39.074.200,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
Saldo 31 Desember 2023				110.613.400,00	
4	Mpunda	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan September, Oktober, November dan Desember 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	September	2.860.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Oktober	46.639.200,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			November	27.550.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Desember	41.562.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
Saldo 31 Desember 2023				118.611.300,00	
5	Kumbe	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	12.610.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			November	10.990.000,00	
			Desember	4.746.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
Saldo 31 Desember 2023				28.346.100,00	
6	Paruga	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, Desember 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	2.857.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			November	50.692.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Desember	58.207.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
Saldo 31 Desember 2023				111.756.300,00	
7	Kolo	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan September, Oktober, November, Desember 2023 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	September	983.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Oktober	960.000,00	
			November	4.957.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
			Desember	2.586.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2024
Saldo 31 Desember 2023				9.486.200,00	
Jumlah				465.139.800,00	

5.3.1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		2.569.480.270,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai 2.569.480.270,00 yang terdiri dari dividen Bank NTB tahun buku 2023 dari hasil RUPS 26 Maret 2024 senilai Rp2.461.315.900,00 dan Deviden BPR NTB Tahun Buku 2023 sesuai RUPS 16 Mei 2024 senilai Rp108.164.370,00 dan Tahun 2022 senilai 0,00.



		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.1.1.6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.557.402.496,83	1.239.295,74

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp13.557.402.496,83. Mengalami kenaikan senilai Rp13.556.163.201,09 di bandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp1.239.295,74. Kenaikan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berasal dari Piutang lain-Lain PAD yang sah atas sewabeli BMD dan terdapat koreksi hasil pemeriksaan BPK, serta Piutang pendapatan Bunga Remunirasi TDF dan Piutang Pendapatan BLUD.

Tabel 5.3.27
Piutang Lian-Lain PAD yang Sah Tahun 2023

NO	URAIAN	TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Koreksi BPK	TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	11.318.540.045,09	1.741.773.925,00	13.060.313.970,09
2	PIUTANG PENDAPATAN BUNGA REMUNIRASI TDF	1.239.295,74	0,00	1.239.295,74
3	PIUTANG PENDAPATAN BLUD DARI JASA LAYANAN	495.849.231,00	0,00	495.849.231,00
	TOTAL	11.815.628.571,83	1.741.773.925,00	13.557.402.496,83

Tabel 5.3.28
Piutang BLUD dari Jasa Layanan Pada RSUD

NO	(Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	JUMLAH	TANGGAL	KET
1	Klaim Pending Rawat Inap Bulan Juli	434.328.800,00	02 Februari 2024	Dibayarkan Oleh BPJS di Tahun 2024
2	Klaim Pending Rawat Inap Bulan Juni	33.461.300,00	08 Februari 2024	Dibayarkan Oleh BPJS di Tahun 2024
3	Klaim pembayaran klaim IFRS	27.657.131,00	02 Februari 2024	Dibayarkan Oleh BPJS di Tahun 2024
4	Klaim Pelayanan Retribusi Kesehatan	402.000,00	Februari 2024	Disetor oleh Bendahara Penerima
	TOTAL	495.849.231,00		

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.268.829.245,00	728.448.661,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp1.268.829.245,00. Mengalami kenaikan Rp540.380.584,00 atau 74.18% di bandingkan tahun 2022 senilai Rp728.448.661,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.29
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Koreksi Piutang 2022										Aset Lainnya (TDF) 2023 (Rp)	Piutang Transfer 2023 (Rp)
		Piutang DBH 2022 pada LKPD TA 2022 (Rp)	Kurang Bayar DBH 2022 sesuai PMK 90/2023	Penyesuaian Piutang DBH 2022 pada LKPD TA 2023(Rp)	Penetapan sesuai PMK 159 Perubahan Perpres 130 Tahun 2023	Potongan	Total Penetapan DBH 2023	Pembayaran (TDF) TA 2022	Non Tunai (TDF) TA 2023	Non Tunai (TDF) Kurang Bayar TA 2022	Pembayaran Tahun Berjalan		
1	2	3	5	8=6	9	11	12=9+10-11	14	14		15	16	17=12-13-14-15
	DBH Pemerintah Pusat												
	Dana Bagi Hasil Pajak												
1	Biaya Pemungutan PBB Sektor Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Migas	0,00	0,00	0,00	415.269.000,00	0,00	415.269.000,00	67.778.277,00	56.693.000,00	0,00	358.576.000,00	56.693.000,00	0,00
	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Non Migas	0,00	0,00	0,00	1.823.955.000,00	0,00	1.823.955.000,00	0,00	314.135.000,00	0,00	1.509.820.000,00	314.135.000,00	0,00
4	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	76.023.000,00	0,00	76.023.000,00	12.360.838,00	12.713.000,00	0,00	63.310.000,00	12.713.000,00	0,00
	DBH PBB Perkebunan	0,00	0,00	0,00	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	8.237.000,00	1.453.000,00	0,00
	DBH PBB Kehutanan	0,00	0,00	0,00	13.529.000,00	0,00	13.529.000,00	0,00	2.233.000,00	0,00	11.296.000,00	2.233.000,00	0,00
5	DBH Pajak PPh Pasal 21	312.308.820,00	0,00	0,00	7.108.239.000,00	0,00	7.108.239.000,00	885.067.968,00	1.164.840.000,00	0,00	5.943.399.000,00	1.164.840.000,00	0,00
6	DBH Pajak PPh Pasal 25/29	268.169.911,00	0,00	0,00	377.820.000,00	0,00	377.820.000,00	48.081.539,00	10.336.000,00	0,00	367.484.000,00	10.336.000,00	0,00
7	DBH PBB Bagi Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.605.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No	Uraian	Koreksi Piutang 2022										Aset Lainnya (TDF) 2023 (Rp)	Piutang Transfer 2023 (Rp)
		2023											
		Piutang DBH 2022 pada LKPD TA 2022 (Rp)	Kurang Bayar DBH 2022 sesuai PMK 90/2023	Penyesuaian Piutang DBH 2022 pada LKPD TA 2023(Rp)	Penetapan sesuai PMK 159 Perubahan Perpres 130 Tahun 2023	Potongan	Total Penetapan DBH 2023	Pembayaran (TDF) TA 2022	Non Tunai (TDF) TA 2023	Non Tunai (TDF) Kurang Bayar TA 2022	Pembayaran Tahun Berjalan		
1	2	3	5	8=6	9	11	12=9+10-11	14	14		15	16	17=12-13-14-15
8	DBH Cukai Hasil Tembakau	105.401.490,00	0,00	0,00	18.811.404.000,00	0,00	18.811.404.000,00	450.334.872,00	0,00	0,00	17.542.575.000,00	0,00	1.268.829.000,00
	Jumlah I	685.880.221,00	0,00	0,00	28.635.929.000,00	0,00	28.635.929.000,00	1.939.011.804,00	1.562.403.000,00	0,00	25.804.697.000,00	1.562.403.000,00	1.268.829.000,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA												
1	DBH SDA Pertambangan Umum Royalty	42.568.440,00	19.730.063.245,00	19.730.063.245,00	31.725.188.000,00	3.694.939.000,00	51.455.251.245,00	2.952.877.453,00	8.050.032.000,00	19.730.063.000,00	23.675.156.000,00	27.780.095.000,00	245,00
2	DBH SDA Kehutanan	0,00	0,00	0,00	43.883.000,00	0,00	43.883.000,00	6.214.586,00	0,00	0,00	43.883.000,00	0,00	0,00
3	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.262.149.000,00	0,00	1.262.149.000,00	211.753.211,00	0,00	0,00	1.262.149.000,00	0,00	0,00
	Jumlah II	42.568.440,00	19.730.063.245,00	19.730.063.245,00	33.031.220.000,00	3.694.939.000,00	52.761.283.245,00	3.170.845.250,00	8.050.032.000,00	19.730.063.000,00	24.981.188.000,00	27.780.095.000,00	245,00
	Jumlah I + Jumlah II	728.448.661,00	19.730.063.245,00	19.730.063.245,00	61.667.149.000,00	3.694.939.000,00	81.397.212.245,00	5.109.857.054,00	9.612.435.000,00	19.730.063.000,00	50.785.885.000,00	29.342.498.000,00	1.268.829.245,00

X



5.3.1.1.8	Piutang Transfer Antar Daerah	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
		4.528.880.817,00	4.361.716.996,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp4.528.880.817,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp167.163.821,00 atau 3,83% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4.361.716.996,00.

Tabel 5.3.30

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Piutang DBH Propinsi 2022 pada LKPD TA 2022 (Rp)	2023				Piutang Transfer 2023 (Rp)
			Penetapan sesuai SK GUB Nomor 973-184 Tahun 2023	Total Penetapan DBH Pajak Propinsi 2023	Pembayaran Piutang	Pembayaran Tahun Berjalan	
1	2	3	9	12=9+10-11	13	15	17=12-13-14-15
DBH Pemerintah Provinsi							
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor	1.431.975.859,00	7.691.974.654,00	9.123.950.513,00	1.431.975.859,00	6.443.571.435,00	1.248.403.219,00
2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.265.478.494,00	7.286.028.813,00	8.551.507.307,00	1.265.478.494,00	5.886.755.795,00	1.399.273.018,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.660.046.665,00	20.848.887.577,00	22.508.934.242,00	1.660.046.665,00	18.971.169.183,00	1.877.718.394,00
4	DBH Pajak Air Permukaan	4.215.978,00	40.054.648,00	44.270.626,00	4.215.978,00	36.568.462,00	3.486.186,00
5	DBH Pajak Rokok	0,00	18.683.218.067,00	18.683.218.067,00	0,00	18.683.218.067,00	Rp0,00
Jumlah		4.361.716.996,00	54.550.163.759,00	58.911.880.755,00	4.361.716.996,00	50.021.282.942,00	4.528.880.817,00
Total		4.361.716.996,00	54.550.163.759,00	58.911.880.755,00	4.361.716.996,00	50.021.282.942,00	4.528.880.817,00

5.3.1.1.9	Piutang Lainnya	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		56.904.527.841,25	2.778.761.737,25

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Piutang Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah yang sudah memiliki Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa piutang ganti rugi disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp56.904.527.841,25 tidak mengalami kenaikan senilai Rp54.125.766.104,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.778.761.737,25.



Piutang Lainnya salah satunya terdiri dari Untuk lampiran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana pada **Lampiran 14**.

Terdapat penambahan Piutang Lainnya yang terdiri dari :

- Terdapat Piutang atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp2.778.761.737,25 sebagaimana pada **Lampiran 14**.
- dinas PUPR di akibatkan adanya pengembalian uang muka atas pekerjaan fisik pembukaan yang belum di kembalikan ke Kas Daerah Kota Bima di Tahun 2023 senilai Rp49.879.500,00.

Pengembalian Uang muka atas pekerjaan fisik tersebut di akibatkan karena adanya penolakan dari masyarakat setempat atas pekerjaan Rabat Gang RW 03 Kelurahan Pane dengan no sp2d 5693/LS/Kobi/2023 oleh CV. Virin.

- Terdapat Bagi Hasil IUPK PT AMNT dengan rincian berikut:

- a. 2020: USD 282.738
- b. 2021: USD 749.480
- c. 2022: USD 2.470.333

Dikalikan JISDOR per 31 Desember 2023 senilai Rp15.439,00

- a. 2020: Rp4.365.188.551,00
- b. 2021: Rp11.571.221.720,00
- c. 2022: Rp38.139.476.333,00

Total Piutang Lainnya senilai Rp54.075.886.604,00

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.1.1.11	Penyisihan Piutang	(8.686.677.242,40)	(11.235.490.023,86)

Saldo Penyisihan Piutang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp8.686.677.242,40 Mengalami penurunan sebesar Rp2.548.812.781,46 atau 22,69%. Jika dibandingkan tahun 2022 senilai Rp11.235.490.023,86. Di akibatkan adanya penghapusan penyisihan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak bumi Bangunan senilai Rp4.730.195.714,00.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.3.1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	13.750.000,00	274.770.484,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp13.750.000,00 mengalami penurunan senilai Rp261.020.484,00 atau 95,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp274.770.484,00 dengan rincian sebagai berikut.

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.31
Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 dan 2022

No	OPD	Keterangan	2023	2022
			(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Sewa Rumah Aspirasi kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Tahun 2021	13.750.000,00	13.750.000,00
2	Dinas Perhubungan	Atas Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	43.980.000,00
3	Dinas Kesehatan	Renovasi Gedung Lab Kesda (DAK)	0,00	141.849.738,00
			0,00	75.190.746,00
Jumlah			13.750.000,00	274.770.484,00

5.3.1.1.13 Persediaan 2023 (Rp)
18.330.422.816,30 2022 (Rp)
12.186.271.978,05

Saldo Persediaan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp18.330.422.816,30 mengalami kenaikan senilai Rp6.144.150.838,25 atau 50,42% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp12.186.271.978,05.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis/material yang terdiri dari obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis, ATK, bibit tanaman, benih ikan, barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan barang Persediaan lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.3.32
Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2023

No	Nama OPD	PERSEDIAAN 2023								TOTAL
		ATK	CETAK	KERTAS DAN COVER	BAHAN/ BIBIT	OBAT-OBATAN	OBAT-OBATAN LAINNYA	BAHAN - BAHAN LAINNYA	BRANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	
1	Dinas Kesehatan	0,00	13.517.777,78	0,00	0,00	6.892.578.046,32	0,00	230.531.600,00	0,00	7.136.627.424,10
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098.667.132,00	8.098.667.132,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.278.000,00	0,00	112.278.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	194.051.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051.794,15
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	402.788.521,00	0,00	0,00	0,00	402.788.521,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
7	Dinas Koperindag	0,00	11.536.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536.250,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	182.000,00	200.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
9	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266.892,00	0,00	0,00	0,00	10.266.892,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	783.000,00	31.500.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.769.000,00
11	RSUD Kota Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.089.731,05	372.553.847,00	106.432.225,00	0,00	2.308.075.803,05
TOTAL KESELURUHAN		965.000,00	266.905.821,93	6.486.000,00	880.000,00	9.134.723.190,37	372.553.847,00	449.241.825,00	8.098.667.132,00	18.330.422.816,30



Tabel 5.3.33

Laporan Persediaan Per SKPD Tahun 2022

No	Nama OPD	PERSEDIAAN 2022						TOTAL
		ATK	CETAK	KERTAS DAN COVER	BAHAN KOMPUTER	OBAT-OBATAN	BAHAN - BAHAN LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	29.432.000,00	0,00	0,00	7.901.545.405,68	681.943.250,00	8.612.920.655,68
3	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450.000,00	45.450.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	278.000,00	273.049.935,64	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	278.567.935,64
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	677.583.309,00	0,00	677.583.309,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
7	Dinas Koperindag	0,00	28.585.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585.950,00
8	Diskanlut	129.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	2.509.000,00
9	BPBD	0,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	810.000,00	29.625.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.535.000,00
11	RSUD Kota Bima	0,00	14.337.800,00	0,00	0,00	2.300.391.792,73	142.115.535,00	2.456.845.127,73
TOTAL KESELURUHAN		2.292.000,00	424.330.686,00	3.400.000,00	5.240.000,00	10.879.520.507,00	871.488.785,00	12.186.271.978,05

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	18.137.504.969,22	23.023.125.259,72

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp18.137.504.969,22 mengalami penurunan senilai Rp4.885.620.290,50 atau 21,22% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp23.023.125.259,72 yang terdiri dari.



Tabel 5.3.34

Laporan Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022

No	Investasi Jangka Panjang	31/12/2023	31/12/2022
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	18.137.504.969,22	23.023.125.259,72
Jumlah		18.137.504.969,22	23.023.125.259,72

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tersebut merupakan dana bergulir yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif maupun masyarakat melalui dinas/instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan beserta bagi hasil keuntungannya dalam jangka waktu tertentu.

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Tabel 5.3.35

Tabel Investasi Non Permanen

No	Investasi Jangka Panjang	31/12/2023	31/12/2022
1	Dana Bergulir	3.516.637.731,00	3.525.842.694,00
2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(3.516.637.731,00)	(3.525.842.694,00)
Jumlah		0,00	0,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	3.516.637.731,00	3.525.842.694,00

Saldo Dana Bergulir pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp3.516.637.731,00 mengalami penurunan senilai Rp9.204.963,00 atau 0,26% dibandingkan tahun 2022 senilai Rp3.525.842.694,00

Mutasi Dana Bergulir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.36

Data Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022

No	OPD Pengelola	31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.045.394.785,00	0,00	3.342.443,00	1.042.052.342,00	Lampiran 15
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.419.472.909,00	0,00	5.862.520,00	2.413.610.389,00	Lampiran 16
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	0,00	0,00	60.975.000,00	Lampiran 17
Jumlah		3.525.842.694,00	0,00	9.204.963,00	3.516.637.731,00	



Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, dilakukan penyisihan atas dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut.

Tabel 5.3.37
Perhitungan Dana Bergulir sesuai Kebijakan Akuntansi

No	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 2 thn	Lancar	0 %
2	> 2 thn s.d 3 thn	Kurang Lancar	10 %
3	>3 thn s.d 4 thn	Diragukan	50 %
4	> 4 thn ke atas	Macet	100 %

Dari jumlah Dana Bergulir senilai Rp3.516.637.731,00 telah dilakukan penyisihan senilai Rp3.516.637.731,00 sehingga nilai Dana Bergulir neto adalah senilai Rp0,00.

Rincian dana bergulir beserta perhitungan penyisihannya masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.38
Perhitungan Dana Bergulir Per SKPD Tahun 2023

No	OPD Pengelola	31/12/2023	Penyisihan Tidak Tertagih	NRV 31 Desember 2023
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.042.052.342,00	1.042.052.342,00	0,00
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.413.610.389,00	2.413.610.389,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	60.975.000,00	0,00
Jumlah		3.516.637.731,00	3.516.637.731,00	0,00

5.3.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2023 (Rp) 2022 (Rp)
(3.516.637.731,00) (3.525.842.694,00)

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp3.516.637.731,00 dan di tahun 2022 senilai Rp3.525.842.694,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 2023 (Rp) 2022 (Rp)
18.137.504.969,22 23.023.125.259,72



Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.137.504.969,22 dan Tahun 2022 senilai Rp23.023.125.259,72. Nilai saldo merupakan Akumulasi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima pada PERUMDA Bima Aneka dengan menggunakan metode Ekuitas senilai dan PT.Bank NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD BPR NTB dan KPN Sabua Ade menggunakan Metode Biaya.

5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2023 (Rp)	2022(Rp)
		18.137.504.969,22	16.137.504.969,22

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp18.137.504.969,22 dan di tahun 2022 senilai Rp16.137.504.969,22.

Tabel 5.3.39A
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

NO	PENYERTAAN MODAL	2023	2022	Keterangan
1	PERUMDA Bima Aneka	725.134.575,22	725.134.575,22	Metode Ekuitas
2	PT. Bank NTB	15.067.621.350,00	13.067.621.350,00	Metode Biaya
3	PT. Jamkrida NTB BERSAING	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Metode Biaya
4	PD. BPR NTB	1.044.749.044,00	1.044.749.044,00	Metode Biaya
5	KPN Sabua Ade	300.000.000,00	300.000.000,00	Metode Biaya
Total		18.137.504.969,22	16.137.504.969,22	

Rincian Penyertaan modal dengan menggunakan Metode Ekuitas dan Metode Biaya :

Tabel 5.3.39B
Perhitungan Menggunakan Metode Ekuitas

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Naik/ (turun)
1	PERUMDA Bima Aneka	100,00%	725.134.575,22	725.134.575,22	0,00
J u m l a h			725.134.575,22	725.134.575,22	0,00

Tabel 5.3.40
Perhitungan Mengguakan Metode Biaya
Data Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Naik/ (turun)
1	PT. Bank NTB	1,48%	15.067.621.350,00	13.067.621.350,00	2.000.000.000,00
2	PT. Jamkrida NTB BERSAING	3,05%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3	PD. BPR NTB	0,58%	1.044.749.044,00	1.044.749.044,00	0,00
4	KPN Sabua Ade	2,14%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
J u m l a h			17.412.370.394,00	15.412.370.394,00	2.000.000.000,00



Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima bahwa Investasi pada PERUMDA Bima Aneka menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan sahamnya 100% milik Pemerintah Kota Bima sedangkan PT. Bank NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB dan KPN sabua Ade menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham kurang dari 20%. Sesuai PSAP 6 paragraf 40 menyatakan bahwa hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

5.3.1.3 Aset Tetap	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	2.023.919.402.348,75	1.947.211.575.128,24

Saldo Nilai Buku Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp2.023.919.402.348,75, mengalami kenaikan senilai Rp76.707.827.220,51 atau 3,94% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.947.211.575.128,24 sebagaimana pada **Lampiran 20** dan rincian per Perangkat Daerah (PD) pada **Lampiran 21**.

Tabel 5.3.41
Rincian Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	605.155.129.175,00	566.178.193.169,87
2	Peralatan dan Mesin	358.928.790.783,25	331.728.951.182,14
3	Gedung dan Bangunan	794.793.378.334,16	719.111.405.819,66
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.301.044.811.594,24	1.235.419.949.690,20
5	Aset tetap lainnya	87.161.832.504,71	85.432.671.685,71
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	1.778.987.297,00	8.402.727.432,20
J u m l a h		3.148.862.929.688,36	2.946.273.898.979,78
Akumulasi Penyusutan		(1.124.943.527.339,61)	(999.062.323.851,54)
Nilai Buku Aset Tetap		2.023.919.402.348,75	1.947.211.575.128,24

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.3.42

Mutasi Aset Tetap tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2022 (Rp)	Mutasi		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	566.178.193.169,87	45.013.642.999,00	6.036.706.993,87	605.155.129.175,00
2	Peralatan dan Mesin	331.728.951.182,14	37.850.608.648,06	10.650.769.046,95	358.928.790.783,25
3	Gedung dan Bangunan	719.111.405.819,66	86.552.394.047,99	10.870.421.533,49	794.793.378.334,16
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.235.419.949.690,20	85.518.681.360,04	19.893.819.456,00	1.301.044.811.594,24
5	Aset Tetap Lainnya	85.432.671.685,71	2.213.311.119,00	484.150.300,00	87.161.832.504,71
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	8.402.727.432,20	24.986.020.153,80	31.609.760.289,00	1.778.987.297,00
	Jumlah	2.946.273.898.979,78	282.134.658.327,89	79.545.627.619,31	3.148.862.929.688,36
	Akumulasi Penyusutan	(999.062.323.851,54)	(135.510.369.076,18)	(9.629.165.588,11)	(1.124.943.527.339,61)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.947.211.575.128,24	146.624.289.251,71	69.916.462.031,20	2.023.919.402.348,75

Penambahan Aset Tetap senilai Rp282.134.658.327,89 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp147.460.020.226,00;
- b. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp41.163.001.610,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 134.4/007/07.3/2023 dan Nomor 180/1/NKD/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 (**Lampiran 22**);
- c. Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan senilai Rp150.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 300.1.7/8164/BAK/XII/2022 dan Nomor: 364/BAST/DAMKAR/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 (**Lampiran 22**);
- d. Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp640.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/204/2023 tanggal 5 September 2023 (**Lampiran 22**);
- e. Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp292.300.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/130/2023 tanggal 7 Agustus 2023 (**Lampiran 22**);
- f. Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp29.750.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 tanggal 11 Desember 2023 (**Lampiran 22**);
- g. Hibah dari Masyarakat senilai Rp8.100.000,00 (**Lampiran 22**);
- h. Kapitalisasi atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp213.360.000,00;
- i. Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.309.361.109,00;
- j. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp33.815.181.944,80;
- k. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp2.594.798.877,03;
- l. Reklas antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp54.444.924.561,06; dan
- m. Reklas tambah dari Aset Lain-lain senilai Rp13.860.000,00.



Pengurangan Aset Tetap senilai Rp79.545.627.619,31 terdiri dari:

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/325/900.32/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota senilai Rp647.869.654,18;
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/555/900.32/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota senilai Rp995.989.193,65;
- c. Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/674/900.32/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp431.250.539,69;
- d. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi atas Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Bima dengan Polres Bima Kota Nomor : 600/1359/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 senilai Rp199.843.000,00;
- e. Pengurangan Aset Tetap atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/845/900.32/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2023 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp1.431.805.489,35;
- f. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp12.418.245.491,30;
- g. Pengurangan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp2.594.798.877,03;
- h. Reklasifikasi antar KIB senilai Rp54.444.924.561,06;
- i. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap dan Koreksi Kode Rekening senilai Rp2.267.931.317,00;
- j. Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang kurang volume pekerjaan senilai Rp402.049.000,00; dan
- k. Pengurangan Aset yang disebabkan adanya Koreksi kurang yang direklasifikasi ke Properti Investasi senilai Rp3.710.920.496,05.

5.3.1.3.1 Tanah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	605.155.129.175,00	566.178.193.169,87

Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp605.155.129.175,00 mengalami kenaikan senilai Rp38.976.936.005,13 atau 6,88% dibandingkan tahun 2022 Rp566.178.193.169,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Rincian Aset Tanah Tahun 2023 dan 2022

No.	Tanah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah Persil	136.488.254.052,34	115.483.039.046,21



No.	Tanah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2	Tanah Non Persil	284.343.756.232,00	283.271.191.233,00
3	Lapangan	184.323.118.890,66	167.423.962.890,66
	Jumlah	605.155.129.175,00	566.178.193.169,87

Mutasi Tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	566.178.193.169,87
Penambahan Tahun 2023	45.013.642.999,00
Pengurangan Tahun 2023	6.036.706.993,87
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	605.155.129.175,00

Penambahan Aset Tanah Tahun 2023 senilai Rp.45.013.642.999,00 berasal dari:

- Belanja modal tanah Tahun 2023 senilai Rp1.094.391.000,00;
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp15.922.292.000,00; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 134.4/007/07.3/2023 & 180/1/NKD/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023; **Lampiran 22.**
- Hibah dari Masyarakat senilai Rp8.100.000,00; **Lampiran 22.**
- Kapitalisasi atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp3.710.000,00;
- Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang dan Koreksi Kode Rekening pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp27.971.289.999,00;
- Reklas tambah dari Aset Lain-lain senilai Rp13.860.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2023 senilai Rp6.036.706.993,87 terdiri dari :

- Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/325/900.32/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota senilai Rp38.436.454,18;
- Pengurangan Aset Tetap Tanah atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/674/900.32/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp431.250.539,69;
- Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan adanya Koreksi Kode Rekening/Penggabungan pencatatan Aset senilai Rp1.919.200.000,00 pada Sekretariat Daerah;
- Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan Koreksi Kurang atas Tanah Bermasalah yang sudah bersertifikat atas nama Warga senilai Rp28.600.000,00;
- Pengurangan Aset Tetap Tanah yang disebabkan adanya Koreksi berupa Reklas ke Properti Investasi senilai Rp2.912.375.000,00.
- Pengurangan Aset Tetap Tanah yang disebabkan Reklas ke Aset Lainnya senilai Rp706.845.000,00 pada Sekretariat Daerah.



Jumlah tanah sebanyak 798 objek yang terdiri dari 524 objek yang bersertifikat, dan yang tidak bersertifikat sebanyak 274 objek.

Selama tahun 2023 tidak ada penambahan penerbitan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh BPKAD Bidang BMD tahun 2012 dan Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bima tahun 2016 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima. Upaya sertifikasi akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan Kota Bima.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.44
Penerbitan Sertifikat Tanah masih dalam Proses

No.	Uraian	2022		Terbit 2023		Sisa dalam proses s/d Tahun 2023		Keterangan
		Jumlah Bidang	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Luas (m ²)	
1	Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2012	8	36.272	0,00	0,00	8	36.272	BPKAD Bidang Aset
2	Pengajuan Penerbitan Sertifikat 2016	6	12.981	0,00	0,00	6	12.981	Bag. Administrasi Pemerintahan
	JUMLAH	14	49.253	0,00	0,00	14	49.253	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<u>358.928.790.783,25</u>	<u>331.728.951.182,14</u>

Saldo Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp358.928.790.783,25 mengalami kenaikan senilai Rp27.199.839.601,11 atau 8,20% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp331.728.951.182,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.45
Rincian Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

No.	Peralatan dan Mesin	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Besar Darat	11.876.642.202,00	11.500.431.811,00
2	Alat Besar Apung	49.527.500,00	49.527.500,00
3	Alat Bantu	2.001.690.342,83	1.759.673.315,83
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	67.963.627.581,33	62.626.305.638,31
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.133.226.612,68	3.098.226.612,68
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	8.866.755.159,50	8.766.955.159,50
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	846.590.750,00	648.192.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.042.049.525,11	1.039.766.025,11



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	Peralatan dan Mesin	2023 (Rp)	2022 (Rp)
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	395.593.340,66	395.593.340,66
10	Alat Ukur	2.267.857.647,33	2.275.182.647,33
11	Alat Pengolahan	5.394.192.415,57	5.277.636.540,57
12	Alat Kantor	15.198.729.069,73	13.397.517.918,34
13	Alat Rumah Tangga	38.962.612.231,85	36.657.050.211,55
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.968.772.461,24	8.319.140.124,24
15	Alat Studio	10.737.034.612,05	10.449.988.475,05
16	Alat Komunikasi	3.117.901.620,19	2.849.439.979,74
17	Peralatan Pemancar	1.912.524.975,28	1.912.524.975,28
18	Alat Kedokteran	43.638.092.704,02	42.866.097.104,02
19	Alat Kesehatan Umum	38.892.831.640,17	28.587.404.647,17
20	Unit Alat Laboratorium	10.378.214.601,91	10.384.463.351,91
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	291.813.083,65	291.813.083,65
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	19.283.133.251,84	19.273.127.251,84
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	159.486.875,00	159.486.875,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184.444.000,00	184.444.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	668.534.375,00	668.534.375,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	204.114.085,75	204.114.085,75
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.300.000,00	2.300.000,00
28	Senjata Api	24.906.800,00	24.906.800,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	356.797.000,00	29.375.000,00
30	Alat Khusus Kepolisian	9.797.150,00	9.797.150,00
31	Komputer Unit	45.142.012.442,34	42.392.107.650,01
32	Peralatan Komputer	12.686.214.662,22	11.536.162.768,60
33	Alat Deteksi	101.950.000,00	101.950.000,00
34	Alat Pelindung	39.128.000,00	30.000.000,00
35	Alat Sar	344.221.700,00	344.221.700,00
36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.238.637.100,00	3.078.263.600,00
37	Peralatan Olah Raga	546.833.264,00	537.229.464,00
	Jumlah	358.928.790.783,25	331.728.951.182,14
	Akumulasi Penyusutan	(254.269.148.413,81)	(226.313.432.097,54)
	Nilai Buku Peralatan dan Mesin	104.659.642.369,44	105.415.519.084,60

Tabel 5.3.46

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Alat Besar Darat	11.500.431.811,00	947.000.000,00	570.789.609,00	11.876.642.202,00
2	Alat Besar Apung	49.527.500,00	0,00	0,00	49.527.500,00
3	Alat Bantu	1.759.673.315,83	242.017.027,00	0,00	2.001.690.342,83

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	62.626.305.638,31	12.683.904.312,00	7.346.582.368,98	67.963.627.581,33
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.098.226.612,68	35.000.000,00	0,00	3.133.226.612,68
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	8.766.955.159,50	99.800.000,00	0,00	8.866.755.159,50
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	648.192.000	198.398.750,00	0,00	846.590.750,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.039.766.025,11	2.283.500,00	0,00	1.042.049.525,11
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	395.593.340,66	0,00	0,00	395.593.340,66
10	Alat Ukur	2.275.182.647,33	0,00	7.325.000,00	2.267.857.647,33
11	Alat Pengolahan	5.277.636.540,57	116.555.875,00	0,00	5.394.192.415,57
12	Alat Kantor	13.397.517.918,34	2.045.072.541,95	243.861.390,56	15.198.729.069,73
13	Alat Rumah Tangga	36.657.050.211,55	3.602.957.199,11	1.297.395.178,81	38.962.612.231,85
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.319.140.124,24	746.672.337,00	97.040.000,00	8.968.772.461,24
15	Alat Studio	10.449.988.475,05	316.886.137,00	29.840.000,00	10.737.034.612,05
16	Alat Komunikasi	2.849.439.979,74	298.713.496,00	30.251.855,55	3.117.901.620,19
17	Peralatan Pemancar	1.912.524.975,28	0,00	0,00	1.912.524.975,28
18	Alat Kedokteran	42.866.097.104,02	771.995.600,00	0,00	43.638.092.704,02
19	Alat Kesehatan Umum	28.587.404.647,17	10.319.886.010,00	14.459.017,00	38.892.831.640,17
20	Unit Alat Laboratorium	10.384.463.351,91	16.270.000,00	22.518.750,00	10.378.214.601,91
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	291.813.083,65	0,00	0,00	291.813.083,65
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	19.273.127.251,84	60.495.800,00	50.489.800,00	19.283.133.251,84
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	159.486.875,00	0,00	0,00	159.486.875,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	184.444.000,00	0,00	0,00	184.444.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	668.534.375,00	0,00	0,00	668.534.375,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	204.114.085,75	0,00	0,00	204.114.085,75
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
28	Senjata Api	24.906.800,00	0,00	0,00	24.906.800,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	29.375.000,00	327.422.000,00	0,00	356.797.000,00
30	Alat Khusus Kepolisian	9.797.150,00	0,00	0,00	9.797.150,00
31	Komputer Unit	42.392.107.650,01	3.558.992.463,79	809.087.671,46	45.142.012.442,34
32	Peralatan Komputer	11.536.162.768,60	1.251.180.299,21	101.128.405,59	12.686.214.662,22
33	Alat Deteksi	101.950.000,00	0,00	0,00	101.950.000,00
34	Alat Pelindung	30.000.000,00	39.128.000,00	30.000.000,00	39.128.000,00

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
35	Alat Sar	344.221.700,00	0,00	0,00	344.221.700,00
36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.078.263.600,00	160.373.500,00	0,00	3.238.637.100,00
37	Peralatan Olah Raga	537.229.464,00	9.603.800,00	0,00	546.833.264,00
J u m l a h		331.728.951.182,14	37.850.608.648,06	10.650.769.046,95	358.928.790.783,25
Akumulasi Penyusutan		(226.313.432.097,54)	(36.838.391.673,38)	(8.882.675.357,11)	(254.269.148.413,81)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		105.415.519.084,60	1.012.216.974,68	1.768.093.689,84	104.659.642.369,44

U r a i a n	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	331.728.951.182,14
Penambahan Tahun 2022	37.850.608.648,06
Pengurangan Tahun 2022	10.650.769.046,95
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	358.928.790.783,25
Akumulasi Penyusutan	(254.269.148.413,81)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	104.659.642.369,44

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 senilai Rp37.850.608.648,06 berasal dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 senilai Rp35.595.128.839,00;
- Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang/jasa senilai Rp118.390.000,00;
- Kapitalisasi atas belanja barang dan jasa konsultan perencana serta konsultan pengawasan senilai Rp501.329.229,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2023 senilai Rp288.924.500,00;
- Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp640.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Bima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/204/2023 tanggal 5 September 2023 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp292.300.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Bima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/130/2023 tanggal 7 Agustus 2023 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senilai Rp29.750.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Bima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 tanggal 11 Desember 2023 (**Lampiran 22**);
- Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan senilai Rp150.000.000,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 300.1.7/8164/BAK/XII/2022 dan Nomor: 364/BAST/DAMKAR/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, (**Lampiran 22**);
- Reklas dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp214.806.080,06 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp19.980.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima;

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2023 senilai Rp10.650.769.046,95 terdiri atas :



- a. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2023 senilai Rp288.924.500,00;
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/555/900.32/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota senilai Rp995.989.193,65 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- c. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp68.344.500,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima (**Lampiran 23**);
- d. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp39.347.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima (**Lampiran 23**);
- e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp14.459.017,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima (**Lampiran 23**);
- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp199.860.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima;
- g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp198.398.200,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- h. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp25.764.300,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima;
- i. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp8.819.682.336,30.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 21.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 terkait kendaraan dinas tidak didukung BPKB adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.47
Kendaraan Dinas Yang Tidak Didukung BPKB

No.	Uraian	Audited 2022		Sudah Ada Tahun 2023		Belum Ada	
		Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
1	Mobil Tangki/Tinja	1	125.000.000,00	0	0,00	1	125.000.000,00
2	Pick Up	1	170.092.500,00	0	0,00	1	170.092.500,00
3	Semi Trailer	2	80.000.000,00	0	0,00	2	80.000.000,00
4	Sepeda Motor	38	621.261.450,00	0	0,00	38	621.261.450,00
5	Station Wagon	10	2.217.272.000,00	0	0,00	10	2.217.272.000,00
6	Truck + Attachment	7	655.750.000,00	0	0,00	7	655.750.000,00
	JUMLAH	59	3.869.375.950,00	0	0,00	59	3.869.375.950,00



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	794.793.378.334,16	719.111.405.819,66

Saldo Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp794.793.378.334,16 mengalami kenaikan senilai Rp75.681.972.514,50 atau 10,52% dibanding dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp719.111.405.819,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.48

Nilai Bangunan dan Gedung Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Gedung dan Bangunan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	666.695.208.864,16	606.026.215.987,33
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	61.395.118.768,68	51.510.668.968,68
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.101.363.078,25	5.101.363.078,25
4	Bangunan Menara Perambuan	604.570.000,00	604.570.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	60.997.117.623,07	55.868.587.785,40
Jumlah		794.793.378.334,16	719.111.405.819,66
Akumulasi Penyusutan		(160.257.124.768,00)	(142.289.606.965,00)
Nilai Buku Bangunan dan Gedung		634.536.253.566,16	576.821.798.854,66

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.49

Mutasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	606.026.215.987,33	70.429.051.410,32	9.760.058.533,49	666.695.208.864,16
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.510.668.968,68	10.246.360.800,00	361.911.000,00	61.395.118.768,68
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.101.363.078,25	0,00	0,00	5.101.363.078,25
4	Bangunan Menara Perambuan	604.570.000,00	0,00	0,00	604.570.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	55.868.587.785,40	5.876.981.837,67	748.452.000,00	60.997.117.623,07
Jumlah		719.111.405.819,66	86.552.394.047,99	10.870.421.533,49	794.793.378.334,16
Akumulasi Penyusutan		(142.289.606.965,00)	(18.712.342.676,00)	(744.824.873,00)	(160.257.124.768,00)
Nilai Buku Bangunan dan Gedung		576.821.798.854,66	67.840.051.371,99	10.125.596.660,49	634.536.253.566,16

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	719.111.405.819,66
Penambahan Tahun 2023	86.552.394.047,99
Pengurangan Tahun 2023	10.870.421.533,49
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	794.793.378.334,16
Akumulasi Penyusutan	(160.257.124.768,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	634.536.253.566,16



Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp86.552.394.047,99 berasal dari :

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp49.102.960.640,00;
- b. Kapitalisasi atas belanja honorarium pengadaan barang/jasa senilai Rp89.900.000,00;
- c. Kapitalisasi atas belanja barang dan Jasa senilai Rp379.463.780,00;
- d. Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp2.305.874.377,03;
- e. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai Rp25.240.709.610,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 134.4/007/07.3/2023 dan Nomor 180/1/NKD/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 (**Lampiran 22**);
- f. Reklas tambah dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp199.860.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima;
- g. Reklas tambah dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp198.398.200,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima;
- h. Reklas tambah dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp345.000.000,00
- i. Reklas tambah dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.774.441.782,20 pada Dinas Kesehatan Kota Bima
- j. Reklas tambah dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.270.538.174,76
- k. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp2.645.247.484,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 senilai Rp10.870.421.533,49 terdiri atas :

- a. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/845/900.32/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah di Proses Pembongkaran Tahun 2023 dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp1.431.805.489,35;
- b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Mutasi antar Perangkat Daerah (PD) senilai Rp2.305.874.377,03;
- c. Pengurangan Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan atas Hibah berdasarkan SK. Walikota Bima Nomor : 188.45/325/900.32/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bima Yang Telah dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota senilai Rp609.433.200,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima (**Lampiran 26**);
- d. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp214.806.080,06 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- e. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.529.357.736,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima;
- f. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke Persediaan senilai Rp68.931.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
- g. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke Persediaan senilai Rp20.000.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima;
- h. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya senilai Rp526.868.200,00 pada Sekretariat Daerah Kota Bima.



- i. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya senilai Rp2.304.849.955,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima;
- j. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Non Lancar (Properti Investasi) senilai Rp62.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- k. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp59.950.000,00;
- l. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Non Lancar (Properti Investasi) senilai Rp736.545.496,05 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	1.301.044.811.594,24	1.235.419.949.690,20

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp1.301.044.811.594,24 mengalami kenaikan senilai Rp65.624.861.904,04 atau 5,31% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.235.419.949.690,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.50
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jalan	822.649.967.324,03	779.650.613.819,99
2	Jembatan	79.400.869.266,85	78.260.494.266,85
3	Bangunan Air Irigasi	69.896.568.783,21	65.496.948.583,21
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.926.462.554,99	2.926.462.554,99
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.409.472.769,23	2.409.472.769,23
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	149.225.302.227,48	147.162.749.227,48
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	13.054.322.484,42	13.054.322.484,42
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.230.110.892,52	16.323.497.192,52
9	Bangunan Air Kotor	28.264.795.892,68	21.165.089.392,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	41.460.577.516,26	41.460.577.516,26
11	Instalasi Air Kotor	2.584.445.101,23	2.584.445.101,23
12	Instalasi Pengolahan Sampah	343.260.000,00	343.260.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	2.958.400.000,00	2.958.400.000,00
14	Instalasi Gardu Listrik	3.084.761.882,85	3.084.761.882,85
15	Instalasi Pengaman	22.250.000,00	22.250.000,00
16	Jaringan Air Minum	26.672.127.807,55	26.672.127.807,55
17	Jaringan Listrik	26.426.602.348,94	24.409.962.348,94
18	Jaringan Telepon	49.200.000,00	49.200.000,00
19	Jaringan Gas	7.385.314.742,00	7.385.314.742,00
	Jumlah	1.301.044.811.594,24	1.235.419.949.690,20
	Akumulasi Penyusutan	(710.417.254.157,80)	(630.459.284.789,00)
	Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan	590.627.557.436,44	604.960.664.901,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.51
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Jalan	779.650.613.819,99	58.268.207.213,04	15.268.853.709,00	822.649.967.324,03
2	Jembatan	78.260.494.266,85	1.755.636.236,00	615.261.236,00	79.400.869.266,85
3	Bangunan Air Irigasi	65.496.948.583,21	4.537.246.700,00	137.626.500,00	69.896.568.783,21
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.926.462.554,99	0,00	0,00	2.926.462.554,99
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.409.472.769,23	0,00	0,00	2.409.472.769,23
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	147.162.749.227,48	2.062.553.000,00	0,00	149.225.302.227,48
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	13.054.322.484,42	0,00	0,00	13.054.322.484,42
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	16.323.497.192,52	7.614.590.711,00	1.707.977.011,00	22.230.110.892,52
9	Bangunan Air Kotor	21.165.089.392,68	9.263.807.500,00	2.164.101.000,00	28.264.795.892,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	41.460.577.516,26	0,00	0,00	41.460.577.516,26
11	Instalasi Air Kotor	2.584.445.101,23	0,00	0,00	2.584.445.101,23
12	Instalasi Pengolahan Sampah	343.260.000,00	0,00	0,00	343.260.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	2.958.400.000,00	0,00	0,00	2.958.400.000,00
14	Instalasi Gardu Listrik	3.084.761.882,85	0,00	0,00	3.084.761.882,85
15	Instalasi Pengaman	22.250.000,00	0,00	0,00	22.250.000,00
16	Jaringan Air Minum	26.672.127.807,55	0,00	0,00	26.672.127.807,55
17	Jaringan Listrik	24.409.962.348,94	2.016.640.000,00	0,00	26.426.602.348,94
18	Jaringan Telepon	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00
19	Jaringan Gas	7.385.314.742,00	0,00	0,00	7.385.314.742,00
Jumlah		1.235.419.949.690,20	85.518.681.360,04	19.893.819.456,00	1.301.044.811.594,24
Akumulasi Penyusutan		(630.459.284.789,00)	(79.959.634.726,80)	(1.665.358,00)	(710.417.254.157,80)
Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan		604.960.664.901,20	5.559.046.633,24	19.892.154.098,00	590.627.557.436,44

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	1.235.419.949.690,20
Penambahan Tahun 2023	85.518.681.360,04
Pengurangan Tahun 2023	19.893.819.456,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	1.301.044.811.594,24
Akumulasi Penyusutan	(710.417.254.157,80)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	590.627.557.436,44

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 senilai Rp85.518.681.360,04 berasal dari :

- a. Belanja Modal tahun 2023 senilai Rp59.909.921.028,00;

Handwritten signature



- b. Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp23.592.120.332,04 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- c. Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.972.660.000,00 pada Dinas Perhubungan Kota Bima;
- d. Koreksi tambah atas kurang catat nilai perolehan barang pada Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Bima senilai Rp43.980.000,00 pada Dinas Perhubungan Kota Bima

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 senilai Rp19.893.819.456,00 terdiri atas:

- a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Bima dengan Polres Bima Kota Nomor : 600/1359/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 senilai Rp199.843.000,00 (**Lampiran 26**);
- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang direklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp19.301.997.956,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima;
- c. Koreksi Kurang (-) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp49.879.500,00 (**Lampiran 23**);
- d. Koreksi kurang (-) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan adanya kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal senilai Rp342.099.000,00 (**Lampiran 23**);

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	87.161.832.504,71	85.432.671.685,71

Aset Tetap Lainnya senilai Rp87.161.832.504,71 dan Rp85.432.671.685,71 merupakan nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.52
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Aset Tetap Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	82.847.617.053,71	81.361.420.634,71
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	341.944.251,00	341.944.251,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.889.651.200,00	1.681.859.200,00
4	Musik	48.370.000,00	48.370.000,00
5	Three Dimensional Artefacts And Realita	99.500.000,00	99.500.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	433.676.000,00	403.003.600,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	753.560.000,00	749.060.000,00
8	Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	742.514.000,00	742.514.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		87.161.832.504,71	85,432,671,685,71



Tabel 5.3.53

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	81.361.420.634,71	1.832.946.419,00	346.750.000,00	82.847.617.053,71
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	341.944.251,00	117.420.300,00	117.420.300,00	341.944.251,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.681.859.200,00	207.792.000,00	0,00	1.889.651.200,00
4	Musik	48.370.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	48.370.000,00
5	Three Dimensional Artefacts And Realita	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	403.003.600,00	30.672.400,00	0,00	433.676.000,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	749.060.000,00	4.500.000,00	0,00	753.560.000,00
8	Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	742.514.000,00	0,00	0,00	742.514.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	85.432.671.685,71	2.213.311.119,00	484.150.300,00	87.161.832.504,71

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	85.432.671.685,71
Penambahan Tahun 2023	2.213.311.119,00
Pengurangan Tahun 2023	484.150.300,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	87.161.832.504,71

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 senilai Rp2.213.311.119,00 terdiri dari:

- Belanja Modal tahun 2023 senilai Rp1.757.618.719,00;
- Kapitalisasi atas Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp1.360.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima;
- Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp209.642.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
- Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp11.134.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
- Kapitalisasi atas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp207.792.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima;
- Reklas tambah dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp25.764.300,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima;

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 senilai Rp484.150.300,00 terdiri dari:



- a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp29.964.450,00 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima (**Lampiran 23**);
- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp27.455.850,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima (**Lampiran 23**);
- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang disebabkan adanya Koreksi kurang atas Belanja Modal yang tidak tercatat sebagai aset tetap senilai Rp1.750.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima (**Lampiran 23**);
- d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Lainnya senilai Rp60.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
- e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp19.980.000,00 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima;
- f. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp345.000.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		1.778.987.297,00	8.402.727.432,20

Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 senilai Rp1.778.987.297,00 dan Rp8.402.727.432,20 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.54

Rincian Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	174.570.250,00	2.774.441.782,20
2	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	1.604.417.047,00	5.628.285.650,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1.778.987.297,00	8.402.727.432,20

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.55

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	MUTASI		2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Gedung dan Bangunan	2.774.441.782,20	3.445.108.424,76	6.044.979.956,96	174.570.250,00
2	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	5.628.285.650,00	21.540.911.729,04	25.564.780.332,04	1.604.417.047,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	8.402.727.432,20	24.986.020.153,80	31.609.760.289,00	1.778.987.297,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	8.402.727.432,20
2	Penambahan Tahun 2023	24.986.020.153,80
3	Pengurangan Tahun 2023	31.609.760.289,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.778.987.297,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	1.124.943.527.339,61	999.062.323.851,54

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp1.124.943.527.339,61 dan Rp999.062.323.851,54.

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 disajikan sebagaimana tertuang pada rincian **Lampiran 24**.

Tabel 5.3.56

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(254.269.148.413,81)	(226.313.432.097,54)
3	Gedung dan Bangunan	(160.257.124.768,00)	(142.289.606.965,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(710.417.254.157,80)	(630.459.284.789,00)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.124.943.527.339,61)	(999.062.323.851,54)

Tabel 5.3.57

Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Nilai Perolehan 31-12-2023	Saldo Awal 2022(Rp)	MUTASI		Saldo Akhir 2023 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	(605.155.129.175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(358.928.790.783,25)	(226.313.432.097,54)	(36.838.391.673,38)	(8.882.675.357,11)	(254.269.148.413,81)
3	Gedung dan Bangunan	(791.525.478.159,40)	(142.289.606.965,00)	(18.712.342.676,00)	(744.824.873,00)	(160.257.124.768,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.281.389.649.912,20)	(630.459.284.789,00)	(79.959.634.726,80)	(1.665.358,00)	(710.417.254.157,80)
5	Aset Tetap Lainnya	(87.161.832.504,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(21.547.384.692,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.145.708.265.226,56)	(999.062.323.851,54)	(135.510.369.076,18)	(9.629.165.588,11)	(1.124.943.527.339,61)

Handwritten signature



Mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	(999.062.323.851,54)
Penambahan Tahun 2023	(135.511.916.047,18)
Pengurangan Tahun 2023	(9.630.712.559,11)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	(1.124.943.527.339,61)

5.3.1.4 Properti Investasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	10.483.729.499,55	0,00

Properti Investasi pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.483.729.499,55 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Properti Investasi terdiri dari tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bima yang di sewakan pada pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.58
Properti Investasi Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2023
1	Properti Investasi Tanah	3.886.030.071,50	3.072.305.000,00	172.000.000,00	6.786.335.071,50
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	3.786.023.770,00	798.545.496,05	0,00	4.584.569.266,05
	Jumlah Aset Non Lancar	7.672.053.841,50	3.870.850.496,05	172.000.000,00	11.370.904.337,55
	Akumulasi Penyusutan	(786.433.551,00)	(100.741.287,00)	0,00	(887.174.838,00)
	Nilai Buku Aset Non Lancar	6.885.620.290,50	3.770.109.209,05	172.000.000,00	10.483.729.499,55

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	6.885.620.290,50
2	Penambahan Tahun 2023	3.870.850.496,05
3	Pengurangan Tahun 2023	172.000.000,00
	Jumlah aset non lancar	10.584.470.786,55
	Akumulasi Penyusutan	(100.741.287,00)
	Nilai Buku Aset Non Lancar	10.483.729.499,55

5.3.1.4.1 Properti Investasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	11.370.904.337,55	0,00

Properti Investasi pada Neraca Pemerintah Kota Bima sebelum di kurangi dengan Akumulasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.370.904.337,55. Properti Investasi terdiri dari tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bima yang di sewakan pada pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut.

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Sesuai Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi, Kota Bima memiliki Properti Investasi Kota Bima Tahun Anggaran 2023
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.59
Rincian Properti Investasi Kota Bima Tahun 2023

No.	URAIAN ASET	SALDO AWAL 2023	BERTAMBAH 2023		BERKURANG 2023		SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI	AKUMULASI PROPERTIS INVESTASI 2023	SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI
		NILAI BUKU	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI	AKUMU LASI PENYU SUTAN			
A	TANAH	3.886.030.071,50	3.072.305.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00	6.786.335.071,50	0,00	6.786.335.071,50
1	SEWA TANAH BANGUNAN PERTOKOAN DI KEL. PARUGA OLEH BANK BPR	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
2	SEWA TANAH SAWAH SO LACICI ASAKOTA ST. HALIMAH	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
3	SEWA TANAH SAWAH SO KALATE PENATOI A. HALIK	2.002.029.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.029.071,50	0,00	2.002.029.071,50
4	SEWA TANAH SAWAH SO KALATE PENATOI SUDIRMAN YUSUF	559.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	387.000.000,00	0,00	387.000.000,00
5	SEWA TANAH SAWAH SO KALATE PENATOI SUDIRMAN YUSUF	409.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500.000,00	0,00	409.500.000,00
6	SEWA TANAH SAWAH SO KAWINDA PENARAGA ABDULLAH ABIDIN	685.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.501.000,00	0,00	685.501.000,00
7	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN LAMPE, AHMAD	0,00	50.310.000,00	0,00	0,00	0,00	50.310.000,00	0,00	50.310.000,00
8	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, MASHUDIN	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
9	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, AHMAD	0,00	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00	0,00	9.630.000,00
10	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, BAHARUDIN	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00
11	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, DARMAWATI	0,00	9.090.000,00	0,00	0,00	0,00	9.090.000,00	0,00	9.090.000,00
12	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, FITRATUNNISA	0,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
13	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, IKRALA	0,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
14	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, MA'ANI	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	URAIAN ASET	SALDO AWAL 2023		BERTAMBAH 2023		BERKURANG 2023		SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI	AKUMULASI PROPERTIS INVESTASI 2023	SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI
		NILAI BUKU	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				
15	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, MUHAMAD NUR	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00	
16	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, MUHAMMAD JAFAR	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
17	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, SRIYANTI	0,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	
18	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, SUDIRMAN	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	
19	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, SUGIANTO	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	
20	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, SUKRIN	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	
21	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN NTOBO, TAMRIN	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	
22	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN RABANGODU SELATAN, DEDY MULYADIN	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	
23	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN JATIBARU, ILYAS	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	
24	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN SAMBINAE, MASHULLAH	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
25	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN KODO, NAZAMUDDIN	0,00	12.690.000,00	0,00	0,00	0,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	
26	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN KENDO, SAIDIN	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
27	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN SAMBINAE, SAOKI FUTAKIN	0,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	
28	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN MATAKANDO, ILHAM	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
29	SEWA TANAH SAWAH DI KELURAHAN PENATOI, SYAHRIR	0,00	1.707.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.707.200.000,00	0,00	1.707.200.000,00	
30	SEWA TANAH BUMI PERKEMAHAN GATSU, SABATIA	0,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00	0,00	1.020.000.000,00	
31	SEWA TANAH BUMI PERKEMAHAN GATSU, M. OLLAH ARSYAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	URAIAN ASET	SALDO AWAL 2023		BERTAMBAH 2023		BERKURANG 2023		SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI	AKUMULASI PROPERTIS INVESTASI 2023	SALDO AKHIR 2023 PROPERTIS INVESTASI
		NILAI BUKU	NILAI	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			
32	SEWA TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOL.III / Ir. H. ABIDIN HAMZAH	0,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
									-	-
B	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.999.590.219,00	798.545.496,05	100.741.287,00				4.584.569.266,05	887.174.838,00	3.697.394.428,05
				0,00	0,00	0,00		-	-	-
1	SEWA KIOS PASAR PENARAGA	1.186.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.640.000,00	320.161.000,00	1.186.479.000,00
2	PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN ASAKOTA KOTABIMA	109.048.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.189.550,00	24.140.601,00	109.048.949,00
3	PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN ASAKOTA KOTABIMA	125.901.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.660.220,00	11.758.479,00	125.901.741,00
4	PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN ASAKOTA KOTABIMA	139.376.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.035.000,00	7.658.073,00	139.376.927,00
5	Pabrik Es	1.438.783.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.499.000,00	422.715.398,00	1.438.783.602,00
6	SEWA BANGUNAN RUMAH NEGARA GOL.III TYPE C PERMANEN / SARBUDIN, ST	0,00	62.000.000,00	1.291.667,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	1.291.667,00	60.708.333,00
7	SEWA KIOS / LAPAK LAWATA	0,00	195.772.748,03	25.287.310,00	0,00	0,00	0,00	195.772.748,03	25.287.310,00	170.485.438,03
8	SEWA KIOS / LAPAK LAWATA	0,00	195.772.748,02	25.287.310,00	0,00	0,00	0,00	195.772.748,02	25.287.310,00	170.485.438,02
9	SEWA KIOS / LAPAK LAWATA (2 Orang Penyewa)	0,00	345.000.000,00	48.875.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000.000,00	48.875.000,00	296.125.000,00
	J U M L A H	6.885.620.290,50	3.870.850.496,05	100.741.287,00	172.000.000,00	0,00	0,00	11.370.904.337,55	887.174.838,00	10.483.729.499,55

5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 31-12-2023(Rp) 31-12-2022 (Rp)
(887.174.838,00) **0,00**

Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan Properties Investasi Per 31 Desember 2023 senilai 887.174.838,00 dan Per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00. Yang berasal dari sewa gedung dan bangunan.

5.3.1.5 DANA CADANGAN 31-12-2023 (Rp) 31-12-2022 (Rp)
0,00 **0,00**

Saldo Nilai Dana Cadangan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.



5.3.1.5.1	Dana Caadangan	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Dana Cadangan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.6	Aset Lainnya	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		53.014.633.951,14	25.475.127.372,73

Saldo Nilai Buku Aset Lainnya Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp53.014.633.951,14 dan mengalami kenaikan senilai Rp27.539.506.578,41 atau 108,10% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp25.475.127.372,73.

Berikut adalah Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.60
Rincian Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Aset Lainnya	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
1	Tagihan Jangka Panjang	34.766.666,67	34.766.666,67
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	2.764.386.035,00	2.596.965.735,00
4	Aset Lain-lain (Barang Rusak Berat)	48.370.250.387,82	47.495.533.644,56
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(829.668.867,45)	(692.600.664,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(29.473.262.830,90)	(29.069.395.063,50)
7	Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	29.342.498.000,00	5.109.857.054,00
8	Aset Lain-Lain Lainnya	2.805.664.560,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	53.014.633.951,14	25.475.127.372,73

5.3.1.6.1	Tagihan Jangka Panjang	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		34.766.666,67	34.766.666,67

Saldo Nilai Buku Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp34.766.666,67 dan Rp34.766.666,67. Yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi.



5.3.1.6.1.1	Tagihan Penjualan Angsuran	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Saldo Nilai Buku Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.6.1.2	Tuntutan Ganti Rugi	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		34.766.666,67	34.766.666,67

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp34.766.666,67 dan tidak mengalami penurunan/kenaikan jika dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp34.766.666,67.

Tuntutan Ganti Rugi terdiri tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharan atau pejabat lain.

Berikut adalah Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.61
Rincian Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 dan 2022

No	Aset Lainnya	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2022
1	Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	34.766.666,67	34.766.666,67
2	tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharan atau pejabat lain.	0,00	0,00
	Jumlah	34.766.666,67	34.766.666,67

5.3.1.6.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Saldo Nilai Buku Kemitraan dengan Pihak Ketiga Angsuran Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan nilai Per 31 Desember 2022 Rp0,00.

5.3.1.6.3	Aset Tak Berwujud	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		2.764.386.035,00	2.596.965.735,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp2.764.386.035,00 dan 2022 Rp2.596.965.735,00 merupakan Aset Tak Berwujud berupa Perangkat Lunak/*Software*. Rincian Aset Tak Berwujud tahun 2023 adalah sebagai berikut:

E N



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Tabel 5.3.62
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Nilai Perolehan 31/12/2022	Amortisasi 31/12/2022	Tambah Amortisasi 31/12/2023	Penambahan Nilai Perolehan (Rp.)	Saldo 31/12/2023	Nilai Buku 31/12/2022
1	Dinas Kesehatan	190.480.000,00	75.601.500,00	9.524.000,00	0,00	190.480.000,00	105.354.500,00
2	BPKAD	443.650.000,00	188.115.000,00	22.182.500,00	0,00	443.650.000,00	233.352.500,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.850.000,00	8.910.000,00	742.500,00	0,00	14.850.000,00	5.197.500,00
4	Sekretariat Daerah	34.100.000,00	13.640.000,00	2.205.000	20.000.000,00	54.100.000,00	38.255.000,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	436.096.000,00	152.206.488,00	21.804.800,00	0,00	436.096.000,00	262.084.712,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.349.432.275,00	239.443.277,00	68.844.406,20	27.455.850,00	1.376.888.125,00	1.068.600.441,80
7	Dinas Sosial	10.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	10.000.000,00	7.000.000,00
8	BPBD	31.960.260,00	4.794.039,00	3.196.026,00	0,00	31.960.260,00	23.970.195,00
9	Dinas Tenaga Kerja	46.410.000,00	4.641.000,00	2.320.500,00	0,00	46.410.000,00	39.448.500,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.997.200,00	1.249.860,00	1.998.971,25	29.964.450,00	54.961.650,00	51.712.818,75
11	Inspektorat	9.990.000,00	499.500,00	499.500,00	0,00	9.990.000,00	8.991.000,00
12	RSUD Kota Bima	5.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	5.000.000,00	3.750.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	1.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	28.500.000,00
14	Dinas Ketahanan	0,00	0,00	1.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	58.500.000,00
	Jumlah	2.596.965.735,00	692.600.664,00	137.068.203,45	167.420.300,00	2.764.386.035,00	1.934.717.167,55

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	2.596.965.735,00
Penambahan Tahun 2023	167.420.300,00
Pengurangan Tahun 2023	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2.764.386.035,00
Amortisasi	(829.668.867,45)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.934.717.167,55

5.3.1.6.4	Aset Lain-Lain	31-12-2023(Rp)	31-12-2022(Rp)
		80.518.412.947,82	52.605.390.698,56

Saldo Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp80.518.412.947,82 dan Rp52.605.390.698,56 yang merupakan Barang Kondisi Rusak Berat dan Hilang dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) serta adanya pengurangan Aset Tetap karena kurang Volume.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bima Kepada Pemerintah Kota Bima Nomor: 032/035/07.3/2022 dan Nomor: 180/3/BA/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Inventarisasi/Pemeriksaan Fisik BMD dan Dokumen Nomor: 800/1528/BPKAD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 terdapat 126 objek tanah dengan nilai Rp 267.120.000,00 berupa Tanah Non Persil/Tanah Pertanian/Tanah Usaha yang perlu diklarifikasi kembali hasil Inventarisasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bima, oleh karenanya aset tersebut dicatat dalam Aset Lain-Lain.

Handwritten signature



Menindaklanjuti penyerahan aset tahun 2022 sebanyak 126 objek yang dicatat dalam aset lain-lain, Pemerintah Kota Bima bersama Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan Inventarisasi bersama atas Aset Pemerintah Kabupaten Bima Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Bima Tahun 2022-2023 Sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 032/035/07.3/2022 – Nomor :180/3/BA/IV/2022 dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: 134.4/007/07.3/2023 – Nomor : 180/1/NKD/I/2023 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laporan Hasil Penelusuran/Inventarisasi Bersama nomor : 032/071/07.3/2023 – nomor: 032/1323/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Dari penyerahan aset tahun 2022 sebanyak 126 objek Tanah Usaha telah ditemukan 81 objek tidak bermasalah/clear and clean dan sebanyak 45 objek bermasalah/dikuasai/disertifikat warga;
 - Dari 81 objek tersebut sebanyak 72 Objek dicatat sebagai Aset Properti Investasi dan 9 objek dicatat sebagai Aset Tetap Tanah (KIB-A); (**Lampiran 23**)
 - Sedangkan dari 45 objek tanah yang bermasalah ditemukan 6 objek telah dilakukan proses tukar guling oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebelum proses penyerahan aset ke Pemerintah Kota Bima, terdapat 2 objek double pencatatan, dan 20 Objek tanah telah dikuasai/bersertifikat atas nama warga dan sebagian telah berdiri bangunan rumah permanen. Dari 3 (tiga) klasifikasi tersebut di atas dengan jumlah 28 objek telah dihapus dari pencatatan dan terdapat 17 objek tanah yang diklaim/dikuasai sepihak oleh warga dan tercatat di Aset Lain-Lain; (**Lampiran 23**)
- b. Dari penyerahan aset tahun 2023 sebanyak 219 objek terdiri dari 41 objek tanah dan 178 Gedung dan Bangunan. Berdasarkan hasil inventarisasi bersama ditemukan 13 objek aset bermasalah yang dicatat sebagai Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat 10 objek tanah dikuasai oleh Pihak ketiga, 9 (sembilan) diantaranya telah berdiri bangunan rumah permanen milik warga eks Pegawai Dinas Sosial Pemkab Bima,
 - Terdapat 3 objek Gedung dan Bangunan dikuasai oleh warga eks pegawai Dinas Sosial Pemkab Bima.

Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 disajikan secara *netto*/bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sebelum direklas ke Aset Lain-lain, sehingga mutasi Aset Lain-lain tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.63

RINCIAN ASET LAIN LAIN

NO	Uraian	2023	2022
1	Aset Barang Rusak Berat	48.370.250.387,82	47.495.533.644,56
2	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	29.342.498.000,00	5.109.857.054,00
3	Aset Lain-lain lainnya (Kurang Volume)	402.049.000,00	0,00
4	Aset Lain-Lain lainnya (Hibah Lembaga)	2.403.615.560,00	0,00
Total		80.518.412.947,82	52.605.390.698,56



Tabel 5.3.64

Mutasi Aset Lain-Lain Aset Barang Rusak Berat adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2023
1	Tanah	267.120.000,00	706.845.000,00	233.550.000,00	740.415.000,00
1	Peralatan dan Mesin	36.622.709.709,05	10.415.049.645,30	10.540.496.102,04	36.497.263.252,31
2	Gedung dan Bangunan	1.880.069.250,00	526.868.200,00	0,00	2.406.937.450,00
3	Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan	6.286.913.515,33	0,00	0,00	6.286.913.515,33
4	Aset Tetap Lainnya	2.438.721.170,18	0,00	0,00	2.438.721.170,18
Jumlah Aset Lain-lain		47.495.533.644,56	11.648.762.845,30	10.774.046.102,04	48.370.250.387,82
Akumulasi Penyusutan		(29.069.395.063,50)	(9.459.882.136,11)	(9.056.014.368,71)	(29.473.262.830,90)
Nilai Buku Aset Lain-lain		18.426.138.581,06	2.188.880.709,19	1.718.031.733,33	18.896.987.556,92

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	47.495.533.644,56
2	Penambahan Tahun 2023	11.648.762.845,30
3	Pengurangan Tahun 2023	10.774.046.102,04
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		48.370.250.387,82
Akumulasi Penyusutan		(29.473.262.830,90)
Nilai Buku Aset Lain-lain		18.896.987.556,92

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp48.370.250.387,82 merupakan Aset Lain-lain yang disajikan dengan menggunakan harga perolehan secara neto/bersih.

	<u>31-12-2023(Rp)</u>	<u>31-12-2022(Rp)</u>
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	29.342.498.000,00	5.109.857.054,00

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF). Treasury Deposit Facility (TDF Kota Bima Tahun 2023 sebesar Rp29.342.498.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.109.857.054,00. Rincian Treasury Deposit Facility (TDF) Kota Bima Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.65

Lembar Rekapitulasi TDF-TKD (Non Tunai)

Jenis Anggaran Transfer Ke Daerah	Alokasi 2023 Non Tunai (Rp)
A. Transfer DBH Pajak	1.562.403.000,00
DBH PPh	1.175.176.000,00
DBH PPh pasal 21	1.164.840.000,00

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

Jenis Anggaran Transfer Ke Daerah	Alokasi 2023 Non Tunai (Rp)
DBH PPh pasal 25/29 WPOPDN	10.336.000,00
DBH PBB	387.227.000,00
DBH PBB Migas Bagian Daerah	56.693.000,00
DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	1.453.000,00
DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah	2.233.000,00
DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	314.135.000,00
DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	12.713.000,00
B. Transfer DBH Cukai	0,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00
C. Transfer DBH SDA	27.780.095.000,00
Pertambahan Umum	27.780.095.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minerba-Royalti, Triwulan ke-4 TA 2023 Non Tunai	8.050.032.000,00
DBH Kurang Bayar SDA Minerba - Royalti	19.730.063.000,00
Kehutanan	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-4 TA 2023 Non Tunai	0,00
Perikanan	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-4 TA 2023 Non Tunai	0,00
Jumlah Total Penerimaan Transfer (A + B + C)	29.342.498.000,00

Aset Lain-Lain lainnya (Kurang Volume)	<u>31-12-2023(Rp)</u> 402.049.000,00	<u>31-12-2022(Rp)</u> 0,00
---	--	--------------------------------------

Tabel 5.3.66
Rekapan Aset Kurlov Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2023
1	Gedung dan Bangunan	0,00	57.312.000,00	0,00	57.312.000,00
2	Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan	0,00	60.766.000,00	0,00	60.766.000,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	283.971.000,00	0,00	283.971.000,00
	Jumlah	0,00	402.049.000,00	0,00	402.049.000,00

Aset Lain-Lain lainnya (Hibah Lembaga)	<u>31-12-2023(Rp)</u> 2.403.615.560,00	<u>31-12-2022(Rp)</u> 0,00
---	--	--------------------------------------

Tabel 5.3.67
Rekapan Aset lain-lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2023
1	Peralatan dan Mesin	0,00	114.105.975,00	0,00	

Handwritten signature



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	Uraian	Saldo 31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31/12/2023
					114.105.975,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	2.289.509.585,00	0,00	2.289.509.585,00
3	Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	2.403.615.560,00	0,00	2.403.615.560,00

5.3.1.6.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31-12-2023(Rp)	31-12-2022(Rp)
		829.668.867,45	692.600.664,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp829.668.867,45 dan Rp692.600.664,00 merupakan nilai Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut

Tabel 5.3.68

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023

No	Aset Tak Berwujud	Saldo 31/12/2022	Beban Amortisasi 2023	Saldo 31/12/ 2023
1	Dinas Kesehatan	75.601.500,00	9.524.000,00	85.125.500,00
2	BPKAD	188.115.000,00	22.182.500,00	210.297.500,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.910.000,00	742.500,00	9.652.500
4	Sekretariat Daerah	13.640.000,00	2.205.000,00	15.845.000,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	152.206.488,00	21.804.800,00	174.011.288,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	239.443.277,00	68.844.406,20	308.287.683,20
7	Dinas Sosial	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
8	BPBD	4.794.039,00	3.196.026,00	7.990.065,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	4.641.000,00	2.320.500,00	6.961.500
10	Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.249.860,00	1.998.971,25	3.248.831,25
11	Inspektorat	499.500,00	499.500,00	999.000,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah		692.600.664,00	137.068.203,45	829.668.867,45



5.3.1.5.6	Akumulasi	31-12-2023(Rp)	31-12-2022(Rp)
	Penyusutan Aset Lain-lain	29.473.262.830,90	29.069.395.063,50

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 Rp29.473.262.830,90 sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 senilai Rp29.069.395.063,50.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebagai berikut

Tabel 5.3.69
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023

No.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain - LO	2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	28.310.821.519,90
2	Gedung dan Bangunan	386.546.574,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.894.737,00
Jumlah		29.473.262.830,90

5.3.2	Kewajiban	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		8.895.417.511,87	739.857.783,51

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Bima terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp8.895.417.511,87 mengalami kenaikan senilai Rp8.155.559.728,36 atau 1.102,31% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp739.857.783,51.

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		8.895.417.511,87	739.857.783,51

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp8.895.417.511,87 mengalami kenaikan senilai Rp8.155.559.728,36 atau 1.102,31% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp739.857.783,51.

Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bima periode tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.3.70
Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No	Kewajiban	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.510.000,00	30.489.379,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	35.126.301,07	201.506.362,51
3	Utang Belanja	8.848.781.210,80	507.862.042,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		8.895.417.511,87	739.857.783,51

Adapun akun-akun Kewajiban Jangka Pendek yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		11.510.000,00	30.489.379,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp11.510.000,00 mengalami penurunan senilai Rp18.979.379,00. atau 62,25% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp30.489.379,00.

Saldo Utang PFK Tahun 2023 senilai Rp11.510.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.71
Utang PFK SKPD Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Keterangan
1	Pengebalian BOP PAUD	11.510.000,00	Akan di setorkan ke kas Negara Tahun 2024
Total		11.510.000,00	

Saldo Utang PFK Tahun 2022 senilai Rp30.489.379,00 telah disetorkan ke Kas Negara terdiri dari:

Tabel 5.3.72
Utang PFK SKPD Tahun 2022

NO	SKPD	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	Pihak Ketiga Lainnya BOP-PAUD	TOTAL	Tanggal Penyetoran
1	Bappeda Litbang	721.000,00	335.981,00	27.703,00	1.280.453,00	0,00	2.365.137,00	Februari 2023
2	PKM Mpunda	7.613.483,00	1.913.455,00	0,00	13.687.538,00	0,00	23.214.476,00	Januari 2023
3	PKM Kolo	651.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.766,00	Januari 2023
4	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00	4.258.000,00	Januari 2023
JUMLAH		8.986.249,00	2.249.436,00	27.703,00	14.967.991,00	4.258.000,00	30.489.379,00	



Sementara Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 senilai Rp30.489.379,00 merupakan utang PFK berupa PPh21, PPh22, PPh23, PPN dan pihak ketiga lainnya berupa penyetoran atas pengembalian penerimaan BOP PAUD dari semua utang pajak tersebut telah terbayarkan ke Kas Negara dan Kas Daerah pada bulan Januari dan Februari tahun 2023.

5.3.2.1.2	Utang Bunga	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Jumlah Utang Bunga Tahun 2023 senilai Rp 0,00 dan 2022 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Bunga Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023

5.3.2.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek Tahun 2023 senilai Rp 0,00 dan 2022 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Pinjaman Jangka Pendek Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023

5.3.2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Jumlah Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2023 senilai Rp 0,00 dan 2022 senilai Rp0,00. Tidak terdapat Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022

5.3.2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31-12-2023 (Rp)</u>	<u>31-12-2022 (Rp)</u>
		35.126.301,07	201.506.362,51

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp35.126.301,07 mengalami penurunan senilai Rp166.380.061,44 atau 82,57% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp201.506.362,51.

Tabel 5.3.73

Rincian Pendapatan di terima di muka tahun 2023

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Di Terima Di Muka Atas Sewa Ruang ATM BNI Kantor Walikota TA 2023	4.375.000,00
2	Pendapatan Di Terima Di Muka Atas Sewa ATM SDN 55 TA 2023	5.000.000,00
3	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Diterima Dimuka	25.751.301,07
	Total	35.126.301,07



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

5.3.2.1.6 Utang Belanja

31-12-2023 (Rp)
8.848.781.210,80

31-12-2022 (Rp)
507.862.042,00

Saldo Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp8.848.781.210,80 mengalami kenaikan senilai Rp8.340.919.168,80 atau 1642,36% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp507.862.042. Saldo Utang Belanja senilai Rp8.848.781.210,80 merupakan utang belanja atas kekurangan berkala gaji pegawai Rp287.809.160, pengakuan kekurangan utang penyeteraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional senilai Rp1.695.180.440,00, pengakuan kekurangan gaji dan tunjangan PPPK senilai Rp213.325.632,00, pengakuan utang pada tunjangan profesi guru (TPG) pada dinas Dikpora senilai Rp3.295.790.000,00, pengakuan utang pada tambahan penghasilan (TAMSIL) pada Dikpora senilai Rp176.000.000,00, utang tagihan listrik pada dinas kesehatan senilai Rp26.011.517,00 dan Utang Belanja Modal senilai Rp3.154.644.461,80.

Tabel 5.3.74
Utang Belanja Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	SALDO 31/12/2022	PENAMBAHAN								PENGURANG	SALDO 31 DES 2023 (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan)
			UTANG PENGAKUAN PENYETERAAN JABATAN FUNGSIONAL	UTANG PENGAKUAN KEKURANGAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	UTANG BERKALA	TPG 2023	TAMSIL 2023	UTANG LISTRIK	UTANG BELANJA MODAL (Aset Tetap Gedung & Bangunan)	UTANG BELANJA MODAL (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan)		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.656.866,00	15.900.000,00	11.737.414,00	55.312.208,00	3.295.790.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.656.866,00	3.554.739.622,00
2	DINAS KESEHATAN	386.265.390,00	11.418.040,00	12.386.577,00	149.697.781,00	0,00	0,00	26.011.517,00	0,00	0,00	386.265.390,00	199.513.915,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA (RSUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.750.688,76	0,00	0,00	915.750.688,76
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	42565920,00	3100607,00	1020603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.913.773,04	0,00	2.285.600.903,04
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	20.160.000,00	3.987.134,00	578.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725.564,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	21.420.000,00	0,00	1.567.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987.107,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	30.240.000,00	0,00	2.645.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885.669,00
8	DINAS SOSIAL	0,00	33.120.000,00	0,00	10.164.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.284.960,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	109.900.000,00	4.262.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.162.784,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	47.880.000,00	0,00	2.757.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.637.321,00
11	DINAS TENAGA KERJA	1.222.031,00	52.600.000,00	0,00	925.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.031,00	53.525.742,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	4.789.461,00	18.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.461,00	18.240.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	0,00	106.433.040,00	4.262.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.695.824,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	140.380.000,00	10.967.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.347.495,00
15	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.813.377,00	60.480.000,00	3.747.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813.377,00	64.227.715,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980.000,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	106.251.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.251.040,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.3

No.	SKPD	SALDO 31/12/2022	PENAMBAHAN								PENGURANG	SALDO 31 DES 2023
			UTANG PENGAKUAN PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL	UTANG PENGAKUAN KEKURANGAN GAJI DAN TUNJANGAN PPK	UTANG BERKALA	TPG 2023	TAMSIL 2023	UTANG LISTRIK	UTANG BELANJA MODAL (Aset Tetap Gedung & Bangunan)	UTANG BELANJA MODAL (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan)		
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	44.737.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.737.280,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	82.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.360.000,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.808.191,00	47.740.000,00	0,00	1.253.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808.191,00	48.993.604,00
21	DINAS PARIWISATA	0,00	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420.000,00
22	DINAS PERTANIAN	0,00	114.600.000,00	16.962.575,00	8.340.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.902.629,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	16.106.032,00	195.497.760,00	0,00	21.724.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106.032,00	217.222.651,00
24	SEKRETARIAT DPRD	0,00	33.889.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889.440,00
25	INSPEKTORAT	8.063.769,00	11.340.000,00	4.128.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.769,00	15.468.689,00
26	BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	58.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.380.000,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.932.282,00	69.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932.282,00	69.240.000,00
28	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	27.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.884.065,00	44.247.920,00	4.128.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.065,00	48.376.609,00
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	86.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.780.000,00
31	KECAMATAN RASANA E BARAT	870.522,00	0,00	21.293.727,00	7.040.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.522,00	28.333.738,00
32	KEC. RASANA E TIMUR	4.696.473,00	0,00	16.905.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.473,00	16.905.149,00
33	KEC. RABA	0,00	0,00	42.050.977,00	23.190.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.241.581,00
34	KEC. ASAKOTA	2.594.603,00	0,00	19.995.401,00	1.011.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.603,00	21.007.232,00
35	KEC. MPUNDA	4.158.980,00	0,00	33.407.915,00	578.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.980,00	33.986.259,00
TOTAL		507.862.042,00	1.695.180.440,00	213.325.632,00	287.809.160,00	3.295.790.000,00	176.000.000,00	26.011.517,00	915.750.688,76	2.238.913.773,04	507.862.042,00	8.848.781.210,80

5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya 31-12-2023 (Rp) 31-12-2022 (Rp)
0,00 **0,00**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 senilai Rp 0,00 dan 2022 senilai Rp 0,00. Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Bima kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 31-12-2023 (Rp) 31-12-2022 (Rp)
0,00 **0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp 0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp 0,00.



5.3.2.2.1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo utang kepada Pemerintah Pusat pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.3.2.2.2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.3.2.2.3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.3.2.2.4	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	31-12-2023 (Rp)	31-12-2022 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

Perbandingan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima periode tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.75
Rincian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No	Kewajiban	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
4	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
5	Premium (Diskonto) obligasi	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Handwritten signature



5.3.3	Ekuitas	<u>31-12-2023 (Rp)</u> 2.218.552.098.313,85	<u>31-12-2022 (Rp)</u> 2.100.460.506.926,58
--------------	----------------	---	---

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp2.218.552.098.313,85 mengalami kenaikan senilai Rp118.091.591.387,27 atau 5,62% dibandingkan dengan tahun 2022 Rp2.100.460.506.926,58 yang bersumber dari ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3.3.1	Ekuitas	<u>31-12-2023 (Rp)</u> 2.218.552.098.313,85	<u>31-12-2022 (Rp)</u> 2.100.460.506.926,58
----------------	----------------	---	---

Rincian Ekuitas yang bersumber dari ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.76
Rincian Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

NO	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74
2	Surplus/Defisit - LO	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	26.537.869.874,63	16.430.996.589,05
4	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	2.099.407.000,00	354.287.000,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	24.438.462.874,63	16.076.709.589,05
6	Ekuitas Akhir	2.218.552.098.313,85	2.100.460.506.926,58



5.4 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO), berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.4.1
Laporan Operasional – LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	25.213.151.060,08	23.013.317.601,03	2.199.833.459,05	9,56
4	Pendapatan Retribusi Daerah	9.690.522.636,00	23.063.630.472,28	(13.373.107.836,28)	(57,98)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.710.270.723,00	1.545.139.285,00	3.165.131.438,00	204,84
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.629.147.026,56	14.749.833.103,75	13.879.313.922,81	94,10
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	68.243.091.445,64	62.371.920.462,06	5.871.170.983,58	9,41
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	658.477.021.050,00	646.789.586.218,00	11.687.434.832,00	1,81
11	Dana Insentif Daerah	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
12	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10+11)	679.649.231.050,00	685.898.271.218,00	(6.249.040.168,00)	(0,91)
13	TRANSFER ANTAR DAERAH				
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak)-	54.550.163.759,00	50.734.478.786,00	3.815.684.973,00	7,52
15	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bantuan Keuangan)	3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58
16	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (14+15)	58.173.066.959,00	51.234.478.786,00	6.938.588.173,00	13,54
17	Jumlah Pendapatan Transfer (12 + 16)	737.822.298.009,00	737.132.750.004,00	689.548.005,00	0,09
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
19	Pendapatan Hibah	43.848.526.653,49	80.488.640.312,30	(36.640.113.658,81)	(45,52)
20	Pendapatan Lainnya	63.597.663.567,00	0,00	63.597.663.567,00	0,00
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (19 + 20)	107.446.190.220,49	80.488.640.312,30	26.957.549.908,19	33,49
22	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 12 + 17)	913.511.579.675,13	879.993.310.778,36	33.518.268.896,77	3,81
23	BEBAN				
24	BEBAN OPERASI				
25	Beban Pegawai	376.246.208.272,00	361.265.993.269,00	14.980.215.003,00	4,15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
26	Beban Barang dan Jasa	263.016.599.843,92	207.084.266.391,13	55.932.333.452,79	27,01
27	Beban Hibah	39.613.509.262,52	29.679.216.175,55	9.934.293.086,97	33,47
28	Beban Bantuan Sosial	4.270.609.000,00	6.507.250.000,00	(2.236.641.000,00)	(34,37)
29	Beban Penyisihan Piutang	2.239.240.662,94	2.179.367.171,19	59.873.491,75	2,75
30	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Beban Operasi (25 s.d 30)	685.386.167.041,38	606.716.093.006,87	78.670.074.034,51	12,97
32	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
33	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.838.391.673,38	34.456.691.091,20	2.381.700.582,18	6,91
34	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.712.342.676,00	22.870.273.235,00	(4.157.930.559,00)	(18,18)
35	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.959.634.726,80	76.824.655.857,00	3.134.978.869,80	4,08
36	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	137.068.203,45	125.581.722,44	11.486.481,01	9,15
38	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.291.667,00	0,00	1.291.667,00	0,00
39	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (33 s.d 38)	135.648.728.946,63	134.277.201.905,64	1.371.527.040,99	1,02
40	BEBAN TRANSFER				
41	Beban Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Jumlah Beban Transfer (41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEBAN TAK TERDUGA				
45	Beban Tak Terduga	0,00	945.418.000,00	(945.418.000,00)	(100,00)
46	Jumlah Beban Tak Terduga (45)	0,00	945.418.000,00	(945.418.000,00)	(100,00)
47	JUMLAH BEBAN (31+ 39 + 43 + 46)	821.034.895.988,01	741.938.712.912,51	79.096.183.075,50	10,66
48	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI (22- 47)	92.476.683.687,12	138.054.597.865,85	(45.577.914.178,73)	(33,01)
49	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
50	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
51	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	119.957.549,44	95.434.722,54	24.522.826,90	25,70
54	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL (51 s.d 53)	119.957.549,44	95.434.722,54	24.522.826,90	25,70
55	DEFISIT NON OPERASIONAL				
56	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	1.042.787.355,35	2.210.532.753,60	(1.167.745.398,25)	(52,83)
57	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132.368,57	0,00	132.368,57	0,00
59	JUMLAH DEFISIT DARI NON OPERASIONAL (56 s.d 58)	1.042.919.723,92	2.210.532.753,60	(1.167.613.029,68)	(52,82)



No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
60	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (54-59)	(922.962.174,48)	(2.115.098.031,06)	1.192.135.856,58	(56,36)
61	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (48 + 60)	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79	(44.385.778.322,15)	(32,65)
62	POS LUAR BIASA				
63	PENDAPATAN LUAR BIASA				
64	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BEBAN LUAR BIASA				
67	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
69	POS LUAR BIASA (65 - 68)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SURPLUS/(DEFISIT) – LO (61 + 69)	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79	(44.385.778.322,15)	(32,65)

Penjelasan Laporan Operasional tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	913.511.579.675,13	879.993.310.778,36

Pendapatan adalah hak Pemerintah Kota Bima yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun 2023 senilai Rp 913.511.579.675,13 dan tahun 2022 senilai Rp879.993.310.778,36, sehingga kekayaan bersih mengalami kenaikan senilai Rp33.518.268.896,77 atau 3,81%.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Laporan Pendapatan –LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	25.213.151.060,08	23.013.317.601,03	2.199.833.459,05	9,56
4	Pendapatan Retribusi Daerah	9.690.522.636,00	23.063.630.472,28	(13.373.107.836,28)	(57,98)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.710.270.723,00	1.545.139.285,00	3.165.131.438,00	204,84
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.629.147.026,56	14.749.833.103,75	13.879.313.922,81	94,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	68.243.091.445,64	62.371.920.462,06	5.871.170.983,58	9,41
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil	81.397.212.245,00	59.017.743.538,00	22.379.468.707,00	37,92
12	Dana Alokasi Umum	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00	23.435.827.827,00	5,44
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	42.423.553.167,00	89.773.006.178,00	(47.349.453.011,00)	(52,74)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	80.716.898.688,00	67.495.307.379,00	13.221.591.309,00	19,59
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	658.477.021.050,00	646.789.586.218,00	11.687.434.832,00	1,81
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA DANA INSENTIF DAERAH				
17	Dana Insentif Daerah	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	679.649.231.050,00	685.898.271.218,00	(6.249.040.168,00)	(0,91)
20	TRANSFER ANTAR DAERAH				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.550.163.759,00	50.734.478.786,00	3.815.684.973,00	7,52
22	Bantuan Keuangan	3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (19 + 20)	58.173.066.959,00	51.234.478.786,00	6.938.588.173,00	13,54
24	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 23)	737.822.298.009,00	737.132.750.004,00	689.548.005,00	0,09
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
26	Pendapatan Hibah	43.848.526.653,49	80.488.640.312,30	(36.640.113.658,81)	(45,52)
27	Pendapatan Lainnya	63.597.663.567,00	0,00	63.597.663.567,00	0,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	107.446.190.220,49	80.488.640.312,30	26.957.549.908,19	33,49
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	913.511.579.675,13	879.993.310.778,36	33.518.268.896,77	3,81

Adapun Pendapatan-LO masing-masing SKPD tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 5.4.3
Laporan Pendapatan – LO SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	149.000.000,00	236.500.000,00	(87.500.000,00)	(37,00)
2	Dinas Kesehatan	4.912.472.559,49	2.961.985.537,18	1.950.487.022,31	65,85



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.281.835.695,54	18.096.019.899,26	(8.814.184.203,72)	(48,71)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.290.607.251,00	1.378.436.759,28	(87.829.508,28)	(6,37)
5	Dinas Perhubungan	886.862.000,00	793.548.000,00	93.314.000,00	11,76
6	Dinas Lingkungan Hidup	367.465.000,00	364.200.000,00	3.265.000,00	0,90
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.977.041.340,00	2.081.231.041,00	(104.189.701,00)	(5,01)
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	762.888.395,00	698.861.887,00	64.026.508,00	9,16
9	Sekretariat Daerah	41.450.186.610,00	26.185.489.812,00	15.264.696.798,00	58,29
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	851.239.115.390,10	772.980.931.078,64	78.258.184.311,46	10,12
11	Dinas Pertanian	236.110.750,00	251.750.750,00	(15.640.000,00)	(6,21)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	186.600.000,00	173.500.000,00	13.100.000,00	7,55
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.242.984,00	1.000.004.372,00	(751.761.388,00)	(75,18)
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	44.000.000,00	(44.000.000,00)	(100,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.738.000,00	254.074.440,00	(66.336.440,00)	(26,11)
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	185.413.700,00	47.407.532.802,00	(47.222.119.102,00)	(99,61)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	5.085.244.400,00	(5.085.244.400,00)	(100,00)
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH		913.511.579.675,13	879.993.310.778,36	33.518.268.896,77	3,81

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah 2023 (Rp) 2022 (Rp)
68.243.091.445,64 **62.371.920.462,06**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diakui menjadi hak Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp68.243.091.445,64 dan tahun 2022 senilai Rp62.371.920.462,06 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami kenaikan senilai Rp5.871.170.983,58 atau 9,41% dengan rincian sebagai berikut.

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.4
Laporan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	25.213.151.060,08	23.013.317.601,03	2.199.833.459,05	9,56
Pendapatan Retribusi Daerah	9.690.522.636,00	23.063.630.472,28	(13.373.107.836,28)	(57,98)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.710.270.723,00	1.545.139.285,00	3.165.131.438,00	204,84



PENDAPATAN ASLI DAERAH	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.629.147.026,56	14.749.833.103,75	13.879.313.922,81	94,10
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	68.243.091.445,64	62.371.920.462,06	5.871.170.983,58	9,41

Penjelasan:

Sebab kenaikan Pendapatan Asli Daerah-LO secara garis besar dikarenakan peningkatan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan akibat adanya piutang dividen serta peningkatan pada Lain-lain PAD yang Sah karena adanya penambahan sewa BMD dan Pendapatan BLUD RSUD.

5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		25.213.151.060,08	23.013.317.601,03

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2023 senilai Rp25.213.151.060,08 dan tahun 2022 senilai Rp23.013.317.601,03 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami kenaikan senilai Rp2.199.833.459,05 atau 9,56% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.5
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Pajak Daerah - LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel	1.283.727.287,59	911.273.944,30	372.453.343,29	40,87
2	Pajak Restoran	2.169.467.450,00	2.139.537.662,65	29.929.787,35	1,40
3	Pajak Hiburan	55.767.950,00	36.669.080,00	19.098.870,00	52,08
4	Pajak Reklame	648.556.603,44	487.984.266,25	160.572.337,19	32,91
5	Pajak Penerangan Jalan	10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
6	Pajak Parkir	185.048.000,00	136.015.500,00	49.032.500,00	36,05
7	Pajak Air Tanah	53.909.204,30	56.651.077,65	(2.741.873,35)	(4,84)
8	Pajak Sarang Burung Walet	21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235.761.383,75	350.043.239,18	(114.281.855,43)	(32,65)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.289.309.797,00	5.181.964.524,00	107.345.273,00	2,07
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.036.730.141,00	4.255.895.792,00	780.834.349,00	18,35
Jumlah		25.213.151.060,08	23.013.317.601,03	2.199.833.459,05	9,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Tabel 5.4.6

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.1.1.06	Pajak Hotel	1.281.743.103,28	1.283.727.287,59	(1.984.184,31)
7.1.1.07	Pajak Restoran	2.132.758.354,00	2.169.467.450,00	(36.709.096,00)
7.1.1.08	Pajak Hiburan	56.267.950,00	55.767.950,00	500.000,00
7.1.1.09	Pajak Reklame	448.264.791,50	648.556.603,44	(200.291.811,94)
7.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	10.233.873.243,00	10.233.873.243,00	0,00
7.1.1.11	Pajak Parkir	164.195.500,00	185.048.000,00	(20.852.500,00)
7.1.1.12	Pajak Air Tanah	52.914.467,70	53.909.204,30	(994.736,60)
7.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
7.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235.761.383,75	235.761.383,75	0,00
7.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.456.288.051,00	5.289.309.797,00	(1.833.021.746,00)
7.1.1.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.128.733.641,00	5.036.730.141,00	92.003.500,00
Jumlah		23.211.800.485,23	25.213.151.060,08	(2.001.350.574,85)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Pendapatan Pajak Daerah		Rp	23.211.800.485,23
Penambah:			
1	Penambahan Piutang Pajak Hotel	Rp	2.200.184,31
2	Penambahan Piutang Pajak Restoran	Rp	76.534.869,40
3	Penambahan Piutang Pajak Hiburan	Rp	-
4	Penambahan Piutang Pajak Reklame	Rp	659.878.478,44
5	Penambahan Piutang Pajak Parkir	Rp	23.952.500,00
6	Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	Rp	54.514.292,30
7	Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet-LO	Rp	21.000.000,00
8	Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp	5.702.106.326,00
9	Penambahan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp	-
Jumlah Penambah		Rp	6.540.186.650,45
Pengurang:			
1	Pengurangan Piutang Pajak Hotel	Rp	216.000,00
2	Pengurangan Piutang Pajak Restoran	Rp	39.825.773,40
3	Pengurangan Piutang Pajak Hiburan	Rp	500.000,00
4	Pengurangan Piutang Pajak Reklame	Rp	459.586.666,50
5	Pengurangan Piutang Pajak Parkir	Rp	3.100.000,00
6	Pengurangan Piutang Pajak Air Tanah	Rp	53.519.555,70
7	Pengurangan Piutang Pajak Sarang Burung Walet-LO	Rp	21.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

8	Pengurangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp 3.869.084.580,00
9	Pengurangan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 92.003.500,00
Jumlah Pengurang		Rp 4.538.836.075,60
Total Tambah (Kurang)		Rp 2.001.350.574,85
Saldo Pendapatan Pajak-LO		Rp 25.213.151.060,08

Secara rinci Pendapatan Pajak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Laporan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
Pajak Hotel					
1	Hotel - LO	1.224.776.012,59	873.061.994,30	351.714.018,29	40,29
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	57.487.275,00	35.993.450,00	21.493.825,00	59,72
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	1.464.000,00	2.218.500,00	(754.500,00)	(34,01)
Jumlah		1.283.727.287,59	911.273.944,30	372.453.343,29	40,87
Pajak Restoran					
1	Restoran- LO	1.006.220.720,30	1.217.923.521,40	(211.702.801,10)	(17,38)
2	Rumah makan- LO	148.231.880,00	182.783.607,70	(34.551.727,70)	(18,90)
3	Kafetaria- LO	302.715.100,60	157.054.894,00	145.660.206,60	92,74
4	Kantin- LO	48.875.926,05	42.533.883,00	6.342.043,05	14,91
5	Warung- LO	373.684.151,05	248.366.516,15	125.317.634,90	50,46
6	Jasa boga/katering- LO	289.739.672,00	290.875.240,40	(1.135.568,40)	(0,39)
Jumlah		2.169.467.450,00	2.139.537.662,65	29.929.787,35	1,40
Pajak Hiburan					
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya- LO	3.406.350,00	5.641.080,00	(2.234.730,00)	(39,62)
3	Permainan bilyar, golf, bowling- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan - LO	52.361.600,00	31.028.000,00	21.333.600,00	68,76
5	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes center</i>)- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hiburan anak- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		55.767.950,00	36.669.080,00	19.098.870,00	52,08
Pajak Reklame					
1	Reklame papan/bill board/videotron/megatron- LO	562.281.793,02	399.450.614,59	162.831.178,43	40,76
2	Reklame kain- LO	65.690.187,50	76.658.000,00	(10.967.812,50)	(14,31)
3	Reklame berjalan- LO	20.584.622,92	11.875.651,66	8.708.971,26	73,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Jumlah	648.556.603,44	487.984.266,25	160.572.337,19	32,91
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan PLN- LO	10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
	Jumlah	10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir - LO	185.048.000,00	136.015.500,00	49.032.500,00	36,05
	Jumlah	185.048.000,00	136.015.500,00	49.032.500,00	36,05
Pajak Air Tanah					
1	Pajak Air Tanah - LO	53.909.204,30	56.651.077,65	(2.741.873,35)	(4,84)
	Jumlah	53.909.204,30	56.651.077,65	(2.741.873,35)	(4,84)
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Pajak Sarang Burung Walet - LO	21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
	Jumlah	21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan kerikil- LO	115.661.350,00	134.597.875,11	(18.936.525,11)	(14,07)
2	Tanah liat- LO	5.239.375,00	5.941.457,79	(702.082,79)	(11,82)
3	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	114.860.658,75	209.503.906,28	(94.643.247,53)	(45,17)
	Jumlah	235.761.383,75	350.043.239,18	(114.281.855,43)	(32,65)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan- LO	5.289.309.797,00	5.181.964.524,00	107.345.273,00	2,07
	Jumlah	5.289.309.797,00	5.181.964.524,00	107.345.273,00	2,07
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
1	BPHTB- LO	5.036.730.141,00	4.255.895.792,00	780.834.349,00	18,35
	Jumlah	5.036.730.141,00	4.255.895.792,00	780.834.349,00	18,35
Total Pajak daerah		25.213.151.060,08	23.013.317.601,03	2.199.833.459,05	9,56

5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		9.690.522.636,00	23.063.630.472,28

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp9.690.522.636,00 dan Rp23.063.630.472,28 sehingga hak Pemerintah Kota Bima yang menambah ekuitas mengalami penurunan senilai Rp13.373.107.836,28 atau 57,98 % dengan rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Tabel 5.4.8
Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	2.452.721.600,00	1.792.047.800,00	660.673.800,00	36,87
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	0,00	14.228.723.536,00	(14.228.723.536,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	389.147.150,00	340.923.450,00	48.223.700,00	14,15
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	501.768.000,00	509.321.000,00	(7.553.000,00)	(1,48)
5	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	407.854.000,00	315.780.000,00	92.074.000,00	29,16
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	452.125.000,00	487.003.000,00	(34.878.000,00)	(7,16)
7	Retribusi Los-LO	12.832.500,00	13.950.000,00	(1.117.500,00)	(8,01)
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	434.910.000,00	429.810.000,00	5.100.000,00	1,19
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	0,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	187.738.000,00	187.738.000,00	0,00	0,00
11	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	423.923.700,00	327.305.000,00	96.618.700,00	29,52
12	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	232.005.000,00	21.140.000,00	210.865.000,00	997,47
13	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	553.350.000,00	546.000.000,00	7.350.000,00	1,35
14	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	0,00
15	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	46.380.000,00	50745000	(4.365.000,00)	(8,60)
16	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	236.475.000,00	237.675.000,00	(1.200.000,00)	(0,50)
17	Retribusi Pemakaian Alat-LO	284.570.000,00	290.645.000,00	(6.075.000,00)	(2,09)
18	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	1.215.332.040,00	1.402.808.040,00	(187.476.000,00)	(13,36)
19	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	5.626.000,00	8.730.000,00	(3.104.000,00)	(35,56)
20	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	211.343.000,00	216.983.500,00	(5.640.500,00)	(2,60)
21	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	14.700.000,00	47.710.000,00	(33.010.000,00)	(69,19)
22	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	561.114.395,00	542.245.387,00	18.869.008,00	3,48
23	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	917.757.251,00	1.051.296.759,28	(133.539.508,28)	(12,70)
24	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	22.550.000,00	15.050.000,00	7.500.000,00	49,83
Total Retribusi Daerah		9.690.522.636,00	23.063.630.472,28	(13.373.107.836,28)	(57,98)

Tabel 5.4.9
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.1.2.01.01.0001	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	2.346.924.800,00	2.452.721.600,00	(105.796.800,00)
7.1.2.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
7.1.2.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	389.147.150,00	389.147.150,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.1.2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	501.768.000,00	501.768.000,00	0,00
7.1.2.01.04.0001	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	407.854.000,00	407.854.000,00	0,00
7.1.2.01.05.0001	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	452.125.000,00	452.125.000,00	0,00
7.1.2.01.05.0002	Retribusi Los-LO	12.832.500,00	12.832.500,00	0,00
7.1.2.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	434.860.000,00	434.910.000,00	(50.000,00)
7.1.2.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00
7.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	187.738.000,00	187.738.000,00	0,00
7.1.2.02.01.0001	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	390.573.700,00	423.923.700,00	(33.350.000,00)
7.1.2.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	217.285.000,00	232.005.000,00	(14.720.000,00)
7.1.2.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	553.350.000,00	553.350.000,00	0,00
7.1.2.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Ruang-LO	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
7.1.2.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	46.380.000,00	46.380.000,00	0,00
7.1.2.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	236.475.000,00	236.475.000,00	0,00
7.1.2.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO	262.570.000,00	284.570.000,00	(22.000.000,00)
7.1.2.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	423.824.800,00	1.215.332.040,00	(791.507.240,00)
7.1.2.02.04.0001	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	5.626.000,00	5.626.000,00	0,00
7.1.2.02.05.0001	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	211.343.000,00	211.343.000,00	0,00
7.1.2.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
7.1.2.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	561.114.395,00	561.114.395,00	0,00
7.1.2.03.03.0001	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	917.757.251,00	917.757.251,00	0,00
7.1.2.03.07.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00
Jumlah		8.723.098.596,00	9.690.522.636,00	(967.424.040,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Pendapatan Retribusi-LRA		Rp	8.723.098.596,00
Penambah:			
1	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Rp	465.139.800,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	50.000,00
3	Penambahan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dari pendapatan diterima dimuka dan piutang	Rp	6.775.000,00
4	Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	Rp	14.720.000,00
5	Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Alat	Rp	22.000.000,00
6	Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Rp	791.507.240,00
7	Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp	40.950.000,00
Jumlah Penambah		Rp	1.341.142.040,00
Pengurang:			
1	Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Rp	359.343.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

2	Pengurangan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan karena pengakuan pendapatan diterima di Muka dan pembayaran piutang	Rp	14.375.000,00		
	Jumlah Pengurang	Rp	373.718.000,00		
	Total Tambah (Kurang)			Rp	967.424.040,00
	Saldo Pendapatan Retribusi-LO			Rp	9.690.522.636,00

Pendapatan Retribusi - LO senilai Tahun 2023 Rp9.690.522.636,00 dikelola oleh 14 (Empat Belas) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Pendapatan Retribusi – LO SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	149.000.000,00	114.000.000,00	35.000.000,00	30,70
2	Dinas Kesehatan	2.633.290.500,00	1.942.880.500,00	690.410.000,00	35,54
3	RSUD Kota Bima	23.492.000,00	14.248.973.536,00	(14.225.481.536,00)	(99,84)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.290.607.251,00	1.378.436.759,28	(87.829.508,28)	(6,37)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	185.413.700,00	0,00	185.413.700,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	886.862.000,00	793.548.000,00	93.314.000,00	11,76
7	Dinas Lingkungan Hidup	367.465.000,00	364.200.000,00	3.265.000,00	0,90
8	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.846.365.040,00	2.081.121.040,00	(234.756.000,00)	(11,28)
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	762.888.395,00	698.861.887,00	64.026.508,00	9,16
10	Sekretariat Daerah	417.360.000,00	440.380.000,00	(23.020.000,00)	(5,23)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	529.430.000,00	393.240.000,00	136.190.000,00	34,63
12	Dinas Pertanian	236.110.750,00	251.750.750,00	(15.640.000,00)	(6,21)
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	174.500.000,00	168.500.000,00	6.000.000,00	3,56
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	187.738.000,00	187.738.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	9.690.522.636,00	23.063.630.472,28	(13.373.107.836,28)	(57,98)

5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		4.710.270.723,00	1.545.139.285,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Bank NTB, PD BPR NTB, PT Jamkrida NTB Bersaing dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kasabua Ade senilai Rp4.710.270.723,00 dan pada tahun 2022 senilai Rp1.545.139.285,00 terjadi kenaikan senilai Rp3.165.131.438,00 atau 204,84% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.4.11

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Nama Perusahaan	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	PT. Bank NTB	4.449.882.316,00	1.364.656.675,00	3.085.225.641,00	226,08
2	PD. BPR NTB	210.599.996,00	155.056.258,00	55.543.738,00	35,82
3	PT.Jamkrida NTB Bersaing	41.066.722,00	25.426.352,00	15.640.370,00	61,51
4	KPN Kasabua Ade	8.721.689,00	0,00	8.721.689,00	0,00
Total		4.710.270.723,00	1.545.139.285,00	3.165.131.438,00	204,84

Tabel 5.4.12

Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.1.3.02.01.0001	PT. Bank NTB	1.988.566.416,00	4.449.882.316,00	(2.461.315.900,00)
7.1.3.02.01.0001	PD. BPR NTB	102.435.626,00	210.599.996,00	(108.164.370,00)
7.1.3.02.01.0001	PT.Jamkrida NTB Bersaing	41.066.722,00	41.066.722,00	0,00
7.1.3.02.01.0001	KPN Kasabua Ade	8.721.689,00	8.721.689,00	0,00
Jumlah		2.140.790.453,00	4.710.270.723,00	(2.569.480.270,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA		Rp 2.140.790.453,00	
Penambah:			
1	Penambahan Piutang Dividen PT. Bank NTB	Rp	2.461.315.900,00
2	Penambahan Piutang Dividen PT. BPR NTB	Rp	108.164.370,00
Jumlah Penambah		Rp	2.569.480.270,00
Pengurang:			
1	Pengurang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00
Jumlah Pengurang			0,00
Total Tambah (Kurang)			Rp 2.569.480.270,00
Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO		Rp 4.710.270.723,00	

Penambahan Piutang Dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTB pada tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp 2.461.315.900,00 dan PT BPR NTB pada tanggal 16 Mei senilai Rp108.164.370,00.



5.4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2023 (Rp) 28.629.147.026,56	2022 (Rp) 14.749.833.103,75
------------------	--	--	--

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp 28.629.147.026,56 dan 2022 senilai Rp14.749.833.103,75 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp 13.879.313.922,81 atau 94,10% terdiri dari :

Tabel 5.4.13
Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	800.759.500,00	0,00	800.759.500,00	0,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	297.746.423,00	0,00	297.746.423,00	0,00
3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	15.231.000,00	0,00	15.231.000,00	0,00
4	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	4.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
5	Hasil Sewa BMD-LO	13.139.049.426,76	0,00	13.139.049.426,76	0,00
6	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	0,00	40.064.900,00	(40.064.900,00)	(100,00)
7	Jasa giro kas daerah - LO	444.039.980,05	597.948.766,56	(153.908.786,51)	(25,74)
8	Jasa giro kas bendahara - LO	35.329.115,47	36.388.559,37	(1.059.443,90)	(2,91)
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.247.190.524,39	1.701.109.920,75	1.546.080.603,64	90,89
10	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.185.757.924,39	406.652.754,32	779.105.170,07	191,59
11	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	35.676.961,50	25.536.962,75	10.139.998,75	39,71
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	133.093.093,00	296.382.068,00	(163.288.975,00)	(55,09)
13	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - LO	123.934,00	170.251,00	(46.317,00)	(27,21)
14	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	1.336.440,00	(1.336.440,00)	(100,00)
15	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan - LO	2.265.850,00	5.063.080,00	(2.797.230,00)	(55,25)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga-LO	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	0,00
17	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	9.241.581.994,00	0,00	9.241.581.994,00	0,00
18	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	3.839.000.000,00	(3.839.000.000,00)	(100,00)
19	Hasil dari pengelolaan dana bergulir - LO	501.300,00	110.001,00	391.299,00	355,72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
20	Pendapatan dana kapitasi JKN - LO	0,00	7.795.069.400,00	(7.795.069.400,00)	(100,00)
Total		28.629.147.026,56	14.749.833.103,75	13.879.313.922,81	94,10

Tabel 5.4.14

Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.1.4.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	800.759.500,00	800.759.500,00	0,00
7.1.4.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	297.746.423,00	297.746.423,00	0,00
7.1.4.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	15.231.000,00	15.231.000,00	0,00
7.1.4.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
7.1.4.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	78.735.456,67	13.139.049.426,76	(13.060.313.970,09)
7.1.4.05.01.0001	Jasa giro kas daerah - LO	444.039.980,05	444.039.980,05	0,00
7.1.4.05.02.0001	Jasa giro kas bendahara - LO	35.329.115,47	35.329.115,47	0,00
7.1.4.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.247.190.524,39	3.247.190.524,39	0,00
7.1.4.08.01.0001	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.185.757.924,39	1.185.757.924,39	0,00
7.1.4.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	35.676.961,50	35.676.961,50	0,00
7.1.4.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	133.093.093,00	133.093.093,00	0,00
7.1.4.12.15.0001	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - LO	123.934,00	123.934,00	0,00
7.1.4.15.03.0001	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan - LO	2.265.850,00	2.265.850,00	0,00
7.1.4.15.38.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga-LO	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
7.1.4.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	11.046.242.349,00	9.241.581.994,00	1.804.660.355,00
7.1.4.06.01.0001	Hasil dari pengelolaan dana bergulir - LO	501.300,00	501.300,00	0,00
Jumlah		17.373.493.411,47	28.629.147.026,56	(11.255.653.615,09)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah- LRA	Rp	17.373.493.411,47
Penambah:		
1 Penambahan Piutang Hasil Sewa BMD	Rp	13.128.139.790,00
2 Penambahan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp	495.849.231,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

	Jumlah Penambah	Rp	13.623.989.021,00
Pengurang:			
1	Pembayaran Piutang Hasil Sewa BMD	Rp	67.825.819,91
2	Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp	2.300.509.586,00
	Jumlah Pengurang	Rp	2.368.335.405,91
Total Tambah (Kurang)			Rp 11.255.653.615,09
Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah- LO			Rp 28.629.147.026,56

5.4.1.2	Pendapatan Transfer	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		737.822.298.009,00	737.132.750.004,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan tahun 2023 senilai Rp737.822.298.009,00 dan 2022 Rp737.132.750.004,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp689.548.005,00 atau 0,09% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.15
Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN TRANSFER				
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
3	DANA PERIMBANGAN				
4	Dana Bagi Hasil Pajak	28.635.929.000,00	17.958.559.206,00	10.677.369.794,00	59,46
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	52.761.283.245,00	41.059.184.332,00	11.702.098.913,00	28,50
6	Dana Alokasi Umum	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00	23.435.827.827,00	5,44
7	Dana Alokasi Khusus	123.140.451.855,00	157.268.313.557,00	(34.127.861.702,00)	(21,70)
8	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (4 s/d 7)	658.477.021.050,00	646.789.586.218,00	11.687.434.832,00	1,81
9	DANA INSENTIF DAERAH	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
10	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (9)	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
11	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.550.163.759,00	50.734.478.786,00	3.815.684.973,00	7,52
13	Bantuan Keuangan	3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Povinsi (12)	58.173.066.959,00	51.234.478.786,00	6.938.588.173,00	13,54
15	Total Pendapatan Transfer (7+10+13)	737.822.298.009,00	737.132.750.004,00	689.548.005,00	0,09



Penjelasan :

Sebab kenaikan Pendapatan Transfer umumnya dikarenakan peningkatan pada Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<u>2023 (Rp)</u> 679.649.231.050,00	<u>2022 (Rp)</u> 685.898.271.218,00
------------------	---	--	--

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 senilai Rp679.649.231.050,00 dan 2022 senilai Rp685.898.271.218,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp6.249.040.168,00 atau 0,91%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4.16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dana Perimbangan	658.477.021.050,00	646.789.586.218,00	11.687.434.832,00	1,81
2	Dana Insentif Daerah	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
	Total	679.649.231.050,00	685.898.271.218,00	(6.249.040.168,00)	(0,91)

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan	<u>2023 (Rp)</u> 658.477.021.050,00	<u>2022 (Rp)</u> 646.789.586.218,00
--------------------	-------------------------	--	--

Dana Perimbangan pada Tahun 2023 senilai Rp660.797.844.588,00 dan 2022 senilai Rp646.789.586.218,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp11.687.434.832,00 atau 1,81%.

Dana Perimbangan pada tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5.4.17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan– LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	DANA PERIMBANGAN				
1	Bagi Hasil Pajak				
	Pajak Bumi dan Bangunan	2.338.466.000,00	5.390.876.827,00	(3.052.410.827,00)	(56,62)
	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	7.486.059.000,00	8.476.804.507,00	(990.745.507,00)	(11,69)
	Cukai Hasil Tembakau	18.811.404.000,00	4.090.877.872,00	14.720.526.128,00	359,84
	Jumlah	28.635.929.000,00	17.958.559.206,00	10.677.369.794,00	59,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam				
	Provisi Sumber Daya Hutan	43.883.000,00	63.687.586,00	(19.804.586,00)	(31,10)
	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	51.455.251.245,00	38.825.432.535,00	12.629.818.710,00	32,53
	Pungutan Hasil Perikanan	1.262.149.000,00	2.170.064.211,00	(907.915.211,00)	(41,84)
	Jumlah	52.761.283.245,00	41.059.184.332,00	11.702.098.913,00	28,50
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00	23.435.827.827,00	5,44
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
	Dana Alokasi Khusus - Fisik				
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.039.613.511,00	26.076.988.000,00	(12.037.374.489,00)	(46,16)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.891.507.700,00	2.466.236.500,00	3.425.271.200,00	138,89
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.260.280.000,00	5.523.565.000,00	1.736.715.000,00	31,44
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.544.625.982,00	37.802.206.678,00	(29.257.580.696,00)	(77,40)
	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.578.947.000,00	(1.578.947.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik Bidang Pendidikan	6.687.525.974,00	16.325.063.000,00	(9.637.537.026,00)	(59,04)
	Jumlah	42.423.553.167,00	89.773.006.178,00	(47.349.453.011,00)	(52,74)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.672.799.800,00	19.996.779.270,00	676.020.530,00	3,38
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD	4.365.496.000,00	4.334.874.000,00	30.622.000,00	0,71
	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.325.406.520,00	34.424.858.975,00	4.900.547.545,00	14,24
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	1.009.999.950,00	1.029.000.000,00	(19.000.050,00)	(1,85)
	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	434.261.629,00	387.372.856,00	46.888.773,00	12,10
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.609.476.668,00	3.248.199.820,00	5.361.276.848,00	165,05
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.555.064.242,00	2.089.486.982,00	1.465.577.260,00	70,14
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.633.700.000,00	771.100.000,00	862.600.000,00	111,87
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	432.394.800,00	397.878.676,00	34.516.124,00	8,68
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	481.725.079,00	397.356.800,00	84.368.279,00	21,23
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	196.574.000,00	418.400.000,00	(221.826.000,00)	(53,02)
	Jumlah	80.716.898.688,00	67.495.307.379,00	13.221.591.309,00	19,59
	Total Dana Alokasi Khusus	123.140.451.855,00	157.268.313.557,00	(34.127.861.702,00)	(21,70)
	Total Dana Perimbangan (1 + 2+ 3 + 4)	658.477.021.050,00	646.789.586.218,00	11.687.434.832,00	1,81



Tabel 5.4.18
Perbandingan Pendapatan Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
	DANA PERIMBANGAN			
	Bagi Hasil Pajak			
7.2.1.01.01.0001	Pajak Bumi dan Bangunan	2.506.766.425,00	2.338.466.000,00	168.300.425,00
7.2.1.01.01.0002	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	7.244.032.507,00	7.486.059.000,00	(242.026.493,00)
7.2.1.01.01.0004	Cukai Hasil Tembakau	17.992.909.872,00	18.811.404.000,00	(818.494.128,00)
	Jumlah	27.743.708.804,00	28.635.929.000,00	(892.220.196,00)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
7.2.1.01.01.0010	Provisi Sumber Daya Hutan	50.097.586,00	43.883.000,00	6.214.586,00
7.2.1.01.01.0009	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	26.628.033.453,00	51.455.251.245,00	(24.827.217.792,00)
7.2.1.01.01.0013	Pungutan Hasil Perikanan	1.473.902.211,00	1.262.149.000,00	211.753.211,00
	Jumlah	28.152.033.250,00	52.761.283.245,00	(24.609.249.995,00)
7.2.1.01.02.0001	Dana Alokasi Umum (DAU)	453.939.356.950,00	453.939.356.950,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
	Dana Alokasi Khusus - Fisik			
7.2.1.01.03.0034	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.039.613.511,00	14.039.613.511,00	0,00
7.2.1.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.891.507.700,00	5.891.507.700,00	0,00
7.2.1.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.260.280.000,00	7.260.280.000,00	0,00
7.2.1.01.03.0025	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.544.625.982,00	8.544.625.982,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
7.2.1.01.03.0001	DAK Fisik Bidang Pendidikan	6.687.525.974,00	6.687.525.974,00	0,00
	Jumlah	42.423.553.167,00	42.423.553.167,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik			
7.2.1.01.04.0001	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.672.799.800,00	20.672.799.800,00	0,00
7.2.1.01.04.0007	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD	4.365.496.000,00	4.365.496.000,00	0,00
7.2.1.01.04.0004	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.325.406.520,00	39.325.406.520,00	0,00
7.2.1.01.04.0005	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	1.009.999.950,00	1.009.999.950,00	0,00
7.2.1.01.04.0016	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	434.261.629,00	434.261.629,00	0,00
7.2.1.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.609.476.668,00	8.609.476.668,00	0,00
7.2.1.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.555.064.242,00	3.555.064.242,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.2.1.01.04.0008	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.633.700.000,00	1.633.700.000,00	0,00
7.2.1.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	432.394.800,00	432.394.800,00	0,00
7.2.1.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	481.725.079,00	481.725.079,00	0,00
7.2.1.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	196.574.000,00	196.574.000,00	0,00
	Jumlah	80.716.898.688,00	80.716.898.688,00	0,00
	Total Dana Alokasi Khusus	123.140.451.855,00	123.140.451.855,00	0,00
	Total Dana Perimbangan	632.975.550.859,00	658.477.021.050,00	(25.501.470.191,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Dana Perimbangan-LRA		Rp	632.975.550.859,00
Penambah:			
1	Pengakuan Piutang DBH PBB-LO	Rp	387.227.000,00
2	Pengakuan Piutang DBH PPh Pasal 21-LO	Rp	1.164.840.000,00
3	Pengakuan Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	Rp	10.336.000,00
4	Pengakuan Piutang DBH CHT-LO	Rp	1.268.829.000,00
5	Pengakuan Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	Rp	27.780.095.245,00
	Jumlah Penambah	Rp	30.611.327.245,00
Pengurang:			
1	Pembayaran Piutang DBH PBB-LO	Rp	555.527.425,00
2	Pembayaran Piutang DBH PPh Pasal 21-LO	Rp	885.067.968,00
3	Pembayaran Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	Rp	48.081.539,00
4	Pembayaran Piutang DBH CHT-LO	Rp	450.334.872,00
5	Pembayaran Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	Rp	2.952.877.453,00
6	Pembayaran Piutang DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	Rp	6.214.586,00
7	Pembayaran Piutang DBH SDA Perikanan-LO	Rp	211.753.211,00
	Jumlah Pengurang	Rp	5.109.857.054,00
Total Tambah (Kurang)		Rp	25.501.470.191,00
Saldo Dana Perimbangan-LO		Rp	658.477.021.050,00



5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00

Dana Perimbangan pada Tahun 2023 senilai Rp21.172.210.000,00 dan 2022 senilai Rp39.108.685.000,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp17.936.475.000,00 atau 45,86%.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Antar Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	58.173.066.959,00	51.234.478.786,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tahun 2023 senilai Rp58.173.066.959,00 dan 2022 senilai Rp51.234.478.786,00, sehingga mengalami kenaikan senilai Rp6.938.588.173,00 atau 13,54 % merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi NTB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.19
Pendapatan DBH Provinsi – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Transfer Pemerintah Antar Daerah	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.550.163.759,00	50.734.478.786,00	3.815.684.973,00	7,52
2	Bantuan Keuangan	3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58
Total		58.173.066.959,00	51.234.478.786,00	6.938.588.173,00	13,54

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	54.550.163.759,00	50.734.478.786,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 senilai Rp54.550.163.759,00 dan 2022 senilai Rp50.734.478.786,00, sehingga mengalami kenaikan senilai Rp3.815.684.973,00 atau 7,52%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.4.20
Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.691.974.654,00	6.206.609.566,00	1.485.365.088,00	23,93
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.286.028.813,00	7.382.877.116,00	(96.848.303,00)	(1,31)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.848.887.577,00	17.956.244.885,00	2.892.642.692,00	16,11



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	40.054.648,00	38.930.668,00	1.123.980,00	2,89
5	Pajak Rokok	18.683.218.067,00	19.149.816.551,00	(466.598.484,00)	(2,44)
Total		54.550.163.759,00	50.734.478.786,00	3.815.684.973,00	7,52

Tabel 5.4.21

Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.2.2.01.01.0001	Pajak Kendaraan Bermotor	7.875.547.294,00	7.691.974.654,00	183.572.640,00
7.2.2.01.01.0002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.152.234.289,00	7.286.028.813,00	(133.794.524,00)
7.2.2.01.01.0003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.631.215.848,00	20.848.887.577,00	(217.671.729,00)
7.2.2.01.01.0004	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	40.784.440,00	40.054.648,00	729.792,00
7.2.2.01.01.0005	Pajak Rokok	18.683.218.067,00	18.683.218.067,00	0,00
Jumlah		54.382.999.938,00	54.550.163.759,00	(167.163.821,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Bagi Hasil Pajak-LRA		Rp 54.382.999.938,00	
Penambah:			
1	Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	1.248.403.219,00
2	Pengakuan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	1.399.273.018,00
3	Pengakuan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	1.877.718.394,00
4	Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp	3.486.186,00
Jumlah Penambah		Rp	4.528.880.817,00
Pengurang:			
1	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	1.431.975.859,00
2	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	1.265.478.494,00
3	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	1.660.046.665,00
4	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp	4.215.978,00
Jumlah Pengurang		Rp	4.361.716.996,00
Total Tambah (Kurang)		Rp	167.163.821,00
Saldo Bagi Hasil Pajak-LO		Rp	54.550.163.759,00



5.4.1.2.2 Bantuan Keuangan	2023 (Rp) 3.622.903.200,00	2022 (Rp) 500.000.000,00
-----------------------------------	---	---

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 senilai Rp3.622.903.200,00 dan 2022 senilai Rp500.000.000,00, sehingga mengalami kenaikan senilai Rp3.122.903.200,00 atau 624,58%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.4.22
Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

No.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Iuran Kesehatan	3.622.903.200,00	0,00	3.622.903.200,00	0,00
Total		3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2023 (Rp) 107.446.190.220,49	2022 (Rp) 80.488.640.312,30
--	---	--

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pendapatan Hibah pada tahun 2023 senilai Rp 107.446.190.220,49 dan 2022 senilai Rp80.488.640.312,30 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp 26.957.549.908,19 atau 33,49%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.4.23
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 2023 dan 2022

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan hibah	43.848.526.653,49	80.488.640.312,30	(36.640.113.658,81)	(45,52)
2	Pendapatan Lainnya	63.597.663.567,00	0,00	63.597.663.567,00	0,00
Total		107.446.190.220,49	80.488.640.312,30	26.957.549.908,19	33,49

Penjelasan:

Sebab kenaikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dikarenakan kenaikan yang signifikan pada pendapatan lainnya yaitu Pendapatan atas DanaReducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment dan Pendapatan JKN pada FKTP.



Tabel 5.4.24

Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
7.3.1	Pendapatan hibah	0,00	43.848.526.653,49	(43.848.526.653,49)
7.3.3	Pendapatan Lainnya	9.521.776.963,00	63.597.663.567,00	(54.075.886.604,00)
Jumlah		9.521.776.963,00	107.446.190.220,49	(97.924.413.257,49)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA		Rp	9.521.776.963,00
Penambah:			
1	Penambahan Hibah Aset dari Pemerintah Pusat	Rp	1.112.050.000,00
2	Penambahan Hibah Aset dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	41.163.001.610,00
3	Penambahan Hibah Obat Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	1.565.375.043,49
4	Penambahan Hibah Tanah dari Masyarakat	Rp	8.100.000,00
5	Penambahan Piutang atas Bagi Hasil IUPK	Rp	54.075.886.604,00
Jumlah Penambah		Rp	97.924.413.257,49
Pengurang:			
1	Pengurang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00
Jumlah Pengurang			0,00
Total Tambah (Kurang)		Rp	97.924.413.257,49
Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		Rp	107.446.190.220,49

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<u>43.848.526.653,49</u>	<u>80.488.640.312,30</u>

Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Bima bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tahun 2023 senilai Rp 43.848.526.653,49 dan tahun 2022 senilai Rp 80.488.640.312,30 sehingga mengalami penurunan senilai Rp 36.640.113.658,81 atau 45,52% .

Rincian Pendapatan Hibah tahun 2023 terdiri dari.

Tabel 5.4.25

Pendapatan Hibah Tahun 2023

No.	SKPD	Keterangan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Hibah Aset Tetap dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	962.050.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	SKPD	Keterangan	Nilai
2	Dinas Kesehatan	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi	1.317.132.059,49
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hibah Aset Tetap dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	150.000.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Masyarakat	8.100.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi	248.242.984,00
6	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	130.175.000,00
7	Sekretariat Daerah	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Bima	41.032.826.610,00
Jumlah			43.848.526.653,49

Perbandingan Pendapatan Hibah LRA dan LO:

Pendapatan Hibah LRA senilai Rp0,00 dan Pendapatan Hibah LO senilai Rp43.848.526.653,49 dan menghasilkan selisih sebesar Rp43.848.526.653,49. Selisih tersebut diperoleh dari mutasi tambah Hibah Aset Tetap senilai Rp 42.283.151.610,00 dan Obat senilai Rp 1.565.375.043,49.

5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Dana Darurat-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	63.597.663.567,00	0,00

Pendapatan Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp 63.597.663.567,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Dalam rekening Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO terdapat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP senilai Rp 9.461.776.963,00 yang terdapat pada 7 Puskesmas antara lain:

- Puskesmas Mpunda senilai Rp2.294.524.403,00
- Puskesmas Rasanae Timur senilai Rp831.943.062,00
- Puskesmas Paruga senilai Rp1.884.855.292,00
- Puskesmas Penanae senilai Rp1.957.307.633,00
- Puskesmas Kolo senilai Rp411.862.204,00
- Puskesmas Kumbe senilai Rp457.552.311,00
- Puskesmas Jatibaru senilai Rp1.623.732.058,00



5.4.2	Beban	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		821.034.895.988,01	741.938.712.912,51

Beban merupakan beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Pada tahun 2023 Beban – LO Pemerintah Kota Bima senilai Rp821.034.895.988,01 dan 2022 senilai Rp741.938.712.912,51. Jika dibanding tahun 2022 beban tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp79.096.183.075,50 atau 10,66%.

Adapun Beban masing-masing SKPD tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.26
Laporan Beban SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Beban 2023 (Rp)	Beban 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	194.673.247.162,45	179.947.147.716,89	14.726.099.445,56	8,18
2	Dinas Kesehatan	102.057.396.555,60	94.641.568.723,35	7.415.827.832,25	7,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	27.574.854.689,18	23.966.180.471,78	3.608.674.217,40	15,06
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	92.595.336.704,00	83.476.692.221,18	9.118.644.482,82	10,92
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	8.349.927.231,00	15.605.616.302,66	(7.255.689.071,66)	(46,49)
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	7.951.899.611,98	7.885.301.879,00	66.597.732,98	0,84
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.753.565.589,00	10.229.064.482,66	524.501.106,34	5,13
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.248.793.769,00	5.181.594.699,00	1.067.199.070,00	20,60
9	Dinas Sosial	8.964.619.369,00	10.708.492.630,70	(1.743.873.261,70)	(16,28)
10	Dinas Tenaga Kerja	3.836.661.592,00	3.847.834.708,33	(11.173.116,33)	(0,29)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.478.260.264,00	5.594.613.254,00	3.883.647.010,00	69,42
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.153.497.320,00	3.952.886.145,00	200.611.175,00	5,08
13	Dinas Lingkungan Hidup	22.712.000.837,67	19.664.849.851,67	3.047.150.986,00	15,50
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.418.325.043,49	5.322.994.974,00	95.330.069,49	1,79
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.094.678.427,00	7.477.403.074,00	1.617.275.353,00	21,63
16	Dinas Perhubungan	13.379.525.279,29	12.111.642.835,92	1.267.882.443,37	10,47
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.353.246.225,73	9.770.838.750,81	2.582.407.474,92	26,43
18	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	12.693.911.552,86	10.408.234.916,70	2.285.676.636,16	21,96
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.979.225.663,00	3.759.489.923,00	219.735.740,00	5,84
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	6.120.943.293,00	4.885.573.260,86	1.235.370.032,14	25,29
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.739.922.719,01	6.013.094.746,50	(273.172.027,49)	(4,54)



Adapun rincian Beban operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Beban Operasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Operasi	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	376.246.208.272,00	361.265.993.269,00	14.980.215.003,00	4,15
2	Beban Barang dan Jasa	263.016.599.843,92	207.084.266.391,13	55.932.333.452,79	27,01
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	39.613.509.262,52	29.679.216.175,55	9.934.293.086,97	33,47
6	Beban Bantuan Sosial	4.270.609.000,00	6.507.250.000,00	(2.236.641.000,00)	(34,37)
7	Beban Penyisihan Piutang	2.239.240.662,94	2.179.367.171,19	59.873.491,75	2,75
JUMLAH		685.386.167.041,38	606.716.093.006,87	78.670.074.034,51	12,97

Penjelasan:

Sebab kenaikan beban operasi dikarenakan kenaikan pada beban pegawai yang bersumber dari utang beban pegawai, beban barang jasa yang bersumber dari reklas Barang jasa BOS dan BLUD serta kapitalisasi dan beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

5.4.2.1.1	Beban Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		376.246.208.272,00	361.265.993.269,00

Beban Pegawai - LO tahun 2023 adalah senilai Rp376.246.208.272,00 dan tahun 2022 senilai Rp361.265.993.269,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp14.980.215.003,00 atau 4,15% dibandingkan tahun 2022.

Adapun Beban Pegawai – LO tahun 2023 dan 2022 beserta kenaikan/penurunannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.29
Beban Pegawai Pemerintah Kota Bima Tahun Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Pegawai	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	245.132.939.189,00	240.020.940.727,00	5.111.998.462,00	2,13
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	62.332.814.300,00	54.164.103.648,00	8.168.710.652,00	15,08
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.593.681.611,00	56.342.601.210,00	(748.919.599,00)	(1,33)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.913.395.633,00	9.978.172.296,00	(64.776.663,00)	(0,65)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	228.909.962,00	274.375.788,00	(45.465.826,00)	(16,57)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	455.799.600,00	485.799.600,00	(30.000.000,00)	(6,18)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Pegawai	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
7	Beban Pegawai BLUD	2.588.667.977,00	0,00	2.588.667.977,00	0,00
	Jumlah	376.246.208.272,00	361.265.993.269,00	14.980.215.003,00	4,15

Tabel 5.4.30

Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	244.216.882.843,00	245.132.939.189,00	(916.056.346,00)
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	62.332.814.300,00	62.332.814.300,00	0,00
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.335.251.611,00	55.593.681.611,00	(3.258.430.000,00)
8.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.913.395.633,00	9.913.395.633,00	0,00
8.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	228.909.962,00	228.909.962,00	0,00
8.1.1.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	455.799.600,00	455.799.600,00	0,00
8.1.1.99	Beban Pegawai BLUD	2.588.667.977,00	2.588.667.977,00	0,00
	Jumlah	372.071.721.926,00	376.246.208.272,00	(4.174.486.346,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Pegawai-LRA		Rp 372.071.721.926,00	
Penambah:			
1	Penambahan Utang Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023	Rp	4.663.664.577,00
	Jumlah Penambah	Rp	4.663.664.577,00
Pengurang:			
1	Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan Tahun sebelumnya	Rp	275.818.231,00
2	Kapitalisasi Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	213.360.000,00
	Jumlah Pengurang	Rp	489.178.231,00
Total Tambah (Kurang)		Rp	4.174.486.346,00
Saldo Beban Pegawai-LO		Rp 376.246.208.272,00	

5.4.2.1.2 **Beban Barang dan Jasa**

2023 (Rp)

263.016.599.843,92

2022 (Rp)

207.084.266.391,13

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp 263.016.599.843,92 dan 2022 senilai Rp207.084.266.391,13 sehingga ada kenaikan senilai Rp55.932.333.452,79 atau 27,01 % dibandingkan tahun 2022.

Adapun rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.4.31
Beban Barang dan Jasa – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	86.789.638.945,63	62.429.569.572,13	24.360.069.373,50	39,02
2	Beban Jasa	110.074.963.136,29	94.235.400.303,00	15.839.562.833,29	16,81
3	Beban Pemeliharaan	13.086.660.328,00	7.484.722.023,00	5.601.938.305,00	74,84
4	Beban Perjalanan Dinas	53.065.337.434,00	42.934.574.493,00	10.130.762.941,00	23,60
Jumlah		263.016.599.843,92	207.084.266.391,13	55.932.333.452,79	27,01

5.4.2.1.2.1	Beban Barang	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		86.789.638.945,63	62.429.569.572,13

Beban Barang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp86.789.638.945,63 dan 2022 senilai Rp62.429.569.572,13 sehingga ada kenaikan senilai Rp 24.360.069.373,50 atau 39,02% dibandingkan tahun 2022.

Rincian Beban Persediaan sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.32
Beban Barang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Persediaan	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Bahan Pakai Habis	86.789.638.945,63	62.429.569.572,13	24.360.069.373,50	39,02
Jumlah		86.789.638.945,63	62.429.569.572,13	24.360.069.373,50	39,02

Tabel 5.4.33
Perbandingan Beban Barang LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
5.1.2.01	Bahan Pakai Habis	81.346.245.862,96	86.789.638.945,63	(5.443.393.082,67)
Jumlah		81.346.245.862,96	86.789.638.945,63	(5.443.393.082,67)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Barang-LRA	Rp 81.346.245.862,96
Penambah:	
1 Penambahan Beban Barang karena persediaan tahun lalu	Rp 12.186.271.978,05
2 Penambahan Beban Barang karena reklas dari beban barang jasa	Rp 9.861.889.023,00
3 Penambahan Beban Barang yang direklas dari Beban barang dan Jasa	Rp 212.331.517,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

4	Penambahan Beban Barang Karena Pendapatan Hibah	Rp	1.482.966.622,00	
5	Penambahan Beban karena Penggunaan Obat-obatan	Rp	161.142.056,42	
6	Penambahan Beban barang reklas dari beban tak terduga	Rp	380.843.206,00	
	Jumlah Penambah	Rp	24.285.444.402,47	
Pengurang:				
1	Pengurangan Beban Barang karena Persediaan Tahun ini	Rp	10.310.621.687,80	
2	Pengurangan Beban Barang karena Kapitalisasi Beban Barang ke Aset Tetap	Rp	333.267.500,00	
3	Pengurangan Beban Barang karena Pembayaran Utang Obat tahun lalu	Rp	194.400.000,00	
4	Pengurangan Beban karena belum diserahkan kepada Masyarakat	Rp	8.003.762.132,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	18.842.051.319,80	
	Total Tambah (Kurang)			Rp 5.443.393.082,67
	Saldo Beban Barang-LO			Rp 86.789.638.945,63

5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		110.074.963.136,29	94.235.400.303,00

Jumlah Beban Jasa Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 senilai Rp110.074.963.136,29 dan 2022 senilai Rp94.235.400.303,0000 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp15.839.562.833,29 atau 16,81% dibandingkan tahun 2022.

Rincian Beban Jasa sesuai rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.34
Beban Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Kantor				
	Beban Telepon	20.898.983,00	44.608.784,00	(23.709.801,00)	(53,15)
	Beban Air	1.598.000,00	23.209.444,00	(21.611.444,00)	(93,11)
	Beban Listrik	7.685.978.206,51	6.956.844.837,00	729.133.369,51	10,48
	Beban Surat Kabar/Majalah	129.127.454,00	195.977.450,00	(66.849.996,00)	(34,11)
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.732.134.933,00	2.440.353.565,00	1.291.781.368,00	52,93
	Beban Paket/Pengiriman	34.675.000,00	22.784.750,00	11.890.250,00	52,19
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	114.561.803,00	83.941.218,00	30.620.585,00	36,48
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.414.640,00	5.816.280,00	10.598.360,00	182,22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.112.700.000,00	1.525.500.000,00	587.200.000,00	38,49
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.807.297.500,00	1.976.593.100,00	830.704.400,00	42,03
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.093.545.000,00	5.178.083.000,00	915.462.000,00	17,68
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	66.600.000,00	136.800.000,00	(70.200.000,00)	(51,32)
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	996.300.000,00	550.900.000,00	445.400.000,00	80,85
	Beban Honorarium Rohaniwan	80.800.000,00	51.200.000,00	29.600.000,00	57,81
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	311.000.000,00	199.700.000,00	111.300.000,00	55,73
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	144.550.000,00	294.725.000,00	(150.175.000,00)	(50,95)
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	537.500.000,00	597.000.000,00	(59.500.000,00)	(9,97)
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	72.000.000,00	6.180.000,00	65.820.000,00	1.065,05
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	5.624.779.000,00	6.536.860.720,00	(912.081.720,00)	(13,95)
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.392.066.463,00	9.484.889.049,00	1.907.177.414,00	20,11
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	64.290.000,00	0,00	64.290.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	482.520.800,00	347.636.000,00	134.884.800,00	38,80
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.948.980.000,00	2.898.540.000,00	50.440.000,00	1,74
	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	444.000.000,00	407.250.000,00	36.750.000,00	9,02
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.306.300.000,00	6.338.550.000,00	(32.250.000,00)	(0,51)
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.100.000,00	8.600.000,00	(6.500.000,00)	(75,58)
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	142.450.000,00	58.500.000,00	83.950.000,00	143,50
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.924.470.500,00	5.635.048.818,00	5.289.421.682,00	93,87
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	292.250.000,00	245.400.000,00	46.850.000,00	19,09
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.301.231.000,00	5.779.447.000,00	521.784.000,00	9,03
	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.055.808.666,00	297.750.000,00	758.058.666,00	254,60
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.918.860.258,00	4.860.307.685,00	1.058.552.573,00	21,78
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	514.710.000,00	670.312.000,00	(155.602.000,00)	(23,21)
	Beban Jasa Tenaga Caraka	127.200.000,00	486.580.000,00	(359.380.000,00)	(73,86)
	Beban Jasa Tenaga Supir	285.455.000,00	316.250.000,00	(30.795.000,00)	(9,74)
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	587.550.000,00	464.300.000,00	123.250.000,00	26,55
	Beban Jasa Tata Rias	3.000.000,00	14.400.000,00	(11.400.000,00)	(79,17)
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	152.600.000,00	723.100.000,00	(570.500.000,00)	(78,90)
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	94.481.700,00	129.579.000,00	(35.097.300,00)	(27,09)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	225.750.000,00	222.750.000,00	3.000.000,00	1,35
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	93.970.000,00	(83.970.000,00)	(89,36)
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	798.243.264,00	561.560.000,00	236.683.264,00	42,15
	Beban Jasa Kalibrasi	184.108.270,00	7.277.500,00	176.830.770,00	2.429,83
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	336.812.931,00	755.551.633,00	(418.738.702,00)	(55,42)
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	16.390.000,00	12.292.500,00	4.097.500,00	33,33
	Beban Lembur	3.916.098.400,00	884.522.000,00	3.031.576.400,00	342,74
	Beban Medical Check Up	238.146.657,00	196.447.893,00	41.698.764,00	21,23
	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	0,00	2.718.537.000,00	(2.718.537.000,00)	(100,00)
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	1.640.445.000,00	(1.640.445.000,00)	(100,00)
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	1.562.677.300,00	(1.562.677.300,00)	(100,00)
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	639.109.424,00	0,00	639.109.424,00	0,00
	Jumlah	84.990.443.852,51	74.649.548.526,00	10.340.895.326,51	13,85
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi				
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.415.513.000,00	8.903.007.000,00	3.512.506.000,00	39,45
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.088.338.000,00	803.411.600,00	284.926.400,00	35,46
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	211.709.637,00	124.689.000,00	87.020.637,00	69,79
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	264.637.053,00	155.861.250,00	108.775.803,00	69,79
	Jumlah	13.980.197.690,00	9.986.968.850,00	3.993.228.840,00	39,98
3	Beban Jasa Konsultansi				
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	488.528.500,00	2.886.000,00	485.642.500,00	16.827,53
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	306.232.500,00	74.800.000,00	231.432.500,00	309,40
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	78.490.000,00	42.095.000,00	36.395.000,00	86,46
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.998.000,00	1.995.780,00	2.220,00	0,11
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	187.223.700,00	75.235.800,00	111.987.900,00	148,85
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	371.121.805,00	277.678.000,00	93.443.805,00	33,65
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	0,00	6.387.802,00	(6.387.802,00)	(100,00)
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	192.534.600,00	594.211.450,00	(401.676.850,00)	(67,60)
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	269.445.000,00	296.104.800,00	(26.659.800,00)	(9,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	227.656.495,00	(227.656.495,00)	(100,00)
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	97.380.300,00	0,00	97.380.300,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	59.155.800,00	0,00	59.155.800,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	970.713.750,00	0,00	970.713.750,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	37.758.380,00	0,00	37.758.380,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	192.596.100,00	0,00	192.596.100,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	103.597.000,00	0,00	103.597.000,00	0,00
	Jumlah	3.437.775.435,00	1.599.051.127,00	1.838.724.308,00	114,99
4	Beban Sewa				
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	158.980.000,00	0,00	158.980.000,00	0,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.468.000,00	26.460.000,00	31.008.000,00	117,19
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.500.000,00	10.800.000,00	(2.300.000,00)	(21,30)
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	152.100.000,00	82.400.000,00	69.700.000,00	84,59
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	146.371.000,00	41.044.000,00	105.327.000,00	256,62
	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00
	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	1.308.465.000,00	657.282.000,00	651.183.000,00	99,07
	Beban Sewa Photo and Film Equipment	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	16.250.000,00	24.600.000,00	(8.350.000,00)	(33,94)
	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	207.500.000,00	(207.500.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	30.036.000,00	(30.036.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	207.700.000,00	150.078.400,00	57.621.600,00	38,39
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Bangunan Terbuka	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Hotel	202.680.000,00	190.223.000,00	12.457.000,00	6,55
	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	51.760.000,00	50.000.000,00	1.760.000,00	3,52
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	488.565.220,00	541.346.400,00	(52.781.180,00)	(9,75)
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	29.000.000,00	2.000.000,00	27.000.000,00	1.350,00
	Beban Sewa Lapangan Lainnya	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Beban Sewa Taman	5.500.000,00	3.400.000,00	2.100.000,00	61,76
	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.852.789.220,00	2.033.569.800,00	819.219.420,00	40,28
5	Beban Beasiswa Pendidikan PNS				
	Beasiswa Tugas Belajar S2	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	Beasiswa Tugas Belajar S3	215.000.000,00	115.000.000,00	100.000.000,00	86,96
	Jumlah	415.000.000,00	315.000.000,00	100.000.000,00	31,75
6	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Non PNS				
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	408.293.000,00	144.740.500,00	263.552.500,00	182,09
	Sosialisasi	89.800.000,00	2.150.000,00	87.650.000,00	4.076,74
	Bimbingan Teknis	195.125.000,00	437.040.000,00	(241.915.000,00)	(55,35)
	Beban Diklat Kepemimpinan	490.385.000,00	400.064.000,00	90.321.000,00	22,58
	Jumlah	1.183.603.000,00	983.994.500,00	199.608.500,00	20,29
7	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak dan Reribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN				
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.496.000,00	3.596.800,00	(100.800,00)	(2,80)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.012.000,00	17.213.900,00	(1.201.900,00)	(6,98)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	235.500,00	282.500,00	(47.000,00)	(16,64)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	106.830.080,00	107.878.900,00	(1.048.820,00)	(0,97)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	981.400,00	1.018.000,00	(36.600,00)	(3,60)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	467.700,00	520.000,00	(52.300,00)	(10,06)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.470.000,00	47.966.200,00	(496.200,00)	(1,03)
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	175.492.680,00	182.676.300,00	(7.183.620,00)	(3,93)
8	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.709.542.400,00	1.184.433.600,00	1.525.108.800,00	128,76
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.600.000,00	4.119.600,00	11.480.400,00	278,68
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	3.240.000.000,00	(3.240.000.000,00)	(100,00)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	274.518.858,78	0,00	274.518.858,78	0,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.000.000,00	56.038.000,00	(16.038.000,00)	(28,62)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Jasa	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Jumlah	3.039.661.258,78	4.484.591.200,00	(1.444.929.941,22)	(32,22)
	Total	110.074.963.136,29	94.235.400.303,00	15.839.562.833,29	16,81

Tabel 5.4.35

Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.2.02.01	Beban Jasa Kantor	71.961.716.775,00	84.990.443.852,51	(13.028.727.077,51)
8.1.2.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.980.197.690,00	13.980.197.690,00	0,00
8.1.2.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.765.363.000,00	1.877.834.000,00	(112.471.000,00)
8.1.2.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	922.695.220,00	974.455.220,00	(51.760.000,00)
8.1.2.02.06	Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	500.000,00	500.000,00	0,00
8.1.2.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.426.457.030,00	2.523.674.030,00	902.783.000,00
8.1.2.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	944.101.405,00	914.101.405,00	30.000.000,00
8.1.2.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00
8.1.2.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.091.628.000,00	1.183.603.000,00	(91.975.000,00)
8.1.2.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	175.492.680,00	175.492.680,00	0,00
8.1.2.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.602.912.400,00	2.725.142.400,00	(122.230.000,00)
8.1.2.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	314.518.858,78	314.518.858,78	0,00
	Jumlah	97.600.583.058,78	110.074.963.136,29	(12.474.380.077,51)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Jasa-LRA		Rp 97.600.583.058,78	
Penambah:			
1	Penambahan Beban Jasa Kantor karena reklasifikasi dari beban barang jasa BOS dan BLUD	Rp	12.421.145.352,51
2	Penambahan Beban Sewa karena reklasifikasi dari beban barang jasa BOS dan BLUD	Rp	164.231.000,00
3	Penambahan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Non PNS karena reklasifikasi dari beban barang jasa BOS dan BLUD	Rp	91.975.000,00
4	Penambahan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	122.230.000,00
5	Penambahan Beban Jasa karena utang listrik tahun berjalan	Rp	26.011.517,00
6	Penambahan Beban Jasa karena reklas dari beban tak terduga	Rp	617.568.666,00
	Jumlah Penambah	Rp	13.443.161.535,51
Pengurang:			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

1	Pengurangan Beban Jasa Konsultasi karena Kapitalisasi Beban Jasa ke Aset Tetap	Rp	837.878.000,00	
2	Pengurangan Beban Barang karena Pembayaran Utang Listrik tahun lalu	Rp	35.998.458,00	
3	Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Masjid Al Muwahidin	Rp	94.905.000,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	968.781.458,00	
	Total Tambah (Kurang)			Rp 12.474.380.077,51
	Saldo Beban Jasa-LO			Rp 110.074.963.136,29

5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		13.086.660.328,00	7.484.722.023,00

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 senilai Rp13.086.660.328,00 dan 2022 senilai Rp7.484.722.023,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp5.601.938.305,00 atau 74,84% jika dibandingkan tahun 2022.

Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.36
Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Pemeliharaan - LO	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Tanah	1.339.625.000,00	174.458.000,00	1.165.167.000,00	667,88
2	Peralatan dan Mesin	5.795.904.240,00	4.604.640.349,00	1.191.263.891,00	25,87
3	Gedung dan Bangunan	5.322.307.993,00	2.608.395.946,00	2.713.912.047,00	104,05
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	415.850.000,00	0,00	415.850.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	212.973.095,00	97.227.728,00	115.745.367,00	119,05
	Jumlah	13.086.660.328,00	7.484.722.023,00	5.601.938.305,00	74,84

Tabel 5.4.37
Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.2.03.01	Tanah	1.241.280.000,00	1.339.625.000,00	(98.345.000,00)
8.1.2.03.02	Peralatan dan Mesin	5.176.563.786,00	5.795.904.240,00	(619.340.454,00)
8.1.2.03.03	Gedung dan Bangunan	5.104.343.017,00	5.322.307.993,00	(217.964.976,00)
8.1.2.03.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	415.850.000,00	415.850.000,00	0,00
8.1.2.03.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	212.973.095,00	(212.973.095,00)
	Jumlah	11.938.036.803,00	13.086.660.328,00	(1.148.623.525,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Pemeliharaan-LRA		Rp	11.938.036.803,00
Penambah:			
1	Penambahan Beban Pemeliharaan Tanah karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	98.345.000,00
2	Penambahan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS dan BLUD	Rp	619.340.454,00
3	Penambahan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	386.180.585,00
4	Penambahan Beban Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	212.973.095,00
	Jumlah Penambah	Rp	1.316.839.134,00
Pengurang:			
1	Pengurangan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	Rp	168.215.609,00
	Jumlah Pengurang	Rp	168.215.609,00
Total Tambah (Kurang)		Rp	1.148.623.525,00
Saldo Beban Pemeliharaan-LO		Rp	13.086.660.328,00

5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		53.065.337.434,00	42.934.574.493,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2023 senilai Rp53.065.337.434,00 dan tahun 2022 senilai Rp42.934.574.493,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp10.130.762.941,00 atau 23,60% jika dibandingkan tahun 2022.

Adapun rinciannya sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.38

Beban Perjalanan Dinas- LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Perjalanan Dinas - LO	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.159.422.302,00	28.023.330.907,00	6.136.091.395,00	21,90
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	1.027.580.197,00	(1.027.580.197,00)	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.761.482.500,00	6.688.266.347,00	4.073.216.153,00	60,90
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.693.447.000,00	7.089.206.500,00	604.240.500,00	8,52
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	450.985.632,00	106.190.542,00	344.795.090,00	324,69
Total		53.065.337.434,00	42.934.574.493,00	10.130.762.941,00	23,60



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Tabel 5.4.39
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.2.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.025.403.020,00	34.159.422.302,00	(1.134.019.282,00)
8.1.2.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
8.1.2.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.761.482.500,00	10.761.482.500,00	0,00
8.1.2.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.284.265.000,00	7.693.447.000,00	(409.182.000,00)
8.1.2.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	415.435.632,00	450.985.632,00	(35.550.000,00)
Jumlah		51.486.586.152,00	53.065.337.434,00	(1.578.751.282,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Perjalan Dinas-LRA		Rp 51.486.586.152,00
Penambah:		
1	Penambahan Beban Perjalanan Dinas Biasa karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS dan BLUD	Rp 1.134.019.282,00
2	Penambahan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp 332.182.000,00
3	Penambahan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	Rp 35.550.000,00
4	Penambahan Beban Perjalanan Dinas karena reklas dari beban tak terduga	Rp 77.000.000,00
Jumlah Penambah		Rp 1.578.751.282,00
Pengurang:		
1	Pengurangan Beban Perjalanan Dinas	0,00
Jumlah Pengurang		0,00
Total Tambah (Kurang)		Rp 1.578.751.282,00
Saldo Beban Perjalanan Dinas-LO		Rp 53.065.337.434,00

5.4.2.1.3	Beban Bunga	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Beban Bunga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2023 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

5.4.2.1.4	Beban Subsidi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		0,00	0,00

Beban Subsidi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2023 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.5	Beban Hibah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		39.613.509.262,52	29.679.216.175,55

Beban Hibah Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2023 senilai Rp39.613.509.262,52 dan 2022 senilai Rp29.679.216.175,55 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp9.934.293.086,97 atau 33,47% dibandingkan tahun 2022.

Rincian Beban Hibah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Hibah Pemerintah Kota Bima Tahun 2023

No.	Beban Hibah - LO	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.154.765.722,83	(625.491.225,65)	2.780.256.948,48	(444,49)
2	Beban Hibah Kepada Partai Politik	977.856.000,00	977.856.000,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.693.941.000,00	1.640.000.000,00	1.053.941.000,00	64,26
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.810.000.000,00	825.000.000,00	6.985.000.000,00	846,67
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.940.000.000,00	0,00	17.940.000.000,00	0,00
6	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.035.596.000,00	0,00	5.035.596.000,00	0,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	3.127.074.000,00	(3.127.074.000,00)	(100,00)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	10.806.100.000,00	(10.806.100.000,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.570.100.000,00	2.199.095.139,00	371.004.861,00	16,87
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.729.582.262,20	(10.729.582.262,20)	(100,00)
11	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	431.250.539,69	0,00	431.250.539,69	0,00
Jumlah		39.613.509.262,52	29.679.216.175,55	9.934.293.086,97	33,47



Tabel 5.4.41
Perbandingan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.5.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	140.729.233,00	2.154.765.722,83	(2.014.036.489,83)
8.1.5.07.01.0001	Beban Hibah Kepada Partai Politik	977.856.000,00	977.856.000,00	0,00
8.1.5.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.693.941.000,00	2.693.941.000,00	0,00
8.1.5.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.810.000.000,00	7.810.000.000,00	0,00
8.1.5.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.940.000.000,00	17.940.000.000,00	0,00
8.1.5.05.03.0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.035.596.000,00	5.035.596.000,00	0,00
8.1.5.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.570.100.000,00	2.570.100.000,00	0,00
8.1.5.02.02.0001	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	431.250.539,69	(431.250.539,69)
Jumlah		37.168.222.233,00	39.613.509.262,52	(2.445.287.029,52)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Hibah-LRA		Rp 37.168.222.233,00	
Penambah:			
1	Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Properti Investasi-Tanah Kepada Pemerintah Pusat	Rp	172.000.000,00
2	Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Aset Tetap Kepada Pemerintah Pusat	Rp	1.643.858.847,83
3	Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Aset Tetap Tanah untuk Bangunan tempat kerja Kepada Pemerintah Daerah lainnya	Rp	431.250.539,69
4	Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Aset Tetap kepada Polres Bima Kota	Rp	198.177.642,00
Jumlah Penambah		Rp	2.445.287.029,52
Pengurang:			
1	Pengurangan Beban Hibah		0,00
Jumlah Pengurang			0,00
Total Tambah (Kurang)			Rp 2.445.287.029,52
Saldo Beban Hibah-LO			Rp 39.613.509.262,52

5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		4.270.609.000,00	6.507.250.000,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2023 senilai Rp4.270.609.000,00 dan 2022 senilai Rp6.507.250.000,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp2.236.641.000,00 atau 34,37% dibandingkan tahun 2022.

Adapun Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan 2022 sesuai tabel berikut ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

Tabel 5.4.42

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Bantuan Sosial - LO	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.370.559.000,00	92.500.000,00	2.278.059.000,00	2.462,77
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.215.000.000,00	(1.215.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.900.050.000,00	5.199.750.000,00	(3.299.700.000,00)	(63,46)
Jumlah		4.270.609.000,00	6.507.250.000,00	(2.236.641.000,00)	(34,37)

Tabel 5.4.43

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
8.1.6.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.583.250.000,00	2.370.559.000,00	(787.309.000,00)
8.1.6.02.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.900.050.000,00	1.900.050.000,00	0,00
Jumlah		3.483.300.000,00	4.270.609.000,00	(787.309.000,00)

Perhitungan selisih dari nilai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Bantuan Sosial-LRA	Rp 3.483.300.000,00
Penambah:	
1 Penambahan Beban Bantuan Sosial karena reklas dari Beban Tak Terduga	Rp 787.309.000,00
Jumlah Penambah	Rp 787.309.000,00
Pengurang:	
1 Pengurangan Beban Hibah	0,00
Jumlah Pengurang	0,00
Total Tambah (Kurang)	Rp 787.309.000,00
Saldo Beban Bantuan Sosial-LO	Rp 4.270.609.000,00

5.4.2.1.7	Beban Penyisihan Piutang	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		2.239.240.662,94	2.179.367.171,19

Beban penyisihan Piutang dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima.

Beban penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp2.239.240.662,94 dan 2022 senilai Rp2.179.367.171,19 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp59.873.491,75 atau 2,75%.

Beban penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.4.44

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No.	Beban Penyisihan Piutang - LO	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Piutang Pajak Hotel	306.491,52	1.785.440,00	(1.478.948,48)	(82,83)
2	Piutang Restoran	3.564.833,75	7.065.818,84	(3.500.985,09)	(49,55)
3	Piutang Pajak Reklame	976.931,95	14.347.850,68	(13.370.918,73)	(93,19)
4	Piutang Pajak Parkir	119.762,50	154.000,00	(34.237,50)	(22,23)
5	Piutang Pajak Air Tanah	7.999,12	3.025,44	4.973,68	164,40
6	Piutang PBB	1.283.963.190,94	1.175.258.330,40	108.704.860,54	9,25
7	Piutang BPHTB	54.581.100,00	152.359.340,00	(97.778.240,00)	(64,18)
8	Piutang Hiburan	0,00	2.500,00	(2.500,00)	(100,00)
9	Piutang Retribusi	895.720.353,16	828.390.865,83	67.329.487,33	8,13
	Jumlah	2.239.240.662,94	2.179.367.171,19	59.873.491,75	2,75

5.4.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		135.648.728.946,63	134.277.201.905,64

Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 melakukan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud serta beban penyusutan Properti Investasi dengan nilai Rp135.648.728.946,63 yang terdiri beban penyusutan aset tetap tahun berjalan senilai Rp135.510.369.076,18 dan amortisasi aset tak berwujud senilai Rp137.068.203,45 serta Penyusutan Properti Investasi senilai Rp1.291.667,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.45

Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	471.346.730,00
2	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	189.645.000,00
3	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	4.952.750,00
4	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	78.700.000,00
5	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	26.179.293,00
6	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	93.800,00
7	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	4.648.875,00
8	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	929.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
9	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	19.484.330,00
10	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mounteneri g	275.600,00
11	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	182.778,00
12	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.898.644.154,00
13	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	358.124.572,00
14	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	406.400.653,00
15	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	791.085.213,00
16	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.645.833,00
17	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.106.114.530,00
18	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	106.609.178,00
19	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	464.130.995,00
20	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	583.335,00
21	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	292.332.612,00
22	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	68.978.718,00
23	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	374.742.265,00
24	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	84.340.066,00
25	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	10.779.750,00
26	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	5.168.879,00
27	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.123.906,00
28	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	7.153.480,00
29	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	2.882.000,00
30	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.861.260,00
31	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	2.973.898,00
32	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	750.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
33	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	15.290.063,00
34	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.210.000,00
35	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	1.801.800,00
36	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	18.879.204,00
37	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	1.000.000,00
38	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	583.333,00
39	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	3.614.830,00
40	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.030.000,00
41	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	3.074.120,00
42	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	103.823.584,00
43	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	3.333.229,00
44	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	5.171.032,00
45	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	5.540.000,00
46	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	45.685.600,00
47	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	49.585.020,00
48	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	73.702.800,00
49	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	2.800.000,00
50	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.149.210,00
51	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	59.538.069,00
52	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	711.828.045,00
53	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	91.596.040,00
54	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	1.686.816,00
55	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	34.538.909,00
56	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	405.186.740,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
57	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	977.277.279,29
58	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.222.843.273,93
59	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	444.444,00
60	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	64.092.539,00
61	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	520.895.042,53
62	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	65.370.108,00
63	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	537.909.157,70
64	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	141.241.308,00
65	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	41.664.335,00
66	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	12.927.204,00
67	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	150.332.798,66
68	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	62.108.896,00
69	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.429.333,00
70	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	140.072.283,00
71	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	112.311.933,00
72	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.040.684.867,00
73	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	269.145.269,72
74	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.265.139,00
75	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	5.558.642,00
76	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	452.048.103,00
77	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	4.930.491,00
78	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	33.550.139,00
79	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	38.294.019,00
80	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	12.867.474,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
81	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	1.525.000,00
82	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	941.635,00
83	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	1.914.250,00
84	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	340.000,00
85	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	1.881.000,00
86	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	1.430.000,00
87	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	98.732.206,00
88	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.540.620.345,00
89	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	276.381.437,00
90	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	11.091.930,00
91	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	402.067.247,00
92	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	779.857.581,00
93	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	63.228.363,00
94	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	2.259.840,00
95	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	327.675.691,00
96	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	159.421.900,00
97	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	61.292.740,00
98	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	8.751.697,00
99	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	29.745.000,00
100	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	140.285.228,00
101	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	10.000.000,00
102	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	261.384.991,00
103	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	634.920,00
104	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	196.310.082,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
105	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	1.548.000,00
106	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	220.000,00
107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	191.322.000,00
108	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	6.392.240,00
109	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.241.478.566,00
110	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	11.261.789,00
111	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.122.798,00
112	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	12.953.458,00
113	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	7.622.797,00
114	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	36.909.798,00
115	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	354.174.986,00
116	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	168.980.520,00
117	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	17.534.000,00
118	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	223.092.136,00
119	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	8.343.247,00
120	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	31.290.919,00
121	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	26.992.500,00
122	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	202.986,00
123	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	5.161.258,00
124	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	99.602.021,00
125	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	11.225.600,00
126	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	3.257.875,00
127	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	39.975.200,00
128	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	2.406.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
129	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	10.626.144,00
130	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	162.208.113,00
131	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	3.064.200,00
132	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	7.292.411,00
133	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	550.000,00
134	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	11.529.542,00
135	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	468.803.700,12
136	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	61.207.030,00
137	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	34.490.342,00
138	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	55.914.499,00
139	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	65.880.845,00
140	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	20.300.130,00
141	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	736.100,00
142	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	37.650,00
143	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	139.919.762,00
144	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	63.990.485,00
145	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	135.590.719,00
146	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	33.986.630,00
147	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	641.667,00
148	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	30.064.375,00
149	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	58.649.875,00
150	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	39.162.820,00
151	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya Optik dan Akustik	460.000,00
152	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	100.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
153	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Keamanan	25.282.387,00
154	Beban Penyusutan Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	317.360,00
155	Beban Penyusutan Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	357.000,00
156	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	103.301.949,00
157	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	5.359.514.663,39
158	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	760.000,00
159	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	122.461.676,00
160	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	21.307.970,00
161	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	993.188.334,04
162	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	351.353.905,00
163	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	29.561.000,00
164	Beban Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	20.390.000,00
165	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	1.333.333,00
166	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	2.666.660,00
167	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	858.000,00
168	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	1.000.000,00
169	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	662.670,00
170	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	23.558.624,00
171	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	22.432.896,00
172	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	72.429.170,00
173	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	10.452.600,00
174	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	24.374.184,00
175	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.547.426.883,00
176	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	183.170.069,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
177	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	24.371.525,00
178	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	352.704.052,00
179	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	181.453.980,00
180	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.650.826.762,00
181	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	73.929.113,00
182	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	707.784.623,00
183	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	435.733.983,00
184	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.373.790.095,00
185	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	161.580.362,00
186	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.160.210.353,00
187	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	52.210.565,00
188	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	53.623.032,00
189	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	51.386.425,00
190	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	474.671.684,00
191	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.560.575,00
192	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	40.140.203,00
193	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	45.718.793,00
194	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	63.239.731,00
195	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	36.974.020,00
196	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	62.577,00
197	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	48.232.200,00
198	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	1.866.004,00
199	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.197.869.864,00
200	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22.122.891,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
201	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	3.062.500,00
202	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	29.848.356,00
203	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	238.541.074,00
204	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/ Tempat Peristirahatan	35.955.038,00
205	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	819.679.464,00
206	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	125.385.485,00
207	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	2.161.250,00
208	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	1.815.000,00
209	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	71.712.334,00
210	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	77.132.897,00
211	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.359.388.914,00
212	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	17.755.900,00
213	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	2.723.501.416,00
214	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	42.762.965.745,00
215	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kota	3.191.016.534,00
216	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	1.964.261.810,00
217	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	8.920.385.614,00
218	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	1.249.958,00
219	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.373.566.015,00
220	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	74.411.340,00
221	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	34.605.304,00
222	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	4.746.800,00
223	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	72.999.372,00
224	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	11.875.374,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
225	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	591.341.132,00
226	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.800.886.958,00
227	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	64.054.265,00
228	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	516.051.670,00
229	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	73.532.884,00
230	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	19.181.917,00
231	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	12.757.700,00
232	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	26.432.128,00
233	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	93.873.300,00
234	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	13.260.000,00
235	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	80.710.891,00
236	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	2.000.000,00
237	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	37.762.750,00
238	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.259.999.727,00
239	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.069.634.713,00
240	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	26.175.359,00
241	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	126.155.904,00
242	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	466.594.070,00
243	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	59.966.150,00
244	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	4.994.900,00
245	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	88.554.515,00
246	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	100.367.309,00
247	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	144.810.000,00
248	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	407.111.901,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
249	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	87.690.213,00
250	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	621.170.485,00
251	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	4.982.033,00
252	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	380.998.853,00
253	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	88.314.833,00
254	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	8.808.407,00
255	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	5.328.310,00
256	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	49.906.058,00
257	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	106.124.401,00
258	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.896.901.285,00
259	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	129.222.256,00
260	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	12.180.000,00
261	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	4.983.000,00
262	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	9.295.000,00
263	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	138.625.002,00
264	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	142.564.367,00
265	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	11.673.726,00
266	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.112.500,00
267	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	215.344.711,00
268	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	812.209.682,00
269	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	306.559.848,00
270	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	850.927.965,00
271	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	104.115.967,80
272	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	359.345.844,00



No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2023 (Rp)
273	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	2.432.917,00
274	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	334.877.788,00
275	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	34.387.950,00
276	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	137.068.203,45
277	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.291.667,00
Jumlah		135.648.728.946,63

Sebab kenaikan angka Beban penyusutan dan Amortisasi secara garis besar dikarenakan peningkatan pada beban penyusutan Perlatan dan Mesin dan Beban penyusutan gedung dan bangunan serta adanya tambahan pada beban penyusutan properti investasi.

Tabel 5.4.46
Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023

No.	Beban Penyusutan	2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	36.838.391.673,38
2	Gedung dan Bangunan	18.712.342.676,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.959.634.726,80
4	Aset Tetap Lainnya	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	137.068.203,45
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.291.667,00
Jumlah		135.648.728.946,63

5.4.2.2.1	Beban Penyusutan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	36.838.391.673,38	34.456.691.091,20

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO Pemerintah Kota Bima untuk tahun 2023 senilai 36.838.391.673,38 dan 2022 senilai Rp34.456.691.091,20 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp2.381.700.582,18 atau 6,91% dibandingkan tahun 2022. Rincian beban penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47
Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesih Tahun 2023

No	Nama Barang	2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	796.438.656,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No	Nama Barang	2023 (Rp)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	5.969.511.874,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.038.038,00
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	879.798.180,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.384.333.651,11
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.077.420.167,72
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.711.969.798,00
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.467.216.927,12
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	26.056.747,00
10	Beban Penyusutan Komputer	6.981.449.497,43
11	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	26.910.663,00
12	Beban Penyusutan Alat Peraga	23.558.624,00
13	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	22.432.896,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	107.255.954,00
	Total	36.838.391.673,38

Lebih rinci beban penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.4.48
Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	Nama Barang	2023 (Rp)
1	Alat Besar Darat	660.991.730,00
2	Alat Besar Apung	4.952.750,00
3	Alat Bantu	130.494.176,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.673.624.133,00
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	464.714.330,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	736.053.595,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	95.119.816,00
8	Alat Bengkel Bermesin	43.203.486,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	31.193.287,00
10	Alat Ukur	289.641.265,00
11	Alat Pengolahan	879.798.180,00
12	Alat Kantor	1.417.002.928,29
13	Alat Rumah Tangga	2.552.795.873,16
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	414.534.849,66
15	Alat Studio	1.428.965.850,72
16	Alat Komunikasi	544.156.861,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No	Nama Barang	2023 (Rp)
17	Peralatan Pemancar	104.297.456,00
18	Alat Kedokteran	6.464.098.992,00
19	Alat Kesehatan Umum	6.247.870.806,00
20	Unit Alat Laboratorium	1.257.380.298,00
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	1.081.499.559,12
23	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	30.064.375,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00
25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	58.649.875,00
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	39.162.820,00
27	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya Optik dan Akustik	460.000,00
28	Senjata Api	100.000,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	25.282.387,00
30	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	317.360,00
31	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	357.000,00
32	Komputer Unit	5.463.576.612,39
33	Peralatan Komputer	1.517.872.885,04
34	Alat Deteksi	20.390.000,00
35	Alat Pelindung	3.999.993,00
36	Alat Sar	2.520.670,00
37	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	23.558.624,00
38	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	22.432.896,00
39	Peralatan Olah Raga	107.255.954,00
	Total	36.838.391.673,38

	Beban Penyusutan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.4.2.2.2	Gedung dan Bangunan	18.712.342.676,00	22.870.273.235,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp18.712.342.676,00 dan 2022 senilai Rp22.870.273.235,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp4.157.930.559,00 atau 18,18 %. Rincian beban penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.4.49

Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Nama	2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.947.660.364,00
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.127.080.984,00
2	Monumen	127.546.735,00
3	Bangunan Menara	73.527.334,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.436.527.259,00
	Total	18.712.342.676,00

	Beban Penyusutan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.4.2.2.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.959.634.726,80	76.824.655.857,00

Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp79.959.634.726,80 dan 2022 senilai Rp76.824.655.857,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp3.134.978.869,80 atau 4,08%. Rincian beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50

Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No.	Nama Barang	2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	61.141.465.808,00
2	Bangunan Air	13.290.050.341,00
3	Instalasi	2.507.915.905,00
4	Jaringan	3.020.202.672,80
	Total	79.959.634.726,80

Lebih rinci beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.4.51

Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No.	Nama Barang	2023 (Rp)
1	Jalan	59.581.136.977,00
2	Jembatan	1.560.328.831,00
3	Bangunan Air Irigasi	3.076.924.200,00
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

No.	Nama Barang	2023 (Rp)
		146.323.128,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	120.473.641,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	7.355.809.799,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	652.716.124,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	833.528.838,00
9	Bangunan Air Kotor	1.104.274.611,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2.058.260.054,00
11	Instalasi Air Kotor	129.222.256,00
12	Instalasi Pengolahan Sampah	17.163.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	147.920.002,00
14	Instalasi Gardu Listrik	154.238.093,00
15	Instalasi Pengaman	1.112.500,00
16	Jaringan Air Minum	1.334.114.241,00
17	Jaringan Listrik	1.314.389.776,80
18	Jaringan Telepon	2.432.917,00
19	Jaringan Gas	369.265.738,00
	Total	79.959.634.726,80

5.4.2.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

5.4.2.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Beban penyusutan Aset Lainnya – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

5.4.2.2.6	Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		137.068.203,45	125.581.722,44



Beban Amortisasi Aset tak Berwujud – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp137.068.203,45 dan 2022 senilai Rp125.581.722,44 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp11.486.481,01 atau 9,15%.

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* senilai Rp137.068.203,45 terdapat pada 14 (empat belas) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.52
Beban Amortisasi ATB – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023

No.	Beban Penyusutan	2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	2.205.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.196.026,00
3	Dinas Kesehatan	9.524.000,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.804.800,00
5	Dinas Sosial	500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	2.320.500,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	22.182.500,00
8	Inspektorat	499.500,00
9	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	68.844.406,20
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	742.500,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.500.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.998.971,25
14	Rumah Sakit Umum Daerah Bima	250.000,00
	Jumlah	137.068.203,45

5.4.2.2.7	Beban Penyusutan Properti Investasi	<u>2023 (Rp)</u> 1.291.667,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
------------------	--	---	---------------------------------

Beban Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp1.291.667,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp0,00. Beban Penyusutan Properti Investasi terdapat pada Sekretariat Daerah Kota Bima.

5.4.2.3	BEBAN TRANSFER	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
----------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Beban Transfer Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.4

5.4.2.3.1	Beban Bagi Hasil Pajak	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
-----------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Beban Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.4.2.3.2	Beban Bantuan Keuangan	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
-----------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.4.2.4	BEBAN TAK TERDUGA	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 945.418.000,00
---------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------

Beban tak Terduga Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp945.418.000,00,00.

5.4.2.4.1	Beban Tak Terduga	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 945.418.000,00
-----------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------

Beban Tak Terduga Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun 2022 senilai Rp945.418.000,00 .

5.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>2023 (Rp)</u> (922.962.174,48)	<u>2022 (Rp)</u> (2.115.098.031,06)
-------	--	--------------------------------------	--

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp(922.962.174,48) dan 2022 senilai Rp(2.115.098.031,06) sehingga mengalami kenaikan senilai Rp1.192.135.856,58 atau 56,36%.

5.4.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	<u>2023 (Rp)</u> 119.957.549,44	<u>2022 (Rp)</u> 95.434.722,54
---------	--	------------------------------------	-----------------------------------



Surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp119.957.549,44 dan 2022 senilai Rp95.434.722,54 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp24.522.826,90 atau 25,70%.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.4.3.1.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00

Surplus/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.4.3.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Surplus/Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.4.3.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	119.957.549,44	95.434.722,54

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp119.957.549,44 dan 2022 senilai Rp95.434.722,54 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp24.522.826,90 atau 25,70%.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.4.3.2	Defisit Non Operasional	1.042.919.723,92	2.210.532.753,60

Defisit/dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp1.042.919.723,92 dan 2022 senilai Rp2.210.532.753,60 sehingga mengalami penurunan senilai Rp1.167.613.029,68 yang berasal dari Penghapusan Bangunan dan Gedung dan obat daluarsa.

		<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
5.4.3.2.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	1.042.787.355,35	2.210.532.753,60

Defisit/ Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Kota Bima adalah senilai Rp1.042.787.355,35 dan 2022 senilai Rp2.210.532.753,60 sehingga mengalami penurunan senilai Rp1.167.745.398,25.



5.4.3.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Defisit/ Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Bima tahun 2023 adalah senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

5.4.3.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>2023 (Rp)</u> 132.368,57	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Defisit/ dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp132.368,57 berasal dari penghapusan obat daluarsa

5.4.4	Pos Luar Biasa	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
--------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pos Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.4.1	Pendapatan Luar Biasa	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
----------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

5.4.4.1.1	Pendapatan Luar Biasa	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00 dan 2022 senilai Rp0,00.

5.4.4.2	Beban Luar Biasa	<u>2023 (Rp)</u> 0,00	<u>2022 (Rp)</u> 0,00
----------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.5	Surplus/(Defisit) -LO	<u>2023 (Rp)</u> 91.553.721.512,64	<u>2022 (Rp)</u> 135.939.499.834,79
--------------	------------------------------	--	---

Surplus/(Defisit) -LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp 91.553.721.512,64 dan 2022 senilai Rp135.939.499.834,79 sehingga Surplus/(Defisit)-LO mengalami penurunan senilai Rp44.385.778.322,15 atau 32,65%



5.5 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Bima untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	89.569.409.283,45	210.379.919.143,22

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai Rp89.569.409.283,45 dan Rp210.379.919.143,22. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp120.810.509.859,77 atau 57,42% dibandingkan tahun 2022.

Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Penerimaan Pajak Daerah	23.211.800.485,23	21.355.298.265,81	1.856.502.219,42	8,69
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.723.098.596,00	19.710.293.760,28	(10.987.195.164,28)	(55,74)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	1.545.139.285,00	595.651.168,00	38,55
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.255.756.488,47	14.703.672.797,13	1.545.484.691,34	10,56
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	55.895.742.054,00	69.899.355.791,00	(14.003.613.737,00)	(20,03)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00	23.435.827.827,00	5,44
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	42.423.553.167,00	89.773.006.178,00	(47.349.453.011,00)	(52,74)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	80.716.898.688,00	67.495.307.379,00	13.221.591.309,00	19,59
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00	(17.936.475.000,00)	(45,86)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.382.999.938,00	51.171.903.581,00	3.211.096.357,00	6,28
11	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Penerimaan Lainnya - Bantuan Keuangan Provinsi	3.622.903.200,00	500.000.000,00	3.122.903.200,00	624,58
13	Penerimaan Lainnya - Pendapatan atas Pengembalian Hibah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.461.776.963,00	0,00	9.461.776.963,00	0,00
Jumlah		772.006.886.982,70	805.766.191.160,22	(33.759.304.177,52)	(4,19)
Arus Keluar Kas					
1	Pembayaran Pegawai	372.071.721.926,00	361.680.806.870,00	10.390.915.056,00	2,87
2	Pembayaran Barang dan Jasa	267.851.512.668,25	209.804.746.008,00	58.046.766.660,25	27,67
3	Pembayaran Hibah	37.168.222.233,00	16.448.051.139,00	20.720.171.094,00	125,97
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.483.300.000,00	6.507.250.000,00	(3.023.950.000,00)	(46,47)
6	Pembayaran Tak Terduga	1.862.720.872,00	945.418.000,00	917.302.872,00	97,03
Jumlah		682.437.477.699,25	595.386.272.017,00	87.051.205.682,25	14,62
Total		89.569.409.283,45	210.379.919.143,22	(120.810.509.859,77)	(57,42)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1	Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		772.006.886.982,70	805.766.191.160,22

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp772.006.886.982,70 terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penerimaan Dana Penyesuaian, Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya dari Aktivitas Operasi. Jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp33.759.304.177,52 atau 4,19% dibandingkan tahun 2022 senilai Rp805.766.191.160,22.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sudah termasuk pendapatan dari Dana Kapitasi dan BOK pada 7 FKTP, Pendapatan BLUD RSUD, pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pendidikan (BOSP) pada 106 (Seratus Enam) sekolah penerima Dana BOS terdiri dari 69 (Enam Puluh Sembilan) Sekolah Dasar dan 15 (lima belas) Sekolah Menengah Pertama dan 22



Sekolah Swasta, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 165 (Seratus enam puluh lima) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari 34 (Tiga puluh empat) PAUD Negeri dan 131 (Seratus tiga puluh satu) PAUD Swasta dan 14 (Empat belas) Penerima Bantuan Operasional (BOP) Kesetaraan sebagaimana yang diamanatkan dengan rincian pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Dana Kapitasi, BOK, BLUD RSUD, dan Dana BOSP Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Kapitasi JKN	9.461.776.963,00
2	Penerimaan Dana Klaim JKN RSUD	0,00
3	Penerimaan Jasa Pelayanan BLUD RSUD	11.046.242.349,00
4	Penerimaan Dana BOS Reguler Negeri	17.121.599.800,00
5	Penerimaan Dana BOS Reguler Swasta	2.490.100.000,00
6	Penerimaan Dana BOS Kinerja Negeri	962.500.000,00
7	Penerimaan Dana BOS Kinerja Swasta	80.000.000,00
8	Penerimaan Dana BOP PAUD	4.365.496.000,00
9	Penerimaan Dana BOP Kesetaraan	839.350.000,00
10	Penerimaan Dana BOK	7.208.150.700,00
Jumlah		53.575.215.812,00

5.5.1.1.1	Arus Masuk Kas dari	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Penerimaan Pajak Daerah	23.211.800.485,23	21.355.298.265,81

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2023 dan Tahun 2022 dari Penerimaan Pajak Daerah adalah senilai Rp23.211.800.485,23 dan Rp21.355.298.265,81 terdiri dari:

Tabel 5.5.3
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	1.281.743.103,28	911.452.444,30	370.290.658,98	40,63
2	Pajak Restoran	2.132.758.354,00	2.103.232.173,38	29.526.180,62	1,40
3	Pajak Hiburan	56.267.950,00	36.169.080,00	20.098.870,00	55,57
4	Pajak Reklame	448.264.791,50	489.500.086,50	(41.235.295,00)	(8,42)
5	Pajak Penerangan Jalan	10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
6	Pajak Parkir	164.195.500,00	132.915.500,00	31.280.000,00	23,53



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.5

No.	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Pajak Air Tanah	52.914.467,70	56.046.006,45	(3.131.538,75)	(5,59)
8	Pajak Sarang Burung walet	21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235.761.383,75	350.043.239,18	(114.281.855,43)	(32,65)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.456.288.051,00	3.543.193.929,00	(86.905.878,00)	(2,45)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.128.733.641,00	4.275.463.292,00	853.270.349,00	19,96
Jumlah		23.211.800.485,23	21.355.298.265,81	1.856.502.219,42	8,69

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.4
Rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Hotel					
1	Pajak Hotel	1.222.791.828,28	873.240.494,30	349.551.333,98	40,03
2	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos	57.487.275,00	35.993.450,00	21.493.825,00	59,72
3	Rumah Kos Dengan Jumlah kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.464.000,00	2.218.500,00	(754.500,00)	(34,01)
Jumlah		1.281.743.103,28	911.452.444,30	370.290.658,98	40,63
Pajak Restoran					
1	Restoran	999.716.604,40	1.192.303.990,00	(192.587.385,60)	(16,15)
2	Rumah Makan	147.215.135,00	178.489.112,00	(31.273.977,00)	(17,52)
3	Kafetaria	282.255.872,50	155.637.536,00	126.618.336,50	81,35
4	Kantin	46.069.776,05	42.244.835,00	3.824.941,05	9,05
5	Katering	289.570.957,00	290.457.621,40	(86.664,40)	(0,31)
6	Warung	367.930.009,05	244.099.078,98	123.830.930,07	50,73
Jumlah		2.132.758.354,00	2.103.232.173,38	29.526.180,62	1,40
Pajak Hiburan					
1	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya	3.406.350,00	5.641.080,00	(2.234.730,00)	(39,62)
2	Pertandingan Olahraga, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	52.861.600,00	30.528.000,00	22.333.600,00	73,16
3	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hiburan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		56.267.950,00	36.169.080,00	20.098.870,00	55,57
Pajak Reklame					
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	370.089.399,00	399.375.631,50	(29.286.232,50)	(7,33)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.5

No.	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Reklame Kain	64.565.187,50	76.733.000,00	(12.167.812,50)	(15,86)
3	Reklame Berjalan	13.610.205,00	13.391.455,00	218.750,00	1,63
Jumlah		448.264.791,50	489.500.086,50	(41.235.295,00)	(8,42)
Pajak Penerangan Jalan					
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
Jumlah		10.233.873.243,00	9.443.782.515,00	790.090.728,00	8,37
Pajak Parkir					
1	Pajak Parkir	164.195.500,00	132.915.500,00	31.280.000,00	23,53
Jumlah		164.195.500,00	132.915.500,00	31.280.000,00	23,53
Pajak Air Tanah					
1	Pajak Air Tanah	52.914.467,70	56.046.006,45	(3.131.538,75)	(5,59)
Jumlah		52.914.467,70	56.046.006,45	(3.131.538,75)	(5,59)
Pajak Sarang Burung Walet					
1	Pajak Sarang Burung Walet	21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
Jumlah		21.000.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	55,56
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1	Pasir dan Kerikil	115.661.350,00	134.597.875,11	(18.936.525,11)	(14,07)
2	Tanah Liat	5.239.375,00	5.941.457,79	(702.082,79)	(11,82)
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	114.860.658,75	209.503.906,28	(94.643.247,53)	(45,17)
Jumlah		235.761.383,75	350.043.239,18	(114.281.855,43)	(32,65)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.456.288.051,00	3.543.193.929,00	(86.905.878,00)	(2,45)
Jumlah		3.456.288.051,00	3.543.193.929,00	(86.905.878,00)	(2,45)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
1	BPHTB - Pemindahan Hak	5.128.733.641,00	4.275.463.292,00	853.270.349,00	19,96
Jumlah		5.128.733.641,00	4.275.463.292,00	853.270.349,00	19,96
Total		23.211.800.485,23	21.355.298.265,81	1.856.502.219,42	8,69

5.5.1.1.2	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		8.723.098.596,00	19.710.293.760,28

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp8.723.098.596,00 dan Rp19.710.293.760,28 terdiri dari:



Tabel 5.5.5
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.736.071.950,00	13.970.104.800,00	(11.234.032.850,00)	(80,41)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	501.768.000,00	509.321.000,00	(7.553.000,00)	(1,48)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	407.854.000,00	315.780.000,00	92.074.000,00	29,16
4	Retribusi Pelayanan Pasar	464.957.500,00	500.953.000,00	(35.995.500,00)	(7,19)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	434.860.000,00	429.810.000,00	5.050.000,00	1,17
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	0,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.738.000,00	181.374.000,00	6.364.000,00	3,51
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.763.033.700,00	1.468.535.000,00	294.498.700,00	20,05
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	423.824.800,00	452.400.314,00	(28.575.514,00)	(6,32)
10	Retribusi Terminal	5.626.000,00	8.730.000,00	(3.104.000,00)	(35,56)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	211.343.000,00	216.983.500,00	(5.640.500,00)	(2,60)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	14.700.000,00	47.710.000,00	(33.010.000,00)	(69,19)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	561.114.395,00	542.245.387,00	18.869.008,00	3,48
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	917.757.251,00	1.051.296.759,28	(133.539.508,28)	(12,70)
15	Retribusi Izin Trayek	22.550.000,00	15.050.000,00	7.500.000,00	49,83
Jumlah		8.723.098.596,00	19.710.293.760,28	(10.987.195.164,28)	(55,74)

5.5.1.1.3	Arus Masuk Kas dari Penerimaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	1.545.139.285,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp2.140.790.453,00 dan Rp1.545.139.285,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.6
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 & 2022

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	155.056.258,00	(155.056.258,00)	(100,00)



No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.140.790.453,00	25.426.352,00	2.115.364.101,00	8.319,57
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	1.364.656.675,00	(1.364.656.675,00)	(100,00)
Jumlah		2.140.790.453,00	1.545.139.285,00	595.651.168,00	38,55

**5.5.1.1.4 Arus Masuk Kas dari
Penerimaan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah
yang Sah**

2023 (Rp)

16.255.756.488,47

2022 (Rp)

14.703.672.797,13

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp16.255.756.488,47 dan Rp14.703.672.797,13 terdiri dari:

Tabel 5.5.7

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2023 dan 2022

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penerimaan Sewa BMD	78.735.456,67	0,00	78.735.456,67	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	479.369.095,52	634.481.215,05	(155.112.119,53)	(24,45)
3	Pendapatan Bunga	3.247.190.524,39	1.699.870.625,01	1.547.319.899,38	91,03
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.185.757.924,39	406.652.754,32	779.105.170,07	191,59
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	35.676.961,50	25.536.962,75	10.139.998,75	39,71
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	133.093.093,00	296.382.068,00	(163.288.975,00)	(55,09)
7	Pendapatan Denda Pajak	123.934,00	170.251,00	(46.317,00)	(27,21)
8	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	49.065.850,00	5.063.080,00	44.002.770,00	869,09
10	Pendapatan Retribusi	0,00	1.336.440,00	(1.336.440,00)	(100,00)
11	Pendapatan BLUD	11.046.242.349,00	0,00	11.039.643.349,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	7.795.069.400,00	(7.795.069.400,00)	(100,00)
13	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	501.300,00	110.001,00	391.299,00	355,72
14	Pendapatan Dana BOS	0,00	3.839.000.000,00	(3.839.000.000,00)	(100,00)



No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	16.255.756.488,47	14.703.672.797,13	1.552.083.691,34	10,56

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas Paragraf 8 ***bahwa arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah*** dan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 senilai Rp16.255.756.488,47 sudah termasuk Pendapatan BLUD pada RSUD Kota Bima sebesar Rp11.046.242.349,00 dan Dengan berpedoman pada aturan di atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional senilai pada 7 (tujuh) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bima sudah dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dapat kami jelaskan bahwa nilai yang ditampilkan dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LRA) senilai Rp17.373.493.411,47 sementara yang ditampilkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Laporan Arus Kas) senilai Rp16.255.756.488,47 sehingga terdapat selisih senilai Rp1.117.736.923,00 yang merupakan Pendapatan atas Aset Lainnya. Dimana nilai tersebut direklasifikasi ke Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

5.5.1.1.5	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		55.895.742.054,00	69.899.355.791,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 senilai Rp55.895.742.054,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.003.613.737,00 atau 15,28 % dan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp69.899.355.791,00.

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.5.8
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Bagi Hasil	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	27.743.708.804,00	17.064.519.260,00	10.679.189.544,00	62,58
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	28.152.033.250,00	52.834.836.531,00	(24.682.803.281,00)	(46,72)
	Jumlah	55.895.742.054,00	69.899.355.791,00	(14.003.613.737,00)	(20,03)



Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 senilai Rp27.743.708.804,00, mengalami peningkatan sebesar Rp10.679.189.544,00 atau 62,58 % dan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp17.064.519.260,00.

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5 .6.9
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.506.766.425,00	5.701.935.675,00	(3.195.169.250,00)	(56,04)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	7.244.032.507,00	7.630.278.551,00	(386.246.044,00)	(5,06)
3	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	17.992.909.872,00	3.732.305.034,00	14.260.604.838,00	382,09
Jumlah		27.743.708.804,00	17.064.519.260,00	10.679.189.544,00	62,58

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2023 senilai Rp28.152.033.250,00, mengalami penurunan sebesar Rp24.682.803.281,00 atau 20,21 % dan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp52.834.836.531,00.

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Provisi Sumber Daya Hutan	50.097.586,00	89.910.439,00	(39.812.853,00)	(44,28)
2	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	26.628.033.453,00	50.786.615.092,00	(24.158.581.639,00)	(47,57)
3	Pungutan Hasil Perikanan	1.473.902.211,00	1.958.311.000,00	(484.408.789,00)	(24,74)
Jumlah		28.152.033.250,00	52.834.836.531,00	(24.682.803.281,00)	(46,72)

5.5.1.1.6	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		453.939.356.950,00	430.503.529.123,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp453.939.356.950,00 dan Rp430.503.529.123,00.



5.5.1.1.7	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		42.423.553.167,00	89.773.006.178,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp42.423.553.167,00 dan Rp89.773.006.178,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.11
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendidikan	6.687.525.974,00	16.325.063.000,00	(9.637.537.026,00)	(59,04)
2	Kesehatan	8.544.625.982,00	37.802.206.678,00	(29.257.580.696,00)	(77,40)
3	Infrastruktur Jalan	14.039.613.511,00	26.076.988.000,00	(12.037.374.489,00)	(46,16)
4	Infrastruktur Air Minum	5.891.507.700,00	2.466.236.500,00	3.425.271.200,00	138,89
5	Infrastruktur Air Sanitasi	7.260.280.000,00	5.523.565.000,00	1.736.715.000,00	31,44
6	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.578.947.000,00	(1.578.947.000,00)	(100,00)
Jumlah		42.423.553.167,00	89.773.006.178,00	(47.349.453.011,00)	(52,74)

5.5.1.1.8	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		80.716.898.688,00	67.495.307.379,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp80.716.898.688,00 dan Rp67.495.307.379,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.12
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah	20.672.799.800,00	19.996.779.270,00	676.020.530,00	3,38
2	Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.325.406.520,00	34.424.858.975,00	4.900.547.545,00	14,24
3	Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	1.009.999.950,00	1.029.000.000,00	(19.000.050,00)	(1,85)



No.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	PNSD				
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.365.496.000,00	4.334.874.000,00	30.622.000,00	0,71
5	Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	8.609.476.668,00	3.248.199.820,00	5.361.276.848,00	165,05
6	Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.555.064.242,00	2.089.486.982,00	1.465.577.260,00	70,14
7	Dana pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	434.261.629,00	387.372.856,00	46.888.773,00	12,10
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.633.700.000,00	771.100.000,00	862.600.000,00	111,87
10	Fasilitasi Penanaman Modal	432.394.800,00	397.878.676,00	34.516.124,00	8,68
11	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	481.725.079,00	397.356.800,00	84.368.279,00	21,23
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.574.000,00	418.400.000,00	(221.826.000,00)	(53,02)
	Jumlah	80.716.898.688,00	67.495.307.379,00	13.221.591.309,00	19,59

5.5.1.1.9	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		21.172.210.000,00	39.108.685.000,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2023 senilai Rp21.172.210.000,00 dan tahun 2022 senilai Rp39.108.685.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.936.475.000,00 atau 45,86%.

5.5.1.1.10	Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Provinsi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		54.382.999.938,00	51.171.903.581,00

Jumlah Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp54.382.999.938,00 dan Rp51.171.903.581,00, mengalami peningkatan sebesar Rp3.211.096.357,00 atau 6,28%. Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2022 terdiri dari:



Tabel 5.5.13
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

No.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.875.547.294,00	7.625.909.931,00	249.637.363,00	3,27
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.152.234.289,00	5.609.123.194,00	1.543.111.095,00	27,51
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.631.215.848,00	18.745.529.174,00	1.885.686.674,00	10,06
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	40.784.440,00	41.524.731,00	(740.291,00)	(1,78)
5	Pajak Rokok	18.683.218.067,00	19.149.816.551,00	(466.598.484,00)	(2,44)
	Jumlah	54.382.999.938,00	51.171.903.581,00	3.211.096.357,00	6,28

5.5.1.1.11 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	3.622.903.200,00	500.000.000,00

Jumlah Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan Tahun 2023 senilai Rp3.622.903.200,00 dan 2022 Rp500.000.000,00. Realisasi Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan Tahun 2022 bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi NTB untuk pembayaran BPJS Kesehatan.

5.5.1.1.12 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Jumlah Arus masuk kas yang bersumber dari Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.1.13 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Dana Darurat	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Jumlah Arus masuk kas yang bersumber dari Pendapatan dari Dana darurat 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.1.14 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	9.521.776.963,00	0,00

Jumlah Arus masuk kas dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp9.521.776.963,00 dan Rp0,00. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sudah dianggarkan dalam



rekening Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdapat pada 7 (tujuh) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bima. Pendapatan lainnya terdiri dari Pendapatan atas pengembalian bantuan sosial senilai Rp60.000.000,00.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional senilai Rp9.461.776.963,00 pada 7 (tujuh) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bima dengan rincian sebagai berikut.

- Puskesmas Mpunda senilai Rp 2.294.524.403,00;
- Puskesmas Rasanae Timur senilai Rp 831.943.062,00;
- Puskesmas Paruga senilai Rp 1.884.855.292,00;
- Puskesmas Penanae senilai Rp 1.957.307.633,00;
- Puskesmas Kolo senilai Rp 411.862.204,00;
- Puskesmas Kumbe senilai Rp 457.552.311,00;
- Puskesmas Jatibaru senilai Rp 1.623.732.058,00.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	682.437.477.699,25	595.386.272.017,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp682.437.477.699,25 dan Rp595.386.272.017,00 terdiri dari :

Tabel 5.5.14

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	372.071.721.926,00	361.680.806.870,00	10.390.915.056,00	2,87
2	Pembayaran Barang	267.851.512.668,25	209.804.746.008,00	58.046.766.660,25	27,67
3	Pembayaran Hibah	37.168.222.233,00	16.448.051.139,00	20.720.171.094,00	125,97
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.483.300.000,00	6.507.250.000,00	(3.023.950.000,00)	(46,47)
5	Pembayaran Tak Terduga	1.862.720.872,00	945.418.000,00	917.302.872,00	97,03
Jumlah		682.437.477.699,25	595.386.272.017,00	87.051.205.682,25	14,62

5.5.1.2.1 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	372.071.721.926,00	361.680.806.870,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp372.071.721.926,00 dan Rp361.680.806.870,00 terdiri dari :

Tabel 5.5.15

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai
Tahun 2023 dan 2022

No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	244.216.882.843,00	240.011.994.328,00	4.204.888.515,00	1,75



No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Tambahan Penghasilan PNS	62.332.814.300,00	54.164.103.648,00	8.168.710.652,00	15,08
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.335.251.611,00	56.766.361.210,00	(4.431.109.599,00)	(7,81)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.913.395.633,00	9.978.172.296,00	(64.776.663,00)	(0,65)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	228.909.962,00	274.375.788,00	(45.465.826,00)	(16,57)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	455.799.600,00	485.799.600,00	(30.000.000,00)	(6,18)
7	Belanja Pegawai BLUD	2.588.667.977,00	0,00	2.588.667.977,00	0,00
Jumlah		372.071.721.926,00	361.680.806.870,00	10.390.915.056,00	2,87

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2023 tersebut di atas termasuk pembayaran pegawai yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP di tujuh Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp6.479.681.484,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.16
Rincian Pembayaran Pegawai Dana Kapitasi dan Dana BOS
Tahun 2023 dan 2022

No.	Pembayaran Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.458.201.484,00	5.608.419.956,00
3	Honorarium PNS	21.480.000,00	21.979.692,00
4	Uang Saku/Transport	0,00	0,00
5	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00
6	Uang Lembur	0,00	0,00
7	Honorarium Tenaga Honorar/Tidak Tetap	0,00	0,00
8	Honorarium Peserta Pengganti Uang Transport/Akomodasi/Konsumsi	0,00	0,00
9	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00
Jumlah		6.479.681.484,00	5.643.684.203,00

5.5.1.2.2	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa	2023 (Rp)	2022(Rp)
		267.851.512.668,25	209.804.746.008,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp267.851.512.668,25 dan Rp209.804.746.008,00 terdiri dari :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.5

Tabel 5.5.17
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang
Tahun 2023 dan 2022

No.	Pembayaran Barang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bahan Pakai Habis	81.346.245.862,96	57.459.374.310,00	23.886.871.552,96	41,57
2	Jasa Kantor	71.961.716.775,00	69.381.287.567,00	2.580.429.208,00	3,72
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.980.197.690,00	9.986.968.850,00	3.993.228.840,00	39,98
4	Belanja Sewa Tanah	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.765.363.000,00	793.029.000,00	972.334.000,00	122,61
6	Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	922.695.220,00	1.195.330.400,00	(272.635.180,00)	(22,81)
7	Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	6.387.802,00	(6.387.802,00)	(100,00)
9	Perjalanan Dinas	51.486.586.152,00	38.319.952.531,00	13.166.633.621,00	34,36
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	175.492.680,00	180.676.300,00	(5.183.620,00)	(2,87)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
12	Beasiswa Pendidikan PNS	415.000.000,00	315.000.000,00	100.000.000,00	31,75
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS	1.091.628.000,00	967.384.500,00	124.243.500,00	12,84
14	Pemeliharaan	11.938.036.803,00	6.503.946.252,00	5.434.090.551,00	83,55
15	Jasa Konsultansi	4.370.558.435,00	4.428.859.125,00	(58.300.690,00)	(1,32)
16	Hadiah	2.587.312.400,00	1.184.433.600,00	1.402.878.800,00	118,44
17	Barang Dana BOS	16.085.406.650,51	15.832.004.171,00	253.402.479,51	1,60
18	Barang dan Jasa BLUD	9.394.654.141,00	0,00	9.394.654.141,00	0,00
19	Penhargaan atas suatu Prestasi	15.600.000,00	4.119.600,00	11.480.400,00	278,68
20	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	3.240.000.000,00	(3.240.000.000,00)	(100,00)
21	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	314.518.858,78	1.992.000,00	312.526.858,78	15.689,10
Jumlah		267.851.512.668,25	209.804.746.008,00	58.046.766.660,25	27,67



5.5.1.2.3	Arus Keluar Kas dari Belanja Bunga	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Bunga Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.2.4	Arus Keluar Kas dari Belanja Subsidi	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Subsidi Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.1.2.5	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		37.168.222.233,00	16.448.051.139,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp37.168.222.233,00 dan Rp16.448.051.139,00 terdiri dari :

Tabel 5.5.18
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2023 dan 2022

No.	Pembayaran Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	33.479.537.000,00	13.271.100.000,00	20.208.437.000,00	152,27
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	140.729.233,00	0,00	140.729.233,00	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	2.570.100.000,00	2.199.095.139,00	371.004.861,00	16,87
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00	977.856.000,00	0,00	0,00
Jumlah		37.168.222.233,00	16.448.051.139,00	20.720.171.094,00	125,97

5.5.1.2.6	Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		3.483.300.000,00	6.507.250.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp3.483.300.000,00 dan Rp6.507.250.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.5.19
Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

No.	Pembayaran Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Kelompok Masyarakat	0,00	1.215.000.000,00	(1.215.000.000,00)	(100,00)



No.	Pembayaran Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.583.250.000,00	92.500.000,00	1.490.750.000,00	1.611,62
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.900.050.000,00	5.199.750.000,00	(3.299.700.000,00)	(63,46)
Jumlah		3.483.300.000,00	6.507.250.000,00	(3.023.950.000,00)	(46,47)

5.5.1.2.7 Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga	<u>2023 (Rp)</u> 1.862.720.872,00	<u>2022 (Rp)</u> 945.418.000,00
--	--	--

Jumlah Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp1.862.720.872,00 dan Rp945.418.000,00 dengan rincian tahun 2023 sebagai berikut.

- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan darurat banjir tahun 2023 senilai Rp454.971.622,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak percepatan penataan sempadan sungai Padolo di Kota Bima tahun 2023 senilai Rp444.271.250,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- Pembayaran tidak terduga untuk penanganan keadaan mendesak penanggulangan demam berdarah dengue (DBD) dan Chikungunya Bima Tahun 2023 senilai Rp282.978.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pembayaran tidak terduga untuk santunan kematian dan pengobatan untuk masyarakat di Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp680.500.000,00 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>2023 (Rp)</u> (148.361.783.303,00)	<u>2022 (Rp)</u> (155.764.719.387,73)
--	--	--

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing defisit senilai Rp148.362.283.303,00 dan Rp155.764.719.387,73. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

Rincian aliran kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.5.20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas					
1	Penjualan atas Perlaatan dan Mesin	1.098.505.923,00	0,00	1.098.505.923,00	0,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	15.231.000,00	0,00	15.231.000,00	0,00
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	40.064.900,00	(40.064.900,00)	(100,00)
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.117.736.923,00	45.064.900,00	1.072.672.023,00	2.380,28
Arus Keluar Kas					
1	Perolehan Tanah	1.094.391.000,00	3.035.329.060,00	(1.940.938.060,00)	(63,94)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	35.594.628.839,00	45.650.535.702,00	(10.055.406.863,00)	(22,03)
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	49.102.960.640,00	34.349.972.004,73	14.752.988.635,27	42,95
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.909.921.028,00	69.040.535.395,00	(9.130.614.367,00)	(13,23)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.757.618.719,00	1.733.412.126,00	24.206.593,00	1,40
6	Perolehan Aset Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		149.479.520.226,00	155.809.784.287,73	(6.329.764.061,73)	(4,06)
Total		(148.361.783.303,00)	(155.764.719.387,73)	7.402.436.084,73	(4,75)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	1.117.736.923,00	45.064.900,00

Arus Masuk Kas Tahun 2023 dan 2022 dari hasil penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, kendaraan dinas roda empat dan Bahan-bahan Bekas Bangunan senilai Rp1.117.736.923,00 dan Rp45.064.900,00 terdiri dari :

Tabel 5.5.21
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.098.505.923,00	0,00	1.098.505.923,00	0,00



No.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	15.231.000,00	0,00	15.231.000,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap	4.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
7	Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	40.064.900,00	(40.064.900,00)	(100,00)
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.117.736.923,00	45.064.900,00	1.072.672.023,00	2.380,28

5.5.2.1.1	Pencairan dana	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Cadangan	0,00	0,00

Saldo Pencairan dana Cadangan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.5.2.1.2	Penjualan Atas Tanah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Tanah pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.5.2.1.3	Penjualan Atas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	1.098.505.923,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Peralatan dan mesin pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.5.2.1.4	Penjualan Atas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Gedung dan Bangunan	15.231.000,00	0,00

Saldo Penjualan Atas Gedung dan Bangunan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.



5.5.2.1.5	Penjualan Atas Jalan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Saldo Penjualan Atas jalan irigasi dan jaringan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

5.5.2.1.6	Penjualan Aset Tetap	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		4.000.000,00	5.000.000,00

Saldo Penjualan Aset Tetap pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp4.000.000,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.000.000,00.

5.5.2.1.7	Penjualan Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Lainnya	0,00	40.064.900,00

Saldo Penjualan Aset Tetap dalam hal ini Aset Lainnya pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. mengalami penurunan senilai 40.064.900,00 atau 100,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp40.064.900,00.

5.5.2.1.8	Hasil Penjualan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Kekayaan Daerah	0,00	0,00
	Yang Dipisahkan		

Saldo Hasil Pejualan Kekayaan yang dipisahkan pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

5.5.2.1.9	Penerimaan Penjualan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Investasi Non	0,00	0,00
	Permanen		

Saldo Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.



5.5.2.2 Arus Keluar Kas	2023(Rp)	2022 (Rp)
	149.479.520.226,00	155.809.784.287,73

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp149.479.520.226,00 dan Rp155.809.784.287,73 terdiri dari Perolehan Aset Tetap (Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya) dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari :

Tabel 5.5.22
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Tanah	1.094.391.000,00	3.035.329.060,00	(1.940.938.060,00)	(63,94)
3	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	35.594.628.839,00	45.650.535.702,00	(10.055.406.863,00)	(22,03)
4	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	49.102.960.640,00	34.349.972.004,73	14.752.988.635,27	42,95
5	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.909.921.028,00	69.040.535.395,00	(9.130.614.367,00)	(13,23)
6	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.757.618.719,00	1.733.412.126,00	24.206.593,00	1,40
7	Belanja Modal - Aset Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	149.479.520.226,00	155.809.784.287,73	(6.329.764.061,73)	(4,06)

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 tersebut di atas termasuk perolehan aset tetap pada Dana Kapitasi JKN pada FKTP di 7 (tujuh) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp295.888.000,00 dan Bendahara Dana BOS pada 84 (delapan puluh Empat) sekolah senilai Rp2.017.293.349,00 dan dicatat dalam laporan arus kas karena merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah.

Rincian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.23
Perolehan Aset Tetap yang pencairannya langsung lewat Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Bendahara Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

No.	Perolehan Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pengadaan <i>Electric Generating Set</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan Peralatan Kantor	272.849.800,00	317.302.950,00	(44.453.150,00)	(14,01)



No.	Perolehan Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Perolehan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perolehan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Perolehan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perolehan Pengadaan Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Perolehan Pengadaan Komputer/Personal Komputer	104.835.000,00	40.802.450,00	64.032.550,00	156,93
8	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.500.000,00	27.153.500,00	(20.653.500,00)	(76,06)
9	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
10	Perolehan Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	396.384.399,00	352.214.526,00	44.169.873,00	12,54
11	Perolehan Meja Kerja Pejabat	29.175.000,00	14.375.000,00	14.800.000,00	102,96
12	Perolehan Kursi Pejabat	20.000.000,00	10.166.000,00	9.834.000,00	96,73
13	Perolehan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Perolehan Lemari dan Arsip Pejabat	42.300.000,00	61.680.000,00	(19.380.000,00)	(31,42)
15	Perolehan Alat Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Perolehan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Perolehan Alat Kesehatan Umum Lainnya	59.069.000,00	42.463.475,00	16.605.525,00	39,11
18	Peralatan Kantor Lainnya	262.756.331,00	217.856.450,00	44.899.881,00	20,61
19	Perolehan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.989.000,00	3.850.000,00	139.000,00	3,61
20	Perolehan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pengadaan Buku	1.067.565.719,00	1.226.859.426,00	(159.293.707,00)	(12,98)
22	Pengadaan Alat Musik	34.884.300,00	37.070.000,00	(2.185.700,00)	(5,90)
23	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	6.872.800,00	1.684.500,00	5.188.300,00	308,00
Jumlah		2.313.181.349,00	2.353.478.277,00	(40.296.928,00)	(1,71)

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2023(Rp)	2022 (Rp)
		9.204.963,00	5.647.042,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing defisit senilai Rp9.204.963,00 dan senilai Rp5.647.042,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu arus masuk kas pendanaan dikurangi dengan arus keluar kas pendanaan. Nilai tersebut merupakan pengembalian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.



Tabel 5.5.24
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
Tahun 2023 dan 2022

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Masuk Kas				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Investasi Dana Bergulir)	9.204.963,00	5.647.042,00	3.557.921,00	63,01
Jumlah	9.204.963,00	5.647.042,00	3.557.921,00	63,01
Arus Keluar Kas				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.204.963,00	5.647.042,00	3.557.921,00	63,01

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

2023 (Rp)

9.204.963,00

2022 (Rp)

5.647.042,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing senilai Rp9.204.963,00 dan Rp5.647.042,00 yang merupakan penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir yang disalurkan kepada masyarakat dan terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 5.5.25
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
Tahun 2023 dan 2022

Arus Kas Masuk	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	9.204.963,00	5.647.042,00	3.557.921,00	63,01
Jumlah	9.204.963,00	5.647.042,00	3.557.921,00	63,01



5.5.3.2 Arus Keluar Kas 2023 (Rp)
0,00 2022 (Rp)
0,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Arus Kas Keluar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2023 (Rp)
(88.063.700,00) 2022 (Rp)
0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai (Rp88.063.700,00) dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas aktivitas transitoris dikurangi dengan arus keluar kas aktivitas transitoris (PFK dan Sisa UP/TU) yang merupakan PFK tahun lalu yang terbayarkan tahun 2023.

Rincian arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.26
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Masuk Kas					
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran :				
	Total SPJ GU	78.931.033.546,00	0,00	78.931.033.546,00	0,00
	Total SPJ Nihil	32.401.334.332,00	0,00	32.401.334.332,00	0,00



No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
3	Penerimaan Sisa UP TA. 2021	0,00	5.720.000,00	(5.720.000,00)	0,00
4	Penerimaan Sisa UP TA. 2022	0,00	147.606.380,00	(147.606.380,00)	0,00
5	Penerimaan Sisa UP TA. 2023	395.200.895,00	0,00	395.200.895,00	0,00
6	Penerimaan Sisa TU TA. 2022 dan TA. 2023	708.462.994,00	264.897.315,00	443.565.679,00	167,45
7	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		172.660.545.465,00	57.430.921.272,64	115.229.624.192,36	200,64
Arus Keluar Kas					
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran				
	Total SP2D UP	7.734.000.000,00	0,00	7.734.000.000,00	0,00
	Total SP2D GU	78.931.033.546,00	0,00	78.931.033.546,00	0,00
	Total SP2D TU	25.770.998.221,00	0,00	25.770.998.221,00	0,00
3	Pengeluaran Sisa UP TA. 2021	0,00	5.720.000,00	(5.720.000,00)	(100,00)
4	Pengeluaran Sisa UP TA. 2022	0,00	147.606.380,00	(147.606.380,00)	(100,00)
7	Kiriman Uang Keluar	88.063.700,00	0,00	88.063.700,00	0,00
Jumlah		172.748.609.165,00	57.166.023.957,64	115.582.585.207,36	202,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(88.063.700,00)	264.897.315,00	(352.961.015,00)	(133,24)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
	172.660.545.465,00	57.430.921.272,64

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah senilai Rp172.660.545.465,00 dan Rp57.430.921.272,64 terdiri dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran dan penerimaan sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) serta kiriman uang masuk.

Uraian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.5.27
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Masuk Kas					
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran :				
	Total SPJ GU	78.931.033.546,00	0,00	78.931.033.546,00	0,00
	Total SPJ Nihil	32.401.334.332,00	0,00	32.401.334.332,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.5

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
3	Penerimaan Sisa UP TA. 2021	0,00	5.720.000,00	(5.720.000,00)	0,00
4	Penerimaan Sisa UP TA. 2022	0,00	147.606.380,00	(147.606.380,00)	0,00
5	Penerimaan Sisa UP TA. 2023	395.200.895,00	0,00	395.200.895,00	0,00
6	Penerimaan Sisa TU TA. 2022 dan TA. 2023	708.462.994,00	264.897.315,00	443.565.679,00	167,45
7	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		172.660.545.465,00	57.430.921.272,64	115.229.624.192,36	200,64

Rincian arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai Rp60.224.513.698,00 dan Rp57.012.697.577,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.28
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tahun 2023 dan 2022

No	Penerimaan PFK	Tahun 2023	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)			
1	Iuran Wajib Pegawai	2.340.677.997,00	2.313.987.708,00	26.690.289,00	1,15
2	Potongan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BPJS Kesehatan	9.528.399.365,00	9.404.054.754,00	124.344.611,00	1,32
4	PPh Ps 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	28.196.302,00	12.163.097,00	16.033.205,00	131,82
5	PPh Ps 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	11.801.216.006,00	11.391.693.324,00	409.522.682,00	3,59
6	PPh Ps 22	800.879.480,00	800.504.461,00	375.019,00	0,05
7	PPh Ps 23	61.577.732,00	78.214.027,00	(16.636.295,00)	(21,27)
8	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	0,00	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	40.479.225,00	51.462.400,00	(10.983.175,00)	(21,34)
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	524.282.718,00	621.867.703,00	(97.584.985,00)	(15,69)
11	PPh Ps 15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.055.514.294,00	16.108.010.795,77	1.947.503.498,23	12,09
13	Iuran Wajib Pegawai (8%)	12.872.805.402,00	3.095.714.536,00	(222.909.134,00)	(1,70)
14	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	380.194.338,00	374.559.288,00	5.635.050,00	1,50
15	Jaminan Kematian (JKM)	1.140.582.313,00	1.121.498.822,00	19.083.491,00	1,70
16	TAPERA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Potongan Askes	2.358.470,00	1.442.214,00	916.256,00	63,53
18	Pajak Restoran	0,00	111.429,00	(111.429,00)	(100,00)
19	Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	368.099.134,00	189.342.724,00	178.756.410,00	94,41
20	BPJS Kesehatan Dewan	0,00	4.488.953,00	(4.488.953,00)	(100,00)
21	BPJS Kesehatan PPPK	520.059.125,00	257.731.341,00	262.327.784,00	101,78
22	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	0,00	114.300,00	(114.300,00)	(100,00)



No	Penerimaan PFK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
23	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	0,00	352.800,00	(352.800,00)	(100,00)
24	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - PPPK	127.535.381,00	63.638.929,00	63.896.452,00	100,40
25	PPh Pasal 4 ayat 2 (final)	1.623.746.416,00	1.112.443.971,87	511.302.444,13	45,96
26	Perhitungan Pihak Ketiga - Lainnya	7.910.000,00	0,00	7.910.000,00	0,00
Jumlah		60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

2023 (Rp)

172.748.609.165,00

2022 (Rp)

57.430.921.272,64

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah senilai Rp172.748.609.165,00 dan Rp57.430.921.272,64 terdiri dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran.

Tabel 5.5.29
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor Tahun 2023 dan 2022

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Keluar Kas					
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran				
	Total SP2D UP	7.734.000.000,00	0,00	7.734.000.000,00	0,00
	Total SP2D GU	78.931.033.546,00	0,00	78.931.033.546,00	0,00
	Total SP2D TU	25.770.998.221,00	0,00	25.770.998.221,00	0,00
3	Pengeluaran Sisa UP TA. 2021	0,00	5.720.000,00	(5.720.000,00)	(100,00)
4	Pengeluaran Sisa UP TA. 2022	0,00	147.606.380,00	(147.606.380,00)	(100,00)
7	Kiriman Uang Keluar	88.063.700,00	0,00	88.063.700,00	0,00
Jumlah		172.748.609.165,00	57.166.023.957,64	115.582.585.207,36	202,19

Rincian arus keluar kas dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing senilai Rp60.224.513.698,00 dan Rp57.012.697.577,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.30
Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 dan 2022

No	Pengeluaran PFK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Iuran Wajib Pegawai	2.340.677.997,00	2.313.987.708,00	26.690.289,00	1,15
2	Potongan Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BPJS Kesehatan	9.528.399.365,00	9.404.054.754,00	124.344.611,00	1,32



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 5.5

No	Pengeluaran PFK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
4	PPh Ps 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	28.196.302,00	12.163.097,00	16.033.205,00	131,82
5	PPh Ps 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	11.801.216.006,00	11.391.693.324,00	409.522.682,00	3,59
6	PPh Ps 22	800.879.480,00	800.504.461,00	375.019,00	0,05
7	PPh Ps 23	61.577.732,00	78.214.027,00	(16.636.295,00)	(21,27)
8	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	0,00	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	40.479.225,00	51.462.400,00	(10.983.175,00)	(21,34)
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	524.282.718,00	621.867.703,00	(97.584.985,00)	(15,69)
11	PPh Ps 15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.055.514.294,00	16.108.010.795,77	1.947.503.498,23	12,09
13	Iuran Wajib Pegawai (8%)	12.872.805.402,00	13.095.714.536,00	(222.909.134,00)	(1,70)
14	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	380.194.338,00	374.559.288,00	5.635.050,00	1,50
15	Jaminan Kematian (JKM)	1.140.582.313,00	1.121.498.822,00	19.083.491,00	1,70
16	TAPERA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Potongan Askes	2.358.470,00	1.442.214,00	916.256,00	63,53
18	Pajak Restoran	0,00	111.429,00	(111.429,00)	(100,00)
19	Iuran Wajib Pegawai (3,25%)	368.099.134,00	189.342.724,00	178.756.410,00	94,41
20	BPJS Kesehatan Dewan	0,00	4.488.953,00	(4.488.953,00)	(100,00)
21	BPJS Kesehatan PPPK	520.059.125,00	257.731.341,00	262.327.784,00	101,78
22	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	0,00	114.300,00	(114.300,00)	(100,00)
23	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai - KDH/WKDH	0,00	352.800,00	(352.800,00)	(100,00)
24	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai - PPPK	127.535.381,00	63.638.929,00	63.896.452,00	100,40
25	PPh Pasal 4 ayat 2 (final)	1.623.746.416,00	1.112.443.971,87	511.302.444,13	45,96
26	Perhitungan Pihak Ketiga - Lainnya	7.910.000,00	0,00	7.910.000,00	0,00
	Jumlah	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64	3.211.816.120,36	5,63

5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran 2023 (Rp) 2022 (Rp)
76.583.026.629,67 21.962.179.832,18

Saldo Kas per 1 Januari 2023 senilai Rp76.583.026.629,67 dan Tahun 2022 Rp21.962.179.832,18.



5.5.6	Saldo Akhir Kas	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		17.811.367.573,12	76.613.516.008,67

Saldo akhir Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp17.811.367.573,12 dan Rp76.613.516.008,67 dengan rincian berikut.

Tabel 5.5.31
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	17.711.793.873,12	76.583.026.629,67	(58.871.232.756,55)	(76,87)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	88.063.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	11.510.000,00	30.489.379,00	(18.979.379,00)	(62,25)
Jumlah		17.811.367.573,12	76.613.516.008,67	(58.802.148.435,55)	(76,75)

- a. Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 senilai Rp17.711.793.873,12 terdiri dari :
 - Kas di BUD Per 31 Desember 2022 senilai Rp14.428.033.676,32;
 - Kas di Bendahara FKTP merupakan Kas Dana Kapitasi pada Bendahara FKTP Puskesmas Mpunda, Puskesmas Paruga dan Puskesmas Penanae dan Kas BOK pada FKTP di 7 (tujuh) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp139.665.450,00; dan
 - Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp3.144.094.746,80.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp88.063.700,00 terdiri dari
 - Pendapatan Retribusi atas pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan senilai Rp86.713.700,00
 - Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan senilai Rp1.350.000,00,
- c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp11.510.000,00 merupakan:
 - Kas yang tidak digunakan pada Dinas pendidikan dan Olahraga senilai Rp11.510.000,00 merupakan pengembalian BOP PAUD.



5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	2.100.460.506.926,58	1.948.090.010.502,74
2	Surplus/Defisit - LO	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	26.537.869.874,63	16.430.996.589,05
5	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	2.099.407.000,00	354.287.000,00
7	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,00	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya	24.438.462.874,63	16.076.709.589,05
10	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	0,00	0,00
11	Ekuitas Akhir	2.218.552.098.313,85	2.100.460.506.926,58

5.6.1	Ekuitas Awal	<u>2023 (Rp)</u> 2.100.460.506.926,58	<u>2022 (Rp)</u> 1.948.090.010.502,74
-------	--------------	--	--

Jumlah ekuitas awal tahun 2023 senilai Rp2.100.460.506.926,58 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022, sementara ekuitas awal 2022 senilai Rp1.948.090.010.502,74.

5.6.2	Surplus/Defisit - LO	<u>2023 (Rp)</u> 91.553.721.512,64	<u>2022 (Rp)</u> 135.939.499.834,79
-------	----------------------	---------------------------------------	--

Saldo Surplus/Defisit - LO bersumber pada Laporan Operasional tahun 2023 senilai Rp91.553.721.512,64 dan mengalami penurunan senilai Rp44.385.778.322,15 atau 32,65% jika dibandingkan tahun 2022 senilai Rp135.939.499.834,79 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.6.2
Laporan Operasional Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan	913.511.579.675,13	879.993.310.778,36	33.518.268.896,77	3,81
2	Beban	821.034.895.988,01	741.938.712.912,51	79.096.183.075,50	10,66
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	92.476.683.687,12	138.054.597.865,85	(45.577.914.178,73)	(33,01)
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(922.962.174,48)	(2.115.098.031,06)	1.192.135.856,58	(56,36)
5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa – LO	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79	(44.385.778.322,15)	(32,65)
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Surplus/Defisit - LO	91.553.721.512,64	135.939.499.834,79	(44.385.778.322,15)	(32,65)

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		26.537.869.874,63	16.430.996.589,05

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 senilai Rp26.537.869.874,63 dan Tahun 2022 senilai Rp16.430.996.589,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.3
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	26.537.869.874,63	16.430.996.589,05
2	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	2.099.407.000,00	354.287.000,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	24.438.462.874,63	16.076.709.589,05

5.6.3.1	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		2.099.407.000,00	354.287.000,00

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2023 senilai Rp2.099.407.000,00 terdapat pada OPD Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Tahun 2022 senilai Rp 354.287.000,00 terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu: Sekretariat Daerah senilai Rp242.300.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp 111.987.000,00.



5.6.3.2	Koreksi Ekuitas	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
	Lainnya	24.438.462.874,63	16.076.709.589,05

Koreksi Ekuitas – Lainnya Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp24.438.462.874,63 dan Rp16.076.709.589,05.

Rincian Tabel koreksi Ekuitas :

KOREKSI EKUITAS LAINNYA		
NO	Uraian	NILAI
1	PIUTANG PBBP2	41.270.174,00
2	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	(728.448.661,00)
3	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH	(52.894.856,04)
4	ASET TETAP TANAH	23.924.082.999,00
5	ASET TETAP BAGUNAN DAN GEDUNG	2.284.507.000,00
6	AKM PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	3.362.288.530,00
7	AKM PENYUSUTAN GEDUNG & BANGUNAN	384.716.749,00
8	ASET LAIN-LAIN	(8.619.870.105,04)
9	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	4.845.606.346,71
10	UTANG BELANJA	(1.002.795.302,00)
TOTAL KOREKSI EKUITAS LAINNYA		24.438.462.874,63

5.6.4	Ekuitas Akhir	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		2.218.552.098.313,85	2.100.460.506.926,58

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp2.218.552.098.313,85 dan 2022 Rp2.100.460.506.926,58 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Bima secara astronomis terletak di ujung timur Pulau Sumbawa di antara 8°20'-8°30' Lintang Selatan dan 118°41'-118°48' Bujur Timur, dengan sebagian besar batas wilayah Kota Bima di kelilingi oleh wilayah Kabupaten Bima yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Luas wilayah Kota Bima meliputi wilayah daratan seluas 222,25km², dengan jumlah kecamatan sebanyak lima kecamatan yang dihuni oleh penduduk asli suku Mbojo (Bima) dan suku pendatang lainnya. Adapun lima kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Bima adalah: Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota.

Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03km² sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14km². Artinya, hampir sepertiga atau 31,06% wilayah Kota Bima merupakan bagian wilayah Kecamatan Asakota, kemudian 28,83% dan 28,67% merupakan wilayah kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba. Sisanya 10% adalah wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda, sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kota Bima Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasanae Barat	10,14	4,56
2	Mpunda	15,28	6,88
3	Rasanae Timur	64,07	28,83
4	Raba	63,73	28,67
5	Asakota	69,03	31,06
Total		222,25	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2023

Lebih rinci, kelima kecamatan tersebut terdiri dari total 41 kelurahan, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1. Rasanae Barat	Paruga	6
2. Mpunda	Sadia	10
3. Rasanae Timur	Kumbe	8
4. Raba	Penaraga	11
5. Asakota	Melayu	6
Jumlah		41



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2023

Jumlah PNSD di Kota Bima adalah 3.322 orang, yang terdiri dari Eselon dan Non Eselon. Tidak ada Eselon I, Eselon II sebanyak 28 orang, Eselon III sebanyak 129 orang, Eselon IV sebanyak 346 orang, dan Eselon V sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk Non Eselon terdiri dari Tenaga Fungsional sebanyak 1.925 orang dan Staf 894 orang. Jumlah PNS per golongan dan per jabatan Pemerintah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam daftar berikut :

Tabel 6.3

Daftar Jumlah PNS Pergolongan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2023

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	16	0	0	0	7	0	23
Golongan IV/b	0	10	22	1	0	211	1	245
Golongan IV/a	0	1	82	11	0	328	14	436
Jumlah Golongan IV	0	28	104	12	0	546	15	705
Golongan III/d	0	0	24	201	0	487	133	845
Golongan III/c	0	0	1	104	0	329	194	628
Golongan III/b	0	0	0	21	0	257	116	394
Golongan III/a	0	0	0	8	0	248	236	492
Jumlah Golongan III	0	0	25	334	0	1321	679	2359
Golongan II/d	0	0	0	0	0	20	77	97
Golongan II/c	0	0	0	0	0	29	63	92
Golongan II/b	0	0	0	0	0	6	29	35
Golongan II/a	0	0	0	0	0	3	20	23
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	58	189	247
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	11	11
Total	0	28	129	346	0	1925	894	3322



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

Untuk lebih rinci, berikut dilampirkan daftar jumlah PNS per golongan per jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Bima :

Tabel 6.4
Rincian PNS Pergolongan Perjabatan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2023

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sekretariat Daerah	1	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
2	Bagian Pemerintahan Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	9	12	13
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	10	13	14
4	Bagian Hukum Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	2	9	11	12
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	2	7	9	10
6	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	3	8	11	12
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	14	3	17	18
8	Bagian Organisasi Setda	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	10	11
9	Bagian Umum Setda	0	0	1	0	1	0	0	2	0	15	15	17
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	0	0	1	0	1	0	0	2	2	6	8	10
11	Sekretariat DPRD	0	0	3	0	1	0	0	4	3	20	23	27
12	Inspektorat	0	1	3	0	1	0	0	5	46	8	54	59
13	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	3	8	0	0	12	3	24	27	39
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	1	3	5	0	0	10	30	32	62	72
15	Dinas Kesehatan	0	1	1	3	2	1	0	8	51	14	65	73
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	1	4	4	2	0	12	19	38	57	69
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	1	1	2	6	0	0	10	2	18	20	30
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	1	3	2	0	0	7	6	12	18	25
19	Dinas Sosial	0	1	1	3	1	0	0	6	13	16	29	35
20	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	2	3	1	0	6	3	9	12	18
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	0	1	1	2	2	1	0	7	6	11	17	24
22	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	0	3	0	0	0	4	8	9	17	21
23	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	4	4	1	0	11	11	90	101	112
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	1	1	3	2	0	0	7	8	16	24	31
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0	0	1	2	2	0	0	5	7	12	19	24
26	Dinas Perhubungan	0	1	1	2	8	0	0	12	2	18	20	32
27	Dinas Komunikasi,	0	1	1	4	1	0	0	7	12	15	27	34



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JML
		ESELON							NON ESELON			JML	
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana		
	Informatika dan Statistik												
28	Dinas KOPERINDAG	0	1	1	2	4	2	0	10	10	20	30	40
29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	1	1	0	1	0	0	3	6	14	20	23
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	1	1	4	1	0	0	7	19	8	27	34
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	1	3	1	0	0	5	8	10	18	23
32	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	1	1	4	1	0	0	7	16	11	27	34
33	Dinas Pertanian	0	1	1	5	7	5	0	19	61	23	84	103
34	BAPPEDA LITBANG	0	1	1	2	1	0	0	5	16	14	30	35
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0	1	2	1	0	0	4	5	10	15	19
36	BPKAD	0	1	0	6	13	0	0	20	6	50	56	76
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	1	1	2	2	0	0	6	16	11	27	33
38	BPBD	0	1	1	3	1	0	0	6	9	7	16	22
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	4	1	0	0	7	8	12	20	27
40	Kecamatan Asakota	0	0	1	1	4	2	0	8	7	4	11	19
41	Kecamatan RasanaE Barat	0	0	1	1	4	2	0	8	8	4	12	20
42	Kecamatan RasanaE Timur	0	0	1	1	6	1	0	9	5	2	7	16
43	Kecamatan Mpunda	0	0	1	1	6	1	0	9	7	5	12	21
44	Kecamatan Raba	0	0	0	1	5	2	0	8	9	3	12	20
45	Kelurahan Dara	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
46	Kelurahan Dodu	0	0	0	0	1	3	0	4	0	1	1	5
47	Kelurahan Jatibaru	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
48	Kelurahan Jatibaru Timur	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
49	Kelurahan Jatiwangi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
50	Kelurahan Kendo	0	0	0	0	0	4	0	4	0	5	5	9
51	Kelurahan Kodo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
52	Kelurahan Kolo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
53	Kelurahan Kumbe	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
54	Kelurahan Lampe	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
55	Kelurahan Lelamase	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	2	6
56	Kelurahan Lewirato	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
57	Kelurahan Mande	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
58	Kelurahan Manggemaci	0	0	0	0	1	3	0	4	0	5	5	9
59	Kelurahan Matakando	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JML
		ESELON							NON ESELON			JML	
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana		
60	Kelurahan Melayu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
61	Kelurahan Monggonao	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
62	Kelurahan NaE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
63	Kelurahan Nitu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
64	Kelurahan Ntobo	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	4	8
65	Kelurahan Nungga	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
66	Kelurahan Oi Fo'o	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
67	Kelurahan Oimbo	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
68	Kelurahan Pane	0	0	0	0	1	4	0	5	0	3	3	8
69	Kelurahan Panggi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	7	7	12
70	Kelurahan Paruga	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
71	Kelurahan PenanaE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
72	Kelurahan Pendaraga	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
73	Kelurahan Penatoi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
74	Kelurahan Rabadompu Barat	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
75	Kelurahan Rabadompu Timur	0	0	0	0	1	4	0	5	0	5	5	10
76	Kelurahan Rabangodu Selatan	0	0	0	0	1	4	0	5	0	8	8	13
77	Kelurahan Rabangodu Utara	0	0	0	0	1	4	0	5	0	8	8	13
78	Kelurahan Rite	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
79	Kelurahan Rontu	0	0	0	0	1	4	0	5	0	6	6	11
80	Kelurahan Sadia	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
81	Kelurahan SambinaE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	1	1	6
82	Kelurahan Santi	0	0	0	0	1	4	0	5	0	5	5	10
83	Kelurahan SaraE	0	0	0	0	1	4	0	5	0	4	4	9
84	Kelurahan Tanjung	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
85	Kelurahan Ule	0	0	0	0	1	4	0	5	0	2	2	7
86	SKB	0	0	0	0	0	1	0	1	13	1	14	15
87	RSUD Kota Bima	0	0	0	1	2	1	0	4	87	10	97	101
88	Puskesmas Kolo	0	0	0	0	0	1	0	1	17	1	18	19
89	Puskesmas Mpunda	0	0	0	0	0	1	0	1	79	6	85	86
90	Puskesmas Paruga	0	0	0	0	0	1	0	1	70	3	73	74
91	Puskesmas PenanaE	0	0	0	0	0	1	0	1	64	6	70	71
92	Puskesmas Rasanae Timur	0	0	0	0	0	1	0	1	34	4	38	39
93	Puskesmas Kumbe	0	0	0	0	0	1	0	1	28	1	29	30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
94	Puskesmas Jatibaru	0	0	0	0	0	1	0	1	55	1	56	57
95	UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	0	0	0	0	1	0	0	1	13	0	13	14
96	SDN 01 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
97	SDN 02 Suntu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	19	19
98	SDN 03 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
99	SDN 05 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	18	18
100	SDN 06 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
101	SDN 07 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	11
102	SDN 08 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
103	SDN 10 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
104	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	16	16
105	SDN 12 Sarae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
106	SDN 13 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
107	SDN 14 Sadia Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11
108	SDN 15 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
109	SDN 16 Salama Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
110	SDN 17 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
111	SDN 18 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
112	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	17	17
113	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
114	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	17
115	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
116	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	7
117	SDN 25 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
118	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
119	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
120	SDN 28 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16
121	SDN 29 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	20
122	SDN 30 Nitu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
123	SDN 31 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
124	SDN 32 Panggi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
125	SDN 33 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
126	SDN 34 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
127	SDN 35 Nungga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
128	SDN 36 Nggarolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	9
129	SDN 37 Kendo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
130	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	10
131	SDN 40 Lewirato Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	10
132	SDN 42 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	10
133	SDN 43 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	SDN 44 Mandé Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
135	SDN 45 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
136	SDN 46 Lela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
137	SDN 47 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
138	SDN 48 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
139	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	17	17
140	SDN 50 Pendaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
141	SDN 51 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
142	SDN 52 Busu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
143	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
144	SDN 54 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	SDN 55 Dara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	15
146	SDN 56 Tolobali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
147	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
148	SDN 58 Tambana Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
149	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	11
150	SDN 60 Sambinae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
151	SDN 61 Karara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
152	SDN 62 Rontu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	12
153	SDN 63 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
154	SDN 64 Sori Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
155	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	13



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											
		ESELON								NON ESELON			JML
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	JML	
156	SDN 66 Kuta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
157	SDN 67 Rabantala Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
158	SDN 68 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
159	SDN 69 Kabanta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
160	SDN 70 Tolotongga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	10
161	SDN 71 Wenggo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
162	SDN 72 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
163	SDN 73 Sabali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
164	SDN 74 Songgela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
165	SDN 76 Toloweri Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
166	SDN 77 Niu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
167	SMPN 01 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2	52	52
168	SMPN 02 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	43	4	47	47
169	SMPN 03 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	24	24
170	SMPN 04 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	29	29
171	SMPN 05 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	28	28
172	SMPN 06 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	31	31
173	SMPN 07 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	26	26
174	SMPN 08 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	26	6	32	32
175	SMPN 09 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	22	22
176	SMPN 10 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	18	18
177	SMPN 11 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	26	26
178	SMPN 12 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
179	SMPN 13 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	25	25
180	SMPN 14 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	14	14
181	SMPN 15 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	11
182	SMP Muhammadiyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	MIS Darul Hikmah Matakando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	MI Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	MI Nurul Ilmi Paruga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	MI SambinaE Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	MIS Mande Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	MTs Al- Husaini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JML
		ESELON							NON ESELON			JML	
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana		
189	MTs Darul Hikmah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	MTsN Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	MTsN Raba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	SD Islam Al-Ikwan Santi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	SD IT Imam Safi'i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	SD Muhammadiyah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	TK. Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5
196	TK. Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
197	TK. Negeri Pembina 03 Paruga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
198	TK. Negeri 04 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
199	TK. Negeri 05 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
200	TK. Negeri 06 Pendaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
201	TK. Negeri 07 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
202	TK. RA AL-Muhtadin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	TK. Negeri 08 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
204	TK. Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4
205	TK. Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
206	TK. Negeri 11 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
207	TK. Negeri 12 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
208	TK. Negeri 13 Monggonao Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
209	TK. Negeri 14 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
210	TK. Negeri 15 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
211	TK. Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
212	TK. Negeri 17 Nae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
213	TK. Negeri 18 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
214	TK. Negeri 19 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4
215	TK. Negeri 20 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
216	TK. Negeri 21 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
217	TK. Negeri 22 Rontu Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL											JML
		ESELON							NON ESELON			JML	
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana		
	Bima												
218	TK. Negeri 23 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
219	TK. Negeri 24 Nungga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	TK. Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
221	TK. Negeri 26 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
222	TK. Negeri 27 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	TK. Negeri 28 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
224	TK. Negeri 29 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
225	TK. Negeri 30 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
226	TK. Negeri 31 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
227	TK. Negeri 33 Ni'u Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
228	TK. Aisyiyah I Ranggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	TK. Aisyiyah II Tolobali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	TK. Al- Amin Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	TK. Al-Iqra Kendo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	TK. Al-Maani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	TK. Amal PGRI Paruga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	TK. An-Nur Sadia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	TK. Darul Hikmah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	TK. Kartika Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	TK. Kemala Bayangkari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	TK. Masyita Saleko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	TK. Mutmainah Asakota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	TK. Nurul Ilmi Ntobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	TK. RA Darul Maarif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	TK. RA Perwanida I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	TK. RA Perwanida II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	TK. RA Perwanida III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	TK. Yaa Bunaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	TK. Paud IT Delima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	27	43	86	155	191	0	503	1925	894	2819	3322



Pada tahun 2023 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 6.5
Daftar Nama Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Nama Perangkat Daerah	
DINAS DAERAH	
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Dinas Sosial
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21	Dinas Pertanian
BADAN DAERAH	
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penerlitian dan Pengembangan
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah
SEKRETARIAT dan INSPEKTORAT	
29	Sekretariat Daerah
30	Bagian Organisasi
31	Bagian Umum



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 6

	Nama Perangkat Daerah
32	Bagian Humas
33	Bagian Perekonomian
34	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
35	Bagian Kesra
36	Bagian LPBJ
37	Bagian Administrasi Pemerintahan
38	Bagian Hukum
39	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat
KECAMATAN	
40	Kecamatan Asakota
41	Kecamatan Rasanae Barat
42	Kecamatan Rasanae Timur
43	Kecamatan Mpunda
44	Kecamatan Raba

BAB VII
PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bima di masa yang akan datang.

Kota Bima, Mei 2024
Pj. WALI KOTA BIMA,



Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT.